

107th
Kebangkitan
Nasional



H.O.S. TJOKROAMINOTO

PENYEMAI PERGERAKAN
KEBANGSAAN & KEMERDEKAAN





H.O.S. TJOOKROAMINOTO



Penulis:

- Tim Museum Kebangkitan Nasional,
- Djoko Marihandono,
- Harto Juwono,
- Yudha B. Tangkilisan



Museum Kebangkitan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

H.O.S . TJ OKROAMINOTO



Pengantar :

R.Tjahjopurnomo
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Penulis:

Tim Museum Kebangkitan Nasional,
Djoko Marihandono,
Harto Juwono,
Yudha B. Tangkilisan

Editor:

Djoko Marihandono,

Desain dan Tata Letak:

Sukasno

ISBN 978-602-14482-7-4

Diterbitkan:

Museum Kebangkitan Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya buku tentang HOS Tjokroaminoto yang berjudul *Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan* dapat terselesaikan dengan baik dan diterbitkan tepat pada waktunya. Maksud diterbitkannya buku ini adalah sebagai materi pelengkhan pameran tokoh HOS Tjokroaminoto yang berlangsung dari 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2015 di Museum Kebangkitan Nasional, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2015. Sedangkan tujuannya adalah untuk menghargai, menghormati, dan mengenang tokoh HOS Tjokroaminoto, seorang tokoh Pergerakan Nasional Indonesia, bapak guru bangsa, yang patut dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini. Satunya tindakan dengan perkataannya membuat tokoh ini sangat dikagumi sekaligus dihormati oleh siapa saja yang mengenalnya, yang saat ini sudah sangat langka ditemukan di masyarakat.

HOS Tjokroaminoto, sejak awal perjuangannya, dengan sangat gigih tanpa mengenal lelah telah membesarkan organisasi Sarekat Islam. Dengan idealisme yang sangat tinggi, kakuatan fisik yang prima, kepandaianya dalam meyakinkan orang lain, kemampuan kritisnya dalam mencari jalan keluar membuat para pengagumnya mengikuti jejak langkahnya untuk menjadi anggota Sarekat Islam. Pemerintah Kolonial Belanda dengan sangat hati-hati melakukan himbauan agar Sarekat Islam membatasi jumlah anggotanya. Namun, kenyataannya jumlah penduduk bumi putra yang bergabung dengan Sarekat Islam semakin lama semakin banyak.

Tjokroaminoto merupakan Bapak Bangsa. Banyak tokoh perjuangan yang berguru kepadanya. Tercatat beberapa tokoh penting pendiri negara ini yang indekos di rumah Tjokroaminoto, yang ikut mewarnai sejarah bangsa kita. Mereka sangat sering berdiskusi dengan Tjokroaminoto, pemilik rumah yang mereka tempati, di saat-saat makan malam atau di saat-saat senggang mereka.

Kiprah Sarekat Islam di bawah pimpinan Tjokroaminoto sangat memperhatikan penderitaan rakyat. Kasus demi kasus diselesaikannya dengan baik berkat kerjasama di antara mereka. Namun, dalam menangani keluhan rakyat ini terdapat beberapa pihak yang tersinggung yang sempat menjebloskan Tjokroaminoto ke penjara. Perjuangannya yang tanpa pamrih, tidak menyurutkan niatnya untuk tetap mengabdi kepada kepentingan

masyarakat. Perlindungan terhadap anggota organisasinya dilakukan secara maksimal. Koordinasi yang baik dilakukan untuk mengurangi risiko seminimal mungkin. Namun, upaya Tjokroaminoto yang gigih justru membawa dirinya untuk tinggal di hotel prodeo tanpa adanya suatu alasan yang jelas.

Sosok Tjokroaminoto merupakan cerminan tokoh pada zamannya, yang berjuang untuk menuntut keadilan demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat bumi putra. Keteladanan ini hendaknya dapat dijadikan teladan bagi generasi muda, agar selalu konsisten dalam perjuangan membela yang lemah dengan memerangi ketidakadilan guna mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat saat ini merasakan kurangnya sosok yang dapat dijadikan panutan. Masyarakat haus akan figur yang dapat dijadikan pedoman dalam menempuh kehidupannya. Masyarakat juga merasa kekurangan bahan bacaan yang berisi tentang keteladanan dan perjuangan tanpa pamrih dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk di dalamnya Tjokroaminoto.

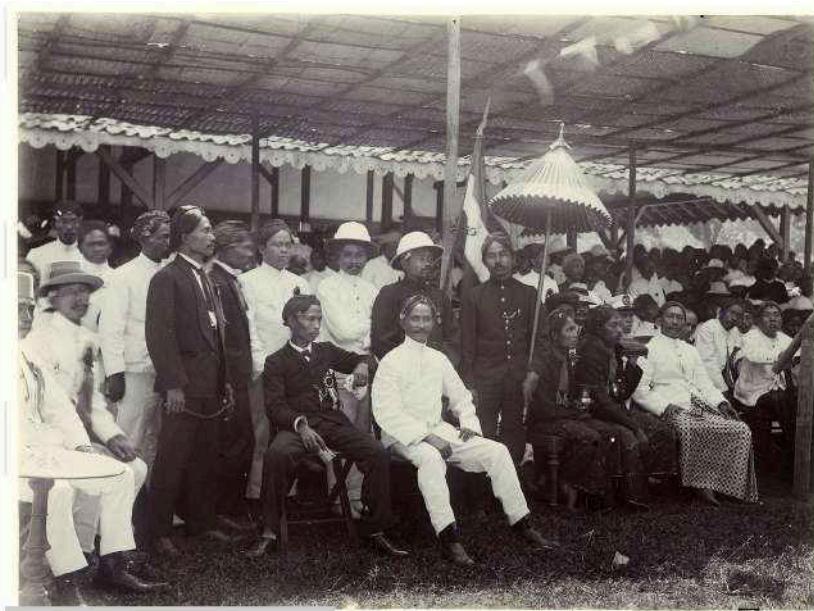
Semoga buku ini bermanfaat bagi anggota masyarakat yang membacanya, yang haus akan bacaan sehat yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme yang kini sudah mulai pudar.

Jakarta, Mei 2015
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

R. Tjahjopurnomo
NIP. 195912271988031001

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Tjokroaminoto dan Syarekat Islam		
Perkembangan Syarekat Islam sejak pendiriannya hingga keberhasilannya menjadi anggota Volksraad berdasarkan surat kabar kolonial	1
Haji Oemar Said Tjokroaminoto		
Tim Museum Kebangkitan Nasional	77
R.H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934)		
Semaian Benih Pergerakan Kebangsaan & Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dalam Kearifan dan Teladan Islam	98
Menghadapi Peradilan Kolonial		
Tjokroaminoto Dalam Perkara Hukum	175



TJOKROAMINOTO DAN SYAREKAT ISLAM:

Perkembangan Syarekat Islam sejak pendiriannya hingga keberhasilannya menjadi anggota Volksraad berdasarkan surat kabar kolonial.

Djoko Marihandono

Kemenangan Jepang atas serangan di Port Arthur yang terletak di jazirah Liaodong di Selatan Manchuria pada 1905 membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di Asia yang mayoritas berada di bawah penjajahan bangsa asing. Kemenangan itu memberikan angin segar bagi bangsa-bangsa di Asia dan meyakinkan mereka bahwa bangsa Asia pun memiliki kemampuan lebih atau setidaknya sama dibandingkan bangsa-bangsa penjajah. Berita kemenangan Jepang itu juga sampai ke wilayah koloni Hindia Belanda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila di wilayah itu mulai muncul gelombang pergerakan masyarakat. Di Nusantara, misalnya muncul pergerakan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yaitu organisasi yang diikrarkan oleh para pemuda yang sedang sekolah di Sekolah Kedokteran di kota Weltevreden. Organisasi Boedi oetomo berkembang sangat pesat, terbukti dengan meningkatnya jumlah anggotanya. Lima bulan setelah dibentuknya organisasi Boedi Oetomo di STOVIA, Weltevreden ini, para anggotanya mengadakan Kongres yang pertama pada 5 Oktober 1908 di kota Surabaya. Dalam kongres ini telah ditetapkan tujuan dan pengurus organisasi tersebut.

Sejarah berdirinya SI tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa lain yang terjadi di Jawa. Pada 1911 dibentuk suatu perhimpunan yang bernama "Kong Sing". Perhimpunan Kong Sing memiliki anggota yang terdiri dari suku bangsa Tionghoa dan suku bangsa Jawa. Walaupun yang terlihat perkumpulan ini bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, namun sebenarnya organisasi

ini berusaha untuk menentang segala kesewenang-wenangan.¹ Dalam perjalannya, kedua bagian dari organisasi yang sama ini saling bersaing terutama dalam perdagangan batik. Hal inilah yang menyebabkan keduanya semakin menjauh dan akhirnya saling memisahkan diri. Di bawah H. Samanhoedi mereka mendirikan organisasi tersendiri, dan bergabung dengan Sarekat Dagang Islam, suatu organisasi dagang yang beranggotakan orang Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam telah didirikan di Bogor pada 1911. Organisasi ini dimotori oleh RM Tirtoadisoerjo bersama-sama dengan Sjech Ahmed Badjened. Namun, berhubung organisasi ini kurang begitu berkembang, akhirnya H. Samanhoedi memiliki inisiatif untuk mendirikan suatu organisasi yang berbendera ke-Islaman yang dinamakan Sarekat Islam atau disingkat SI. Didirikannya organisasi SI ini bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam.

Tujuan lainnya dari didirikannya organisasi yang baru ini adalah untuk membantu para pedagang, karena produk-produk yang diperdagangkan saat itu, terutama batik, banyak dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang sangat menghambat usaha kaum bumi putera yang mayoritas beragama Islam. Berkat kegigihan pengurusnya, organisasi SI berkembang dengan sangat pesat, tidak hanya di kota Solo, tetapi merambah hingga ke kota-kota lain di Jawa bahkan ke luar Jawa seperti di Sumatera, Borneo dan Celebes.

Tokoh yang memiliki peran besar dalam proses pengembangan organisasi SI ini adalah Tjokroaminoto. Ia selalu berusaha hadir dalam setiap rapat terbuka di Jawa maupun di luar Jawa. Selain itu, ia juga berperan secara aktif dalam Kongres SI yang diselenggarakan beberapa kali di beberapa kota. Sebagai pengurus, upaya untuk mengembangkan organisasinya ini membuat orang berdecak kagum. Sebagai pengurus Central Sarekat Islam (CSI), ia berusaha untuk melakukan audiensi dengan wali negeri sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Ia juga mencari berbagai upaya agar organisasi ini

1 Lihat Amelz. 1952. *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya*. (Jakarta, t.t., Bulan Bintang), hlm: 91.

memiliki status hukum yang jelas. Namun, keberhasilannya membesarkan organisasi SI tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali kedudukannya digoncang bahkan pernah merasakan hawa dingin di hotel prodeo tanpa suatu alasan yang jelas. Rekayasa politik telah digunakan untuk membelenggu Tjokroaminoto. Akan tetapi ia tidak pernah gentar, bahkan terus maju membela kepentingan penduduk yang sangat menyandarkan kehidupannya pada organisasi SI ini.

Langkah pertama dari organisasi SI ditekankan pada usaha untuk memperbaiki sistem perdagangan kaum Bumi putera. Organisasi ini dibentuk guna menggalang persatuan melawan pedagang-pedagang lain yang mulai melakukan monopoli terhadap produk yang diperdagangkan. SI berkembang dengan sangat pesat. Namun, perkembangan itu bukannya tanpa adanya permasalahan. Permasalahan justru timbul di kalangan dalam pengurus SI itu sendiri. Namun, SI tetap berdiri, bahkan di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, beberapa kali SI diterima oleh Gubernur Jenderal untuk membahas program-program kerja yang telah digariskannya.

Tulisan ini akan membahas masalah SI sejak pendiriannya sampai dengan keberhasilannya memiliki wakil dalam Volksraad van Nederlands Indië. Tahap ini merupakan tahap yang sangat sulit dan riskan dalam hubungannya dengan perkembangan organisasi SI. Tjokroaminoto telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang sangat besar jasanya dalam “membesarkan” organisasi ini. Pengakuan akan hal tersebut tidak hanya terbatas datang dari organisasi kaum bumi putra, akan tetapi juga berasal dari pemerintah kolonial Hindia.

Pendirian Sarekat Islam (SI)

Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh RM Tirtoadisoerjo ternyata tidak berkembang sesuai yang diharapkan. Terjadi kemelut yang didasarkan pada tidak terlaksananya kewajiban Sarekat dagang Islam, khususnya dalam penerbitan surat kabar *Soro Romo*. Atas inisiatif H. Samanhoedi, didirikanlah

organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini memperoleh simpati dari banyak surat kabar lokal yang terbit di Hindia Belanda, sehingga banyak penduduk yang beragama Islam menjadi anggota organisasi ini.

Pada Maret 1912, banyak warga Surabaya yang telah menjadi anggota SI. Tjokroaminoto sebagai orang yang tinggal di Surabaya dan sudah terbiasa berorganisasi melihat bahwa organisasi SI ini berdasarkan ke-Islaman dan ditujukan untuk memberdayakan rakyat kecil. Pengurus SI Solo, setelah mengetahui adanya seorang pemuda yang sangat aktif dan potensial, mengunjungi Tjokroaminoto di rumahnya di Surabaya pada Mei 1912. Keterbukaan pengurus SI inilah yang membuat Tjokroaminoto bersedia untuk bergabung menjadi anggota SI. Selanjutnya, pada 13 Mei 1913, Tjokroaminoto menerima panggilan dari Pengurus SI untuk ikut menangani permasalahan yang dihadapi saat itu. Bahkan, semua urusan SI diserahkan kepadanya. Penyerahan itu disertai dengan harapan bahwa Tjokroaminoto akan berupaya untuk membela organisasi ini dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan pemerintah kota yang terus mencurigai organisasi ini. Dari lobby yang dilakukannya, beberapa dermawan telah bersedia untuk membantu SI apabila Tjokroaminoto bersedia untuk bergabung dengan organisasi ini. Akhirnya, Tjokroaminoto bersedia pergi ke Solo untuk menemui sahabatnya R. Tjokrosoedarmo. Setelah menyanggupi untuk bergabung, ia merencanakan untuk mengadakan rapat di Surabaya guna membahas apa yang sudah diputuskannya sewaktu mengunjungi sekretariat SI di kota Solo.

Pada awal Agustus 1912, terjadi peristiwa yang menghebohkan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada awal bulan itu telah terjadi pemogokan buruh yang terjadi di kota Solo yang kebanyakan sudah menjadi anggota SI. Para buruh di kota Solo ini melakukan pemogokan di wilayah Krapyak. Berhubung banyak di antara para pemogok adalah anggota SI, organisasi ini diskors oleh Residen Solo pada 12 Agustus 1912 berdasarkan *Resident Wijk* yang dikeluarkan pada tanggal tersebut. Pemerintah kolonial melalui residen



Solo melihat tidak adanya tanda-tanda protes terhadap skorsing yang dijatuhkan kepada organisasi SI ini. Dengan demikian anggapan bahwa insiden ini didalangi oleh organisasi SI tidaklah tepat. Oleh karena itu, empat belas hari setelah dikeluarkannya skorsing, pemerintah mencabut kembali pada 26 Agustus 1912.² Walaupun skorsing telah dicabut, namun SI tetap tidak diizinkan untuk menerima anggotanya yang tinggal di luar kota Solo. Larangan ini justru mendorong para simpatisan SI dari luar kota

Solo yang menginginkan untuk bergabung dengan organisasi ini.

Dalam kondisi seperti ini, Tjokroaminoto bersedia untuk duduk di dalam kepengurusan SI. Kesanggupan Tjokroaminoto itu dilanjutkan dengan menghadap Notaris B. Te Kuile pada 10 September 1912 di Solo bersama dengan 11 lainnya untuk membentuk SI secara legal. Organisasi ini pada prinsipnya akan menjalankan syariat Islam dengan tidak melanggar undang-undang, adat-istiadat dan tidak melanggar ketertiban umum. Ada pun tujuannya adalah:

- Memajukan perdagangan kaum bumi putera;
- Menolong anggota-anggotanya yang mendapat kesusahan;
- Memajukan pendidikan, demi meningkatkan kualitas perilaku penduduk bumi putera;
- Mengedapkan keadilan menurut ajaran agama Islam.

Pada 14 September 1912, Statuta SI selesai dibuat dengan H. Samanhoedi sebagai ketua umum dan Tjokroaminoto sebagai wakilnya.

Selanjutnya, walaupun Residen Surakarta telah menetapkan tidak

2 Lihat Amelz dalam *HOS Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya* (Jakarta, t.t, Bulan Bintang), hlm. 92.

mengizinkan SI merekrut anggota-anggotanya, namun kenyataannya SI tetap berkembang di luar kota Solo. Tjokroaminoto sendiri bahkan menjadi ketua SI Cabang Surabaya. Bahkan, sebagai akibat gencarnya propaganda yang dilakukan oleh pengurus di Surabaya, dalam waktu dua bulan, di Jawa Timur telah tercatat lebih dari 2.000 anggota yang bergabung dengan SI. SI telah berkembang dengan cepat dan menjalar ke seluruh wilayah Jawa bagian timur. Bahkan rumah Tjokroaminoto setiap hari, siang maupun malam banyak dikunjungi orang yang ingin menjadi anggota SI, dan nama Tjokroaminoto mulai dikenal.

Dalam awal kepemimpinannya, terjadi permasalahan SI di desa Kepanjen, Malang. Buku-buku SI yang ada di desa itu dirampas polisi dan Tjokroaminoto oleh pemerintah diminta untuk menghadap residen Malang. Dalam proses verbal yang dilakukannya, Tjokroaminoto dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam organisasi SI ini. Banyak tuduhan dan dakwaan dilontarkan, namun semua permasalahan dapat dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kota Malang, Tjokroaminoto beserta pengurus SI akan menyelenggarakan Kongresnya yang pertama pada awal tahun 1913.

Kongres Pertama SI

Menjelang akhir tahun 1912, pengurus SI masih memiliki agenda untuk pergi ke kota Bandung guna menghadiri rapat pembentukan Indische Partij. Pada rapat yang diselenggarakan pada 25 Desember 1912, Douwes Dekker sebagai wakil penyelenggara Pembentukan Indische Partij menyambut dua orang wakil resmi dari SI yang telah memiliki anggota sebanyak 90.000 anggota. Menurut berita yang dimuat dalam *Soerabajasch Handelsblad* edisi 2 Januari 1913, SI diwakili oleh Redaktur Kepala koran *Oetoesan Hindia* Oemar Said Tjokroaminoto dan direktur CV *Setija Oesaha*, Hasan Ali Soerati. Namun, berita kehadiran kedua tokoh tersebut bukanlah mewakili SI, karena mereka sebenarnya tidak mewakili SI. Mereka berdua

hadir sebagai pribadi yang ingin menjadi anggota Indische Partij. Status kedua tokoh ini ditegaskan karena organisasi Boedi Oetomo, Tionghoa Hwee Koan dan SI sebelumnya telah menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak bersedia untuk bergabung dengan Indische Partij. Dengan demikian, kehadiran mereka sebagai wakil resmi dari organisasi tidak dapat diterima oleh panitia.

Setelah kembali dari rapat pembentukan Indische Partij, pengurus SI ini merencanakan untuk mengadakan kongres di Surabaya pada 26 Januari 1913. Selama beberapa hari panitia telah mempersiapkan dengan baik Kongres tersebut. Persiapan penyambutan, sidang maupun tempat menginap para tamu pun sudah diatur. Pada 25 Januari di stasiun kereta api ditempatkan satu korps musik yang bertugas menyambut kedatangan para tamu. Tampak mobil dan kereta kuda yang diparkir di halaman stasiun kereta api, yang jumlahnya mencapai antara 400-500 buah. Ketika Haji Samanhoedi, pendiri Sarekat Islam, tiba, ia dielu-elukan oleh para pendukung dan pengagumnya. Ia menerima kalungan bunga kemudian dibawa dengan mobil yang telah disiapkan menuju ke sekretariat panitia pelaksana kongres di Gedung Harian *Oetoesan Hindia* tempat di mana kongres akan diselenggarakan.

Di hari minggu pagi, 26 Januari sudah hadir hampir 10.000 orang bumi putra yang berkumpul di halaman gedung harian *Oetoesan Hindia*. Sementara di dalam ruangan telah tersedia hanya 3.000 kursi untuk para undangan. Di tengah taman terdapat tenda yang diisi dengan peralatan musik yang ikut memeriahkan kongres tersebut. Para peserta terlihat sibuk mengobrol dengan orang-orang yang dikenalnya. Tampak hadir dalam rapat itu perwakilan dari daerah-daerah, patih Surabaya, Asisten Wedana, polisi, guru dan para pejabat bumi putra lainnya.³

Tepat pukul 08.30 rapat dibuka oleh wakil ketua pengurus SI Oemar Said Tjokroaminoto, yang juga menjabat sebagai redaktur kepala *Oetoesan Hindia*. Setelah membuka rapat tersebut, ia meminta kepada Haji Samanhoedi,

3 Lihat *Nieuw Rotterdamsche Courant*, 24 Februari 1913, lembar ke-2.

pendiri SI, untuk berdiri agar semua orang yang hadir melihatnya. Saat itu juga H. Samanhoedi yang menggunakan busana haji berdiri diiringi dengan tepuk tangan yang meriah dari semua hadirin yang hadir di ruangan itu. Setelah mempersilakan Haji Samanhoedi duduk kembali, Tjokroaminoto menyampaikan pidatonya dengan menggunakan bahasa Jawa halus tentang tujuan didirikannya SI. Pendirian organisasi ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ia memohon agar semua hadirin memperhatikan apa yang disampaikannya.

Pagi itu oleh Wakil Ketua SI dilaporkan cabang-cabang SI yang sudah didirikan di daerah, yang hampir semuanya mengirimkan wakilnya dalam kongres itu. Sementara itu, ia juga menjelaskan beberapa cabang di daerah yang tidak mengirimkan wakilnya karena berbagai alasan. Dilaporkan pula cabang-cabang yang hadir dan jumlah anggota yang sudah bergabung:

- | | |
|--|-------------------|
| - Semarang | (1.027 anggota) |
| - Kudus | (2.033 anggota) |
| - Malang | (457 anggota) |
| - Sepanjang | (258 anggota) |
| - Madiun, Ngawi, Ponorogo
dan Jombang | (1.060 anggota) |
| - Parakan | (3.769 anggota) |
| - Solo | (64.000 anggota) |
| - Bangil | (156 anggota) |
| - Sidoarjo | (217 anggota) |
| - Surabaya | (6.000 anggota) |

Bila dihitung secara kasar, jumlah anggota keseluruhan SI telah mencapai 80.000 orang.

Setelah melaporkan tentang jumlah anggotanya, Tjokroaminoto juga melaporkan bahwa ia telah terima telegram dari Wakil Ketua



Indische Partij Tjipto Mangoenkoesoemo yang mengucapkan selamat atas diselenggarakannya kongres kali ini. Sehubungan dengan telegram yang diterimanya, ia menyatakan dengan tegas bahwa organisasi SI bukan merupakan partai politik. SI bukanlah partai yang menghendaki revolusi seperti yang telah disangka oleh banyak orang. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa tidak perlu orang merasa takut untuk bergabung dengan organisasi ini karena tujuannya adalah baik, dan tidak ada alasan sama sekali untuk menindasnya karena telah bergabung dengan organisasi ini. Ia kemudian mengaitkan dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang berbunyi: "Perlindungan atas penduduk bumi putra terhadap kesewenang-wenangan dari siapa pun juga merupakan kewajiban dari Yang Mulia Gubernur Jenderal untuk melindunginya". Selanjutnya dikatakan bahwa apabila organisasi ini memenuhi kewajiban di bawah bendera Belanda, maka organisasi ini bisa meminta pertolongan Gubernur Jenderal apabila ada

pihak-pihak lain yang menindas anggota organisasi ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum SI, karena ada beberapa pejabat bumi putra yang sering menyerang anggotanya karena pemahaman mereka salah tentang keberadaan organisasi ini. Ia selanjutnya menegaskan bahwa organisasi ini tidak akan mengobarkan kerusuhan, tidak akan berkelahi baik antarsesama anggota maupun dengan anggota organisasi lainnya.

Selanjutnya, Tjokroaminoto meneruskan pidatonya dengan menjelaskan pasal-pasal dalam anggaran dasar SI demi memberikan pemahaman kepada semua anggota yang hadir pada kongres tersebut. Saat menjelaskan tentang bagian keuangan, ia pun juga menjelaskan tentang retribusi yang dibebankan kepada semua yang hadir sebesar 50 sen. Dari 50 sen retribusi tersebut akan dipotong 30 sen yang akan digunakan untuk menutup anggaran pelaksanaan pertemuan itu. Ia menangkis anggapan yang muncul di masyarakat bahwa organisasi ini mencuri uang rakyat. Akibatnya, banyak buku milik organisasi yang disita. Oleh karena itu, penyitaan tidak boleh terjadi lagi, dan apabila terjadi, seluruh anggota SI harus melawannya. Di antara anggota seharusnya saling membantu. Namun, bantuan yang diberikan harus tidak mengikat, sehingga perlu melewati penelitian yang cermat dari pengurus.

Setelah menjelaskan secara panjang lebar tentang anggaran dasar organisasi, Wakil Ketua SI juga meminta persetujuan anggota tentang rencana dibukanya tiga cabang utama organisasi ini, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang berkedudukan di Solo, Surabaya, dan Batavia. Sementara itu Komite Pusat SI akan dipilih dari cabang-cabang ini, yang berkedudukan di kota Solo. Untuk merealisasikan gagasan ini, akan diselenggarakan rapat di kota itu pada 22 Maret 1913. Diharapkan pada rapat akbar tersebut, perwakilan dari luar Jawa juga akan hadir, sehingga dapat dibicarakan juga tentang pendirian cabang-cabang di luar Jawa.

Dalam kaitannya dengan rencana pembukaan cabang-cabang di luar Jawa, Tjokroaminoto meminta agar para anggota berbuat baik dan tidak menunjukkan sikap berlawanan dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal

ini ia tegaskan kembali mengingat bahwa masih terdapat pemahaman yang keliru yang tumbuh di antara anggota-anggotanya, bahkan oleh pengurus organisasi sendiri. Oleh karena itu, ia berjanji akan membenahi anggota pengurus SI.

Organisasi ini tidak membedakan keanggotaan berdasarkan status atau kedudukan anggotanya. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali syarat menjadi anggota SI adalah setiap orang yang bertabiat dan berkelakuan baik, berusia 18 tahun ke atas, dan beragama Islam. Namun, ia juga menegaskan apabila ada pejabat yang memenuhi syarat-syarat tersebut dan ingin menjadi anggota organisasi ini, pertama kali mereka harus diterima dengan tangan terbuka.

Menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota tentang adalah hubungan antara SI dan Indische Partij. Tjokroaminoto, atas nama pengurus, menjelaskan bahwa antara kedua organisasi ini tidak ada hubungannya sama sekali. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa orang Jawa mulai bangkit dan tidak bisa dicegah oleh tekanan yang datangnya dari mana dan dari pihak mana pun, termasuk dari bangsa lain. Secara serius ia kemudian menyampaikan ada orang yang memfitnah dia dengan memberikan surat kaleng kepada pihak kepolisian. Dalam surat kaleng itu disebutkan bahwa Tjokroaminoto menjual senjata kepada anggota-anggota SI. Dalam akhir pidatonya ia meminta agar orang-orang yang menulis surat kaleng itu segera menemuinya dan berbicara secara terbuka kepadanya tentang maksud dan tujuan dari surat kaleng tersebut.

Setelah menutup pidatonya, tibaalah saatnya untuk istirahat makan siang. Pada saat itu juga diedarkan selebaran yang isinya tentang penjelasan tujuan organisasi SI. Ketika waktu istirahat berakhir, rapat segera dibuka kembali. Tampil di panggung Mas Wignyo Darmorodjo yang memberikan sambutan. Dalam sambutannya itu ia menyampaikan terima kasih kepada Tjokroaminoto yang telah mengabdikan seluruh hidupnya demi perkembangan SI. Dengan menggunakan bahasa yang tegas, ia melontarkan harapan agar organisasi

yang dipimpinnya tumbuh pesat. Setelah selesai berpidato, Mas Wignyo Darmorodjo menyerahkan sebuah buket bunga kepada Tjokroaminoto yang disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah dari para hadirin.

Giliran kedua tampil di panggung Hasan al Soerati, direktur *Setija Oesaha* sekaligus penerbit *Otoesan Hindia*. Hasan al Soerati tampil dengan penuh semangat ketika membicarakan bahwa setiap partai harus memiliki organ sendiri dan tidak ada satu surat kabar pun yang khusus diterbitkan untuk orang bumi putera, kecuali *Medan Prijaji* terbitan Bandung, yang saat itu sudah tidak terbit lagi. Oleh karena itu, usulnya agar dalam *Otoesan Hindia*, dilampirkan satu lembar terpisah yang ditulis dalam aksara Arab khusus untuk anggota SI. Dengan media yang diusulkan ini, semua anggota dapat memanfaatkannya untuk mengungkapkan keluhan-keluhannya. Selanjutnya, ia menyatakan perlunya memiliki organ sendiri dengan membandingkan dengan *Het Volk* yang diterbitkan oleh kelompok sosial demokrat di Belanda, khususnya bagi organisasi pegawai pemerintah. Demikian pula, *de Expres* yang diterbitkan oleh Indische Partij. Keuntungan organ ini bisa pula dimanfaatkan oleh organisasi karena tujuan *Otoesan Hindia* bukanlah untuk mencari keuntungan dari suatu perusahaan, melainkan untuk menambah kas SI. Pada kesempatan itu, pembicara juga mendesak kepada semua hadirin untuk berlangganan *Otoesan Hindia* yang selama ini menjadi corong organisasi. Tak lama setelah Hasan al Soerati mengakhiri pidatonya, muncul seorang keturunan Arab di podium. Sebagai warga keturunan Arab di Surabaya, ia menyampaikan terima kasih kepada organisasi ini atas upaya yang telah dilakukannya dalam menyejahterakan rakyat bumi putera.

Tiba giliran Patih Surabaya untuk memberikan sambutan. Ia mengulang perkataan Tjokroaminoto yang menyatakan bahwa organisasi ini telah direpotkan oleh aparat kepolisian karena menyita buku-buku milik organisasi. Ia menegaskan bahwa di kota Surabaya, hal itu tidak pernah terjadi. Ia menyangkal berita itu. Polisi di Surabaya tidak pernah melakukan hal itu, dan bupati juga tidak pernah menyuruh berbuat demikian. Ia selanjutnya

menambahkan bahwa ia telah menduduki jabatan sebagai patih selama 42 tahun. Selama menjabat, ia selalu berusaha untuk membantu rakyat kecil. Oleh karena itu, ia merasa bangga karena SI telah melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan, yakni membantu rakyat kecil. Ia juga meminta agar para anggota juga maklum apabila dalam menjalankan kewajibannya, ia harus menyelidiki apakah di dalam organisasi ini ada sesuatu yang buruk. Ia juga menjelaskan pentingnya stabilitas keamanan di wilayahnya, karena mayoritas anggota Sarekat Islam adalah pedagang bumi putra. Dalam sambutannya itu, ia juga memberikan contoh tatkala di Surabaya terjadi kerusuhan pada Februari tahun lalu. Toko-toko milik keturunan Tionghoa langsung tutup. Akibatnya, harga beras segera naik sebesar 25 sen per katinya. Namun, dengan dibukanya toko-toko milik anggota organisasi ini, keadaan itu tidak terulang kembali.

Sebelum penutupan, Tjokroaminoto kembali ke podium untuk mengucapkan terima kasih kepada patih Surabaya yang telah memberikan pendapatnya bahwa organisasi ini cukup berperan sehingga pejabat tinggi juga memberikan respek yang tinggi kepada organisasi ini. Ia kemudian juga menegaskan bahwa dalam pidatonya pagi itu yang ia maksudkan bukan polisi Surabaya melainkan polisi di tempat lain yang patihnya menyatakan bahwa semua anggota SI harus ditangkap. Tjokroaminoto tidak pernah menuduh bahwa yang menyatakan hal itu polisi Surabaya, karena pelaksanaan rapat itu menjadi bukti bahwa pemerintah Surabaya telah memberikan izin untuk melaksanakan pertemuan itu di kota Surabaya. Selanjutnya Wakil Ketua Umum organisasi ini membuka rahasia. Ia menyatakan bahwa polisi yang melakukan penangkapan terhadap anggota SI adalah polisi Malang. Sebelum menyerahkan mimbar kepada ketua umum SI, ia menyampaikan bahwa organisasi ini akan menyelenggarakan Kongres pada bulan Maret dengan mengambil tempat di kota Solo. Rapat akbar tersebut akhirnya ditutup oleh Ketua Umum SI Haji Samanhoedi. Ia memberikan pidato penutupan yang ditujukan kepada rakyat dengan harapan bahwa organisasi ini dapat berjuang demi kemakmuran rakyat.

Sekolah Bumi Putra Mardi Kenyo

Dalam menjalankan misinya, tidak semua program SI dapat berjalan dengan lancar. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan keuangan. Lembaga pendidikan bumi putra Mardi Kenyo yang berada di bawah naungan SI sedang mengalami kesulitan keuangan. Di rumah kontrolir J.E. Jasper di Surabaya, diselenggarakan pertemuan antara pengurus organisasi Mardi Kenyo dan pengurus SI di bawah pimpinan J.E. Jasper untuk membicarakan masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh Mardi Kenyo. Akibatnya, para guru wanita dari sekolah keputrian milik SI sudah dua bulan tidak menerima gaji. Pertemuan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meminta bantuan dari organisasi SI tentang kesulitan ekonomi yang dialami oleh Mardi Kenyo.

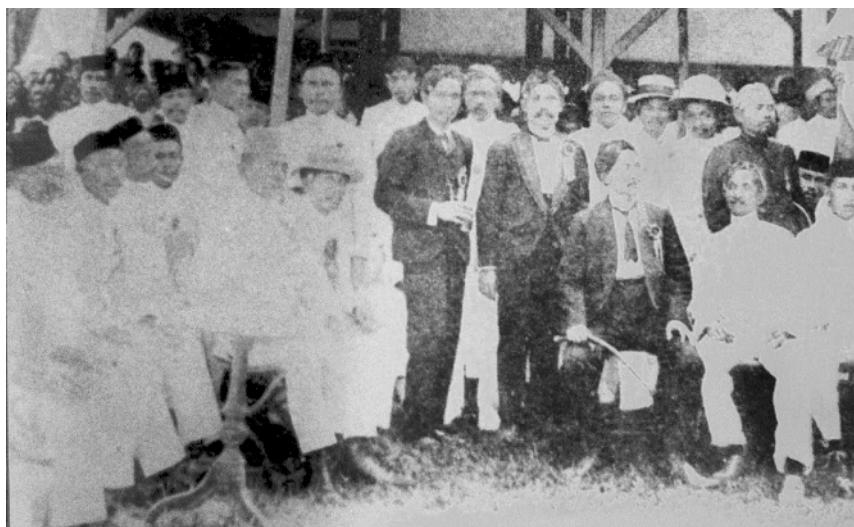
Dalam rapat tersebut ditanyakan oleh Tjokrosoedarmo tentang manfaat dari lembaga pendidikan bagi pendidikan bumi putra. Dijelaskan bahwa tatkala lembaga pendidikan ini berada di bawah J.E. Jasper, banyak manfaat yang bisa dipetik dari lembaga pendidikan untuk bumi putra ini. Tjokrosoedarmo mensinyalir bahwa lembaga pendidikan ini menampung tiga orang anak orang kaya dan kaum bangsawan. Ia merasa berkeberatan apabila hal ini benar-benar terjadi. Namun, sinyalemen ini dibantah oleh J.E. Jasper. Ia justru mengembalikan fungsi lembaga pendidikan ini berdasarkan anggaran rumah tangga organisasi bahwa lembaga bumi putra ini diperuntukkan bagi semua anak dengan tidak mempedulikan apakah mereka itu anak kuli, anak orang miskin ataupun anak orang kaya.

Patih Surabaya yang hadir juga dalam rapat tersebut menduga bahwa sekretaris lembaga pendidikan itu mampu untuk mengatur sendiri semua urusan lembaga itu. Patih merasa terlibat dengan urusan itu, karena ia sering dimintai nasehat oleh sekretaris lembaga apakah anak-anak dari kalangan bawah bisa diterima ataukah hanya anak-anak bangsawan saja yang bisa

diterima di lembaga pendidikan ini. Namun, J.E. Jasper secara tegas menolak apabila lembaga pendidikan ini hanya menerima anak-anak yang berasal dari golongan priyayi saja yang diterima di lembaga pendidikan ini. Hal ini bertentangan dengan anggaran dasar organisasi. J.E. Jasper berjanji akan mengawasi agar sekolah ini terbuka bagi semua anak bumi putra tanpa mempermasalahkan dari mana mereka berasal. Selanjutnya ia ingin menyampaikan apakah SI bersedia memberikan bantuan keuangan pada lembaga pendidikan Mardi Kenyo, sehingga tidak perlu ditutup. Menanggapi hal ini, pemimpin SI Tjokroaminoto memberikan jawaban bahwa putra-putri priyayi tidak akan diutamakan mengikuti pendidikan di sini, namun akan diprioritaskan anak-anak yang orang tuanya miskin. Ia juga akan mendirikan kantor SI di pekarangan sekolah itu. Untuk itu lembaga pendidikan ini akan dibantu oleh organisasi SI sebesar 30-40 ribu Gulden. Untuk mensosialisasikan program dari sekolah ini, SI akan menyelenggarakan pameran di taman kota.

Kongres SI di Solo

Salah satu hasil keputusan kongres yang telah diselenggarakan di Surabaya pada 26 Januari antara lain akan diselenggarakannya Kongres SI di Solo pada 22 Maret 1913. Kongres itu dihadiri oleh banyak peserta. Kegiatan di stasiun kereta api Solo pada Jumat sore itu sudah sangat padat. Sebagian rombongan peserta kongres sudah tampak hadir melalui stasiun kereta api Solo. Selain peserta biasa juga tampak kelompok elite pribumi yang mulai berdatangan. Orang dapat mengetahui asal usul mereka dari pakaian yang dikenakannya. Rombongan dari Yogyakarta dengan menggunakan mobil juga telah memasuki kota Solo. Di dalamnya tampak tokoh-tokoh yang telah dikenal dengan baik oleh masyarakat bumi putera. Kesibukan di kota Solo pada hari itu semakin malam semakin tampak mulai padat. Terlebih



KONGRES SI DI SOLO
Kongres SI pertama diadakan pada 26 Januari 1913 di Solo. Kongres dipimpin oleh HOS. Cokroaminoto. Lain dengan SDI. Tujuan SI adalah mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan dan tolong menolong diantara kaum muslimin semuanya. (Kol. Museum Kebangkitan Nasional)

lagi pada hari Sabtu. Dari pagi hingga petang kota itu semakin dipadati oleh orang-orang yang akan hadir pada acara Kongres SI. Stasiun kereta api dari segala arah yang datang ke kota Solo dipadati oleh calon peserta kongres. Mereka datang dari berbagai organisasi dan dari berbagai kota. Ratusan orang yang berasal dari pegawai kereta api negara (SS) mulai bergabung dengan anggota lainnya, disusul peserta lainnya yang datang menggunakan kereta dari Mojokerto, Jombang dan Madiun. Semula pengurus SI Solo merencanakan akan mengadakan upacara untuk menyambut para tamu. Mereka telah merancang akan menyelenggarakan arak-arakan mengiringi peserta kongres ke kampung Laweyan, tempat tinggal pendiri Sarekat Islam Haji Samanhoedi. Dari situ rencananya mereka akan berhenti dan peserta dipersilakan untuk mencari penginapan sendiri-sendiri, kecuali yang membawa keluarga. Mereka yang tidak membawa keluarga, diminta untuk menginap di tempat yang sudah ditunjuk oleh panitia kongres. Namun, rencana penyambutan itu dibatalkan oleh pengurus SI. Walaupun pemerintah daerah sudah memberikan izin untuk pelaksanaan acara penyambutan itu,

namun akhirnya pengurus pusat membatalkan rencana acara itu.⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap anggota dan organisasi SI sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena pemerintah pusat menghendaki untuk tidak ikut campur dalam masalah SI, walaupun pemerintah daerah juga sudah memberikan izin pelaksanaan kongres di kota Solo. Kongres ini diselenggarakan di Taman Sriwedari yang statusnya adalah tanah milik Sunan.⁵ Dengan tersiarnya kabar bahwa kereta api Soerabaja Express dipenuhi oleh para peserta kongres, pengurus pusat SI mengirimkan semua andong yang beroperasi di kota Solo diperintahkan untuk pergi ke Stasiun Solo Balapan untuk menjemput para tamu. Dengan kedatangan kereta api itu, residen telah mengirim pesan kepada Ketua Umum SI cabang Surabaya, Tjokroaminoto agar segera menghadap Residen pada hari Sabtu pukul 17.00. Dalam pertemuan itu, Residen meminta kepada Tjokroaminoto agar tetap menjaga SI berada di luar ranah politik. Sementara itu pada waktu yang hampir bersamaan, tepatnya di rumah Haji Tir di Laweyan, diselenggarakan rapat pengurus. Hasil dari rapat pengurus itu antara lain meminta perlindungan kepada Pangeran Hangabehi, putra sulung Sunan agar acara kongres ini dapat tetap berjalan. Keputusan lainnya dari rapat itu adalah putusan tentang penerimaan anggota dari timur asing (*vreemdeoosterlingen*), yang memberikan kesempatan kepada bangsa timur asing untuk bergabung dengan SI apabila yang bersangkutan menunjukkan pandangan baik terhadap masyarakat bumi putra yang menjalankan pekerjaannya dengan baik dan tidak bertentangan dengan prinsip organisasi. Rapat pengurus juga telah memutuskan untuk mendirikan percetakan sendiri, yang diharapkan nantinya selain *Oetoesan Hindia* dapat juga dicetak di

4 Acara penyambutan itu dibatalkan karena menurut *Bataviasche Nieuwsblad* tanggal 25 Maret 1913, salah satu pengurus Sarekat Islam masih berada di dalam pengawasan kepolisian atas tuduhan menjual senjata kepada anggotanya.

5 Pada hari Sabtu Siang, pengurus pusat akhirnya memutuskan untuk mengerahkan semua andong yang berada di kota Solo ke stasiun kereta api untuk menyambut para tamu yang menggunakan kereta api Soerabaja Express.

percetakan ini penerbitan lain, seperti *Setija Oesaha*. Selain mencetak kedua penerbitan ini, diharapkan pendirian percetakan ini dapat juga menerbitkan penerbitan dalam bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Untuk penerbitan itu semua, pengurus pusat bersedia untuk menjadi penanggung jawab isinya. Penanggung jawab percetakan itu antara lain:

Ketua	:	Haji Samanhoedi
Wakil Ketua	:	Tjokroaminoto
Sekretaris	:	Moehamad Yoesoef
Bendahara	:	Haji Abdoelatah
Komisaris	:	Haji Tjokrosoedarmo Goenawan Haji Ketip Amin, dan Haji Achmad Hisan Djoeni

Rapat itu juga memutuskan untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Jenderal yang berada di Batavia. Upaya untuk menjalankan rencana itu dibantu oleh Dr. Rinkes, Ajun Penasehat Urusan Bumi Putra. Ia akan membuat surat permohonan audiensi dengan Gubernur Jenderal hari itu juga, agar segera dapat segera diproses.

Salah satu keputusan lainnya yang penting adalah tentang wibawa organisasi ini. Diputuskan bahwa dalam semua kepengurusan organisasi SI, ketua dan wakilnya harus warga bumi putra. Pada rapat sore hari menjelang kongres kali ini yang diselenggarakan di Taman Sriwedari milik Sunan ini juga dihadiri oleh tamu-tamu bumi putra terkenal, antara lain: para bupati, Sunan Paku Buwono juga tampak hadir, semua perwira Legion Mangkunegaran, sekretaris wilayah, penerjemah Dr. Rinkes, dan Said Oesman, penasehat Urusan Arab yang datang secara khusus dari Batavia.

Setelah acara organisasi selesai dibicarakan dan diputuskan bersama, tampil Tjokroaminoto menyampaikan pujian kepada Ratu, Pangeran Hendrik,

Sunan, dan Residen yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta rapat. Pada pembicaraan kali ini, ia membahas masalah organisasi, terutama ketaatan para anggota terhadap aturan organisasi. Kemudian disusul oleh Said Oesman yang membicarakan tentang tujuan keagamaan organisasi. Sebelum rapat ditutup, ada beberapa orang yang ingin menyampaikan gagasannya, antara lain: dari kepala Perpustakaan Rakyat, Ardiwinato yang meminta informasi tentang tidak diterimanya orang-orang yang dianggap tidak menguntungkan bagi organisasi. Ia juga mempertanyakan apakah pengurus yang terdiri atas para pemuda, bersedia menjalankan aturan-aturan yang sudah digariskan dalam agama Islam. Gagasan ini disambung dengan komentar dari utusan dari Bandung, Soewardi, yang meminta agar unsur agama dalam organisasi ini tidak terlalu perlu untuk diutamakan. Bagi Soewardi tujuan untuk menghimpun rasa nasionalisme bagi seluruh anggota SI harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, semua kegiatan organisasi harus diarahkan kepada penyadaran kepada seluruh anggota agar memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.⁶ Rapat ini ditutup menjelang tengah malam.

Pada pagi harinya, Kongres dibuka dengan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya Kongres ini. Selanjutnya, Tjokroaminoto mengajak para hadirin untuk mulai membahas apa yang telah diputuskan dalam rapat pengurus yang telah diselenggarakan satu hari sebelumnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa organisasi ini adalah organisasi yang baru, sehingga apabila masih sering terdapat kesalahan dalam berorganisasi, masih dapat diberikan toleransi dan masih bisa diperbaiki. Ia juga memuji tentang perkembangan SI di Surabaya, yang dianggapnya sebagai suatu kemajuan yang baik. Di kota itu telah dibuka 17 buah toko bumi putra yang menghabiskan modal sebesar antara 5 dan 10 ribu gulden. Oleh karena itu, ia, atas nama organisasi meminta untuk menghindari kerusuhan dan perlawan yang telah terjadi di beberapa cabang di daerah. Pembicara mendorong agar para pemimpin organisasi ini tidak

6 Lihat *Batavia Nieuwsblad*, 25 maret 1913 Lembar ke-1.

melanggar hukum dan segera mengurus agar status badan hukum organisasi di daerah yang selama ini diperlukan, segera dapat diurus dan diterima oleh pengurus di daerah. Sambutan dari Wakil Ketua Pengurus organisasi ini mendapatkan sambutan yang meriah dari seluruh peserta kongres yang hadir.

Acara berikutnya adalah pidato dari Penasehat Urusan Arab dari Batavia, Sayid Oesman. Ia menegaskan pentingnya para anggota organisasi ini menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Namun, karena bahasa yang digunakan tidak terlalu dapat dipahami, apa yang disampaikan diulang kembali oleh Hasan Ali Soerati dari Surabaya. Setelah keduanya turun dari mimbar, Tjokroaminoto naik kembali ke panggung yang menginformasikan bahwa pada saat itu ada seorang utusan dari organisasi ini yang menghadap Gubernur Jenderal di Batavia yang meminta permohonan untuk diizinkan melakukan audiensi di Batavia.

Acara berikutnya diisi oleh redaktur kepala *Volkslectuur* Mas Ardiwinata. Pidatonya dapat dirangkum menjadi dua, yakni mempertanyakan mengapa SI menolak orang yang tidak baik masuk dalam organisasi ini. Ia menegaskan bahwa Nabi telah mengajarkan kepada umatnya bahwa orang yang tidak baik harus ditarik, dan SI harus bisa menjadikannya orang baik. Kedua disampaikan bahwa pengurus pusat organisasi SI kebanyakan adalah generasi muda. Mas Adiwinata mengkhawatirkannya karena generasi muda tidak cukup kuat dalam memahami ajaran Islam dan masih sulit untuk mematuhi ajaran ini. Generasi muda lebih sukar disadarkan bila dibandingkan dengan orang tua.

Pidato Mas Adiwinata mengusik Tjokroaminoto yang ingin memberikan klarifikasi atas dua pertanyaan tersebut:

1. Orang yang tidak baik tidak ditolak menjadi anggota. Mereka diberikan waktu selama enam bulan untuk memperbaiki dirinya. Setelah itu, mereka dapat mendaftarkan kembali menjadi anggota;
2. Mengenai dipatuhi atau tidaknya ajaran agama bagi pengurus yang masih muda, mereka masih memiliki ribuan

penasehat yang tanpa diminta akan selalu mengingatkan mereka;

Akhirnya Kongres di Solo ditutup dengan berbagai keputusan yang telah dibicarakan seperti tersebut di atas.

Status Hukum SI

Pada 10 Juli 1913, pengurus Sarekat Islam berkumpul di rumah Residen Solo. Mereka yang hadir antara lain Tjokroaminoto, Haji Samanhoedi, Hadi Widjojo, Tjokro Soedarmo dan Dr. Rinkes, untuk mengetahui keputusan pemerintah tentang status badan hukum SI. Residen menginformasikan bahwa Gubernur Jenderal di Batavia menolak status badan hukum SI tetapi cenderung mengabulkan permintaan pendirian cabang-cabang di daerah. Residen juga menyampaikan saran-saran yang diberikan oleh Gubernur Jenderal terhadap organisasi ini. Untuk menindaklanjuti langkah apa yang harus dilakukan oleh organisasi ini, pada petang harinya, mereka berkumpul di rumah Haji Samanhoedi di Solo untuk membicarakan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan penolakan itu.

Walaupun status badan hukum SI ditolak oleh pemerintah, organisasi ini dikabarkan telah mendirikan sebuah organisasi dagang bumi putra yang memiliki nama “Al Islamiyah” yang sudah mulai bekerja dengan modal dasar sebesar f 500.000. Wakil Ketua SI Pusat Tjokroaminoto melakukan perjalanan untuk mempromosikan ‘Al Islamiyah” dengan himbauan agar organisasi di daerah dapat turut serta berpartisipasi. Dari perjalannya itu, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jawa Timur	f 150.000
- Semarang dan sekitarnya	f 12.000
- Jawa Barat	f 30.000
- Yogyakarta dan sekitarnya	f 80.000
- Solo dan sekitarnya	f 13.500
Total yang diperoleh	f 285.000

Pengurus Pusat SI mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang terkumpul sebanyak itu.

Pengurus "Al Islamiyah" menghendaki pertama-tama agar orang bumi putra dapat memperoleh keuntungan, yang diperoleh dari hasil tanah yang mereka kerjakan. Selanjutnya, "Al Islamiyah" akan mengimpor barang-barang dari Eropa atau dari negara lain yang diperlukan oleh kaum bumi putra. Para pendiri "Al Islamiyah" berharap agar badan usaha ini dapat memberikan bantuan yang besar bagi organisasi dagang bumi putra yang saat ini masih belum berkembang. Pendirian "Al Islamiyah" dianggap sebagai dampak logis dari keberadaan banyak toko milik bumi putra. Lembaga ini tidak dapat mengandalkan importir besar. Untuk tujuan inilah "Al Islamiyah" didirikan.

Penolakan pemberian badan hukum terhadap SI pusat oleh pemerintah kolonial secara lengkap dengan alasan-alasannya dimintakan oleh pengurus pusat SI agar diinformasikan ke semua lembaga pers yang ada di wilayah koloni ini. Seperti apa yang dikutip oleh *Java Bode* pada 14 September 1912, Tjokroaminoto dalam hal ini bertindak bagi dan atas nama organisasi SI yang telah dibentuk di Surabaya dan berkedudukan juga di kota itu. Ia telah mengajukan pengesahan sebagai badan hukum atas organisasi SI dengan menyertakan anggaran dasarnya. Dalam koran itu juga dijelaskan bahwa organisasi ini berjuang demi kepentingan seluruh penduduk bumi putra termasuk di dalamnya kalangan yang kurang sejahtera. Pemerintah memandang bahwa pengakuan organisasi yang dibentuk saat itu akan bertentangan dengan kepentingan umum. Namun pemikiran yang terungkap dari permohonan status hukum itu memang tidak dapat disetujui karena berbeda dengan organisasi lainnya yang hanya terbatas di tingkat lokal seperti: Batavia, distrik, atau kabupaten saja. Dengan organisasi lokal seperti ini akan didorong suatu kerjasama melalui sarana lembaga perwakilan yang ada di daerah yang sudah ada sejak lama.

Berdasarkan pasal 3 Keputusan Raja, 28 Maret 1870 no. 2 Lembaran Negara nomor 64 yang telah diubah dengan Keputusan Raja tanggal 14

Mei 1913 no. 37 (lembaran Negara nomor 432), disebutkan bahwa setelah mendengar nasehat Dewan Hindia Belanda, pemerintah merasa berkeberatan untuk mengabulkan permohonan pengakuan organisasi. Pemerintah hanya dapat menyetujui organisasi yang bersifat lokal yang dalam pertimbangannya dinilai positif dan tidak ada keberatan sama sekali terhadap organisasi lokal tersebut. Keputusan ini disampaikan melalui Residen Surakarta, ditujukan kepada Tjokroaminoto. Keputusan itu juga disertai keterangan mengenai penjelasan lebih lanjut tentang keputusan itu yang diserahkan juga oleh pemerintah kepada Residen Surakarta. Seperti dimuat dalam koran *Javasche Courant*, 4 April 1913 nomor 27 tentang pertemuan pada 29 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal kepada Komite Pusat SI, gubernur Jenderal memberikan rasa simpati yang nyata kepada organisasi ini yang ditujukan untuk pengembangan lahir batin penduduk dan maksud baik para pemimpinnya.

Sehubungan dengan pengakuan pemerintah terhadap SI sebagai badan hukum, Gubernur Jenderal menyampaikan bahwa sebelum melangkah ke arah sana, pemerintah harus mempunyai keyakinan bahwa gerakan yang terungkap dalam SI aman berada di tangan pemimpinnya, dalam artian bahwa para pemimpinnya tidak hanya memiliki niat baik, tetapi juga kekuatan, keinginan dan bebas dari pengaruh anggotanya. Bahkan, pemimpinnya berani untuk mencegah agar organisasi ini atau beberapa cabangnya tidak melanggar ketertiban umum sehingga masyarakat yang hidup damai di antara berbagai macam penduduk sama-sama berkembang. Pernyataan ini berkaitan dengan apa yang semula terbukti tentang pandangan banyak anggota yang kurang maju, dan bekerja sama yang justru mengarah pada melakukan gangguan terhadap ketertiban umum.

Di antara petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Jenderal kepada pengurus pusat ini, pertama-tama nasehat agar tidak menambah jumlah anggota yang saat ini sudah sangat besar. Kegiatan tidak diarahkan pada penambahan jumlah anggota, tetapi lebih pada mencurahkan perhatian pada gerakan dengan pengaturan organisasi yang baik, terutama pengaturan keuangan yang

memadai, dalam melakukan pemilihan pemimpinnya, kekuasaan dimiliki oleh anggota. Apabila tidak demikian, ada kemungkinan suatu saat organisasi ini secara tidak terduga akan melanggar ketertiban umum atau mengancam pemerintah yang mau tidak mau harus ditangani oleh pemerintah terhadap organisasi ini. Dalam pengakuan suatu organisasi, dikatakan oleh Gubernur Jenderal tidak jarang pemerintah harus mencabut kembali pengakuan itu akibat dari tindakan sejumlah anggota atau dari pengurusnya.

Selanjutnya Gubernur Jenderal pada pertemuan 29 Maret 1913 menegaskan tidak perlunya merinci secara khusus mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan status hukum bagi organisasi lokal. Persyaratan ini didasarkan pada Keputusan Raja tanggal 23 Maret 1870 dan hanya dinyatakan bahwa anggaran dasar suatu organisasi harus mengatur masuk dan keluarnya anggota organisasi itu. Sementara itu ditegaskan bahwa organisasi SI tidak mengatur apa pun tentang anggota yang keluar dari organisasi. Selain itu juga dinyatakan bahwa kesanggupan dan permohonan pengakuan atas organisasi di daerah juga akan dipertimbangkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa permohonan itu juga bisa ditolak setelah penyelidikan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang juga bersifat lokal.

Pada 30 Juni 1913 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Jenderal yang menyatakan bahwa status hukum yang diajukan oleh Pengurus SI ditolak dengan alasan bahwa anggota SI saat itu sudah terlampaui banyak. Di dalam Surat Keputusan ini ditetapkan bahwa di tiap-tiap daerah boleh didirikan SI cabang untuk daerahnya masing-masing. Cabang-cabang SI di daerah boleh didirikan dengan mengingat peraturan sbb:

- a. Memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran;
- b. Memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan paham-paham yang keliru tentang agama Islam;
- c. Mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong menolong di antara anggota-anggotanya.⁷

⁷ Lihat Amelz, *ibid*, hlm. 105.

Pada 11 Juli 1913, Wakil Ketua SI, Raden Oemar Said Tjokroaminoto menerima panggilan dari Residen Surakarta untuk datang menghadapnya dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pemerintah mengenai status badan hukum SI. Oleh pengurus organisasi ini, dilaporkan pada bulan Juli telah menerima anggota sebanyak 300 ribu bila dibandingkan dengan 90 ribu pada Februari di tahun yang sama. Di samping itu, menurut catatan pengurus, organisasi ini dalam tiga bulan terakhir telah mengeluarkan sebanyak 200 ribu anggota dari organisasi. Solo memiliki jumlah keanggotaan yang terbesar hingga mencapai 30 ribu orang. Menyusul Batavia dengan 26 ribu anggota. Cirebon 23 ribu, Semarang 17 ribu dan Surabaya dengan 16 ribu anggota. Pada pertemuan itu, Tjokroaminoto tidak kecewa dengan penolakan pemberian badan hukum bagi organisasi yang dipimpinnya.⁸

Pendirian SI Cabang di Beberapa wilayah

Pada 27 Juli 1913, di Kaliwungu Kendal diselenggarakan Rapat Umum Terbuka SI. Keramaian dan kesibukan setelah kedatangan kereta pertama di Kaliwungu Kendal pada pagi hari telah membuat kota itu menjadi ramai. Semua orang tampak berkumpul di dekat gerbong kereta api. Di tempat itulah rapat terbuka SI akan dibuka pada pukul 9 pagi. Tak lama setelah kereta berhenti pandangan semua orang tertuju pada sebuah kapal besar yang bertuliskan “Kapal Sarekat Islam” yang juga akan segera mendarat.

Diperkirakan jumlah orang yang berkumpul mencapai antara 6 dan 7 ribu orang, yang ingin melihat dari dekat para tokoh SI yang datang dari Solo dan Surabaya. Setelah Bupati Kendal beserta jajarannya sampai di tempat tersebut, seorang anggota dari Kaliwungu berpidato menyambut Bupatinya yang telah hadir bersama tamu undangan lainnya. Dikatakannya bahwa cabang Kaliwungu telah memiliki 2.100 anggota SI. Secara singkat ia juga menjelaskan tujuan organisasi SI. Setelah selesai berpidato, disusul Haji Dachlan dari Yogyakarta, yang sekaligus juga pengurus SI berpidato

⁸ Lihat *Algemeen Handelsblad*, 6 Agustus 1913 lembar ke-1.

di mimbar. Namun, pidatonya tidak begitu terdengar karena tertutup oleh riuh rendahnya peserta yang hadir di tempat itu. Dalam pidatonya itu Haji Dachlan menyampaikan bahwa tidak ada fanatisme dalam kegiatan organisasi ini. Kewajiban terhadap anggota ditunjukkan melalui larangan perzinahan, pencurian dan penyuapan. Juga dikatakan adanya larangan dari organisasi untuk bersikap bermusuhan terhadap orang lain yang bukan anggota baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam. Ditegaskannya bahwa Agama Islam menuntut kepatuhan kepada penguasa, meskipun penguasa yang memerintah bukan Islam. Namun pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk menjalankan ibadah. Oleh karena itu semua anggota SI harus mengikuti perintah pemerintah. Dalam pidato itu, sangat sedikit ditemukan sikap revolusioner.

Setelah selesai sambutan Haji Dachlan, disusul sambutan redaktur kepala *Oetoesan Hindia*, sekaligus pengurus SI, Tjokroaminoto. Suaranya yang keras dan memenuhi ruangan itu memukau pendengarnya. Tokoh SI ini begitu banyak dikagumi orang. Setelah mengucapkan selamat datang kepada hadirin, ia mulai menguraikan perubahan besar yang terjadi di tubuh organisasi ini. Melalui organisasi ini jauh lebih banyak dilakukan persatuan di antara penduduk bumi putra di Jawa. Tujuannya adalah untuk mengangkat martabat orang bumi putera yang harus dicapai dengan evolusi dan bukan revolusi. Kemajuan SI menuntut kesabaran. SI akan berkarya bagi seluruh anggota masyarakat bumi putera, baik anggota organisasi ini maupun yang bukan anggota. Perbaikan nasib rakyat tidak akan dapat dicapai dengan cara merugikan bangsa lain. Setiap kali masing-masing pribadi harus berjuang demi tujuan yang baik. Ia kemudian menjelaskan bahwa penduduk bumi putera saat ini masih hidup dalam lumpur dan untuk mengentaskan penduduk merupakan tugas utama organisasi ini. Sumpah yang diucapkan pada saat mereka diterima menjadi anggota merupakan janji kesetiaan kepada anggaran dasar, dan tidak ada satu pasal pun yang meminta untuk melawan pemerintah. Penduduk bumi putera pada saat mendaftar sudah sangat memahami hal tersebut. Apabila tugas pengurus belum berhasil melaksanakan tugasnya,

sudah merupakan kewajiban pengurus untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Kemudian, Tjokroaminoto mengubah bahasa yang digunakan, yang sebelumnya menggunakan bahasa Melayu, kemudian menggunakan bahasa Jawa untuk menjelaskan tujuan organisasi. Maksud dan tujuannya adalah agar masyarakat yang mayoritas adalah penduduk Kendal yang hanya paham berbahasa Jawa memahami maksud dan tujuan SI. Ia menunjuk banyak kasus saling tolong-meolong melalui bantuan SI, khususnya cabang Surabaya. Ia menegaskan pentingnya menyekolahkan anak-anak, pentingnya menghargai kebudayaan dan kebiasaan orang Jawa. Ada satu hal yang diupayakan agar tidak dilakukan oleh penduduk adalah berhutang.

Dalam kesempatan itu, Tjokroaminoto juga berjanji akan mengajukan kembali permohonan memperoleh status badan hukum untuk organisasi ini. Ia berjanji untuk mengajukannya kembali bulan berikutnya, dengan meminta pengajuan yang baru. Sebelum meninggalkan panggung, Tjokroaminoto meminta agar semua anggota organisasi ini menaati anggaran dasar yang menjadi pegangan bagi seluruh anggota SI di mana pun berada.

Pidato Tjokroaminoto disambut dengan ajakan diskusi yang datang dari seorang Jaksa dari kota Kendal. Pernyataan langsung ditujukan kepada Wakil Ketua Umum SI yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam organisasi yang tidak diketahui oleh anggota yaitu di bawa ke mana uang yang telah disetorkan. Hal ini merupakan kritikan yang selalu dilontarkan oleh jurnalis pers Eropa khususnya dalam menanggapi kegiatan SI. Kemudian, organisasi ini juga dikritik ketika bupati ditolak ketika akan memeriksa uang kas SI. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini masuk dalam wewenang bupati mengontrol keuangan suatu organisasi yang berada di wilayahnya. Permasalahan lainnya dari organisasi ini yang menginginkan menempatkan pulau Jawa sebagai suatu ikatan organisasi perlu dipertimbangkan kembali karena berdasarkan kenyataan yang ada, hubungan komunikasi antara Kaliwungu dan Kendal saja masih banyak mengalami kendala. Demikian pula sama halnya dengan daerah lainnya.

Diakui oleh Tjokroaminoto bahwa konsolidasi masih sangat sukar dilaksanakan, sehingga tidak ada satu anggota pun yang mau dipaksa untuk menyumbangkan uang mereka. Para pengurus telah bekerja secara gratis tanpa dibayar. Meskipun administrasi keuangan masih tidak memadai, namun perbaikan secara perlahan berlangsung dan dirasakan oleh setiap anggota. Pengurus akan membuka laporan keuangan ini apabila diminta. Diakuinya pula ada sebuah cabang yang menolak bupati yang memintanya untuk menyetorkan uangnya ke kas. Namun hal ini merupakan akibat tindakan aparat kepolisian yang kasar. Apabila diminta dengan cara yang sopan, permintaan tersebut akan dipenuhi. Tjokroaminoto juga menjawab pertanyaan dari seorang anggota yang hadir, yang menyampaikan adanya seorang ketua cabang yang telah mengambil uang kas organisasi ini untuk membantu seseorang. Tjokroaminoto menjawab bahwa ketua tersebut akan dipecat dan cabang itu, dalam waktu dekat, harus memilih orang-orang yang dipercaya untuk diangkat menjadi pengurus cabang. Jawaban tersebut merupakan acara terakhir rapat terbuka tersebut, sementara pengurus SI mengikuti acara lain yang diselenggarakan oleh pengurus Kaliwungu.

Komite Hindia

Dalam sebuah artikel yang dimuat di *Oetoesan Hindia*, dimuat suatu penjelasan yang diberikan oleh SI tentang pandangannya terhadap Komite Hindia, yang telah mengirimkan selebaran di Bandung. Dengan menggunakan bahasa yang sangat jelas di majalah tersebut bahwa SI tidak bekerja sama dengan kelompok Bandung. Walaupun di rumah Tjokroaminoto ditemukan sebanyak 247 eksemplar brosur “Andaikan Saya orang Belanda” yang telah disita oleh polisi, namun pengiriman itu dilakukan tanpa sepengertahan apa pun dari alamat yang dituju. Tjokroaminoto sebelum melakukan perjalanan ke beberapa daerah telah memperoleh peringatan agar tidak memuat brosur itu di dalam koran *Oetoesan Hindia*.

Dari Batavia dikabarkan bahwa surat-surat kabar di Deli telah menerbitkan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Dari berita yang

beredar dikatakan bahwa redaksi *Oetoesan Hindia* telah menerima beberapa eksemplar brosur dan di rumah Tjokroaminoto ditemukan sebanyak 247 eksemplar. Sebagai terompet organisasi SI, *Oetoesan Hindia* memberitakan bahwa diduga selebaran yang berada di kota Solo dimiliki oleh Raden Mas Soewardi, yang saat ini telah menjalani hukuman pengasingan bersama Douwes Dekker. Sehubungan dengan hal itu, *Deli Courrant* menyebutkan bahwa Ketua Sarekat Islam Batavia memiliki satu pak brosur tersebut yang berjudul “Andaikan Aku Orang Belanda”. Ketua organisasi ini menyampaikan bahwa ia menerima satu pak selebaran tersebut dari Komite di Bandung untuk disebarluaskan. Namun semua selebaran itu telah diserahkan kepada Asisten Residen Batavia.

Kasus beredarnya pamflet “Andaikan Aku Orang Belanda” yang diterima oleh Tjokroaminoto, setelah dilakukan penyelidikan polisi, ternyata ditulis oleh R.M. Soewardi Soerjaningrat di Bandung. Brosur itu telah disita oleh polisi. Penyitaan itu diperkuat dengan datangnya telegram dari Batavia yang diterima oleh pihak pengadilan di Bandung. Dalam penggeledahan itu, petugas pengadilan didampingi oleh Komisaris Polisi Van Haarlem, telah melakukan pemeriksaan di rumah R.M. Soewardi Soerjaningrat dan di kantor perusahaan dagang *Setija Oesaha* tempat *Oetoesan Hindia* dicetak. Di kantor redaksi ini hanya terdapat tiga eksemplar pamflet, yang kemudian disita oleh pemerintah.⁹

Mengingat bahwa *Oetoesan Hindia* dicetak di perusahaan dagang *Setija Oesaha*, selanjutnya, petugas pengadilan melakukan pemeriksaan di rumah Tjokroaminoto Wakil Ketua SI yang status badan hukumnya ditolak oleh pemerintah. Di rumahnya, di kampung Plampitan, Solo, disita kira-kira 200 eksemplar pamflet tersebut, yang dimaksudkan untuk disebarluaskan ke daerah timur Jawa. Penemuan pamflet tersebut telah menjadi bukti, sehingga lembaga

⁹ Berita tentang penyitaan ini dimuat dalam *Oetoesan Hindia* yang ditulis sbb: “dan buku itu lalu dirampas, dan dibawa oleh opsi” Lihat laporannya dalam *Algemeen Handelsblad*, 28 Agustus 1913.

keamanan dan lembaga terkait lainnya mempertanyakan kembali organisasi SI didirikan hanya untuk tujuan memajukan ekonomi penduduk bumi putera. Meskipun hal itu disangkal oleh pemimpin SI, bagi pihak keamanan tidak dapat dibantah bahwa penemuan pamflet di dalam rumah salah satu pemimpinnya, akan memberikan pandangan yang berbeda dengan yang selama ini dijanjikan oleh pemimpin SI bahwa organisasi ini hanya bergerak di bidang ekonomi saja. Alasannya adalah orang tidak mau mengirimkan selebaran yang isinya menghasut itu apabila ia tidak setuju dengan isinya.

Dari penemuan pamflet itu, berdasarkan berita dari *De Preanger Bode* di Bandung digambarkan terjadi penangkapan terhadap 4 orang dari Perusahaan Dagang Setija Oesaha. Penangkapan dilakukan dengan sangat cepat, tidak lebih dari 45 menit untuk mencegah kaburnya para pelaku. Mereka dijebloskan ke penjara, dikawal dan dijaga oleh polisi sebanyak satu kesatuan di bawah komando Letnan den Hartig. Tempat penahanan dilakukan di perempatan sebelah timur stasiun. Untuk menjaga jangan sampai terjadi keributan, di sebelah barat stasiun hingga bengkel kereta api milik kereta api negara Belanda (SS) ditempatkan satu kesatuan yang dijaga secara ketat di bawah komando Letnan de Voght. Gedung-gedung umum seperti kantor pos, kantor telepon, rumah bupati, kantor residen dan asisten residen serta penjara juga dijaga dengan ketat.

Di Cimahi, kesatuan kavaleri disiagakan untuk melindungi fasilitas vital pemerintah seperti jaringan telepon dan telegraf. Di Cikudapateuh pasukan juga sudah disiagakan untuk menjaga segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Situasi tampak tegang, dan semua aparat keamanan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan kerusuhan yang mungkin timbul. Sekitar pukul 16.00 dari kantor residen muncul empat kesatuan infanteri masing-masing berkekuatan 100 orang yang berada di bawah komando Sersan Mayor Schout Braun dan pembantunya Von Grumblow, yang dikawal oleh dua orang opsi. Mereka dikerahkan untuk menangkap Tjipto Mangunkusumo di tempat kerjanya.

Pernyataan SI yang dikuatkan oleh Notaris

Koran *De Tijd* edisi 6 Oktober 1913 menerbitkan sebuah akta asli tentang pernyataan organisasi SI. Dalam akta yang bernomor 38 itu disebutkan bahwa pada hari Selasa, 8 Juli 1913 telah menghadap notaris Benjamin ter Kuile di Surabaya tiga orang tokoh Sarekat Islam, yakni:

1. Raden Oemar Said Tjokroaminoto, redaktur kepala surat kabar berbahasa Melayu, *Soeara Hindia*;
2. Raden Tjokrosoedarmo, pekerjaan swasta;
3. Raden Hadiwidjojo, pekerjaan swasta.

Mereka bertiga telah menghadap notaris Benjamin ter Kuile yang mengaku sebagai pendiri organisasi SI. Ketika badan hukum ini diberikan, Tjokroaminoto masih menjabat sebagai wakil ketua pengurus, Tjokrosoedarmo sebagai komisaris pengurus dan Hadiwidjojo sebagai ketua pengurus SI Jawa Timur. Mereka semua mengaku mengetahui sejarah pembentukan SI. Dalam akta itu juga dimuat pandangan mereka bertiga tentang organisasi tersebut, a.l:

- a. Sejarah pembentukan organisasi Sarekat Islam tidak berhubungan dengan apa yang berulang kali disampaikan dalam surat kabar Hindia, bahwa dari pihak pemerintah ada tekanan pada peralihan umat Islam untuk menjadi pemeluk Kristen.
- b. Di lingkungan mereka juga tidak terjadi bahwa usaha tersebut (jika ada) telah menimbulkan keresahan di antara penduduk bumi putera.
- c. Penduduk bumi putera tidak dihambat dalam menjalankan ibadah agama Islam mereka dan dari kondisi ini juga tidak dihalangi untuk beribadah. Dipastikan bahwa organisasi Sarekat Islam didirikan tidak untuk menghambat agama Kristen atau agama manapun juga;

- d. Tujuan didirikannya organisasi ini terutama adalah untuk mewujudkan hubungan ekonomi lewat kerjasama yang lebih baik, sehingga orang Jawa, Sunda, Madura dan Melayu, masing-masing menurut kemampuannya dapat bekerjasama demi memperoleh banyak keuntungan dan kemajuan yang belakangan ini tampak terjadi di Hindia.
- e. Penduduk di wilayah koloni pada tahun-tahun belakangan ini, di mana-mana mengalami banyak kemajuan. Sebagian besar penduduk bumi putera di Jawa bangkit dan memahami bahwa hanya melalui kerjasama, hasil yang dibentuk oleh ikatan organisasi ini akan bisa dipetik.
- f. Organisasi ini telah mencantumkan kata “Islam” pada namanya karena para pendirinya paham benar bahwa Islam mencakup banyak hal. Oleh karena itu, diperlukan ikatan. Ikatan ini di samping memajukan kepentingan materi penduduk bumi putera, juga bermaksud memajukan kehidupan beragama di antara penduduk bumi putera muslim tanpa harus menunjukkan sikap permusuhan terhadap agama lain.

Akte pernyataan ini dibuat di Surabaya di depan calon notaris Hendrik Willem Hazenberg dan Cornelis Douwes, yang bertugas sebagai saksi dan yang ikut menandatangani akta ini.

Perjalanan ke Pelosok Untuk Meresmikan Pendirian SI

Menjelang akhir tahun 1913, Tjokroaminoto menerima permintaan dari daerah-daerah di Jawa untuk hadir dalam rangka peresmian organisasi Sarekat Islam di daerah-daerah. Wakil Ketua Sarekat Islam ini mengajak Dr. Rinkes untuk melakukan perjalanan ke daerah. Demikian padatnya acaranya dan jauhnya wilayah yang dikunjunginya tidak mengecilkan tekadnya untuk tetap hadir pada acara pembukaan cabang-cabang organisasi itu di



Salah satu bukti pergerakan politik pun pengaruhnya sampai di Sulawesi. Namanya pada gambar ini Hadji Umar Said Tjokroaminoto dan Sosrokardono bergambar bersama¹⁰ dengan para Penimipin pergerakan politik Islam di Palu Sulawesi Tengah.

semua penduduk merelakan tanahnya untuk dilalui jalur kereta api uap maupun kereta api listrik. Karena mahalnya harga tanah, pembangunan jalur kereta api mengalami penundaan.

Dengan kondisi seperti itu, undangan-undangan untuk meresmikan pembentukan SI di daerah tetap dia penuhi dan hadiri. Beberapa undangan yang diterimanya pada bulan Desember antara lain: tanggal 20 di Kediri, 21 di Blitar, 24 di Jember, 26 di Bondowoso, 28 di Banjarnegara, 31 di Pati, dan 4 Januari 1914 di Pekalongan. Hampir semua residen memberikan izin dalam rapat pembentukan cabang-cabang organisasi ini di daerah. Hanya ada satu residen yang meminta kepada panitia daftar nama siapa-siapa saja yang akan hadir pada acara rapat di Blitar tersebut. Setelah daftar itu diberikan, izin kemudian diberikan.¹⁰

Suatu partisipasi dari simpatisan organisasi secara mengejutkan memberikan surat kepada Tjokroaminoto. Surat itu datang dari J. Dinger yang bersedia memberikan bantuan dan dukungan keuangan kepada SI, baik untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan padi maupun untuk membuka

daerah. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adlah dengan menggunakan kendaraan mobil, karena jalur kereta api di Surabaya masih mengalami banyak hambatan dalam pembangunannya. Oost Java Stoomtram Maatschappij yang memperoleh konsesi untuk membangun jalur di Surabaya masih memperoleh banyak kendala karena tidak

10 Lihat *Bataviaasche Nieuwsblad*, Desember 1913, lembar ke-2.

toko sehingga rakyat dapat memperoleh barang-barang kebutuhannya dengan mudah dan murah. Mengenai pelaksanaan bantuannya ini J. Dinger akan membicarakan secara lebih terperinci dengan pengurus SI lainnya.

Dari laporan singkat yang dikirimkan dari Keresidenan Palembang diperoleh keterangan bahwa pada November 1913, Raden Goenawan dan Raden Tjokroaminoto telah meninggalkan pulau Jawa menuju ke Palembang. Pada 14 November 1914, mereka mengadakan rapat di kota itu untuk mendirikan organisasi SI cabang Palembang. Secara aklamasi hadirin menyetujuinya, dan tercatat 800 orang pengikut rapat langsung mendaftarkan dirinya menjadi anggota SI.¹¹

SI secara keseluruhan berkembang dengan sangat pesat. Anggotanya pun juga cepat bertambah. Beberapa program yang langsung menyentuh kebutuhan anggotanya telah dicanangkan. Beberapa program yang akan dibuka antara lain pelatihan bengkel pengecoran. Namun, program pelatihan ini belum dapat dilaksanakan mengingat untuk merealisasikannya diperlukan dana yang cukup besar. Dalam Rapat pengurus SI di ruang Panti Harsojo pada Februari 1914, telah dibahas pelaksanaan bantuan yang dijanjikan oleh J. Dinger kepada SI. Beberapa kali J. Dinger telah melobby pengurus SI dengan meminta agar pengurus SI membuat perencanaan bengkel pelatihan pengecoran bagi kaum bumi putra. J. Dinger telah melakukan lobby dengan seorang guru/mentor yang baik, yaitu Mr. Guijt. Maksud dari J. Dinger adalah agar bengkel pelatihan ini segera dibuka, sehingga banyak pemuda akan dilatih di bengkel pelatihan ini untuk mendidik mereka menjadi pandai besi. Dengan ketrampilan yang dimiliki, para pemuda yang telah dilatih akan dengan mudah memperoleh pekerjaan di pabrik-pabrik gula.

Beberapa usulan juga telah disampaikan, apakah mungkin untuk menggabungkan bengkel pelatihan ini dengan sekolah pertukangan bumi

11 Laporan pendirian Sarekat Islam Cabang Palembang dilaporkan dalam berita

Koran *Bataviaasch Nieuwsblad* 4 Februari 1914, yang dimuat dalam *Korte Verslagen*.

putra yang selama ini sudah ada dan sudah dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat Eropa maupun masyarakat bumi putra. Permasalahan ini semua baru akan kembali dibahas pada 4 Maret 1914. Walaupun J. Dinger tampak bersemangat untuk mengejar dan memotivasi para pengurus SI, namun banyak pengurus lain yang mempertanyakan apakah bantuan yang dijanjikan ini akan benar-benar diberikan atau tidak.

Dalam hal pengembangan organisasi SI, telah disebutkan bahwa di Palembang organisasi ini telah dibentuk. Atas desakan beberapa pihak, beberapa anggota SI berinisiatif untuk mendirikan SI di kota Yogyakarta. Pada Sabtu, 18 April 1914 para simpatisan SI mengadakan rapat di gedung milik Yayasan Muhammadyah di daerah Kauman, Yogyakarta. Namun, akhirnya rapat dipindahkan, karena gedung tersebut dianggap terlalu kecil, tidak dapat menampung kaum simpatisan SI di kota Yogyakarta. Akhirnya, pertemuan diselenggarakan di rumah Gondoatmodjo, seorang priyayi Pakualaman, yang bersedia meminjamkan pendopo dan pekarangannya untuk pelaksanaan rapat tersebut, walaupun banyak orang tahu bahwa Gondoatmodjo bukanlah simpatisan SI. Rumah dan pekarangannya yang luas itu terletak di di tepi jalan kecil yang berada persis di belakang istana Pakualaman. Walaupun gang kecil itu terlihat gelap, namun dari jauh, rumah dan pendoponya terlihat dari jalan besar karena di dalamnya dipenuhi dengan lampu. Di pendopo tersebut tampak banyak orang berkumpul, mereka berasal dari luar kota Yogyakarta. Hal ini tampak dari busana yang mereka kenakan. Selain dari busananya, mereka juga memiliki sikap dan pemikiran yang berbeda-beda, khususnya tentang SI. Mereka datang ke tempat itu untuk mengikuti rapat pembentukan SI di kota Yogyakarta. Hadir pada saat itu 108 wakil dari SI daerah. Dari jumlah tersebut 81 perwakilan dari daerah yang diwakili oleh ketua atau wakil ketua, atau sekretarisnya. Sementara itu, sisanya adalah wakil-wakil SI daerah yang membawa surat pengantar, yang harus ditunjukkan kepada pengurus pusat atau anggotanya. Mereka semuanya duduk di kursi yang telah disediakan.

Dari penampilan fisiknya, tampak di antara mereka para ulama yang memakai surban besar dan ikat kepala yang besar, kaum muda dengan model rambut pendek tanpa ikat kepala, dengan menggunakan busana Eropa. Sementara tamu lainnya menggunakan ikat kepala, jas putih atau sarung. Ketua SI Tjokroaminoto tampak berbusana dengan menggunakan kostum berikat kepala. Sesekali duduk atau berdiri sambil menghisap sebatang rokok. Ia menyambut Haji Samanhoedi yang baru saja datang dari kota Solo dengan penuh hormat.

Rapat kali ini sifatnya tertutup, tidak seperti rapat pada Minggu pagi dan petang. Rapat kali ini membahas khusus tentang rumah tangga SI, khususnya akan membahas anggaran dasar dan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan dari pusat hingga ke cabang di daerah. Rapat dibuka oleh Tjokroaminoto yang membukanya dengan menggunakan bahasa Melayu. Atas nama pengurus ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan para pengunjung dan anggota SI dari berbagai daerah. Ditegaskan dalam sambutannya bahwa tujuan dari rapat ini adalah menampung usulan-usulan bagi kemajuan organisasi. Ia juga memohon maaf kepada para hadirin karena ketua kehormatan berhalangan hadir karena sakit. Oleh karena itu, ia diberi mandat untuk membuka rapat itu. Rapat tersebut berlangsung dengan lancar. Agenda utamanya adalah menetapkan pengurus pusat SI. Rapat ini juga merekomendasikan agar kedudukan SI Pusat atau CSI (Centraal Sarekat Islam) tidak berkedudukan di Yogyakarta, akan tetapi di kota Solo. Rapat tersebut telah menetapkan kepengurusan CSI dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Kehormatan	:	Tjokroaminoto, Pimpinan <i>Oetoesan Hindia</i> di Surabaya;
Ketua	:	Raden Goenawan, wartawan di Batavia;
Sekretaris-Bendahara	:	Raden Achmad, ahli pertanian di Surabaya
Komisaris	:	- Raden Mohammad Joesoef, pegawai Semarang Joeana Stoomtram di Semarang;

- Haji Abdul Fatah, pedagang di Solo;
- Haji Ahmad Soejoeli di Sampang;
- Said Kasan bin Semid di Madura;
- Raden Joyo Sudiryo, redaktur *Tjahaja Timoer* di Malang;
- Kasan Djajadiningrat, pedagang di Serang;
- RMA Soerjodipoetro di Bondowoso;
- DK Ardiwinata, pegawai Departemen Pendidikan di Batavia;
- RM Soerjopranoto di Wonosobo;
- R. Tjokrosoedarmo di Surabaya; dan
- Muhammad Samin di Medan.

Sebagai anggota kehormatan diangkat empat pendiri SI di Solo, yakni:

- Mas Atmodimedjo;
- Mas Kartotaroeno;
- H. Abdoelradjak; dan
- Mas Soemowirdjojo.

Sebagai penasehat untuk urusan agama, diangkat Haji Achmad Dahlan dari Yogyakarta, yang juga menduduki sebagai penghulu kepala di Yogyakarta.¹²

Dalam rapat itu juga diperdebatkan kedudukan organisasi, yang saling tarik menarik antara di Yogyakarta atau di kota Solo sebagai kelahiran pendiri SI, Haji Samanhoedi. Banyak di antara peserta rapat yang menyampaikan pendapatnya bahwa kota Solo tidak layak dijadikan tempat kedudukan organisasi pusat dan pemerintah kolonial juga tidak menghendaki kota Solo dipilih menjadi tempat kedudukan pengurus CSI.

Mengenai pembahasan anggaran dasar, peserta rapat tidak berhasil

12 Lihat *Bataviaasche Nieuwsblad*, 24 April 1914, lembar ke-3.

merumuskan suatu pembaharuan pasal-pasal di dalamnya. Namun, akhirnya pasal-pasal terakhir dari rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berhasil disempurnakan.

Penasehat Haji Achmad Dachlan menjelaskan pandangannya mengenai masalah penyimpanan uang di bank dengan mendapatkan sejumlah bunga uang tertentu. Ia berpendapat bahwa orang tidak boleh bertindak bertentangan dengan aturan agama, karena membungakan uang dengan uang itu dilarang oleh agama. Harus dicari cara lain, yaitu dengan membuat kesepakatan dengan pihak bank bahwa orang menitipkan uangnya di bank dengan syarat bahwa mereka kemudian akan menerima kembali dalam jumlah yang lebih besar. Dengan menanamkan uang pada bank, tidak ada masalah terhadap keinginan akan uang itu, kecuali apa yang oleh orang Arab dicap dengan nama “mikro”.

Penjelasan Haji Achmad Dachlan didengar dengan penuh perhatian oleh para peserta rapat. Seorang ulama lain dari Yogyakarta melakukan serangan keras dan menjelaskan pandangannya bahwa menerima bunga bank sama seperti “riba”. Pandangan itu disambut dengan komentar oleh seorang haji lainnya, yang mengajukan pertanyaan kepada penasehat yang tidak langsung dijawab oleh penasehat, tetapi dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan itu. Hal ini sempat membuat gaduh para hadirin, yang kemudian diarahkan oleh ketua sidang, sehingga peserta rapat dapat digiring pada persoalan yang telah lama diselesaikan oleh orang-orang Arab dan para haji. Ketua sidang juga meminta agar perdebatan sengit ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang berpikiran buruk, tetapi justru perbedaan pendapat itu akan mampu untuk memberikan pandangan yang sangat berguna bagi perkembangan SI di masa mendatang.

Utusan dari Serang diberikan kesempatan untuk berbicara. Ia menyampaikannya dalam bahasa Melayu tentang organisasi SI. Ia menyampaikan bahwa organisasi SI merupakan organisasi yang aneh sekali. Rakyat kecil, si Kromo, misalnya, tidak pernah berfikiran untuk membentuk organisasi. Namun, setelah Haji Samanhoedi dan Tjokroaminoto hadir

untuk menyadarkan mereka, akhirnya dalam jumlah besar mereka bergabung dengan organisasi ini. Para sukarelawan ini tidak memiliki latar belakang agama sama sekali. Namun ditegaskan bahwa organisasi ini diibaratkan dengan pendirian sebuah rumah, dan pendirian ini adalah temboknya, sementara penduduk adalah semennya. Dijelaskan bahwa organisasi SI ini memiliki beberapa tujuan, a.l:

1. Memperhatikan masalah-masalah agama;
2. memperhatikan kehidupan atau kondisi ekonomi;
3. Mengangkat derajat bangsa.

Oleh karena itu, ditegaskan oleh pembicara dari Serang ini bahwa dalam upaya yang ketiga (mengangkat derajat bangsa), para pemimpin harus memperhatikan hal itu, sehingga tujuannya adalah membawa organisasi ini bagaikan kapal yang berlabuh di pelabuhan yang aman. Untuk mencapai tujuan itu perlu waspada. Apabila kegagalan dihadapi oleh organisasi ini, kepercayaan anggota kepada organisasi ini dan para pemimpinnya akan lenyap dan sangat sulit untuk menemukannya kembali. Ia menganalogikan buku yang berjudul *Priangan* karya Dr. De Haan yang menguraikan bagaimana kepercayaan penduduk kepada kompeni ini bisa hilang akibat tanaman wajib kopi. Kepercayaan itu belum pulih kembali walaupun sudah berlangsung selama ratusan tahun kemudian. Ini suatu bukti bahwa untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang itu sangat sulit.

Selanjutnya pembicara ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan organisasi ini tergantung pada para pengurus. Ketika semangatnya redup, ketika bertindak bodoh, maka organisasi akan hancur. Dikatakan bahwa Pengurus SI cabang Serang telah memerintahkan kepadanya untuk mengusulkan agar dua anggota pengurus utama menerima gaji, yakni ketua dan Sekretaris-Bendahara. Para pemimpin semua organisasi juga harus memikirkan dirinya dan keluarganya. Jika mereka berkarya untuk organisasi dan mengabaikan pekerjaan dirinya, maka akan terabaikanlah urusan keluarganya dan dirinya. Namun sebaliknya, bila pengurus mementingkan

keluarga dan dirinya maka akan mengorbankan bahkan menghancurkan kepentingan organisasi. Sementara itu, apabila pengurus mendapatkan cukup hasil dari pekerjaan itu, ini juga berarti kemajuan bagi organisasi. Pembicara telah mendirikan dan memimpin banyak organisasi, tetapi kembali semuanya tidak bisa bertahan karena pengurus tidak terikat pada organisasi. Berkarya demi organisasi sebenarnya merupakan pekerjaan pengurus tempat mereka bisa hidup, yang membentuk pengurus. Pembicara menunjukkan contoh seperti Indische Bond, yang meredup karena pengurusnya tidak digaji, dan pada Suikerbond yang berjalan baik karena pengurusnya menerima bayaran.

Di melontarkan harapan agar hadirin bisa menyampaikan pandangannya tentang hal ini dengan menyatakan bahwa ini merupakan masalah rumah tangga organisasi, dan orang harus memperhitungkan penetapan gaji dan anggota pengurus yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan gaji itu. Misalnya cabang Serang memiliki 4.000 orang anggota dan setiap bulan menyetorkan f 400 ke dalam kas. Kini mereka harus memilih seseorang yang bisa menerima lebih sedikit upah daripada jumlah itu. Pembicara sendiri tidak bisa berbuat banyak karena memiliki kebutuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, dia membuka jalan bagi seseorang yang bersedia untuk menerima uang itu. Pembicara menegaskan hal yang sama bagi komite sentral yang harus memegang kepemimpinan lokal akan menerima 10% dari penghasilan bruto lewat komite sentral ini. Organisasi ini saat menyusun anggarannya harus memperhitungkan pengeluaran dan harus menetapkan selama tahun ini dalam anggaran yang harus disiapkan, antara lain: berapa untuk komite sentral, berapa untuk pengurus, berapa untuk sekolah, dan sebagainya.

Pembicara kemudian juga menyatakan bahwa anggaran dasar juga membahas tentang masalah ekonomi. Untuk itu dibutuhkan modal dan mereka hanya bisa memperoleh modal itu lewat kerjasama. Apabila kas bisa membayar, mereka setiap bulan harus menitipkan sejumlah uang tertentu pada bank. Janganlah mengharapkan bunganya tetapi membiarkan agar uang itu terus bertambah, demikian ucapannya. Jika kas tidak mampu membayar,

maka mereka harus meminta sejumlah tertentu dari setiap anggota yang bisa membayarnya. Apa yang akan dilakukan dengan uang ini belum bisa dikatakan karena baru setelah beberapa tahun akan terkumpul sejumlah besar uang dan mungkin pengurus akan ribut, karena mempunyai rencana yang berbeda.

Ketika berbicara mengenai keinginan Gubernur Jenderal yaitu bukan ada suatu organisasi melainkan banyak organisasi lokal di mana-mana, pembicara menyatakan bahwa suatu organisasi bisa mengikuti contoh organisasi lain dalam banyak hal. Dia mencontohkan bagaimana orang-orang di Serang bisa berupaya untuk mendapatkan kontribusi secara teratur dari 4.000 orang. Anggota yang bisa membayar biasanya akan memberikan kontribusinya; sementara orang-orang miskin sekali dalam sebulan akan pergi ke makam dan di sana akan memanjatkan doa bagi arwah keluarga anggota yang kaya. Untuk itu kontribusi mereka akan dibayarkan oleh anggota yang kaya. Organisasi harus membantu anggota dan anggota harus membantu organisasi.¹³

Pertemuan SI selanjutnya direncanakan diselenggarakan pada 21 Juni 1914 di kota Solo untuk membicarakan tentang polemik antara rencana Dr. Rinkes yang didukung oleh Tjokroaminoto dan sanggahan seorang Hakim yang dimuat di dalam surat kabar *Oetoesan Hindia*. Polemik ini demikian hebat, sehingga Asisten Residen Solo merasa khawatir, karena pertemuan tanggal 21 Juni 1914 itu akan dihadiri sekitar 800 orang. Oleh karena itu, ia menasehatkan dengan memberikan perintah secara halus agar menunda pertemuan yang bakal menghebohkan itu hingga Dr. Rinkes kembali dari cutinya dari luar negeri serta menunggu kembalinya Tjokroaminoto dari Borneo.¹⁴

Dalam perkembangan SI yang demikian pesat, penerbitan koran *Oetoesan Hindia* juga mengalami peningkatan omset. Cabang-cabang SI di daerah juga meminta untuk berlangganan koran yang merupakan “teropet” SI ini. Redaksi *Oetoesan Hindia* telah memuat dua artikel yang

13 Lihat *Bataviaasche Nieuwsblad*, 25 April 1914 lembar ke-2.

14 Lihat *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, edisi 6 Juli 1914 lembar ke-1.

isinya menyerang pandangan Tuan Van Geunz, wartawan senior *Soerabaja Handelsblad*.. Ia menuduh bahwa redaksi *Oetoesan Hindia* sangat berbahaya bagi masyarakat di Hindia Belanda. Tuduhannya adalah sbb:

1. *Oetoesan Hindia* telah mengkritik dan mencela tindakan Gubernur Jenderal;
2. Menunjukkan dengan jelas kebencian penduduk bumi putera terhadap pemerintah;
3. Sengaja memuat pidato yang bersifat provokatif yang menghina wartawan boemi putera.

Tuan van Geunz dalam tuduhannya itu menyatakan bahwa “sekelompok pembual” telah mempengaruhi redaktur *Oetoesan Hindia*.

Kepergian wartawan van Geunz dari *Soerabaja Handelsblad* menjadi alasan bagi kaum muda untuk mengungkapkan kekesalan mereka terhadap wartawan ini yang dimuat dalam *Oetoesan Hindia* edisi Sabtu 6 November 1915. Dalam edisi itu dituliskan bahwa lima belas tahun lamanya ia menikmati madu Hindia Belanda dan dia menjadi tenaga ahli dalam mencegah kaum bumi putra yang ingin maju. Ia digaji oleh sebuah perusahaan besar dan ia melakukan hal itu untuk melindungi kapitalis.

Dalam kaitannya dengan SI, semakin luas pengaruh organisasi itu, semakin besar pula tindakan pemerintah untuk melindungi organisasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa SI tidak berbahaya bagi pemerintah, akan tetapi berbahaya bagi kaum kapitalis swasta. Secara jujur dikatakan bahwa redaksi tidak memahami apa yang dimaksudkan sebagai kapitalis swasta tersebut. Dalam bahasan itu disampaikan sinyalemen bahwa yang dimaksudkan sebagai kaum kapitalis adalah orang-orang atau pengusaha yang memiliki modal atau uang, karena bagi kaum muda, modal itu adalah uang. Disinyalir bahwa tuduhan yang disampaikan merupakan propaganda sosialisme. Hal ini muncul karena sosialisme bertentangan dengan kepentingan pemodal dan pekerja, karena bagi kaum kapitalis, modal adalah faktor produksi yang dimiliki oleh orang swasta.

Namun, hal itu sudah sudah dibahas oleh Tjokroaminoto selaku pengurus pada acara Kongres SI di Surabaya yang telah menguraikan bentuk dan usaha organisasi ini. Bahkan, ia juga menegaskan bahwa organisasi ini tidak hanya memiliki tujuan ekonomi tetapi juga memiliki tujuan sosial.

Tentang kongres SI di Surabaya, koran *de Locomotief* mengabarkan bahwa sehari sebelum dilaksanakannya kongres, pengurus SI telah mengadakan pertemuan pengurus di rumah Haji Thayeb yang dihadiri wakil dari seluruh cabang di Hindia Belanda. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Asisten Residen Surabaya Voet dan beberapa pejabat Eropa lainnya. Rapat di rumah Haji Thayeb tersebut dibuka oleh Tjokroaminoto pada pukul 10 pagi. Ia melaporkan bahwa anggota organisasi itu telah mencapai 500 ribu anggota yang tersebar di 92 cabang. Ia juga menyatakan bahwa rencana kunjungan ke Gresik terpaksanya dibatalkan karena kurangnya kendaraan yang tersedia.

Hari berikutnya, kongres yang diselenggarakan di Taman Kota dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi seperti Komisaris Kepala, Asisten Residen, Bupati, dan beberapa orang Eropa dan orang Tionghoa. Kongres dibuka oleh Tjokroaminoto dengan mengucapkan selamat datang kepada para wakil dari seluruh cabang dan tamu-tamu terhormat. Seperti biasa, pengurus pusat organisasi ini menguraikan tujuan SI. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Nyonya Walbrink yang menyambut baik pendirian sebuah HIS swasta yang diperuntukkan bagi penduduk yang dibantu oleh orang-orang Eropa. Pidatonya memperoleh tepuk tangan yang meriah dari peserta kongres. Selanjutnya disambung dengan sambutan Tuan van Beugen yang menguraikan tentang tujuan kerja organisasi ini yang menekankan pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih baik.

Ditegaskan bahwa organisasi akan menjadi kuat apabila anggotanya juga kuat. Oleh karena itu, ditegaskan pentingnya kerjasama yang lebih baik antara organisasi dan pemerintah, karena organisasi ini dibentuk demi kepentingan penduduk. Wakil dari Bandung mengkritik kebiasaan

jelek penduduk bumi putera yang menyukai minuman beralkohol. Melalui kongres ini dimohon bantuan para priyayi untuk mengajak penduduk untuk meninggalkan kebiasaan penduduk ini. Wakil utusan orang Tionghoa mengharapkan agar kerjasama antara orang Tionghoa dan bumi putera bisa terjadi lebih baik. Peranakan orang Tionghoa juga memiliki keluarga bumi putera, mereka diturunkan dari ayah Tionghoa, dan ibu bumi putera dan tidak selalu saling bertikai namun harus selalu berjalan seiring.

Pidato yang berisi permohonan ini ditanggapi oleh Mas Dwidjo Sewojo dan Tjokroaminoto. Dwidjo mendapatkan dukungan dari para peserta kongres ketika ia menginginkan agar orang Tionghoa menunjukkan bukti kerukunan itu melalui tindakan dan tidak hanya sekadar slogan saja. Hal itu dikuatkan oleh ungkapan Tjokroaminoto yang menghendaki kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat.

Pembicara terakhir adalah Raden Achmad yang melontarkan harapan bahwa di masa mendatang kerjasama antara penduduk akan terjadi seperti tercermin dalam kongres ini, di mana para wakil organisasi dari semua cabang berkumpul bersama untuk membicarakan tujuan itu.

Pada acara Kongres di Surabaya, semua hadirin sepakat nama SI Pusat (Centraal Comite Sarekat Islam) yang menjadi cikal bakal SI Pusat diubah namanya menjadi *Centraal Sarekat Islam* (CSI) atau disebut sebagai SI Pusat. Ada pun susunan Pengurus Besar CSI adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Tjokroaminoto
Anggota	:	Abdoel Moeis
		W. Windoamiseno
		Hadji Agoes Salim
		Sosrokardono
		Soerjopranoto
		Alimin Prawirodirdjo.

Perjuangan Menuntut Status Hukum CSI

Setelah selesainya Kongres SI di Surabaya, direncanakan SI akan menyelenggarakan Kongres Nasional yang I yang akan diselenggarakan di Bandung. Menurut rencana kongres akan diselenggarakan pada 17-24 Juni 1916. Oleh karena itu beberapa program yang telah dicanangkan seusai kongres ini akan diperjuangkan dengan gigih terutama tentang pendirian organisasi SI di daerah dan pengakuan status hukum SI dari pemerintah kolonial.

Koran SI *Oetoesan Hindia* memuat aktivitas pemimpin SI Tjokroaminoto dalam kunjungannya ke berbagai cabang SI di Borneo. Mereka disambut secara besar-besaran. Dalam pidato yang lamanya 1.5 jam, Tjokroaminoto menjelaskan tentang maksud dan tujuan Pergerakan SI secara umum. Kondisi ini dikritik oleh S.D. Prawiro dalam tulisannya di *Darmo Kondo* bahwa organisasi SI lebih banyak kegiatannya berupa berbicara dan berapat. Pemimpin SI hadir ke pulau Borneo atas usulan cabang SI Kota Waringin, Sampit, Pleihari, Pegatan dan Kotabaru. Mereka telah mengirimkan uang untuk mendirikan dan membentuk NV Perusahaan Dagang SI Borneo dengan tujuan memajukan perdagangan dan mengelola percetakan. Karena jalannya tidak terlalu lancar, pimpinan CSI diundang ke pulau itu. Tjokroaminoto memanfaatkan kunjungan itu untuk menjelaskan kepada anggotanya bahwa kepemilikan sebuah usaha merupakan kebutuhan mendesak bagi SI Borneo, karena usaha ini akan maju dengan pesat pengurus usaha ini dapat menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang dianggapnya perlu. Pengurus cabang Borneo juga dapat menjawab serangan yang ditujukan kepada SI, apabila mereka memiliki organ tersendiri yang menerbitkan majalah atau surat kabar. Tjokroaminoto mendorong organisasi ini di Borneo agar menyisihkan sebagian dana kas untuk membeli saham perusahaan. Dari hasil pengarahan itu, SI dari berbagai cabang di Borneo berhasil mengumpulkan dana sebesar f4.000. Mengetahui jumlah yang cukup besar dana yang terkumpul, pimpinan CSI Tjokroaminoto mengharapkan

organisasi lain akan menyisihkan dana bagi kepentingan kas, yang dapat digunakan untuk membeli mesin-mesin yang diperlukan atau untuk memenuhi kebutuhan peralatan lainnya. Seperti apa yang dikatakannya, Tjokroaminoto berjanji akan melakukan propaganda yang sama di pulau Sumatera.

Sehubungan dengan status hukum yang sedang diperjuangkan oleh Tjokroaminoto tentang Pengurus CSI (*Central Sarekat Islam*), pada 23 Desember 1915 pengurus CSI telah mengadakan audiensi dengan Gubernur Jenderal. Pidato pada pertemuan tersebut dimuat secara lengkap di *Oetoesan Hindia*. Tujuan utama audiensi itu ke Buitenzorg untuk memohon status badan hukum bagi CSI secara pribadi, agar dapat status hukum CSI dapat segera disahkan oleh Gubernur Jenderal. Berdasarkan laporan dari *Oetoesan Hindia*, pengurus CSI menyampaikan hal-hal sbb:

1. Penjelasan tentang organisasi CSI;
2. Ucapan terima kasih kepada para pejabat yang telah memberikan bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada CSI;
3. Tindakan sewenang-wenang dan tidak adil yang dialami oleh organisasi CSI;
4. Laporan tentang organisasi CSI;
5. Keluhan dan usulan pemecahan masalahnya;
6. Permohonan kepada Gubernur Jenderal;
7. Keputusan yang diambil oleh CSI sehubungan dengan permintaan informasi kepada Gubernur Jenderal.

Ucapan terima kasih disampaikan oleh Tjokroaminoto kepada beberapa orang Eropa yang telah membantu dan mendukung keberadaan SI seperti Dr. D.A. Rinkes. Bagi Tjokroaminoto dari mana pun bantuan itu, apakah dari suara hatinya atau pun dari desakan orang lain, Tjokroaminoto tidak peduli. Dia hanya mengungkapkan fakta yang dia lihat dan dia rasakan. Tentang Mosi dan usul, Tjokroaminoto melihat bahwa pertanyaan Gubernur Jenderal tentang apa manfaat yang akan

diberikan oleh SI, yang penting bagi Tjokroaminoto adalah menguntungkan bagi semua anggota dan demi kepentingan umum. Tjokroaminoto agak menyesal sehubungan dengan audiensi tersebut karena ia belum siap untuk memberikan jawaban. Ia harus menunggu hasil rapat CSI yang baru akan diselenggarakan pada Mei 1916. SI berusaha untuk mematuhi ajaran agama yang lebih cermat dan ketat, seperti yang dituntut oleh agama Islam. Hal ini disadarinya bahwa ribuan atau mungkin bahkan jutaan orang bumi putera tidak pernah merasakan manisnya buah pendidikan untuk perkembangan baik jiwa maupun rasanya, sehingga SI dapat membawa kesatuan di antara anggotanya khususnya masyarakat bumi putera. SI mendorong semangat cinta sesama, membuka mata bagi hak azasi manusia yang sama-sama diperjuangkan oleh penguasa. SI ingin berusaha mewujudkan apa yang dari pihak kaum bumi putera juga semakin banyak ditinggalkan (lihat *Het nieuws van den dag 16 Desember 1915*). Selain itu tentang “hormat” seperti telah dimuat dalam *Pantjaran Warta* 12 Januari 1916 bahwa masih terjadi seorang *bebau* (pengurus desa) yang datang menyetorkan pajak kepada bendahara harus duduk di tanah. Tjokroaminoto mempertanyakan apakah para pejabat telah melupakan surat edaran tentang “hormat” ini? Tidak bisakah disediakan bangku untuk para *bebau* ini? Mengapa mereka bukan dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Mengapa mereka harus menahan sakit ketika duduk di atas tanah yang dingin. Sungguh tidak masuk akal, tambah Tjokroaminoto, bahwa apabila orang Eropa membayar pajak, mereka menerima surat bukti dari bendahara umum di Madiun. Namun mengapa si Kromo harus menerima perlakuan yang berbeda, dan harus merasa

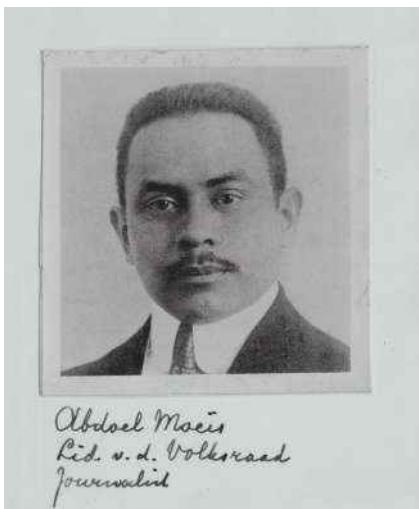
sakit dan tidak ditawari untuk duduk di bangku.¹⁵ Selanjutnya Tjokroaminoto melanjutkan bahwa SI menunjukkan kepada kita semua hak-hak yang bisa dituntut dari pemerintah seperti hak memperoleh bangku untuk duduk di kantor Bendahara Umum di Madiun.

Perpecahan dalam tubuh SI

Redaksi *Kaoem Moeda* telah menuduh Goenawan melakukan suatu tindakan yang tidak sah. Ada sesuatu yang perlu dicatat dalam sejarah SI, tulis Abdoel Moeis sebagai Redaktur kepala *Kaoem Moeda*. Redaktur telah menerima salinan surat edaran yang dibuat Goenawan. Surat edaran itu ditulis oleh pengurus SI Jawa Barat yang ditujukan kepada pengurus SI yang tidak dia sebutkan namanya. Dalam surat edaran itu Goenawan memberitahukan bahwa pengurus SI Jawa Barat pada 30 Januari 1916 telah mengadakan rapat umum di Batavia yang dihadiri oleh wakil dari semua cabang di Jawa Barat. Adapun acaranya adalah membahas hubungan antara SI Lokal dan CSI. Goenawan mendesak agar setiap SI lokal mengirimkan seorang wakil. Hal ini akan memancing perhatian pengurus SI lainnya karena mereka sering menuduh bahwa pimpinan mereka sering menggelapkan uang SI. Albdoel Moeis menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh Goenawan tidak benar dengan berbagai pertimbangan berikut:

1. Ketua CSI Tjokroaminoto tidak mengetahui apa-apa tentang rapat ini. Hingga saat ini Goenawan tidak pernah berkonsultasi dengan dia;
2. Surat edaran itu ditandatangani oleh pengurus SI Jawa Barat dan bukan wakil Ketua CSI;
3. Sampai sekarang Bandung tidak menerima undangan sama sekali untuk menghadiri rapat itu;

15 *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 18 Januari 1916, lembar 1.



4. Apabila tidak salah, Abdoel Moeis menurut *Pantjaran Warta*, tidak menerima berita apa pun tentang rapat itu;

Abdoel Moeis menyampaikan alasannya:

1. Apabila Goenawan menyadari bahwa pemimpin SI adalah dirinya, maka Abdul Moeis memohon agar Goenawan membantah apa yang dikatakan sebelumnya bahwa Goenawan adalah pemecah kesatuan yang akan membiarkan SI runtuh;
2. Goenawan menyebut bahwa sebagai pengurus Si Jawa Barat. Menurut Abdoel Moeis, semua cabang Si di Jawa Barat merupakan anggota CSI yang berkedudukan di Solo, yang pengurus hariannya berkedudukan di Surabaya, yang ketuanya adalah Tjokroaminotot dan yang wakilnya adalah Goenawan. Tindakan umum tidak boleh diambil oleh wakil ketua tanpa persetujuan dari pengurus pusat, kecuali tujuannya adalah memicu perpecahan;
3. Mengapa Bandung tidak diundang dalam rapat tersebut? Apakah Bandung tidak termasuk cabang SI Jawa Barat? Atau mungkin cabang SI Bandung tidak mau uangnya diurus oleh Goenawan.
4. *Pantjaran Warta* sama sekali tidak menyebut tentang rapat yang diadakan. Mungkin saja rapat ini memiliki tujuan lain.

Selanjutnya Abdoel Moeis sepakat dengan pengurus cabang SI Bandung agar berhemat dengan dana SI dan tidak mengeluarkan biaya untuk menghadiri rapat-rapat yang tidak sah dan tidak perlu.

Dari kondisi ini dan situasi di atas, *Pantjaran Warta*, tidak memasukkan sama sekali laporan tentang audiensi pengurus CSI dengan Gubernur Jenderal di Buitenzorg, sementara seluruh surat kabar di Hindia Belanda mengutip dari *Oetoesan Hindia*. Abdul Moeis mengatakan dengan tegas bahwa tujuan Goenawan adalah menjatuhkan Tjokroaminoto, pemimpin SI yang sah.

Seperi telah disebutkan di atas bahwa Goenawan sebagai pengurus SI Jawa Barat telah mengirimkan undangan kepada sejumlah cabang lokal SI di Jawa Barat dan Sumatera untuk menghadiri rapat umum di Batavia dalam membahas hubungan antara SI lokal dan CSI.

Menurut *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie* memuat apa yang dibahas dalam rapat tersebut terbukti menuju arah mana yang diinginkan oleh Goenawan. Dia merasa tidak senang kepada wakil ketua CSI. Seperti apa yang tertulis dalam *Kaoem Moeda*, redaktur kepala harian ini, Abdoel Moeis ikut menghadiri rapat itu, tetapi bukan sebagai tamu undangan, mengingat bahwa ia adalah wakil ketua SI Bandung. Ia juga tidak menerima undangan. Abdoel Moeis datang sebagai pengamat biasa setelah memperoleh izin dari Goenawan, dengan syarat bahwa sebagai wartawan, ia dilarang keras untuk memuat dalam *Kaoem Moeda* apa yang dibahas dalam rapat itu, karena wartawan lainnya juga tidak diundang.

Abdoel Moeis mematuhi syarat yang diberikan oleh Goenawan, sehingga ia tidak memuatnya dalam koran itu. Akan tetapi ketika beberapa hari kemudian SI Bandung mengadakan rapat, Abdoel Moeis beberapa saat kemudian menulis di koran itu. Ia membuat laporan tentang apa yang didengar dan dilihatnya dalam rapat itu dan dalam rapat di Batavia, karena ia berangkat atas biaya organisasi. Dari keterangan tersebut, seluruh laporan dimuat dalam koran *Kaoem Moeda*. Dengan demikian, para pembaca pun tahu apa yang dimaksudkan sebagai rapat rahasia di Batavia itu.

Dari keterangan Abdoel Moeis terbukti bahwa Goenawan membuka rapat dengan menjelaskan tujuan CSI, kemudian ia sendiri yang mengalungi bunga di lehernya. Diumumkannya bahwa dirinya hanya sebagai wakil

ketua SI tetapi sangat berjasa terhadap SI dengan mendirikan cabang-cabang di daerah baik di Sumatera maupun Borneo, dan dalam mengelola uang yang diterimanya. Akhirnya dari anggaran dasar CSI tampak bahwa ia tidak memiliki wewenang apa pun sebagai wakil ketua SI Bandung. Ia kemudian meminta pendapat hadirin dengan mengatakan: “*Sekarang saja lihat boenyi Statuten CSI, kok saya sebagai vice president sadja tida ada kekoeasaan apa-apa. Saja minta timbangan toean-toean yang hadir.*” Demikian ucapannya.

Setelah ia mengucapkan hal tersebut, Hasan Djajadiningrat, wakil CSI yang tinggal di Serang maju ke depan dan mengatakan bahwa rapat di Batavia ini diselenggarakan atas permohonan tiga orang, yakni: Raden Notohatmodjo (Ketua SI di Batavia), Ketua SI Bengkulu, dan dia sendiri. Tujuan pembicara dan Raden Notohatmodjo adalah untuk mencegah agar tidak terjadi perpecahan di tubuh pengurus, terutama antara Goenawan dan Tjokroaminoto. Hal ini diungkapkan oleh Hasan Djajadiningrat bahwa telah terjadi konflik antara Goenawan dan Tjokroaminoto. Oleh karena itu, masih menurut Hasan bahwa konflik ini bisa diselesaikan secara damai dan bisa dilakukan tindakan untuk membersihkan Goenawan dari tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Namun, dengan rapat ini terbukti bahwa rapat ini telah digiring untuk bergerak ke arah lain.

Hasan Djajadiningrat telah meminta untuk mengundang Tjokroaminoto dan Haji Samanhoedi agar dapat menghadiri rapat ini. Namun kenyataannya yang hadir hanya Haji Samanhoedi. Oleh karena itu menurutnya, rapat ini tidak akan membawa hadirin pada tujuan yang akan dicapai. Reaksi spontan muncul dari Haji Mohammad, ketua cabang SI Bengkulu. Ia menyampaikan bahwa secara pribadi telah meminta permohonan untuk penyelenggaraan rapat ini. Namun, ia sama sekali tidak mengetahui konflik apapun yang terjadi antara Goenawan dan Tjokroaminoto. Haji Mohammad menegaskan bahwa yang ia inginkan dari rapat ini adalah untuk mengambil suatu keputusan yang belum diputuskan pada kongres di Surabaya. Ia kembali menegaskan bahwa

dirinya hanya mengakui Goenawan sebagai bapak SI. Meskipun pengurus SI meminta uang untuk diberikan kepada orang lain, ia hanya percaya kepada Raden Goenawan yang diketahuinya telah menunjukkan jasa yang tinggi kepada penduduk Bengkulu.

Suasana rapat menjadi semakin panas. Muncullah pengurus SI cabang Kotabumi. Ia menjunjung tinggi sifat-sifat dan jasa-jasa Goenawan. Dengan demikian, apabila yang diduga pembicara itu benar, maka dia menilai bahwa Goenawan adalah sosok yang suci. Saat menyampaikan hal tersebut, seorang haji utusan dari Bintuhan atau Kroe memuji Goenawan dan berkata bahwa Goenawan adalah pelindung panji SI. Demikain kata-katanya: *"Pajoeng pandji SI ada terpegang oleh Paduka Toewan Raden Goenawan"*. Wakil SI Ciamis menyela dan berkata dengan rasa heran bahwa mendengar keterangan dari Hasan Djajadiningrat yang diakui sendiri oleh Goenawan bahwa sejak lama antara Goenawan dan Tjokroaminoto telah terjadi konflik. Dia meminta agar rapat di Batavia ini dapat mendamaikan antarkedua tokoh ini, agar ketenangan dan kedamaian SI tidak terganggu.

Keberpihakan ketua SI Bengkulu terhadap Goenawan membawanya mengeluarkan usulan bahwa rapat di Batavia ini agar membentuk SI Pusat yang baru dengan Raden Goenawan sebagai ketuanya. Secara aklamasi yang hadir dalam rapat itu mengusulkan untuk dibentuk SI Pusat dengan Goenawan sebagai ketuanya.

Abdoel Moeis sebagai komisaris CSI dan wakil ketua SI Bandung angkat bicara. Ia mengatakan bahwa CSI belum memutuskan apa pun dalam kaitannya dengan pengelolaan uang. Usulannya adalah agar rapat ini hanya memilih seorang bendahara untuk mengelola kas pusat, seperti pada kongres yang diselenggarakan di Surabaya pada 1915. Ia mengatakan bahwa rapat ini akan memutuskan suatu ketidakjujuran. Ditegaskan bahwa ketidakjujuran dalam rapat ini adalah ketika beberapa anggota CSI mengadakan rapat di luar persetujuan dan pengetahuan dari anggota pengurus yang lain.

Setelah Abdoel Moeis selesai berbicara, beberapa pembicara sebelumnya

bangkit dan tetap meminta untuk membentuk SI Pusat yang baru tanpa ikut campur tangan dalam konflik antara Goenawan dan Tjokroaminoto. Utusan dari Kotabumi yang merupakan ipar dari Goenawan menyatakan menolak isi pidato Abdoel Moeis dan tetap menghendaki segera dibentuk SI Pusat yang baru. Dalam suasana yang ramai tersebut, Gunawan mendekati Haji Samanhoedi, kemudian disampaikan kepada Goenawan bahwa ketika pengurus cabang SI Jawa Barat dan Sumatera menghendaki, mereka bisa membentuk SI Pusat. Meskipun hanya tiga suara, telah dipilih pengurus baru dengan nama SI Pusat Batavia, yang terdiri atas:

- Haji Samanhoedi Ketua
- Goenawan Wakil Ketua sekaligus kasir
- Partondo Sekretaris dan beberapa yang lain
 yang menjabat sebagai komisaris.

Setelah pembentukan pengurus SI Pusat Batavia, Goenawan membacakan pertanggungjawaban kas, seperti yang dikatakannya untuk membersihkan diri dari tuduhan dari orang-orang yang cemburu terhadap dirinya, yang membuktikan bahwa di dalam kas ada saldo sebesar f 8.146. Dengan demikian telah terjadi suatu perpecahan dalam tubuh SI.

Dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie* tanggal 26 Februari 1916 dimuat tinjauan tentang perpecahan di tubuh SI. Sebelum sampai pada permasalahan yang sebenarnya terjadi, hendaknya dipahami terlebih dahulu penjelasan singkat agar bisa dipahami persoalan yang sebenarnya terjadi dan dapat memberikan penilaian yang objektif.

Haji Samanhoedi yang belum lama ini diangkat menjadi Ketua SI Pengurus SI Jawa Barat, merupakan pribadi yang berfikir untuk menghidupkan SI. Motivasi apa yang mendorongnya tidak ada yang tahu, akan tetapi diduga menurut koran tersebut yang menjadi motivasi adalah diperolehnya kekuasaan, kedudukan dan sumber pendapatan. Pada mulanya direncanakan

hanya akan membentuk sebuah organisasi besar untuk seluruh Jawa, bahkan seluruh wilayah Hindia Belanda, dengan Haji Samanhoedi sebagai ketuanya dan Tjokroaminoto sebagai wakil ketua Pengurus CSI. Namun, permohonan untuk memperoleh status badan hukum organisasi ditolak oleh pemerintah dengan pemberitahuan bahwa pemerintah bermaksud memberikan status badan hukum kepada cabang-cabang di daerah. Haji Samanhoedi dianggap sebagai Bapak Sarekat Islam. Namun, meskipun demikian, dalam pengurus pusat berikutnya dia tidak diangkat sebagai ketua maupun wakil ketua, atau tidak sama sekali sebagai pengurus lainnya. Orang hanya menjadikannya sebagai pelindung. Semula hal ini terdengar aneh, namun setelah rapat di Batavia yang diselenggarakan oleh para penentangnya, persoalannya menjadi semakin jelas. Pada saat itu Haji Samanhoedi (Ketika Goenawan menghadapnya untuk meminta pendapat), memberitahukan bahwa dia tidak menguasai bahasa Melayu. Dengan demikian ia hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa, seperti yang dilakukannya selama ini. Kini seorang Jawa yang tidak bisa berbahasa Melayu, tidak akan bisa maju. Oleh karena itu, orang akan mengalihkan pilihannya kepada orang lain yang bisa berbahasa Melayu. Selanjutnya dalam rapat SI pertama di kota Solo, Haji Samanhoedi akan menjadi pengurus pusat, akan tetapi jabatan itu kemudian diserahkan kepada Tjokroaminoto.

Haji Samanhoedi yang memiliki banyak pengaruh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kini terpilih sebagai pengurus pusat untuk Jawa Barat. Begitu pula Goenawan, yang selalu mengeluh sebagai wakil ketua pengurus pusat, dia tidak memiliki kewenangan apa pun. Dengan kondisi Haji Samanhoedi sebagai Ketua Umum dan Goenawan sebagai Wakil Ketua Umum SI, Jawa Barat memiliki lebih banyak kekuasaan, ditambah lagi ia juga diangkat sebagai kasir.

Apa yang selama ini menjadi teka-teki adalah bahwa *Pantjaran Warta*, organ SI dengan Goenawan sebagai redaktur kepalanya, tidak pernah memuat

rapat SI di Batavia. Ia sendiri telah mengirim salinan notulen rapat ke *Sinar Djawa*, organ SI di Semarang. Dalam notulen yang dikirimkan ke Semarang itu banyak yang tidak disebutkan. Seperti pemberitahuan tentang SI Batavia dan Serang, dua di antara tiga cabang yang meminta diselenggarakannya rapat tersebut. Kedua cabang tersebut sebenarnya meminta diselenggarakannya rapat untuk mencari jalan keluar dengan maksud mendamaikan antara Goenawan dan Tjokroaminoto.

Dalam notulen itu dikatakan oleh Goenawan bahwa rapat itu bukan bertujuan untuk menciptakan perpecahan akan tetapi untuk menyelesaikan urusan pusat, yakni untuk lebih memperhatikan kepentingan cabang lokal yang letaknya jauh dari kepengurusan Pusat yang berada di kota Surabaya. Dia memastikan bahwa tidak ada perpecahan antara Batavia dan Surabaya dan jika perlu Batavia akan membantu Surabaya dengan uang seperti dahulu.

Abdoel Moeis menulis dalam *Kaoem Moeda*, bahwa apa yang dikatakan sangat indah. Permainan kata-kata mudah dilakukan. Mengapa seperti tujuan semula, sebelumnya pengurus pusat tidak diberi tahu. Kini terbukti terutama dari pengakuan Goenawan terakhir bila dia berpendapat bahwa seluruh organisasi SI tak lain hanya untuk mendapatkan uang. Semakin jelas bahwa ia ingin menjadi ketua dan sekaligus bendahara, agar dia tidak perlu menyerahkan uang yang masih berada di dalam kas sebesar f 8.000 kepada bendahara, dan ada banyak uang pada pengurus lokal. Abdoel Moeis selanjutnya yakin bila tidak ada uang di kas dan tidak ada lagi yang diharapkan, Goenawan akan mengakui: “Bikin tjape badan voor pertjuma” seperti yang sering diucapkan oleh Goenawan.

Sinar Djawa yang saat itu memuat notulen rapat dan surat-surat Goenawan, tidak memberikan komentar dan juga kemudian dalam laporan Abdoel Moeis, yang juga diambil alih, memuat tulisan P. Disoerjo yang bagi Goenawan semuanya adalah palsu. *Sinar Djawa* menuliskan bahwa orang-orang seperti Goenawan yang menjadi pemilik Hotel Samirono secara tidak

sah (Dahulu milik NV. Medan Prijaji dengan nama Hoten Medan Prijaji) tidak dapat diharapkan bahwa dia akan menjadi pemimpin dan pengelola kas yang baik. Majalah *Pemitrans* bahkan menyebut tindakan Goenawan sebagai rendah dan memalukan.

Dengan kondisi seperti ini Haji Mohammad dari SI Bengkulu mengirimkan sebuah artikel di *Pamitrans*, untuk membela Goenawan dan memujinya sebagai pemimpin. Akan tetapi Sosrokardono (yang membahas iuran masuk dalam *Oetoesan Hindia*) telah menggantikan posisinya dan menyebut Goenawan sebagai bajingan, pengkhianatan, dan dikatakan bahwa bergaul dengan dia adalah haram.

Menurut Sosrokardono, tidak ada konflik antara Goenawan dan Tjokroaminoto. Dugaannya adalah Goenawan sakit hati karena Goenawan tidak diikutsertakan dalam pertemuan dengan Gubernur Jenderal. Selanjutnya Sosrokardono mengakui bahwa dia yang mengusulkan kepada Tjokroaminoto untuk tidak mengikutsertakan Goenawan ketika bertemu dengan Gubernur Jenderal. Hal itu dikemukakan, karena Sosrokardono telah mendengar kabar tentang siapa Goenawan itu tatkala ia berada di Sumatera.

Menurut *Tjahaja Sari*, ketika Haji Mohammad berangkat ke Batavia, masyarakat Bengkulu menganggap bahwa Haji Mohammad akan bertemu dengan Gubernur Jenderal di Batavia. Dengan demikian, menurut Tjahaja Sari, orang-orang itu adalah orang yang tidak tahu telah ditipu oleh pemimpinnya sendiri.

Mengetahui hal demikian, apakah Tjokroaminoto tidak berani menghadapi Goenawan. Jika pandangan ini benar, maka terbukti bahwa hanya kesatuan akan ada selama persoalan uang tidak muncul. Namun bila muncul masalah keuangan, bisa terjadi saling bunuh. Namun kini semuanya masih baik. Pengambilan sumpah tidak berarti apa pun. Ketika seorang kapten Cina bisa melanggar sumpahnya, kena apa seorang ketua SI tidak dapat berbuat serupa?

Pengesahan Status Hukum CSI

Gubernur Jenderal Idenburg sesaat sebelum meninggalkan wilayah koloni, telah meninggalkan tiga keputusan di bidang adat, seni, dan politik. Demikian dikutip oleh *Soerabajasch Nieuwsblad*. Idenburg telah memberlakukan peraturan bioskop agar lebih mudah mengawasi tontonan bioskop, peraturan untuk melindungi cagar alam dan menyetujui anggaran dasar Centraal Sarekat Islam.

Keputusan terakhir inilah sangat penting. Gubernur Jenderal Idenburg memberikan persetujuan yang sebelumnya ditolak untuk memberikan status hukum kepada kepengurusan CSI yang wilayahnya mencakup seluruh Hindia Belanda. Idenburg menganggap saatnya telah tiba untuk memberikan izin kepada CSI. Dengan pengakuan itu, sesuatu yang baik akan muncul yang nantinya akan mewariskan dampak dan tanggungjawabnya kepada penggantinya. CSI berkedudukan di Surakarta dan anggaran dasar yang sudah disetujui diterbitkan dalam *Javasche Courant* secara resmi terdiri atas cabang organisasi di Surabaya, Batavia, Cianjur dan Sukabumi. Menurut apa yang dimuat dalam *Javasche Courant*, organisasi CSI memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mendorong pendirian cabang-cabang yang memiliki tujuan memajukan kehidupan lahir dan batin penduduk bumi putera yang sesuai dengan pasal 3 dalam anggaran tersebut;
- b. Memberikan nasehat dan bantuan kepada organisasi dalam rangka mencapai tujuan itu.
- c. Membentuk dan menjalin hubungan dan kerjasama di antara organisasi itu.
- d. Untuk mencapai tujuan ini akan dilakukan dengan segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum negara, adat dan ketertiban umum.

Anggota organisasi hanyalah organisasi berbadan hukum yang anggarannya telah tercatat. Penerimaan menjadi anggota tergantung

pada keputusan organisasi yang akan memeriksa apakah calon memenuhi persyaratan dan tidak bertindak melawan hukum.

Dengan diperolehnya status hukum CSI, maka ditetapkanlah pengurus CSI, yang kepengurusannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : OS Tjokroaminoto, pedagang
- b. Wakil Ketua : Goenawan, pedagang
- c. Bendahara : DK Adiwinata, redaktur Kepala Volkslectuur.
- d. Komisaris : Haji Ahmad Sadzil (Pedagang)
Sayid Hasan bin Abdulrahman bin Semit
(Pedagang)
RM Aryo Soerjodipoetro (Jaksa)
Sosrokardono (Swasta)
R Djojosoediro (Swasta)
R. Tjokrosoedarmo (swasta)
Haji Achmad Hisjam Zaini (Swasta)
R. Moh. Joesoef (swasta)
R. Hasan Djajadiningrat (Swasta)
Moh. Samin (Swasta)
Haji Moh. Arip (pedagang)
Penasehat : Haji Achmad Dachlan (ulama).

Sebagai Ketua CSI Tjokroaminoto diserahi tugas untuk membuat suatu rencana mengenai kedudukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat hingga ke daerah. Di dalam rencana itu dikupas kedudukan anggota SI dalam Dewan Perwakilan Pusat, Provinsi, kota, desa menurut ajaran Islam. Dalam rencana itu juga dijelaskan cara menyusun aturan di Dewan Pemerintah, tata tertib, dan hal lain yang berhubungan dengan itu. Dengan perolehan status hukum bagi CSI, nama para tokoh SI seperti Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, R. Sosrokardono, menjadi buah bibir di masyarakat.

Tjokroaminoto setelah menyelesaikan rancangannya dalam parlemen, ia memutuskan untuk segera berangkat ke Banjarmasin, karena ada permasalahan dengan SI di sana. Sebelumnya beberapa pengurus datang ke kota itu, namun tidak diterima dengan ramah. Itulah alasan Tjokroaminoto pergi ke Banjarmasin. Demi kepentingan SI, ia tidak merasa berkeberatan untuk pergi ke Banjarmasin untuk mendampingi perutusan Belanda yang dikirimkan ke kota itu untuk membantu dalam menjalankan program-program SI. Permasalahan yang ada di kota itu sebenarnya merupakan dampak dari keputusan Kongres di Surabaya yang diselenggarakan pada 1916. Hal ini terbukti SI cabang-cabang di Sumatera kecuali Aceh tidak menyetujui keputusan SI lokal-lokal di Jawa yang berusaha untuk memperoleh perannya sendiri-sendiri, terutama yang memihak pada pendapat Goenawan.

Kerusuhan di Jambi tidak ada hubungannya dengan kerusuhan lain yang muncul di Madiun dan Kediri, walaupun pengaruhnya terasa di wilayah lain di Hindia Belanda. Hubungan antara SI cabang Jambi dan Borneo begitu buruk sehingga baru-baru ini saja pengaruhnya mulai terasa. Masalah-masalah yang tersembunyi memunculkan pembelotan yang bagi pengurus CSI menggunakan pengaruhnya untuk mencegahnya. Tahun ini merupakan tahun penuh permasalahan bagi pengurus CSI. Di Surabaya juga diam-diam ada kemelut SI yang didalangi oleh tokoh revolusioner Soehardjo yang berada di bawah pengaruh ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) yang menjadikan dia menjadi anggotanya dan berada di bawah pengurus CSI. Belakangan terjadi konflik yang menyebabkan Soehardjo harus meninggalkan SI dan ISDV. Ia sempat memberikan pembelaan di pengadilan, namun ditolak. Kerusuhan di Jambi telah membuka mata para pengurus CSI untuk segera menyelesaikan masalah internal organisasi. Pada tahun 1917 ini, kongres tahunan akan diselenggarakan di Surabaya. Dalam kongres itu akan dipamerkan juga hasil karya para anggota yang dimanifestasikan dalam pameran seni dan kerajinan para anggotanya dari seluruh Hindia Belanda. Kongres ini baru akan diselenggarakan setelah kepulangan Tjokroaminoto

dari Borneo. Tentang kunjungannya ke Borneo ini, Tjokroaminoto sempat berkunjung pula ke Kutai selain di Banjarmasin. Saat itu dijanjikan bahwa akan disediakan tenaga Eropa yang cocok untuk bekerjasama dengan pengurus SI agar diperoleh kemajuan seperti yang dikehendaki.

Tjokroaminoto, Ketua CSI kembali mengadakan audiensi dengan Gubernur Jenderal. Ia didampingi oleh tokoh SI lainnya. Menurut *de Locomotief* audiensi ini dimanfaatkan untuk membahas kondisi di tanah-tanah partikelir di Surabaya, perbaikan rumah di Surabaya dan kesewenang-wenangan yang dialami oleh penduduk dari para pengusaha perkebunan tembakau di Besuki.

Para tokoh SI ini diterima Gubernur Jenderal. Mereka diterima untuk membahas pengaduannya, khususnya kesewenang-wenangan yang dialami penduduk Besuki dari para pengusaha tembakau. Kesewenang-wenangan ini bukan disebabkan oleh pengaruh pemerintah, administrasi atau hukum yang menyebabkan kesewenang-wenangan, tetapi SI langsung menunjuk pasal 55 *Regeering Reglement*, bahwa perlindungan atas penduduk bumi putera dari kesewenang-wenangan dari siapapun menjadi salah satu kewajiban pemerintah Belanda.

Gubernur Jenderal telah menjalankan tugasnya, ia sanggup untuk melakukan penyelidikan yang netral tentang peristiwa itu. Gubernur Jenderal akan melakukan kunjungan ke Ujung Timur tahun ini juga. Kunjungan itu akan dikaitkan dengan penyelidikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah itu.

Dari siaran pers SI dijelaskan bahwa audiensi ini membawa hasil yang sangat terasa: Pemberinan tuduhan terhadap aparat pemerintah dengan janji dari *Kandjeng Toewan Besar* bahwa dia akan datang untuk melihatnya sendiri. *De Locomotief* tetap bungkam tentang hasil ini, karena merupakan tamparan bagi penguasa. Dari Buitenzorg setelah menghadap Gubernur jenderal, Tjokroaminoto berangkat ke Cilacap, untuk menghadiri rapat SI di kota itu. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Eropa dan pejabat bumi

putera. Tjokroaminoto selaku pengurus CSI berbicara tentang arti dan makna SI. Ia menegaskan bahwa Islam menjadi alat pengikat semua suku bangsa di Hindia Belanda. Ia juga menegaskan bahwa pemilik tanah di Jawa sebenarnya orang Jawa. Rapat yang dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang ini mendengarkan pidato Tjokroaminoto dengan tenang. Masyarakat tahu bahwa ia baru saja diterima oleh Gubernur Jenderal di Buitenzorg, pejabat tertinggi di wilayah ini. Para peserta rapat melihat dengan jelas bahwa pemimpin SI duduk berdampingan dengan para pejabat Eropa. Para pejabat Eropa tidak memberikan reaksi apa-apa ketika pengurus SI Pusat menjelaskan tentang ucapan itu. Menurut *Bataviaasche Nieuwsblad* edisi 21 Februari 1917, disebutkan bahwa sejak pendirian SI, rakyat Jawa, termasuk yang menghadiri rapat di Cilacap ini, termasuk kelompok yang paling maju, sehingga petani dapat memahami retorika yang diucapkan oleh Tjokroaminoto. Para pejabat Eropa yang hadir saat itu antara lain Asisten Residen, Kontrolir, beberapa pejabat Eropa lainnya beserta isteri. Sementara pejabat bumi putera, tampak hadir bupati, patih dan beberapa pejabat lainnya.¹⁶ Selain para pejabat tersebut juga tampak beberapa perwakilan SI dari Priangan, Jawa Tengah, dan jawa bagian Selatan serta Madura. *De Locomotief* juga mengirimkan wartawannya untuk meliput rapat tersebut. Sementara dari CSI diwakili oleh Tjokroaminoto.

Mengingat pertemuan di Cilacap ini hanyalah sebuah rapat dan bukan kongres tahunan untuk seluruh organisasi SI, beberapa cabang SI lainnya, khususnya dari luar Jawa tidak mengirimkan wakilnya. Rapat dibuka pada pukul 09.00 dan panitia mengucapkan selamat datang kepada semua tamu yang hadir. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan atas bantuan keuangan yang diberikan, yang jumlahnya mencapai hampir f 1.000, di samping beberapa pedagang Tionghoa yang menyanggupi memberikan hadiah yang nilainya mencapai f 100. Hasil bersihnya akan digunakan untuk mendirikan sekolah Islam. Tjokroaminoto yang berbicara atas nama CSI

16 *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 21 Februari 1917, Lembar ke-2.

memberikan penjelasan tentang arti dan nama organisasi. Ia menyampaikan bahwa Islam menjadi pengikat daris emua suku bangsa di Hindia Belanda dan menunjuk pada kenyataan bahwa banyak ulama yang tidak sependapat dengan tujuan dan usaha organisasi, karena mereka menduga bagwa organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu agama yang baru. Tjokroaminoto mendorong penduduk agar tetap rajin dalam bercocok tanam, yang menjadi andalan pemasukan mereka dan menghidupkan sentra-sentra kerajinan untuk menambah penghasilan mereka. Ia juga meminta agar penduduk melakukan penghematan dan selalu bekerja keras. Ia menegaskan kembali bahwa pada hakekatnya orang Jawa adalah pemilik tanah di pulau Jawa ini. Ia mengharapkan penduduk menerapkan hidup mereka secara Islami.

Setelah selesai menyampaikan pidatonya, seorang utusan dari Banjarnegara menguraikan apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh agama Islam. Ia menegaskan bahwa Islam melarang perbuatan mencuri dan bertindak asusila. Setelah itu, kembali Tjokroaminoto naik ke mimbar untuk membahas masalah ketahanan Hindia dan menyatakan bahwa SI mendukung aksi itu, sementara pertahanan diri menjadi kewajiban pertama penduduk. Tjokroaminoto membantah bahwa dengan program ketahanan Hindia Belanda ini penduduk akan dikenai pajak. Sebelum rapat ini ditutup, Pengurus SI cabang Cilangkap mengumumkan bahwa SI Cilangkap mendukung CSI sehubungan dengan program ketahanan Hindia Belanda.

Pada Rapat SI di Cilangkap ini, Tjokroaminoto selaku ketua CSI menyampaikan perlunya menekankan pada perjuangan ekonomi bersama peluang keberhasilannya dengan para wakil bangsa lain adalah pendidikan, terutama pendidikan rakyat atau pendidikan desa. Kualitas penduduk hanya bisa diangkat melalui sarana pendidikan. Jadi jika rakyat ikut terlibat dalam urusan pemerintahan, maka pertama-tama ia harus bekerja keras. Setelah itu Tjokroaminoto memberikan contoh penerapan hak pilih bagi penduduk bumi putera akan memberikan kesempatan untuk duduk dalam dewan daerah dan dewan wilayah. Selain itu, menurut Tjokroaminoto rakyat yang sama

memiliki kebutuhan pendidikan desa sebagai pendidikan paling dasar bagi semua orang. Sebanyak 96% penduduk dari mereka yang buta huruf terdiri atas orang Jawa yang sejak lama ada. Mereka memiliki hak pilih agar mereka bisa ikut mengatur wilayah dan kotanya. SI berpikiran sampai ke sana.

Kongres Nasional SI II di Batavia.

Pada 20-27 Oktober 1917 dilangsungkan Kongres SI Nasional yang kedua. Kongres ini diselenggarakan di kota Batavia. Kongres ini dipersiapkan untuk membicarakan rencana SI yang akan dibawa pada sidang parlemen Belanda (Volksraad). Dalam kongres ini pembicaraan tentang pemerintahan dan badan-badan yang ada menjadi topik yang akan dibahas dalam Kongres ini. Pimpinan CSI masih menyetujui cita-cita pemerintahan nasional di Indonesia yang dilakukan tidak secara revolusioner tetapi secara evolusioner. Dalam kongres tersebut juga dibicarakan aksi untuk melakukan desentralisasi pemerintahan dan hak untuk memilih, kemerdekaan bergerak, pertanian, urusan sosial. Dalam kongres itu juga dibahas tentang janji Gubernur Jenderal untuk melakukan penelitian terhadap kasus kesewenang-wenangan terhadap penduduk Besuki. Peristiwa ini juga menjadi topik dalam acara rapat umum CSI Pusat yang diselenggarakan di balai kota di Surabaya. Kiranya 8.000 orang hadir dalam rapat tersebut. Ketua CSI Tjokroaminoto menyampaikan laporan tentang audiensi yang dipimpinnya dengan Gubernur Jenderal. Tjokroaminoto telah memanfaatkan audiensi ini





sebagai propaganda dengan menafsirkan janji wali negeri yang dilakoninya dengan menempuh perjalanan ke Buitenzorg seolah semua tujuan akan tercapai. Massa menjadi heboh dengan memberikan semangat kepada ketua SI Pusat itu. Mungkin ini dianggap sebagai sikap pemerintah yang

melemah dengan menerima wakil SI Pusat dengan menerima audiensi mereka. Dengan kata lain pemerintah dipaksa oleh SI untuk menyanggupi apa yang menjadi keluhannya. *De Locomotief* melihat bahwa situasi seperti ini akan membahayakan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan munculnya ikatan antara sikap lemah pemerintah yang sangat mempercayai penasehatnya dan meningkatnya keberanian pers bumi putera yang didorong oleh SI.

Menurut Tjokroaminoto bahasa Jawa halus menjadi penghambat dalam perkembangan orang bumi putra. Ia berjanji untuk mengumumkan ide Tjokrosoedarmo di antara para anggota SI. Selanjutnya rakyat kecil tidak perlu ditekan oleh kromo. Apa yang menjadi sudut pandang baru baginya adalah perbagai perbedaan dalam bahasa seperti bahasa Jawa, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dibantah oleh Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang tidak sependapat dengan Tjokrosudarmo dan dia menunjukkan bahwa Kromo adalah bahasa yang beradab, menua berpendidikan, bahasa yang selama berabad-abad digunakan oleh kaum intelektual. Tjokrosoedarmo bisa ditegur. Kini Ngoko dianggap sebagai kasar dan ucapan oleh manusia beradab dan penggunaan bahasa ini akan dianggap merendahkan. Apabila orang Jawa ingin memiliki kesatuan bahasa maka sebaiknya menggunakan kromo. Dia mendapatkan dukungan dari semua aparat yang menentang penghapusan bahasa halus.

Kongres menyetujui pula masuknya SI dalam Kominte Nasional yang bertujuan untuk menyusund aftar nama calon anggota Volksraad untuk dipilih oleh majelis daerah atau yang akan diangkat oleh pemerintah. Semaoen, ketua SI Semarang, tidak menyetujui masuknya SI dalam Volksraad. Dan hingga kongres ditutup, permasalahan ini tidak terselesaikan, sehingga terjadi perselisihan antara Tjokroaminoto-Abdoel Moes melawan Semaoen, dan kawan-kawan.

Rapat Uumum SI di Pemalang

Ketua CSI Tjokroaminoto mendapat undangan untuk menghadiri rapat umum SI di Petarukan (dekat Pemalang). Rapat Umum ini dihadiri oleh kira-kira 2000 orang. Di antara para undangan terdapat pejabat pemerintah baik Eropa maupun bumi putera. Seperti biasa Ketua SI Pusat Tjokroaminoto memberikan sambutan yang membahas bahwa SI Petarukan sangat menderita karena banyak serangan dari para pengkhianat yang dilontarkan oleh bupati Pemalang, yang dibantu oleh penasehatnya yang bersurban. Akan tetapi SI Petarukan dapat bertahan sampai saat itu, mereka diakui sebagai badan hukum yang sah oleh pemerintah. Selanjutnya seperti biasanya Tjokroaminoto menjelaskan tentang nama SI dan mengapa organisasi itu tidak disebut Sarekat Jawa, Sarekat Budha atau Sarekat Kristen. Sarekat berarti organisasi dan Islam menunjukkan bahwa para anggotanya adalah ummat Islam. Tujuannya adalah mendorong 90% dari 30 juta penduduk Jawa yang memeluk agama Islam agar bekerjasama untuk mencapai tujuan itu. Ini bukan hanya merupakan masalah nama, memang orang-orang anti-SI telah berulang kali mengadukan organisasi ini kepada pemerintah, bahwa SI berusaha untuk merebut kekuasaan yang sah. Akan tetapi pemerintah tidak pernah mau menanggapi tuduhan ini. Sehubungan dengan tuduhan beberapa lawan SI bahwa anggota organisasi ini menjadi pokrol bambu. Orang hanya perlu menjawab dengan geleng kepala. Akhirnya, Tjokroaminoto memberikan nasehat kepada para hadirin agar tidak menyewakan tanah kepada pabrik gula, kecuali dengan harga tinggi. Dalam kasus ini janganlah

mereka tertipu dengan menerima uang sewa sekali dalam lima tahun, karena selama lima tahun pemiliknya akan kehilangan tanahnya.

Pada tanggal 19 April 1917 Tjokroaminoto mengadakan perjalanan ke Borneo dan Celebes. Namun pada 9 Mei ia terburu-buru kembali ke Surabaya. Ia menjumpai bahwa SI Sulawesi Tengah dan para pengikut SI telah mempunyai banyak hutang di sana. Pada tgl 4 Mei 1917 Tjokroaminoto tiba di Surabayadengen menaiki kereta api Ekspres dalam perjalannya dari Buitenzorg. Dia berharap bisa diterima seorang pejabat tinggi di Buitenzorg yang bisa diajak bicara tetang kondisi di Sulawesi. Bahkan ketua CSI ini telah berbicara dengan 4 orang residen. Para bupati, pemimpin bumi putera tertinggi menanti bertemu dengan ketua SI Pusat.¹⁷

Koran *Kaoem Moeda* menganggap wajar Tjokroaminoto meminta kesempatan untuk melakukan audiensi di Buitenzorg dengan pejabat tinggi di sana. Apakah ia memiliki akses untuk menghadap Gubernur Jenderal. Apakah pejabat tinggi akan menghadap gubernur jenderal sendiri? Namun apabila pemerintah tetap ingin membiarkan kondisi demikian, mereka belum melupakan pertemuan itu. Pasti pejabat tinggi itu akan mendapat malu dengan peristiwa di Sulawesi itu dan justru akan menampar wajah penguasa.

Pembentukan Komite Nasional

Pada hari Sabtu petang tanggal 19 Mei 1917 telah dilaksanakan rapat SI yang membahas tentang Komite Nasional. Rapat berlangsung di Kepatihan Pakualaman dipimpin oleh pengurus pusat Boedi Oetomo: Woerjaningrat. Pada rapat itu hadir utusan dari organisasi yang berbeda. Yang ikut hadir dalam pembentukan Komite Nasional adalah yakni Solosche Prinsenbond, Darah Dalem Mangkoenegaran, Jogjasche Prinsenbond, Darah Dalem Pakoealaman, de Regentbond, Mangoenhardjo, organisasi guru pribumi (PGHB), pengurus CSI dan pengurus pusat Boedi Oetomo.

Rapat dimulai pada pukul 09.30 dan baru berakhir pada pukul 5

17 Pendapat ini dikutip dari *Kaoem Moeda* oleh *Bataviaasch Nieuwsblad*, 19 Mei 1917 lembar ke-1.

pagi kesesokan harinya. Diskusi yang berlangsung itu berlangsung panas karena membicarakan mengenai nama Komite Nasional. Utusan CSI HOS Tjokroaminoto berpendapat bahwa seolah-olah Komite Nasional hanya mementingkan kepentingan orang Jawa. Apabila memang demikian, ia tidak sependapat dengan hal itu, karena kata “Nasional” menunjuk pada kepentingan semua orang bumi putera di seluruh Hindia Belanda. Organisasi guru bumi putera sependapat dengan pandangan ini. Dr Radjiman, RM Soerjokoesoemo dari Pakualaman, dan dr. Wiriodipoero menyampaikan pendapatnya. Namun akhirnya disepakati nama Komite Nasional. Setelah masalah nama selesai dibicarakan, dilanjutkan dengan konstribusi dari organisasi yang ditetapkan bahwa setiap pengurus organisasi yang bergabung dengan komite ini akan membayar f 5 per kwartal.

Bupati temanggung memberikan sambutan selama satu jam menjelaskan Serikat Bupati mengenai bahasa pengantar yang akan digunakan. Masalah ini tidak ada keputusan yang mengikat. Mengenai bahasa apa yang akan digunakan dalam rapat Boedi Oetomo yang akan diadakan pada bulan Juli 1917, akan diminta pandangan dari dr. Wiriodipoero, Tjokroaminoto dan Sastrowardojo. Sore hari, pengurus organisasi Pasoendan di bandung menyerahkan surat permohonan kepada pengurus untuk bergabung dengan Komite Nasional.

Pada bulan Juni 1917, para anggota SI Cirebon mendesak diperiksanya kas SI. Surat dilayangkan kepada *Soerabaja Handelsblad* untuk meminta agar Ketua CSI bersedia untuk memeriksa laporan keuangan SI Cirebon. Ketua SI Lokal Cirebon Haji Machmoed menyerahkan neraca dan perhitungan rugi-laba untuk diperiksa di kantor. Namun, uangnya untuk sementara tetap disimpan oleh pihak ketiga. Dalam rapat ini Haji Machmoed dinyatakan bersih karena laporan keuangannya dapat diterima oleh anggota. Yang dipertanyakan adalah apakah dana SI yang dipinjamkan kepada seorang pengusaha bioskop telah dibayarkan kembali? Sementara permohonan SI untuk meminta beberapa ratus bahu tanah liar di Arjawinangun untuk menanam pohon mengkudu atau

pace untuk pewarna kain tidak dibicarakan, karena di balik permintaan itu ada usaha untuk menipu NV. Amentsfabriken dalam perluasan lahan tanaman.

Dari kegiatan memeriksa keuangan di Ciebon, Tjokroaminoto pada tanggal 4 Juni 1917 menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh SI Pemalang. Tjokroaminoto menjadi pembicara utama. Tema pembicarannya kali ini adalah Kebangkitan, agama dan Pendidikan. Selanjutnya dikatakan bahwa selain mengenai kehidupan masa depan semua anggota SI harus memikirkan dunia akhirat. Orang mengatakan bahwa orang Jawa masih jauh tertinggal dengan Cina, Arab, dan Eropa di wilayah Hindia ini masih dianggap tamu belaka. SI siap untuk membuat perubahan. Anak-anak harus belajar dengan rajin, sementara orang tuanya bekerja keras. Juga dikatakan bahwa pabrik bukan berasal dari pemerintah. Oleh karena itu tidak ada hukum yang wajibkan penduduk menyewakan tanah kepada pabrik. Ia juga menegaskan bahwa SI bukanlah organisasi orang bodoh, lemah, dan tertindas. Pemerintah tidak menemukan cara untuk membantu penduduk dan menghilangkan kondisi buruk ini. Kini ada SI yang tanpa kecuali membantu pemerintah mencari cara dalam melaksanakan tugasnya. Apabila terjadi kesewéang-wenangan dari petugas pabrik, mereka diminta untuk mengadukannya kepada polisi dan aparat hukum harus melindungi penduduk yang berada dalam kesusahan.

Ketua CSI harus selalu siap sedia dalam mengurus SI lokal. Hal itu telah menjadi komitmen pengurus CSI untuk selalu memajukan SI cabang di daerah-daerah. Pada hari Minggu, 17 Mei 1917 diselenggarakan kongres terbuka di Sirene Park di Batavia. Dari CSI hadir sembilan orang: Tjokroaminoto (Ketua), Soerokardono (pejabat Sekretaris), Djojosoewirjo, Soeripranoto, Said Bamit, Izam Zaeni, dan Abdoel Moeis (wakil ketua). Kongres ini dihadiri oleh sekitar 1.500 orang termasuk 40 orang Eropa ikut hadir (termasuk dr. Hazeu). Soekirno, pengurus SI Batavia membuka dengan menjelaskan tujuan kongres : membahas persoalan mendesak, penguasa swapraja dan tanah-tanah partikelir, serta mendapatkan arahan dari

pengurus CSI Pusat. Tjokroaminoto selaku ketua CSI Pusat diminta untuk memberikan arahan pada kongres ini. Ia menegaskan pentingnya menjadikan Hindia sebagai Negara berpemerintahan sendiri yang kuat. Untuk menuju ke tujuan itu, semua harus bekerja keras tanpa membedakan ras pangkat atau agamanya. Apa yang diinginkan oleh SI adalah persamaan perasaan semua ras di Hindia agar bisa mewujudkan pemerintahan sendiri. CSI menentang kapitalisme, dan tidak akan tinggal diam bila ada suatu bangsa yang menindas bangsa lain. Pemerintahan di Hindia harus sama dengan seperti di Eropa. SI tidak akan membiarkan bentuk-bentuk koloni Belanda melainkan rakyat Belanda. Jika ada Inggris raya maka harus ada Belanda Raya. Bila tidak terwujud dalam waktu dekat, tentu akan terwujud dalam 10 atau 20 tahun ke depan.

Volksraad yang ada belum seperti yang dikehendaki. Bukan sebagai parlemen yang diidamkan oleh SI. Dewan wilayah diibaratkan seperti lemari besi yang tidak bisa ditembus. Masyarakat tidak mengetahui apa pun yang terjadi di dewan wilayah. Penduduk hanya mendengar pajak baru, ada dewan wilayah tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan. Dewan kotapraja bagaikan pintu yang terbuka, tetapi hanya sebagian saja. Semua orang bumi putera di kota besar bisa masuk, namun bumi putera pedalaman mustahil masuk. Mereka menerima penghasilan f 50 per bulan dan apa yang bisa diperoleh orang Jawa dengan kondisi seperti itu. Akhirnya, yang terpilih hanya mereka yang bisa berbahasa Belanda. Namun dari orang bumi putera yang terpilih adalah mereka yang bisa berbahasa Belanda dan mau menerima penghasilan f 25 per bulan.

Tokoh Abdoel Moeis menerima giliran untuk berbicara. Ia mempertanyakan mengapa bangsa ini bisa dikuasai. Di bawah politik Etis penduduk masih dikuasai. Kebijakan eksploitasi ditrapkan di wilayah ini. Selanjutnya ia membahas tentang kerja wajib di Jawa yang telah dihapus, tetapi belum di luar Jawa. Ia mengatakan tanah itu sebagai asset. Selama bertahun-tahun rakyat bumi putera telah meningkat jumlahnya. Sudah tiba

saatnya, dikatakan oleh Abdoel Moeis, bahwa bangsa ini tidak lagi menjadi hewan beban melainkan manusia yang berkesadaran diri. Selanjutnya ia membedakan beberapa arah orang Belanda di Hindia:

1. Arah politik Kompeni Hindia lama;
2. Politik “para pembunuh tropis” tetapi suaranya jarang terdengar lagi dalam parlemen belanda. Ara “Pembunuh tropis” ini menerapkan politik *devide et impera*;
3. “Para pembunuh tropis” tetapi menganut arah sebaliknya. Ini adalah kelompok paling berbahaya karena menggunakan kita sebagai boneka atau alat propaganda untuk mendukung prinsip mereka;

Selanjutnya Abdoel Moeis melontarkan ide nasionalis: Hindia untuk Hindia, di mana berulang kali ia harus mengakhiri pidatonya yang diiringi tepuk tangan.

Semaun, wakil SI Semarang sepandapat dengan Tjokroaminoto, tetapi ia menghendaki kemajuan yang cepat. Tentang hak pilih dalam volksraad, pada dasarnya volksraad tidak perlu didukung karena merupakan sebuah peti boneka.

Dari hasil diskusi disepakati oleh pengurus CSI yang akan meminta kepada pemerintah untuk mengubah Lembaran Negara mengenai pemilihan itu sehingga pemilih cukup hanya memahami bahasa Melayu dan menguasai bahasa tulisan. Orang-orang yang terpilih adalah mereka yang bisa memahami bahasa Belanda. Usia mereka minimal 21 tahun.

Setelah istirahat, tanah partikelir dibahas , sehingga hanya cukup wakil dari cabang SI Batavia, Semarang, dan Surabaya yang memberikan bahasan. Namun semua menghendaki diperkuatnya pengawasan yang lebih baik. Semaoen dari Semarang menekankan pembebasan dan pembelian langsung dan tidak hanya sekadar janji. Tjokroaminoto menegaskan perlunya pembebasan tanah-tanah partikelir yang dimulai dari tanah yang tuan tanahnya selalu menindas rakyat. Wakil dari Buitenzorg memberikan contoh ketentuan-

ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tentang tanah partikelir. Sebelum ditutup Ketua CSI mengucapkan terima kasih kepada SI cabang Batavia yang memberitahukan bahwa 76 wakil SI hadir di Kongres tersebut.

Pada 6 Nopember diselenggarakan rapat SI di Sukabumi di belakang bioskop Elite. Hadir 2.000 anggota. Ketua CSI Tjokroaminoto berpidato tentang program dasar SI berkaitan dengan baru bergabungnya SI Sukabumi dengan CSI. Selain Ketua CSI, ikut memberikan sambutan pengurus cabang Cianjur, Bandung dan beberapa dari Sukabumi. Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa orang Eropa yang berminat.

Ketika Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum membuka sidang Volksraad yang pertama pada 18 Mei 1918, tampak Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis duduk di deretan anggota Volksraad bersama dengan Dr. Radjiman, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Dr. A. Rivai. Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis masuk dalam Volksraad sebagai perwakilan dari SI. Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis duduk dalam barisan oposisi dalam dewan tersebut. Keanggotaan dua tokoh SI di dalam Volksraad menimbulkan pertanyaan baik pro maupun kontra. Namun, itulah yang menjadi dasar dari SI yang selalu menentang kehadiran kaum kapitalis. Menjadi anggota Volksraad merupakan media agar mereka dapat menentang peran kapitalis yang makin lama makin menyudutkan kaum buruh. Namun keikutsertaannya dalam Majelis ini membuat musuh-musuh SI melakukan infiltrasi ke dalam SI dengan mendaftarkan diri menjadi anggota SI. Infiltrasi ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok bumi putera yang tidak merasa sentimen dengan keberhasilan SI, namun juga dari pemerintah kolonial sendiri juga menaruh rasa curiga terhadap kemajuan SI yang demikian pesat dalam merekrut anggota-anggotanya. SI berada di ambang perpecahan. Beberapa konflik internal maupun eksternal terjadi. Hubungan dengan Muhammadiyah yang sebelumnya baik, kini menjadi renggang. Sebenarnya hubungan di antara keduanya baik-baik saja. Namun pertentangan yang ada tidaklah didasarkan hal-hal yang bersifat prinsipiil. Hampir semua permasalahan yang ada didasarkan pada selisih paham perorangan saja, namun

karena banyak orang yang melakukan infiltrasi di tubuh SI, maka konflik yang sederhana itu merambah dan menjadi besar.

Nasib SI menjadi semakin tidak menentu tatkala Tjokroaminoto ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Pemberontakan yang terjadi di daerah seperti di Mempawa, Kalimantan Barat, Jambi, Sekdau, Kudus, Demak, Toli-Toli dilemparkan semuanya ke SI, sekalipun tidak ada satu bukti pun yang mengarah ke kerusuhan di beberapa kota tersebut. Pemerintah Belanda tidak senang melihat derap langkah SI yang mengalami kemajuan yang sangat cepat. Bahkan hal ini dianggap sebagai suatu indikator tentang akan dilakukannya pemberontakan yang dimotori oleh orang-orang SI. Untuk alasan itulah yang menyeret Tjokroaminoto harus mendekam di dalam hotel prodeo selama 8 bulan tanpa alasan yang jelas.¹⁸

Kesimpulan

Sarekat Islam sebagai suatu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat bumi putera merupakan organisasi yang dirindukan kehadirannya oleh rakyat. Antusiasme masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota SI baik di daerah maupun di pusat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam waktu yang relatif singkat SI menerima anggota yang demikian banyak. Anggota SI yang demikian banyak itu dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai ancaman dari eksistensi penjajah di tanah air kita ini. Keberhasilan SI dalam menghimpun masyarakat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tjokroaminoto dalam hal ini telah membuktikan bahwa ia adalah seorang administrator yang baik, yang dipercaya oleh rakyat, karena antara perbuatan dan ucapannya selalu sejalan. Pengabdiannya dalam organisasi sangat luar biasa. Walaupun kondisi transportasi saat itu masih dapat dikatakan sulit, namun, Tjokroaminoto selalu berusaha untuk menghadiri undangan rapat baik di kotanya sendiri maupun di kota-kota lain, bahkan di luar pulau Jawa.

18 Amelz dalam *Ibid*, hlm. 118-119.

Bidang yang menjadi fokus dari organisasi SI adalah menyejahterakan penduduk terutama para pedagang batik yang mengalami tekanan yang datangnya dari kaum kapitalis. SI melindungi penduduk khususnya yang beragama Islam. Oleh karena itu organisasi ini menimbulkan kecurigaan yang besar bagi pemerintah kolonial karena telah berhasil menghimpun anggotanya dalam jumlah yang sangat besar. Di samping itu, tekanan dari pedagang non bumi putera juga sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial sangat berhati-hati dalam mengelola organisasi ini. Kegigihan Tjokroaminoto yang selalu mengumandangkan tujuan dari SI dalam setiap pertemuan, baik rapat, rapat terbuka ataupun kongres, menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang taat azas. Sejak awal ia telah memiliki komitmen untuk selalu berjuang membela kepentingan rakyat kecil yang pada saat itu tidak berdaya menghadapi kekuatan pedagang lain yang di belakangnya terdapat kaum kapitalis yang memiliki modal yang sangat kuat. Upaya untuk memajukan rakyat kecil dengan membuka sekolah, pelatihan, bahkan toko-toko bertujuan untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang sangat memerlukan uluran tangan para tokoh termasuk di dalamnya Tjokroaminoto. Upaya untuk menjatuhkan kedudukannya baik sebagai ketua SI lokal maupun ketua CSI dihadapi dengan penuh tanggung jawab walaupun tuduhan yang didakwakan kepadanya tidak masuk akal. Perpecahan dengan sesama pengurus SI justru memicu Tjokroaminoto untuk tetap melakukan konsolidasi ke dalam, sehingga masyarakat kecil masih tetap menaruh kepercayaan yang tinggi kepadanya. Ketaatazasan Tjokroaminoto terbukti dengan ditinggalkannya statusnya sebagai anggota Volksraad, suatu lembaga yang sangat bergengsi pada saat itu baik bagi masyarakat Eropa maupun masyarakat bumi putra.

Tjokroaminoto dapat dikatakan sebagai seorang “provokator” dalam artian positif. Tjokroaminoto telah membesar organisasi SI ataupun Centraal SI dalam mengusahakan status hukum yang sangat penting dalam perkembangan organisasi ini. Kecurigaan dari pihak pemerintah yang

menolak status hukum CSI ia olah dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh SI sendiri maupun kecurigaan dari pihak pemerintah kolonial. Tjokroaminoto melakukan upaya untuk menghadap ke notaris untuk meyakinkan semua orang bahwa apa yang menjadi tujuan dan prinsip SI sejak awal tetap konsisten. Dengan pernyataan yang ditandatangani oleh notaris, SI mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jenderal, yang akhirnya memberikan status hukum terhadap CSI, walaupun keputusan itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial Belanda di Hindia Timur.

Tjokroaminoto identik dengan SI. Tjokroaminoto merupakan motor dari SI, yang kemudian maju dengan pesat setelah organisasi yang dipimpinnya (CSI) memperoleh status hukum dari pemerintah Belanda. Perolehan status hukum ini juga dapat membawa dampak pada perkembangan SI maupun CSI itu sendiri. Perjuangan yang dilakukan oleh Tjokroaminoto tidak pernah lekang oleh waktu, karena sebagai orang yang diserahi tugas untuk mengembangkan organisasi ini telah dikakukannya dan akhirnya setelah dilakukan kerja keras, organisasi ini memperoleh pujian dari Gubernur Jenderal pada saat itu, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Statusnya yang sudah mulai kokoh sebagai ketua CSI tidak mengubah sikap dan perilakunya sebagai pembela kaum yang menderita. Ia selalu berusaha untuk menemui anggota-anggotanya dari berbagai suku bangsa tanpa memandang perbedaan status, kedudukan maupun jabatannya. Ini semua telah dibuktikannya, sehingga menumbuhkan simpati yang luar biasa besarnya bagi masyarakat yang saat itu berada dalam kesulitan.

Perjalanan panjang yang ia torehkan dalam sejarah perkembangan SI, membawa dampak negatif bagi para pesaingnya. SI diinfiltasi oleh orang-orang yang mencari kelemahan Ketua Umum CSI ini. Walaupun tidak mendasar, akhirnya Tjokroaminoto harus mendekan selama 8 bukan di dalam penjara. Sungguh hal itu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan oleh Tjokroaminoto. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kaum

kapitalis terhadap rakyat dibalas dengan penjeblosannya ke penjara. Namun berkat kelihaiannya dalam melobby, akhirnya Tjokroaminoto dapat lepas dari jeruji besi di tembok tahanan.

Daftar Pustaka

Koran

- *Algemeen Handelsblad*
- *Bataviasche Nieuwsblad*
- *De Soematra Post*
- *De Tijd*
- *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*
- *Kaoem Moeda*
- *Nieuw Rotterdamsche Courant*
- *Oetoesan Hindia*

Buku/Majalah

Amelz. 1952. *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya*.
(Jakarta, t.t., Bulan Bintang.

Kartodirdjo, Sartono. Dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Poeze, Harry A.1994. “Political Intelligence in the Netherlands Indies” dalam Robert Cribb, *The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.

Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.



HAJI OEMAR SAID TJOKROAMINOTO

Tim Museum Kebangkitan Nasional

Keluarga Haji Oemar Said Tjokroaminoto

Pada 16 Agustus 1882 di Desa Bakur, Madiun, lahir anak kedua dari Raden Mas Tjokroamiseno yang diberi nama Oemar Said Tjokroaminoto. Keluarga memanggilnya dengan nama Tjokroaminoto dengan harapan kelak bisa menjadi pemimpin yang berani membela kebenaran dan bisa membebaskan masyarakat dari penindasan. Harapan tersebut di kemudian hari terwujud, karena pada saat memimpin Sarekat Islam, Tjokroaminoto gigih membela kebenaran dengan cara menggugat ketidakadilan di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda (Amelz, 1952: 50).

Tjokroaminoto dilahirkan dari keluarga terhormat, karena ditinjau dari garis keturunannya mengalir darah bangsawan dan ulama. Buyutnya Kyai Bagus Kasan Besari merupakan ulama kharismatik pemilik dan pengasuh pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Kyai Bagus Kasan Besari menjadi teladan bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, karena itu Susuhunan Paku Buwono III menghadiahkan seorang puteri untuk dinikahinya (Soebagijo, 1985: 1). Pernikahan ini menjadikan Kyai Bagus Kasan Besari sebagai bagian dari keluarga Keraton Surakarta.

Kakek Tjokroaminoto yang bernama Tjokronegoro menjabat sebagai Bupati Ponorogo, daerah yang pada masa Tjokroaminoto, dikenal sebagai daerah keras yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Perkelahian antar warok menjadi peristiwa yang sering terjadi, oleh karena itu, Ponorogo harus dipimpin oleh orang yang berani, memiliki kemampuan beladiri dan memiliki sifat mencintai. Tjokronegoro mampu menciptakan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan masyarakat, karena itu ia menjadi bangsawan yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ayah Tjokroaminoto adalah Raden Mas Tjokroamiseno adalah seorang Pangreh Praja dengan pangkat Wedana di daerah Kleco, Madiun.

Tjokroaminoto memiliki dua belas saudara kandung. secara berurutan mereka adalah :

1. Raden Mas Oemar Djaman Tjokroprawiro.
2. Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto.
3. Raden Ayu Tjokrodisoerjo.
4. Raden Mas Poerwadi Tjokrosoedirjo.
5. Raden Mas Oemar Sabib Tjokrosoeprodjo.
6. Raden Ajeng Adiati.
7. Raden Ayu Mamowinoto.
8. Raden Mas Abikoesno Tjokrosoejoso.
9. Raden Ajeng Istingatin.
10. Raden Mas Poewoto;
11. Raden Adjeng Istidja Tjokrosoedarmo.
12. Raden Aju Istirah Mohammad Soebardi, (Amelz, 1952: 48-50).

Tjokroaminoto lahir dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan, karena itu ia berhak untuk menyandang gelar *Raden Mas*. Tjokroaminoto kecil hidup dan bergaul dengan masyarakat. Dalam kesehariannya, gelar kebangsawanannya sering ditanggalkan agar bisa berhubungan lebih akrab dengan anak-anak sepermainannya. Kedudukan Tjokroaminoto sebagai anak Wedana tetap menjadi batasan dalam pergaulan, karena teman-temannya itu berasal dari rakyat biasa yang tetap hormat kepadanya.

Tjokroaminoto selalu menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam setiap permainan, dalam permainan kuda-kudaan atau ayam-ayaman, teman-temannya akan dijadikan sebagai pihak dieksplorasi atau terkurung. Tanpa disadari permainan-permainan tersebut menjadi gambaran dari penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat akibat adanya penjajahan. Bangsa yang selalu menjadi tunggangan dan terkurung akan terus menderita hidupnya, karena itu perlu keberanian untuk membebaskan diri.

Pendidikan Haji Oemar Said Tjokroaminoto

Kebiasaan Tjokroaminoto bergaul dengan semua lapisan masyarakat dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa, menjadikan lingkungan pergaulannya sangat luas dan beragam. Lingkungan pergaulan menjadikan Tjokroaminoto tumbuh sebagai pribadi yang unik. Teman-temannya menjadikan Tjokroaminoto sebagai teman yang kehadirannya sangat dinanti dan disukai, sementara masyarakat mengenalnya sebagai anak pemberani yang suka berkelahi.

Kenakalan Tjokroaminoto kerap kali merepotkan dirinya sendiri dan keluarganya. Anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh perilaku Tjokroaminoto sering datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya. Raden Mas Tjokroamiseno dengan sabar menerima keluhan dan aduan dari masyarakat atas semua permasalahan tersebut dan berusaha untuk menyelesaiannya dengan cara sebaik-baiknya.

Pengalaman yang berkesan pada diri Tjokroaminoto adalah pada saat mengikuti pendidikan di bangku sekolah. Sifat nakalnya yang masih suka muncul menjadikan Tjokroaminoto harus pindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya (Amelz, 1952: 50). Meskipun dikenal sebagai anak nakal, Tjokroaminoto memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan cepat dikuasainya, sehingga guru-gurunya di sekolah sering memujinya di depan kelas.

Pada 1897 Tjokroaminoto berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Belanda tingkat dasar, sehingga ia dinilai mahir dalam bidang baca, tulis, berhitung dan bahasa Belanda. Raden Mas Tirtoamiseno kemudian memasukkan Tjokroaminoto ke sekolah calon pegawai pemerintah bumi putera atau *Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah.

Tjokroaminoto menyetujui untuk disekolahkan oleh orang tuanya ke OSVIA, karena tradisi di kalangan pegawai pemerintah atau *Binnenland*

Bestuur (BB) biasa memasukkan anak-anaknya ke OSVIA. Orang tua berharap selesai mengikuti pendidikan di OSVIA anaknya bisa menjadi pegawai pemerintah, sehingga kesejahteraan hidup keluarganya akan terjamin.

Selama menjadi pelajar OSVIA, Tjokroaminoto selalu menjadi pemimpin yang disegani oleh teman-temannya, karena meskipun dia nakal akan tetapi ia tetap memiliki kecerdasan di atas teman-temannya (Gonggong, 1985: 9). Jabatan orang tuanya yang cukup tinggi dan terpandang juga menjadi faktor Tjokroaminoto dihormati dan disegani selama sekolah di OSVIA. Masyarakat pada masa itu akan menghormati pejabat dan keluarganya, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumah pejabat tersebut.

Keinginan menjadi pegawai pemerintah merupakan keinginan masyarakat pada umumnya, karena jabatan tersebut mengantarkan pemilik dan keluarganya untuk masuk ke dalam lapisan masyarakat yang dihormati yaitu lapisan priyayi. Kedudukan sebagai priyayi menjadikan seseorang menjadi terhormat di mata pemerintah maupun masyarakat, yang berarti dimilikinya beragam fasilitas-fasilitas yang akan memudahkan dalam menjalani kehidupan.

Pendidikan di OSVIA berlangsung selama lima tahun dengan penekanan pada pelajaran ilmu pemerintahan, karena OSVIA merupakan sekolah untuk mendidik anak-anak pribumi agar terampil menjadi pegawai pemerintah. Masa depan pelajar OSVIA sangat baik,



karena setelah lulus dari sekolah, pekerjaan sudah menanti. Pemerintah secara resmi akan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah di daerah-daerah yang membutuhkannya. Biasanya mereka akan ditugaskan di daerah sekitar tempat asalnya.

Minat anggota masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke OSVIA sangat tinggi, tetapi untuk masuk kedalamnya sangatlah sulit. OSVIA menjadi sekolah khusus yang bersifat tertutup, tidak semua anak pribumi yang cerdas dapat diterima menjadi pelajar OSVIA. Anak-anak dari golongan masyarakat biasa tidak diberi kesempatan untuk masuk menjadi pelajar OSVIA, sekolah hanya membuka kesempatan untuk anak-anak yang orang tuanya menjadi pegawai pemerintah.

Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di OSVIA, karena itu semua pelajar dituntut untuk menguasainya secara lisan dan tertulis. Orang tua pelajar OSVIA sering menitipkan anak-anaknya untuk tinggal dalam rumah keluarga Belanda, tujuannya agar penguasaan bahasa Belandanya menjadi lebih cepat dan fasih. Pengaruh lain hidup bersama dengan keluarga Belanda adalah dikuasainya dengan baik tradisi dan budaya sehari-hari bangsa Belanda oleh para pelajar OSVIA. Pengetahuan budaya bangsa Belanda sangat bermanfaat bagi para pelajar OSVIA, karena setelah lulus mereka akan bekerja di bawah pimpinan orang-orang Belanda.

Pendidikan di OSVIA meskipun menekankan pada pembelajaran ilmu-ilmu ke pemerintahan tidak menghilangkan pelajaran yang berhubungan dengan kebudayaan daerah. Pelajar OSVIA mendapatkan pelajaran khusus mengenai sastra gendhing dan karawitan, karena itu mereka dituntut untuk menguasai ilmu olah tembang, ilmu tari-tarian Jawa dan ilmu memukul gamelan (Soebagijo, 1985: 11). Lulusan OSVIA akan merasa malu jika tidak menguasai seni adiluhung peninggalan nenek moyang bangsa Jawa.

Haji Oemar Said Tjokroaminoto Berkeluarga

Pada 1902 Tjokroaminoto dinyatakan lulus dari OSVIA Magelang. Berdasarkan surat keputusan pemerintah, Tjokroaminoto ditugaskan menjadi juru tulis patih di Ngawi, Jawa Timur. Tjokroaminoto dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut, sehingga orang tuanya sangat berbangga hati. Raden Mas Tjokroamiseno berharap anaknya kelak bisa menduduki jabatan tinggi dalam bidang pemerintahan, sehingga bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga.

Penghasilan Tjokroaminoto sebagai pegawai pemerintah dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu orang tuanya berencana untuk segera menikahkannya. Pada masa itu pernikahan anak-anak pegawai pemerintah didasarkan atas perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua kedua belah pihak. Anak yang akan dinikahkan tidak kenal siapa pasangan hidupnya, mereka hanya menyetujui dan mematuhi perintah dari orang tua.

Dalam menikahkan anaknya aspek keturunan menjadi pertimbangan utama, karena itu kalangan priyayi biasanya akan menikahkan anaknya dengan priyayi yang lebih tinggi atau setidaknya sederajat. Raden Mas Tjokroamiseno pada akhirnya meminang Raden Ajeng Soeharsikin, anak dari Raden Mangoensoemo, Patih (wakil bupati) di Ponorogo untuk dijodohkan dengan Tjokroaminoto (Amelz, 1952: 51).

Pilihan ini didasari oleh reputasi Raden Mangoensoemo sebagai pegawai pemerintah yang pemberani, bersikap adil dan piawai dalam menyadarkan para pelaku tindak kejahatan. Pencuri, pemabuk dan penjudi yang tertangkap tangan olehnya tidak langsung dihukum akan tetapi diberikan nasehat terlebih dahulu, sehingga banyak dari mereka yang sadar dan tidak lagi mengulangi perbuatan tercela di sisa masa hidupnya.

Raden Mangoensoemo juga dikenal sebagai orang yang mampu mengobati penyakit dengan cara tradisional dengan menggunakan media tanaman atau mineral yang ada disekitar tempat tinggalnya. Masyarakat



banyak yang datang ke rumahnya jika menderita sakit, khususnya sakit luka yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa. Pengobatan yang dilakukan didasari oleh semangat untuk membantu sesama, karena itu masyarakat yang datang ke rumah tidak dipungut biaya. Saat proses pengobatan dimanfaatkan untuk memberikan nasehat kepada masyarakat untuk selalu hidup rukun dan rajin bekerja.

Sikap dan perilaku Raden Mangoensoemo yang selalu memperhatikan kepentingan masyarakat diilhami oleh perilaku anak-anaknya yang selalu menjaga keharmonisan. Di antara anak kandungnya yang selalu dijadikan sebagai sumber inspirasi adalah Raden Ajeng Soeharsikin. Masyarakat menilai Raden Ajeng Soeharsikin adalah puteri yang halus budi pekertinya, baik perilakunya dan memiliki sifat suka memaafkan (Amelz, 1952: 52).

Karakter dan rupa Raden Ajeng Soeharsin digambarkan oleh Soekarno sebagai berikut :

“Bu Cokro adalah seorang wanita yang manis dengan perawakan kecil dan bagus yang terlihat manis jika dipandang. Itu semua penampakan dari luar, lebih dari itu Bu Cokro benar-benar berbudi manis, berkelakuan bagus. Itu semua dapat dilihat dari tutur katanya. Jawabannya pada saat diminta

bercerai, menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah isteri yang memiliki kesetiaan kepada suami secara lahir dan batin. Kesetiaan yang demikian, ditunjukkan saat semua orang membenci Tjokroaminoto suaminya. Kecintaan lahir dan batin ditunjukannya pada saat semua orang (termasuk keluarganya sendiri) berpaling dari suaminya. Bahkan menuduh suaminya sebagai orang “brangasan” yang bertabiat aneh” (Gonggong, 1985: 18).

Raden Mangoensoemo tidak termasuk dalam kelompok priyayi berpikiran maju, yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang dikhkususkan untuk anak orang Eropa. Anak-anak Raden Mangoensoemo yang perempuan tidak diizinkan belajar pada lembaga pendidikan formal, mereka diberi kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu agama.

Pendidikan formal Raden Ajeng Soeharsikin tidak terlalu tinggi, karena budaya yang berkembang pada masa itu melarang anak perempuan untuk belajar. Masyarakat menilai memasukan anak perempuan ke sekolah merupakan tindakan yang sia-sia, karena setinggi apapun pendidikannya, perempuan hanya akan mengurus dapur dan sumur yang identik dengan kegiatan mengurus suami, mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah.

Raden Ajeng Soeharsikin pasrah menerima kondisi tersebut, keinginannya untuk mempelajari pengetahuan baru disalurkan dengan belajar mengaji dan mempelajari pengetahuan agama lainnya (Amelz, 1952: 52). Berkat ketekunan dan kecerdasannya pemahaman nilai-nilai keagamaanya cukup luas, sehingga perilaku kehidupannya senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Lamaran orang tua Tjokroaminoto kepada orang tua Raden Ajeng Soeharsikin diterima dengan baik, karena kedua orang tua menilai kedudukan sosial mereka di tengah masyarakat tidak jauh berbeda. Sebagai bukti kepatuhan dan pengabdian kepada orang tuanya, Raden Ajeng Soeharsikin menyetujui pernikahan tersebut. Raden Ajeng Soeharsikin menilai

Tjokroaminoto sebagai sosok yang masih misterius, karena dirinya tidak mengenal secara fisik sebelumnya. Keyakinan bahwa orang tua tidak akan menyengsarakan anaknya, menjadi dasar bagi Tjokroaminoto dan Raden Ajeng Soeharsikin memasuki kehidupan baru sebagai sepasang suami isteri.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga pasangan muda ini, tidak ada rasa cinta, rasa saling membutuhkan dan rasa saling memiliki diantara keduanya. Perasaan itu mulai tumbuh setelah mulai menjalani hidup bersama, bahkan rasa tersebut berkembang menjadi sikap saling ketergantungan dan keterkaitan. Pasangan muda ini mulai berkeyakinan jika mereka tidak bisa dipisahkan, keyakinan tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh dalam menjalani tantangan hidup di masa-masa datang.

Tjokroaminoto memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dari gaji sebagai juru tulis patih Ngawi, Jawa Timur, yang diterimanya setiap bulan. Pekerjaan sebagai pegawai pemerintah bukanlah pekerjaan yang cocok bagi Tjokroaminoto, karena dalam pandangan hidupnya menentang sikap feudal yang membenarkan adanya penghambaan di antara sesama manusia. Menurut Tjokroaminoto semua manusia diciptakan dalam derajat yang sama, bangsa kulit putih tidaklah lebih tinggi dan hebat dari bangsa berkulit coklat. Semua manusia dari etnis apapun harus diperlakukan sama dalam pergaulan hidup.

Bekerja sebagai juru tulis pada dinas pemerintahan menjadikan kemerdekaan Tjokroaminoto terampas. Lingkungan pekerjaan memaksa Tjokroaminoto harus menghormati secara berlebihan orang Belanda yang menjadi pimpinannya, bahkan terhadap orang Belanda dengan kedudukan yang sama atau di bawahnya. Kondisi tidak menyenangkan tersebut berusaha untuk terus dijalani, karena keluarganya di rumah membutuhkan biaya untuk hidup.

Tjokroaminoto tidak bisa bekerja dengan sepenuh hati, hatinya terus menolak diperlakukan tidak adil dalam sistem kepegawaian di pemerintahan. Tahun 1905 dengan keyakinan hati yang kuat Tjokroaminoto memutuskan keluar dari jabatan sebagai juru tulis patih Ngawi (Amelz, 1952: 50).

Keputusan tersebut bukanlah keputusan sepihak Tjokroaminoto, tetapi keputusan bersama yang diambil setelah melakukan diskusi cukup lama dengan isterinya.

Tjokroaminoto menyampaikan sendiri surat pengunduran dirinya sebagai juru tulis kepada Patih Ngawi. Surat pengunduran itu disusun secara resmi sehingga disertai dengan alasan yang tepat dan kuat. Tjokroaminoto menuliskan alasan tidak cocok sebagai pegawai pemerintah menjadi sebab utama pengunduran dirinya. Sembah jongkok terhadap pegawai pemerintah orang Belanda menjadi alasan utama Tjokroaminoto mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah.

Pengunduran diri Tjokroaminoto sebagai pegawai pemerintah menimbulkan kegaduhan luar biasa di kalangan pegawai perintah dan masyarakat, karena tindakan tersebut merupakan hal yang sangat tidak lazim. Tjokroaminoto menentang arus besar kebiasaan masyarakat pada masa itu. Pada saat semua orang berlomba ingin menjadi pegawai pemerintah, Tjokroaminoto memilih jalan berbeda menyatakan keluar sebagai pemerintah.

Keputusan Tjokroaminoto keluar sebagai pegawai pemerintah menimbulkan konflik dalam lingkungan keluarga, karena dianggap akan mencoreng wibawa keluarga. Raden Mangoensoemo memiliki keinginan agar kelak menantunya bisa meraih jabatan yang tinggi dalam pemerintahan, sehingga anak cucunya akan menempati kedudukan terhormat.

Raden Mangoensoemo terus membujuk menantunya untuk membatalkan rencana keluar sebagai pegawai pemerintah, karena jika tetap tekun bekerja dengan sendirinya pendapatan dan jabatan akan terus meningkat. Jabatan sebagai juru tulis hanyalah kendaraan awal, yang akan mengantarkannya pada jabatan lebih tinggi dalam pemerintahan.

Tjokroaminoto tidak bergeming dengan keputusannya, meskipun keluarga dan teman-temannya terus membujuk agar tetap bekerja dalam dinas pemerintah. Sikap Tjokroaminoto ini menjadikan hubungannya dengan keluarga Raden Mangoensoemo menjadi kurang harmonis. Ketegasan

Tjokroaminoto dalam mengambil keputusan didukung oleh isterinya Raden Ajeng Soeharsikin, dengan setia dan tabah terus memberikan semangat kepada suami untuk terus melangkah mengambil keputusan yang diyakininya benar.

Tjokroaminoto mulai tidak kerasan tinggal dalam rumah yang dalam kesehariannya penuh ketegangan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah Raden Mangoensoemo pada pertengahan tahun 1905. Perpisahan ini menjadi kenyataan sangat berat yang harus dihadapi oleh pasangan Tjokroaminioto dan Raden Ajeng Soeharsikin, karena pada saat itu sang isteri sedang mengandung anak yang pertama (Amelz, 1952: 52).

Raden Mangoensoemo sangat marah dengan tindakan Tjokroaminoto meninggalkan rumah dan isteri, karena dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan keluarga dan dirinya. Raden Mangoensoemo menilai Tjokroaminoto sebagai menantu yang tidak bertanggungjawab, karena meninggalkan isteri yang sedang membutuhkan perhatian. Raden Mangoensoemo segera memanggil anaknya untuk diminta pendapat tentang kesediannya jika harus bercerai dengan Tjokroaminoto.

Raden Ajeng Soeharsikin dengan lemah lembut menguraikan pendapatnya dengan bahasa yang sangat santun. Berikut ini ungkapan hati paling dalam Raden Ajeng Soeharsikin yang disampaikan kepada kedua orang tuanya :

“Ayahanda ! Dulu anakanda dikawinkan oleh ayah-bunda, sedangkan pada waktu itu tidak kenal dengan Mas Tjokro. Anakanda taati ! Kini anakandapun tetap ta’at. Kalau ayah-bunda ceraikan anakanda dari Mas Tjokro. Tetapi..... seumur hidup anakanda tidak akan menikah lagi, karena dunia dan akhirat, suami anakanda hanyalah Mas Tjokro semata” (Amelz, 1952: 52-53).

Penjelasan yang disampaikan dengan santun dan suara lemah lembut tersebut mampu menggetarkan hati Raden Mangoensoemo, karena di dalamnya terdapat ketegasan sikap yang tidak bisa ditawar lagi. Keinginannya untuk memaksa anaknya cerai dari Tjokroaminoto tidak bisa diwujudkan,

karena tidak tega rasanya memaksa anak yang sudah memiliki ketulusan dan keteguhan hati untuk terus hidup bersama Tjokroaminoto.

Perasaan cinta dan sayang Raden Ajeng Soeharsikin yang teramat dalam tidak memungkinkan buat dirinya untuk meninggalkan Tjokroaminoto yang sedang mengalami kesusahan hati. Raden Ajeng Soeharsikin yakin apa yang disangkakan oleh kedua orang tuanya salah, karena suaminya tidak memiliki sifat dan karakter seperti yang dituduhkan.

Raden Ajeng Soeharsikin menilai Tjokroaminoto sebagai orang yang sangat bertanggung jawab. Keputusannya tidak mengajak isteri meninggalkan rumah bukanlah tanpa alasan yang jelas. Kondisi isteri yang sedang mengandung menjadi pertimbangan utama, karena Tjokroaminoto belum bisa menjamin kesejahteraan untuk isteri dan anaknya di tempat yang akan dituju. Tjokroaminoto tidak ingin melihat orang-orang yang dicintainya hidup menderita bersama dengannya, karena itu ia akan memboyong kembali keluarganya jika kondisi hidup sudah lebih baik.

Haji Oemar Said Tjokroaminoto Menghidupi Keluarga

Tjokroaminoto melangkah kakinya menuju kota Semarang untuk mencoba penghidupan baru, dengan potensi yang ada pada dirinya ia yakin bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Daerah pelabuhan menjadi tempat yang dipilih untuk tinggal, karena kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih mudah dan terbuka. Tjokroaminoto tidak memberitahukan kepada keluarga ke daerah mana ia akan tinggal, dengan tujuan agar apa yang dialaminya nanti tidak diketahui oleh keluarga.

Tjokroaminoto memilih bekerja sebagai kuli pelabuhan dengan tugas memuat dan membongkar barang dari kapal. Pekerjaan sebagai kuli pelabuhan merupakan pekerjaan kasar yang mengandalkan kekuatan tenaga. Pekerjaan ini sebenarnya tidak cocok untuk Tjokroaminoto, tetapi ia melakukannya sebagai tempat pembelajaran untuk menghayati kehidupan masyarakat kelas bawah.

Pengalaman bekerja sebagai kuli pelabuhan membawa kesan yang sangat mendalam, sehingga nantinya akan mempengaruhi cara pandang Tjokroaminoto dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan hidup kaum buruh. Sepekan dinilai sudah cukup untuk memahami kehidupan kaum buruh, karena itu kemudian Tjokroaminoto berusaha untuk mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuannya.

Kota Surabaya dipilih sebagai tempat untuk menimba pengetahuan dan pengalaman baru, karena lokasinya lebih dekat dengan kota Ponorogo tempat tinggal isterinya. Selain itu, Surabaya juga merupakan kota yang sangat ramai karena menjadi pusat kegiatan perdagangan. Tjokroaminoto memilih untuk tinggal di Jalan Paneleh Gang VII, untuk memudahkannya dalam melakukan aktifitas yang terkait dengan pekerjaan barunya nanti.

Tjokroaminoto memilih untuk bekerja menjadi tenaga administrasi pada perusahaan dagang *firma Kooy & Co*. Pekerjaan ini dinilai sesuai dengan kemampuannya, karena lebih banyak menggunakan pikiran. Banyaknya pesanan yang harus dilayani oleh perusahaan, menjadikan waktu Tjokroaminoto tersita untuk kantor. Kesibukan bekerja tidak membuat dirinya lupa akan isteri yang masih tinggal bersama dengan kedua orang tuannya, sehingga terkadang muncul perasaan kangen untuk menemui Raden Ajeng Soeharsikin.

Seiring dengan bertambahnya waktu kandungan Raden Ajeng Soeharsikin terus membesar, masa untuk melahirkan menjadi terus semakin mendekat. Menjelang kelahiran menjadi masa yang sangat mendebarkan karena tidak ada suami disisinya. Dukungan orang tua dan saudara sangat membantu dalam menghadapi proses kelahiran, berkat bantuan dukun beranak Raden Ajeng Soeharsikin berhasil melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Keluarga memberi nama bayi perempuan itu Oetari.

Tangisan dan senyuman Oetari menjadi hiburan tersendiri bagi Raden Ajeng Soeharsikin, tetapi rasa rindu ingin bertemu dengan suami

semakin menjadi-jadi. Tekad untuk mencari suami dari hari ke hari semakin kuat, karena itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya Raden Ajeng Soeharsikin meninggalkan rumah. Sepucuk surat ditinggalkan di kamar untuk memberitahukan kepergiannya. Bersama dengan Oetari, usaha untuk mencari suami dimulai meskipun tidak tahu alamat yang harus dituju.

Raden Mangoensoemo khawatir dengan kepergian anaknya, karena itu segera diperintahkan orang untuk segera menyusul. Fisik Raden Ajeng Soeharsikin yang masih lemah mejadikan perjalannya lambat, sehingga dapat disusul oleh orang suruhan bapaknya. Raden Ajeng Soeharsikin dipaksa untuk kembali ke rumah dengan dikawal oleh pegawai bapaknya.

Kabar kelahiran Oetari terdengar juga oleh Tjokroaminoto, karena itu diputuskan untuk datang ke Ponorogo menemui isteri dan anaknya (Setyarso, 2011: 58). Kehadiran Oetari meluluhkan kemarahan Raden Mangoensoemo, apalagi saat Tjokroaminoto datang, Oetari langsung merangkak mengejarnya. Pertemuan tersebut menjadi momen yang sangat mengharukan karena hubungan mertua dan menantu yang selama ini kurang harmonis bisa diperbaiki kembali.

Tjokroaminoto meminta izin kepada kedua mertuanya untuk memboyong keluarga ke Surabaya, tujuannya untuk memudahkan dalam mengawasi dan membesarkan anak. Atas izin dan restu dari orang tua Raden Ajeng Soeharsikin, Tjokroaminoto membawa keluarganya untuk tinggal di Jalan Paneleh Gang VII, Surabaya.

Keluarga dan pekerjaan tidak menghambat Tjokroaminoto untuk terus menuntut ilmu dan menambah pengetahuan, karena itu pada tahun 1907 ia mengikuti pendidikan *Burgerlijke Avond School*, semacam kursus teknisi yang ditempuhnya selama tiga tahun (Setyarso, 2011: 59). Berkat kecerdasan yang dimilikinya kursus tersebut bisa diselesaikan dengan nilai yang memuaskan.

Pada 1910 Tjokroaminoto mengundurkan diri sebagai pegawai pada *firma Kooy & Co.* Menurutnya pekerjaan tersebut sudah sangat dikuasai

dan dipahami sehingga tidak ada tantangan baru. Berbekal sertifikat dari *Burgerlike Avond School*, Tjokroaminoto melamar bekerja sebagai teknisi pada pabrik gula Rogojampi yang berada dipinggir kota Surabaya. Berkat ketekunannya dalam bekerja, tidak dalam waktu lama jabatannya dinaikkan menjadi ahli kimia. Perubahan jabatan tersebut diiringi pula dengan naiknya kesejahteraan.

Kedudukan sebagai ahli kimia tidak membuat Tjokroaminoto kerasan bekerja di pabrik gula. Budaya di lingkungan perusahaan yang sangat feodal yang mengutamakan kepentingan pegawai Belanda sangat tidak disukainya, karena itu pada akhir tahun 1911 Tjokroaminoto memilih keluar dari pekerjaan. Sikap diskriminasi terhadap pegawai pribumi dan Eropa menjadi penyebabnya, karena Tjokroaminoto meyakini semua manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pengalaman Tjokroaminoto bekerja pada pabrik gula memudahkan dirinya untuk diterima bekerja pada biro teknik di Surabaya. Awal tahun 1912 Tjokroaminoto mulai bekerja sebagai teknisi mesin dan alat-alat elektronik. Penghasilan sebagai teknisi tidak terlalu tinggi, karena itu kebutuhan hidup keluarga terkadang tidak terpenuhi semua. Raden Ajeng Soeharsikin dipaksa oleh keadaan untuk cermat dan hemat dalam membelanjakan uang, agar kebutuhan hidup sehari-hari keluarga bisa terpenuhi.

Rumah indekos Di Paneleh

Tjokroaminoto dan Raden Ajeng Soeharsikin bahu membahu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Rumahnya yang sederhana dijadikan sebagai tempat pemondokan (*kosthuis*) untuk menambah penghasilan. Anak-anak sekolah di Surabaya yang berasal dari berbagai daerah, tinggal dan makan bersama dalam rumah di Jalan Paneleh VII. Mereka ada yang masih terhitung sebagai keluarga dan ada juga orang lain.

Pelajar yang tinggal bersama dalam di rumah Tjokroaminoto jumlahnya lebih dari dua puluh orang. Mereka ini adalah siswa dari *Meer Uitgebreid*



Lager Onderwijs (M.U.L.O) setingkat Sekolah Menengah Pertama dan *Hollands Binnenlands School* (H.B.S). Di antara pelajar-pelajar tersebut terdapat nama yang di kemudian hari menjadi orang penting yang mewarnai lembaran sejarah bangsa Indonesia. Kartosoewirjo, Soekarno, Abikoesno Tjokrosujoso, Musodo, Alimin, Hermen Kartowisastro dan Sampoerno adalah nama-nama yang pernah tinggal bersama di rumah Tjokroaminoto (Amelz, 1952: 55).

Anak-anak yang indekos di rumah Tjokroaminoto adalah pelajar yang cukup cerdas, sebagian di antara mereka kelak menjadi tokoh bangsa. Di antara anak-anak kost tersebut Soekarno menempati kedudukan istimewa karena menjadi anak indekos, murid dan juga menantu Tjokroaminoto (Legge, 2000). Kartosuwiryo tokoh pendiri Negara Islam Indonesia, juga pernah beberapa tahun tinggal di rumah Tjokroaminoto (HolkDengel, 1997: 7-10), demikian juga pula dengan tokoh Partai Komunis Indonesia, Musso dan Alimin, juga menjadi anak indekos dan murid Tjokroaminoto (Brackman, 1963: 24).

Rumah sederhana di Jalan Paneleh VII menjadi sangat berarti dalam dinamika sejarah pergerakan bangsa Indonesia, karena dari sinilah muncul tokoh-tokoh bangsa yang terlibat dalam pergolakan lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Kesederhanaan rumah keluarga Tjokroaminoto digambarkan oleh Soekarno sebagai berikut :

“Pak Cokro semata-mata bekerja sebagai Ketua Sarekat Islam, dengan penghasilan yang tidak banyak. Dia tinggal di kampung yang penuh sesak tidak jauh dari sebuah kali. Menyimpang dari jalanan yang sejarar dengan kali itu ada sebuah gang deretan rumah di kiri-kanannya yang terlalu sempit untuk jalan mobil. Gang kami namanya Gang 7 Paneleh. Pada seperempat jalan jauhnya masuk ke gang itu berdirilah sebuah rumah buruk dengan paviliun setengah melekat. Rumah itu dibagi menjadi sepuluh kamar kecil-kecil, termasuk ruang loteng. Keluarga Pak Cokroaminoto tinggal di depan. Kami yang bayar makan, dibelakang. Sungguhpun semua kamar sama melaratnya, akan tetapi anak-anak yang sudah bertahun-tahun bayar makan mendapat kamar yang namanya saja lebih baik. Kamarku tidak memakai jendela sama sekali, dan tidak juga berpintu. Di dalam sangat gelap, sehingga aku terpaksa menghidupkan lampu terus menerus-meskipun di siang hari. Dalam kamar yang gelap ini terdapat sebuah meja yang sudah goyang tempatku menyimpan buku, sebuah kursi kayu, sangkutan baju dan sehelai tikar rumput. Tidak ada kasur. Dan tidak ada bantal” (Gonggong, 1982: 21-22).

Kehidupan sederhana dalam keluarga Tjokroaminoto menjadi kekuatan yang mampu mengikat dan mempererat rasa persaudaraan di antara sesama penghuninya. Toleransi dan semangat untuk berbagi menjadi landasan hidup yang senantiasa dijunjung tinggi, sehingga dalam keluarga tercipta suasana rukun, tenram dan damai. Suasana rumah yang demikian tidak hanya dirasakan oleh keluarga Tjokroaminoto, semua penghuni rumah termasuk para pelajar yang tinggal didalamnya merasakan hal yang sama.

Raden Ajeng Soeharsikin mampu menjalankan perannya dengan baik, menjadi ibu bagi anak-anak yang tinggal dalam rumah. Semua anak yang tinggal dalam rumah harus taat dan patuh terhadap aturan yang sudah dibuatnya, bagi yang melanggar aturan harus bersedia menerima konsekuensi yang sudah ditetapkan. Sikap disiplin yang disertai dengan sikap rendah hati,

menjadikan semua anak kost patuh dengan apa yang sudah ditentukan oleh Raden Ajeng Soeharsikin.

Setiap Minggu Raden Ajeng Soeharsikin mengumpulkan uang makan anak-anak yang indekos, sehingga kebutuhan dana untuk biaya hidup seminggu ke depan sudah tersedia. Menurut Anhar Gonggong (1985: 22), anak-anak yang indekos diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan, seperti :

1. Makan malam jam sembilan dan barang siapa yang datang terlambat tidak mendapatkan makan;
2. Anak sekolah harus berada di kamarnya jam sepuluh malam;
3. Anak sekolah harus bangun jam empat pagi untuk belajar;
4. Main-main dengan anak gadis dilarang.

Kebersamaan hidup dalam waktu yang cukup lama di rumah Tjokroaminoto yang tidak ada batas-batas di dalamnya, menjadikan pengaruh Tjokroaminoto tertanam kuat dalam diri anak yang indekos. Pelajar-pelajar yang tinggal di dalam rumah tersebut tidak hanya mendapat asuhan dan pengawasan dari Tjokroaminoto, mereka juga berusaha memperhatikan tingkah lakunya baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai pengurus organisasi pergerakan.

Pengaruh kehidupan sehari-hari dalam rumah Tjokroaminoto terhadap penghuninya menjadi semakin kuat, karena rumah tersebut selalu ramai dikunjungi tamu yang memiliki latar belakang ideologi beragam. Tjokroaminoto tidak membeda-bedakan tamu-tamunya, semuanya disambut dengan ramah dan hangat. Anak-anak yang indekos dan penghuni rumah lainnya terkadang diajak serta duduk bersama untuk menerima tamu yang datang.

Pada 1913 sampai dengan 1921, rumah Tjokroaminoto menjadi tempat untuk belajar dan mengembangkan ideologi kerakyatan, demokrasi dan sosialisme yang menentang keras paham kapitalisme dan imperialisme

(Amelz, 1952: 56). Murid-murid ideologi Tjokroaminoto adalah para pelajar yang tinggal dalam rumah tersebut, yang di kemudian hari akan saling berhadapan karena perbedaan ideologi yang dianutnya.

Penutup

Tjokroaminoto menjadi salah satu tokoh pergerakan yang memiliki kedudukan istimewa pada masa kebangkitan nasional. Sikap tegasnya terhadap penjajahan menjadikan Tjokroaminoto memiliki tempat yang istimewa di kalangan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Apalagi rumahnya di Jalan Paneleh VII pernah menjadi tempat kost bagi tokoh-tokoh pergerakan lainnya seperti Muso dan Soekarno. Tokoh-tokoh pergerakan yang berbeda ideologi juga segan dan hormat terhadap beliau.

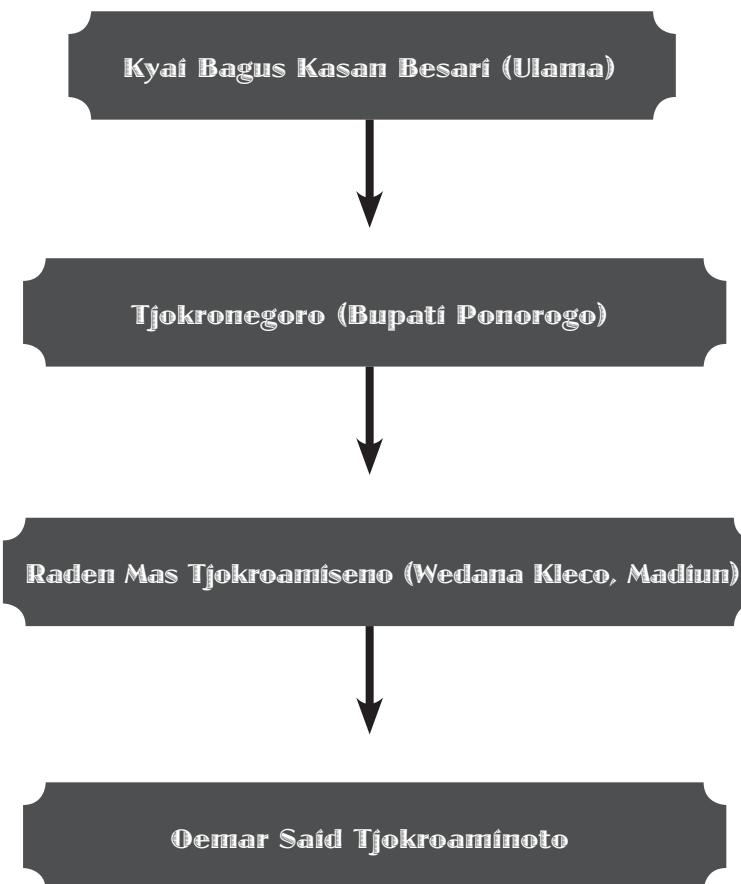
Ketegasan sikap Tjokroaminoto terlihat sejak memutuskan diri untuk keluar dari jabatan sebagai juru tulis pemerintah jajahan Hindia Belanda, padahal pada masa itu masyarakat berlomba untuk menjadi pegawai pemerintah. Tjokroaminoto memilih meninggalkan pekerjaan yang menjanjikan kemewahan hidup, demi memegang teguh prinsip adanya persamaan dalam hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Tjokroaminoto menjadi semakin ditakuti setelah masuk dalam organisasi Sarekat Islam. Ia mampu menyihir massa melalui orasi, karena itu kehadirannya dalam rapat-rapat organisasi senantiasa ditunggu oleh ribuan anggota Sarekat Islam. Pemerintah jajahan khawatir rakyat terpengaruh oleh orasi Oemar Said Tjokroaminoto, karena itu kehadirannya selalu disertai oleh polisi-polisi yang bisa setiap saat menghentikan orasinya. Aktivitas Oemar Said Tjokroaminoto dalam Sarekat Islam menjadikan organisasi ini memiliki jumlah massa terbesar.

Aktivitas Oemar Said Tjokroaminoto pada masa pergerakan nasional perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena itu Museum Kebangkitan Nasional menyajikan informasi tentang Tjokroaminoto dalam ruang pamer di museum.

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Amelz. 1952. *HOS Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya Jilid I*. Jakarta: BulanBintang
- Blumberger, J.Th. Petrus. 1931. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*. Harleem. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V
- Brackman, Arnold. 1963. *Indonesian Communism*. New York: Preager.
- Dengel, Holk. 1997. *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Sebuah Angan-Angan yang Gagal*. Jakarta: SinarHarapan,
- Gonggong, Anhar. 1985. *H.O.S Tjokroaminoto*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kutoyo, Sutrisno et.al. 1977. *Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Legge, J.D. 2000. *Sukarno, Biografi Politik*. Jakarta: SinarHarapan.
- Setyarso, Budi. 2011. *Seri Buku Tempo Tjokroaminoto*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti Press.
- Tjokroaminoto, HOS. 2000. *Sosialisme di dalam Islam*. Islam, Sosialisme dan Komunisme. (editor: HerdiSahrasad), Jakarta: Madani Press.

SILSILAH KELUARGA OEMAR SAID TJOKROAMINOTO

R.H.O.S. TJOKROAMINOTO (1882-1934):
SEMAIAN BENIH PERGERAKAN KEBANGSAAN &
PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA DALAM
KEARIFAN DAN TELADAN ISLAM

Yuda B. Tangkilisan

Pendahuluan

Apa manfaat ideologi terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih menjadi perdebatan yang tampaknya tidak akan berakhir. Dalam spektrum yang luas, di satu sisi terdapat pandangan yang menekankan fungsi ideologi dalam menentukan dan memformulasikan visi, cita-cita dan arah negara yang akan diimplementasikan dalam program pembangunan. Di dalam ideologi tercantum identitas (jati diri) yang dibayangkan (*imagined*) dan fungsi persatuan serta kesatuan (integritas dan integrasi), yang menjadi inti dari konsep nasionalisme. Pandangan lainnya menyatakan bahwa ideologi telah kehilangan fungsinya ketika sejarah sudah berakhir (*the end of history*). Dalam falsafah pragmatisme yang bertentangan dengan idealisme, persoalan ideologi dikesampingkan dalam menyoroti dan mencapai kemajuan (*progress*).

Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, peranan ideologi ikut membentuk semangat dan tekad dalam melawan kekuatan dan upaya rekolonisasi. Akar semangat perjuangan itu terkait pada kurun waktu awal abad ke-20. Ketika itu, perubahan besar melanda dunia, terutama di kawasan yang berada di bawah cengkraman kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan politik yang memantapkan wujud negara bangsa (*nation-state*) dan ekonomi yang bercirikan kapitalisme dan industrialisme mengubah tatanan global yang makin meningkatkan eksplorasi dalam persaingan dan ketergantungan internasional untuk memperoleh bahan baku dan pasar. Oleh karena itu, perkembangan negara-bangsa kian memperluas cengkraman dan pengawasan terhadap wilayah jajahan sebagai bagian dari kekuasaan

kolonialisme agar tidak tertinggal dari negara lainnya.¹

Intensitas eksploitasi kolonialisme semakin meningkat, yang semakin memerlukan perangkat pelaksanaan dan pengawasan demi kepentingan dan keuntungan negeri induk dalam hubungan pusat dan pinggiran (*center and periphery*). Sumber daya politik negeri induk tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan ekspansif dan eksploitatif itu, sehingga pemanfaatan sumber daya manusia negeri jajahan meluas dari lapisan birokrat yang memang menjadi kepanjangan jangkauan wewenang pemerintahan, baik dalam pemerintahan langsung maupun tidak langsung (*direct and indirect rule*), hingga ke kalangan biasa. Seraya itu, pihak swasta negeri induk ikut ambil bagian dalam memanfaatkan sumber daya alam kolonial. Kebutuhan sumber daya manusia yang memenuhi kualitas dan kriteria keinginan itu dipenuhi melalui pengenalan jaringan pendidikan terutama sekolah.

Di satu pihak, kebutuhan untuk memenuhi pelaksanaan perluasan itu terpenuhi, tetapi di pihak lain, introduksi sekolah itu menghasilkan kesadaran emansipasi penduduk jajahan terhadap keadaan yang sedang berlangsung, sebagai langkah awal menuju kebangsaan (*nationhood*) dan nasionalisme (*nationalism*). Kesadaran emansipatif tidak hanya bersumber dari jaringan pendidikan itu. Perkembangan Islam, yang mulai marak sejak abad 16, mewarnai alam intelektual, pergerakan dan tanggapan yang

1 Howard Dick (2002) mengawali pembicaraan tentang pembentukan negara bangsa (*nation-state*) dari tahun 1930-an. Namun menyimak perkembangan kebijakan kolonial yang bekaitan dengan pembentukan rakyat dan pemerintah, pencanangan dan pelaksanaan Politik Etis tahun 1900 merupakan suatu deklarasi resmi dari pengakuan penguasa terhadap kaulanya dalam suatu hubungan kewajiban dan menuju tujuan bersama. Lihat: Nugroho Notosusanto & Marwati Djuned Pusponegoro (eds.) *Sejarah Nasional Indonesia jilid V*, edisi pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka, 2008. Taufik Abdullah (2009) menelusuri genealogi pembentukan *nation-state* dari analisis Sejarah Sosial, yang mendapati bahwa benih-benihnya sudah muncul pada awal abad ke-20 dalam semaihan benih-benih demokrasi dan kemajuan yang terdapat pada ajaran-ajaran sejumlah tokoh di beberapa daerah yang secara langsung dan tidak telah menyemai benih-benih kesadaran sebagai emansipasi budaya untuk memulai suatu pergerakan kebangsaan modern.

konfrontatif terhadap tatanan kolonial. Lembaga sekolah Islam, seperti padepokan, pesantren dan madrasah, berkembang pada jalur dan arah yang berada di luar sentuhan kolonial, walau tidak terkungkung dari dinamika perubahan internasional terutama di lingkungan pengaruh Islam, yang bercorak reformatif (pembaharuan).

Kebijakan pendidikan formal kolonial terutama menyentuh lapisan elite birokrasi tradisional, yang lebih dikenal sebagai kelompok priyayi.² Lingkungan lapisan sosial ini memiliki kesempatan besar untuk menikmati sekolah kolonial. Mereka berada di tengah-tengah dua kultur dan alam pemikiran yang transisional (peralihan) dan bersimpangan (*crossroad*), yaitu pijakan budaya tradisional dan gerbang budaya modern kolonial. Sebagian mereka menemui kesulitan untuk tetap bertahan pada struktur asal yang tradisional, sementara masih gamang dan belum mantap untuk bertransformasi dan menyatu dengan kehidupan yang modern, apalagi tarikan akar dan lingkungan tradisi masih menguat. Kendala terbesar antara lain adalah kendala diskriminatif dari lingkungan modern itu.

Terlepas dari konteks kolonialisme yang sarat dengan kepentingan sepihak, proses tersebut menyebarkan mereka ke berbagai jajaran pelayanan masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya, sesuai dengan fungsi dan kewajiban dalam kearifan “manunggaling kawulo lan gusti” yang tanpa pamrih sebagai wujud dari tanggung jawab penguasa terhadap rakyat (kaula). Namun, mereka tetap menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan kekuasaan kolonial tanpa disertakan pada saat-saat pencanangannya. Pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad) tidak lebih sebagai suatu parlemen semu dengan tugas memberikan pertimbangan dan masukan lepas kepada Gubernur Jenderal tanpa wewenang yang mengikat.

Walau begitu, gagasan emansipatif yang memberontak terhadap belenggu kolonial berasal dari kalangan elite baru tersebut. Wujud pergerakan

2 Tentang kajian priyayi lihat karya Kuntowijoyo (2004), Kartodirdjo dkk dan Tan-gkilisan (2013).

dalam bentuk organisasi modern bermula dari gagasan dan prakarsa priyayi mahasiswa sekolah kedokteran pada tahun 1908, yang disusul perkumpulan lainnya seperti Sarekat Islam (yang berasal dari Sarekat Dagang Islam), Indische Partij dan sejenisnya. Dalam wadah perjuangan modern itu berbagai visi, pemikiran, rencana dan program lahir yang bernuansa kebangsaan dan kebebasan, yang dapat dikatakan sebagai wujud dari pengaruh lingkungan pendidikan yang berpola Barat beserta muatan pengetahuan dan budaya global. Di kalangan pergerakan kebangsaan itu tidak jarang muncul falsafah dan faham Liberalisme, Sosialisme, Kapitalisme, Komunisme, Fasisme, Humanisme, dan seterusnya, termasuk substansi kognisi Islam. Kerap pula, pokok perbincangan dan perdebatan di antara gagasan-gagasan itu merupakan perpaduan pandangan dan ajaran-ajaran tersebut di samping kontradiksi dan antagonisme satu dengan lainnya.

Penerapan pendidikan modern kolonial menghasilkan lapisan elite baru di lapisan priyayi, yang disebut sebagai Elite modern menurut Robert van Niel (1983) atau Neopriyayi oleh William Frederick (1989). Priyayi tradisional tidak pernah mengenyam pendidikan Barat. Neopriyayi terdiri atas priyayi birokrat dan profesional.³ Priyayi birokrat menjadi bagian dari jenjang pemerintahan kolonial, atau kerap disebut sebagai *Inlandsche bestuur*, yang berasal dari pangreh praja, di samping *Europesche bestuur* (*Binnenlandsche bestuur*), sebagaimana dijelaskan lebih mendalam oleh Onghokham (1983) dan Heather Sutherland (1983). Priyayi profesional terjun

3 Savitri Scherer menyebut-nyebut juga istilah priyayi ningrat dan bukan ningrat, priyayi birokratis dan bukan birokratis, priyayi ningrat birokratis, berpendidikan Belanda, berpendidikan pribumi, priyayi profesional bukan ningrat, priyayi rendah, priyayi profesional angkatan (golongan) tua dan priyayi profesional muda. Selanjutnya ia memaparkan bahwa priyayi bukanlah suatu golongan yang serba sama dengan kepentingan yang serupa, melainkan penuh perselisihan yang berkaitan dengan perbedaan pandangan dan cita-cita dalam cara-cara seperti konservatif, radikal, progresif, tradisionalis, reformis atau revisionis (Scherer 1985: 51, 53, 55, 58).

ke lingkungan pekerjaan di kalangan masyarakat, seperti guru, dokter, kerani swasta, pelaut, pekerjaan umum, ahli hukum dan lainnya. Mereka umumnya merupakan lulusan pendidikan atau sekolah kolonial seperti Kweekschoolen, THS (Technische Hogeschool), STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arts, NIAS (Nederlandsche Indische Artsen School), RHS (Recht Hogeschool), GHS (Geneeskundige Hogeschool) dan lainnya.

Berkenan dengan pola-pola pendidikan yang timbul sejak peralihan abad ke-19 hingga ke-20 di samping pendidikan Barat, dan akibat yang ditimbulkan, tampak pada penggambaran sebagai berikut, “Bersamaan dengan pengenalan pada teknik Barat yang begitu ‘menakjubkan’, berdiri sekolah-sekolah yang merupakan pintu ‘gerbang’ ke arah penguasaan ilmu tersebut. Sejumlah kecil pemuda Indonesia mulai mengenal pola-pola pendidikan baru ini. Sebagian melalui sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pihak Barat (sekolah Kristen dan pemerintah Hindia Belanda). Sebagian lagi melalui sekolah-sekolah kaum reformis Islam, seperti sekolah yang dipelopori oleh Sukanti al-Hasari (didirikan pada 1901) dan juga pesantren-pesantren yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kaum reformis Mesir (melalui majalah al-Manar). Perkenalan dengan pendidikan Barat yang berimpit dengan perubahan serbacepat, kemudian menimbulkan ‘krisis pemikiran’ di dalam hati banyak pemuda Indonesia. Perkenalan dengan ide-ide persamaan, kemerdekaan, hak asasi manusia, amratabat bangsa, dan lain-lain menantang pemuda-pemuda ini untuk berpikir lebih maju. Apalagi di dalam kenyataan sehari-hari, mereka melihat bentuk-bentuk paling kasar penghinaan terhadap manusia dan diri mereka sendiri. Kegembiraan dan kegairahan bercampur menjadi satu dengan kemuakan dan kesedihan melihat cita-cita tersebut dan kenyataan-kenyataan yang ada” (Soe 2005: 2,3).

Mengenal H.O.S Tjokroaminoto

Karakter dan kemampuan seseorang tidak terlepas dari pengaruh natur (*nature*), struktur dan kultur. Dalam kehidupan masyarakat ketiga faktor

tersebut saling pengaruh dan mempengaruhi yang mewarnai proses dan perubahan. Keadaan alam (*nature*) mempengaruhi sistem mata pencaharian hidup. Susunan sosial menentukan status, peranan dan kekuasaan dalam masyarakat. Kultur merupakan perekat jalinan hubungan antar anggota masyarakat yang menyimpan asal usul, identitas dan kepentingan bersama (kolektif) agar tetap bertahan dari perubahan sekitar (*surrounding environment*), termasuk dengan kelompok sosial dan politik lainnya baik secara horizontal dan vertikal.

Dari garis dan lingkungan keluarga, Oemar, atau terkadang disebut Omar atau Umar, Said Tjokroaminoto, atau sering dialih-ejaankan menjadi Cokroaminoto, yang lahir pada 16 Agustus 1882 di Bakur, kota kecil di wilayah Madiun, Jawa Timur, tumbuh dan dibesarkan di lingkungan priyayi muslim. Leluhurnya adalah seorang ulama yang mendirikan pesantren. Ayahnya adalah seorang priyayi yang memiliki jabatan sebagai wedana. Namun dari pemberian nama-nama anak-anaknya tampak pengaruh budaya Islam yang kuat.⁴ Berdasarkan garis keturunan priyayi, Tjokroaminoto mampu mengenyam pendidikan modern, yang sebenarnya membawa dirinya kepada suatu keadaan kontradiksi dan transisi di antara priyayi tradisional dan modern (golongan tua dan muda). Dalam interaksi sehari-hari, tampak kesenjangan dan kekakuan hubungan antara priyayi yang mengenyam

4 "Kakek moyang Tjokroaminoto, yaitu Kiai Bagus Kasan Besari, merupakan seorang pendiri Pesantren Tegalsari (di Ponorogo) yang terkenal yang didirikan selama masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749). Ayah Tjokrominoto, yaitu Raden Mas Tjokroamiseno (Wedana Kleco, Madiun) merupakan seorang priyayi Muslim yang taat seperti yang tercermin dalam cara dia memberi nama-nama Arab untuk anak-anaknya seperti Umar Jaman, Umar Said, Umar Sabib, Istirah Mohamad Subari, dan seterusnya" (Latif 2005: 103). Kakeknya adalah Mas Adipati Tjokro-negoro, pernah menjabat sebagai bupati Ponorogo, dan ayahnya adalah Raden Mas Tjokroamiseno, pemangku abdi wedana Madiun (Burhanudin 2012: 58). Berlandaskan silsilah dan tradisi, ia berhak menyandangkan gelar Raden di depan namanya, yang tidak pernah dilakukan sehingga lebih dikenal sebagai Haji Oemar Said Tjokroaminoto.

pendidikan modern dan yang tidak. Kelompok tradisional tidak dapat menerima perubahan-perubahan sikap dan perilaku modern yang dianggap menyimpang dari tradisi atau adat istiadat leluhur. Keadaan-keadaan seperti itu membentuk sosok dan pemikiran Tjokroaminoto.⁵

Robert van Niel (1984: 145, 146) menggambarkan sosoknya sebagai berikut: "Sarekat Islam erat dengan pribadi Raden Umar Said Cokroaminoto, yang cepat memulai posisi pimpinan dalam organisasi. Ia seorang pembicara yang menarik dan bersemangat. Ia telah menawan hati orang banyak dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang merasa diri tertekan dan yang sudah merasa bebas. Ia telah menjadi suatu perantara yang menyuarakan kesusahan-kesusahan yang nyata maupun yang dibayangkan. Ia telah dipandang oleh banyak orang sebagai suatu inkarnasi kebaikan dan kebahagiaan masa depan. Tidak heran kalau pada tahun 1914 ia telah dianggap sebagai *Ratu Adil*, raja yang membawa kebenaran yang akan memimpin jalan ke surga yang dibayangkan. Rakyat—terutama rakyat desa—berkerumun mendengarkan ia berbicara, memegang pakaianya, mencium kakinya. Kata-kata tentang kebenarannya tersebar dari mulut ke mulut. Ia muncul atas nama Islam dan Islamlah yang menjanjikan seorang Imam Mahdi. Tak dapatkah ia dikatakan sebagai Prabu Heru Cokro, ratu adil tradisional, yang sudah lama dinanti-nantikan? Di dalam dunia yang diterobos oleh mistik dan kepercayaan-kepercayaan, ini bukanlah suatu nama yang kebetulan. Kemasyhurannya bertambah. Malahan di kalangan intelektual, yang tidak percaya dengan hubungan-hubungan mistik ini, keberanian dan keahliannya berpidato membuatnya terkenal. Bersamaan dengan popularitasnya, kekuatan dan misi Sarekat Islam pun. Alat-alat modern dalam komunikasi massa dipakai sepenuhnya demi mengangkat derajat organisasi."⁶ Citra dan kiprah

5 Kajian-kajian menyeluruh tentang tokoh ini meliputi seperti karya Amelz (1952), Anhar Gonggong (1985) dan M. Mashur Amin (1995).

6 Proses Tjokroaminoto bergabung dengan Sarekat Islam berkaitan dengan perkembangan organisasi yang didirikan oleh H. Samanhudi, Sarekat Dagang Islam. Perkembangan keadaan tidak memungkinkannya untuk mencurahkan

Tjokroaminoto sebagai sosok Ratu Adil dijelaskan dalam karya A.P.E. Korver (1985) dan Michael Francis Laffan (2003).

Namun, van Niel (1985: 146) melanjutkan penggambaran tentang sosok itu dari sisi yang berbeda. Ia menggambarkannya sebagai: “Sebenarnya, Cokroaminoto, tokoh ideal massa, walaupun memang benar-benar mempunyai maksud baik, adalah seseorang yang tidak mempunyai watak yang kuat dan teguh. Tak seorang pun dapat menyalahkan kalau ia tergetar oleh popularitas Sarekat Islam yang demikian mengherankan; dalam hal ini bukan hanya ia seorang yang seperti itu. Suasana yang membuat penampilannya tepat pada waktunya dan penting, kurang jelas pada waktu itu dibanding dengan sekarang. Oleh karena itu, ia sukar diharapkan untuk menyediakan program kerja untuk jangka panjang. Ia pun patut mencapat puji dengan usahanya untuk mendapatkan intelektual-intelektual Indonesia yang terbaik yang mau memasuki organisasinya, mengelilingi dirinya. Akan tetapi kegagalannya untuk memperlihatkan kepemimpinan yang konstruktif, penyusutan kebijaksanaan sehingga hanya berjangkauan pendek, ketidaksanggupan yang kronis untuk menjangkau lingkup masa depan organisasi, dan akhirnya tidak konsistennya rencana dan kebijaksanaan yang terus menerus dalam menghadapi nasihat-nasihat yang bertentangan dan tekanan-tekanan dari kawan dan sekutu, tidak membantunya membangun gambaran dirinya sebagai seorang pemimpin yang kuat. Keinginannya yang tunggal ialah mempertahankan kesatuan di dalam organisasi dan untuk menjalankan ini ia dapat dan telah menyetujui pendapat semua orang. Orang-orang di sekitarnya, yang terus berfungsi sebagai badan sentral *de facto* untuk Sarekat Islam, malahan sampai sesudah status legal telah ditolak, menyadari akan kekuatan penampilan di depan umum dan tahu, bahwa tanpa dia organisasi dapat terpecah belah.”

perhatian dan tenaga kepada perkumpulan itu, sehingga ia mencari sosok yang mampu menggantikannya untuk menjalankan roda organisasi. Pilihannya jatuh kepada Raden Oemar Said Tjokroaminoto yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Pemerintahan, OSVIA. Reputasinya menarik perhatian Samanhudi untuk mengirimkan utusan mengajaknya bergabung (van Niel 1985: 127-128).

Sementara Ruth McVey (2006: 85) menggambarkan sosoknya sebagai berikut, “Lebih jauh daripada pemimpin lainnya, ia merupakan simbol Sarekat Islam dan pengikut SI sebagian besar setia kepadanya ketimbang pada gerakan itu. Ia adalah seorang pemimpin yang sangat karismatis; gaya politiknya mirip dengan mantan anak asuhnya, Sukarno, dan pengaruhnya terletak pada pengakuan utama sebagai pemimpin yang terkenal dan dalam kemampuannya menyeimbangkan kelompok-kelompok yang bersaing satu dengan lainnya. Ia adalah seorang ahli pidato dan bukan pembina organisasi; tidak seperti pemimpin-pemimpin kelompok, ia tidak mewakili kepentingan khusus dalam gerakan itu melainkan mencoba untuk menampilkan suatu perpaduan berbagai kepentingan gerakan itu. Keprihatinan utamanya adalah untuk memelihara persatuan Sarekat Islam; kedudukannya tegantung pada hal ini; dan ia menyadari juga bahwa SI sekaligus muncul sebagai perwakilan semua orang Indonesia” ⁷ Pendapat McVey tentang orator dan bukan organisator mengingatkan pada kategori pemimpin Indonesia yang diungkapkan oleh Herbert Feith, yaitu *Solidarity Makers* dan *Administrators*. Ia juga memiliki karisma, sebagaimana yang tampak pada aura pemuka agama atau para kyai tradisional dari lingkungan pesantren, atau *kyai khos*. H.O.S Tjokroaminoto bukan seorang kyai karena memang tidak pernah memimpin pesantren atau memiliki latar belakang ilmu agama Islam yang terdidik baik, antara lain karena ia tidak fasih membaca aksara Arab.

7 Teks aslinya adalah *“Far more than any other leader he (Tjokroaminoto, pen) symbolized the Sarekat Islam, and the mass following the SI had acquired was in great part loyal to him rather to the movement itself. He was a strongly charismatic leader; his political style was similar to that of his sometime protégé, Sukarno, and his influence lay in his acknowledged primacy as a popular leader and in his ability to balance rival factions against each other. He was an orator and not an organizer; unlike the faction leaders, he represented no special interest within the movement but attempted to represent a synthesis of its various interests. His principal concern was to preserve the unity of Sarekat Islam; his position depended on this, and he realized also that once the SI appeared to representative of all Indonesians.”*

Meretas Persimpangan Gerbang Kemerdekaan

Sarekat Islam⁸ adalah organisasi pertama yang mengumandangkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Berbagai peluang yang muncul di tengah-tengah pengawasan politik pemerintah Hindia Belanda yang semakin ketat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan gagasan tersebut. Perjuangan itu dilakukan juga secara bertahap, termasuk di dalamnya bekerjasama dengan pemerintah kolonial seperti ikut bergabung menjadi anggota Dewan Rakyat (Volksraad), suatu lembaga parlementer semu yang tidak dibentuk melalui

8 Cikal bakal SI adalah perkumpulan yang bernama "Sarekat Dagang Islam" yang didirikan di beberapa kota yang berlatarbelakangkan persaingan dagang dengan Cina. H. Samanhudi mempeloporinya di Solo, lalu R. Tirtoadisurjo di Bogor. Asal usul pembentukannya dalam versi yang berbeda diajukan oleh Takashi Shiraisi (1997) sebagaimana dikutip dalam *Tempo* 21 Agustus 2011. Pada tahun 1912, Tjokroaminoto yang menggantikan Samanhudi mengganti dan mengubah sebutannya menjadi Sarekat Islam yang tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga politik dan agama. Sartono Kartodirdjo (1990: 107) menyebutkan bahwa "berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya, Sarekat Islam merupakan total, artinya tidak terbatas pada satu orientasi tujuan, tetapi mencakup pelbagai bidang aktivitas, yaitu ekonomi, sosial, politik dan cultural. Tambahan pula di dalam gerakan itu agama Islam berfungsi sebagai ideologi sehingga gerakan itu lebih merupakan suatu revivalisme, yaitu kehidupan kembali kepercayaan dengan jiwa atau semangat yang berkobar-kobar." Semen-tara Abdurrahman Surjomihardjo (1986: 47) menjelaskan bahwa "perkumpulan itu hanya menerima orang Muslim, tidak karena Sarekat Islam itu menjadi suatu partai agama, tetapi karena pertimbangan bahwa hanyalah Islam dapat dipergunakan dengan berhasil sebagai alat pengikat bagi penduduk Hindia yang heterogen itu. Yang berada di luarnya dengan itu akan terbatas pada bagian kecil yang tidak berarti. Bahwa Sarekat Islam bersifat nasionalis Hindia, ternyata dari anggaran dasarnya, dimana terdapat ketentuan bahwa orang Islam berkebangsaan asing tidak boleh menduduki tempat-tempat penting di dalam pimpinan partai..." Namun Roeslan Abdulgani (1976: 30-31) memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu: "Tetapi tidak dapat disangkal, bahwa berdirinya Budi Utomo lah yang memungkinkan timbulnya aliran-aliran baru-baru itu. Aliran politik-nasionalisme-nya Indische Partij dan ke-Islam-annya S.I. dan Muhammadiyah dapat mengalir setelah aliran cultural-nasionalisme-nya Budi Utomo bergerak. Tanpa bedah-nya sungai kulturil-nasionalisme-nya Budi Utomo, maka sungai politik-nasionalismenya Indische Partij dan sungai Islam-nasionalisme-nya S.I. dan Muhammadiyah tidak akan mengalir."

pemilihan umum melainkan dengan penunjukkan dan pengangkatan oleh pemerintah kolonial dan tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif seperti membuat undang-undang serta mengawasi mekanisme roda pemerintahan. Dewan ini lebih merupakan perwakilan organisasi pergerakan bumiputera yang terkadang mengajukan petisi dan pertimbangan lepas kepada pemerintah. Walau fungsinya terbatas, para tokoh pergerakan nasional memanfaatkan sepenuhnya peluang itu untuk menjalin komunikasi politik di antara sesama mereka yang memiliki keragaman latar belakang, *platform* dan pemikiran politik. Tidak jarang, persoalan yang diajukan kepada pemerintah kolonial mencerminkan keprihatinan dan kepedulian mereka terhadap nasib rakyat jajahan.

Tjokroaminoto melihat dan menggunakan peluang politik yang terbatas itu sebagai kancan perjuangan. Pembukaan Dewan Rakyat tahun 1918 dipandangnya sebagai langkah awal untuk berpemerintahan sendiri (*zelf bestuur*) yang menjadi agenda perjuangannya. Oleh karena itu, ia bergabung dengan fraksi konsentrasi radikal yang progresif dalam memperjuangkan hak-hak pemerintahan sendiri dan liberalisasi proses administrasi menuju pemerintahan sendiri (van Niel 1984: 190, 194). Walau perjuangan melalui sikap kooperatif itu hampir-hampir tidak memperlihatkan hasil yang diharapkan. Peluang yang ditangkap dan dimanfaatkan di lingkungan “demokrasi kolonial” yang semu (*half of a democracy*), tampak ketika menggunakan haknya sebagai anggota dewan saat pengajuan mosi yang dikenal sebagai mosi Tjokroaminoto. Tuntutan itu adalah hak pilih sepenuhnya harus ada pada rakyat, badan perwakilan yang mempunyai hak legislatif penuh dan parlemen yang mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Akan tetapi mosi ini akhirnya kandas di tengah jalan, karena tidak ada tanggapan dari pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, ia keluar dari dewan itu, dan mengambil cara non koperatif (Mohammad dkk. 2006: 31).

Tjokroaminoto, walau *self-made man* tetapi bukan *one man show* dalam

kiprah perjuangannya yang memperlihatkan tidak hanya jangkauan hubungan sosial-politik yang luas namun juga peranan, pengaruh dan sumbangsinya terhadap dunia pergerakan nasional, terutama terhadap tokoh-tokoh tertentu. Suwardi Suryaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, pernah bekerjasama dengannya.⁹

K.H. Wahab Hasbullah, salah satu murid terbaik K.H. Hasyim Asy'ari menjalin hubungan erat dengan Tjokroaminoto. Ulama ini adalah keturunan Kiai Sihan, pendiri pesantren Tambakberas di Jombang, dan dikenal sebagai 'santri kelana sejati' melanjutkan semangat gurunya untuk melibatkan ulama pesantren dalam kondisi modernitas Indonesia masa itu. Hubungan keduanya tampak pada penjelasan berikut; "Maka, di tahun 1916, Wahab Hasbullah bersama Mas Mansoer mendirikan Madrasah Nadhlatul Wathan, pusat pembelajaran Islam bergaya modern yang mengikuti langkah *kaum muda* Sumatera Barat. Dengan dukungan keuangan pengusaha Abdul Kahar, dan juga tokoh yang tengah naik daun semisal Tjokroaminoto, sebuah bangunan baru Nadhlatul Wathan didirikan. Di sinilah kepemimpinan Wahab Hasbullah mulai muncul. Madrasah ini digelar tidak hanya sebagai pusat pembelajaran,

9 Sumarsam (1995: 115, 116), mengutip dari Takashi Shiraisi (1990: 185) mengisahkan, bahwa "After his return from Holland in 1919, Soewardi resumed his involvement in political activity. He was appointed chairman of the central committee of the National Indies Party-Sarekat Hindia (National Indies Party Association of the Indies) and made his first public appearance in a Sarekat Hindia rally together with a commissioner of Sarekat Islam, Tjokroaminoto. Although the rally was meant to show the united front of Sarekat Hindia and Sarekat Islam in their anti-aristocrats campaign, Soewardi, a member of nobility himself, did not feel his royal blood presented a problem in leading the campaign." (Setelah kembali dari Negeri Belanda tahun 1919, Soewardi melibatkan diri dalam kegiatan politik. Ia diangkat sebagai ketua komite pusat Sarekat Hindia atau Partai Nasional Indis dan menampilkan diri dalam suatu pawai Sarekat Hindia bersama-sama dengan seorang wakil Sarekat Islam Tjokroaminoto. Walau pawai itu maksudnya untuk memperlihatkan persatuan perjuangan Sarekat Hindia dan Sarekat Islam dalam kampanye anti-bangsawan, Soewardi, seorang anggota ningrat, tidak merasakan darah ningratnya menjadi masalah untuk memimpin kampanye itu).

tetapi juga tempat pertemuan beberapa ulama muda yang diundang Wahab: Bisri Syansuri dari Jombang, Abdul Halim Leuwimunding dari Cirebon, Alwi Abdul Aziz, Maksum dan Kholil dari Lasem-Rembang, jawa Timur. Lewat madrasah ini, Wahab Hasbullah mulai mendirikan landasan kokoh untuk membangun jaringan kuat di antara tokoh-tokoh ulama pesantren masa depan” (Burhanudin 2012: 328-330).

Bahkan ia memiliki hubungan yang baik dengan kalangan non-muslim, seperti penjelasan ini, yakni: “Perkembangan SI yang sangat pesat – oleh Sumartana diibaratkan dengan ‘meteor raksasa yang meluncur dari sudut cakrawala yang satu ke sudut yang lain sambil memancarkan cahaya yang sangat terang dan mempesona setiap orang yang melihatnya’ – tidak hanya menarik perhatian dan simpati umat Islam, melainkan juga kalangan Kristen, seperti terlihat di Jawa Timur. Jerobeam Mattheus Jr., misalnya, yaitu salah seorang tokoh *Rencono Budiyo*, sebuah organisasi yang dibentuk kaum Kristen pribumi di Jawa Timur, menjalin hubungan pribadi yang baik dengan Tjokroaminoto maupun dengan sejumlah tokoh Muslim lainnya. Hubungan baik ini justru membawa dampak positif bagi gereja dan bagi hubungan Kristen dan Islam di daerah itu. Banyak orang Kristen di sana mengikuti jejak Mattheus, dan dengan itu mereka berhasil membangun sikap sendiri yang tidak selalu sama dengan sikap kalangan zending. Dengan demikian di antara kaum Kristen pribumi dan kalangan SI telah lahir saling memahami dan menghargai... Kalangan zending sendiri tidak selalu punya pendapat atau tanggapan yang sama tentang SI. Ketika SI baru terbentuk, walaupun ada dari antara para zendeling yang merasa cemas dan terancam, namun mereka pada umumnya memberi sambutan positif, karena melihat SI sebagai ungkapan hasrat masyarakat pribumi untuk memajukan diri” (Aritonang 2004: 155, 157).

Visi Tjokroaminoto yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan kader perjuangan melalui pendidikan politik. Bukannya tanpa maksud apabila kediamannya yang dijadikan tempat pemondokan sekaligus berfungsi

sebagai wadah penggodokan untuk mereka yang menjadi anak semangnya. Penghuni pemondokannya juga bukan dari kalangan yang biasa, karena pada umumnya adalah mahasiswa atau anggota organisasi pergerakan. Di antara mereka itu antara lain adalah Soekarno, Semaun, Muso, Alimin dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Suatu kenyataan yang menarik bahwa kelak para murid intelektual Tjokroaminoto itu berpisah jalan saat terjun ke arena politik pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Soekarno menjadi pemimpin terkemuka aliran perjuangan nasionalis pluralis; Semaun, Muso dan Alimin memilih pergerakan komunisme dan Kartosoewirjo mengibarkan panji perjuangan di bawah bendera Islam. Dalam sejarah politik Indonesia, pergolakan dan perubahan politik yang terjadi terkait erat dengan ketiga ideologi yang dirintis oleh mereka. Mungkin masih ada murid Tjokroaminoto lainnya yang bergerak dan berjuang di jalur ideologi lainnya, namun belum diketahui secara pasti.¹⁰

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang didengungkan oleh Soekarno dan Hatta, pergolakan politik terjadi pada tahun 1948 berupa pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun di bawah pimpinan Muso dan Alimin, tahun 1948 gerakan Darul Islam bentukan Kartosoewirjo memisahkan diri dari perjuangan kemerdekaan RI yang setahun kemudian memproklamasikan Negara Islam Indonesia (DI/ TII). PKI kembali bergerak hendak merebut kekuasaan pada tahun 1965, sedangkan gerakan DI/ TII meluas hingga ke Sulawesi Selatan pimpinan

10 "Sebagai seorang aktivis yang mengilhami banyak perjuang di tanah air, Tjokro juga berkiprah dan mendorong terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat keilmuan. Ia, antara lain, mendorong didirikannya Indonesische Studie Club (ISC) yang didirikan oleh dr. Soetomo pada Juli 1924 di Surabaya. Setahun kemudian, bersama Haji Agus Salim, membidani Jong Islamieten Bond (JIB) yang merupakan himpunan para mahasiswa dan pelajar Islam agar tidak lalai dengan agamanya, meskipun sekolah atau kuliah dengan cara Barat. JIB inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya para cendikiawan muslim di Indonesia" (Mohammad dkk 2006: 33).

Abdul Kahar Muzakkar, Kalimantan Selatan dan Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan T. Daud Beureuh dan Hasan Tiro.

Soekarno mengenal sosok Tjokroaminoto berawal dari proses melanjutkan pendidikan sekolahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan ELS (Europeesche Lagereschool) di Mojokerto tahun 1916, ia meneruskannya di Surabaya pada sekolah HBS (Hollandsche Burgerlijke School). Dalam proses itu, ayahnya meminta bantuan pada temannya, Oemar Said Tjokroaminoto, yang juga menyediakan pemondokan untuknya. John D. Legge (1996: 40) memaknai masa itu, sebagai “Kejadian ini akan membawa arti yang menentukan untuk masa depan karena Tjokroaminoto yang menjabat ketua organisasi massa nasionalis Sarekat Islam adalah tokoh pusat nasionalisme Indonesia pada saat itu, dan Surabaya merupakan tungku pemikiran dan aksi nasionalis. Di rumah induk semangnya itulah Sukarno mendapatkan pengalaman pertamanya mengenai gairah yang mulai mengusik masyarakat Indonesia dan energi politik yang mempersiapkan perlawanan terorganisasi melawan pemerintah kolonial.”

Sementara kesan dan kenangan Soekarno tentang mantan mertuanya (Adams 2011), adalah:

“Oemar Said Tjokroaminoto berumur 33 tahun ketika aku datang ke Surabaya. Pak Tjokro mengajarku tentang apa dan siapa dia, bukan tentang apa yang ia ketahui ataupun tentang apa jadiku kelak. Seorang tokoh yang mempunyai daya cipta dan cita-cita tinggi, seorang pejuang yang mencintai tanah tumpah darahnya. Pak Tjokro adalah pujaanku. Aku muridnya. Secara sadar atau tidak sadar ia menggembangkan. Aku duduk dekat kakinya dan diberikannya kepadaku buku-bukunya, diberikannya padaku miliknya yang berharga.”

Kenangan selanjutnya menyiratkan ungkapan sepenggal proses pembentukan pemikiran politik dan ideologinya saat-saat bersama dengan

tokoh yang dikaguminya itu dalam kesempatan bersama-sama dengan sosok pergerakan lainnya yang juga digembleng oleh Pak Tjok (Adams 2011), yaitu:

“.....Aku menyukai waktu makan, Kami makan secara satu keluarga, jadi aku dapat mengikuti dan meresapkan percakapan politik. Pada waktu mereka melepaskan lelah di sekeliling meja, aku bahkan kadang-kadang berani mengajukan pertanyaan. Mahaputera-mahaputera ini putera putera yang besar dari rakyat Indonesia, tidak mengacuhkanku karena aku masih anak-anak. Sekali pada waktu makan malam mereka mempersoalkan tentang kapitalisme dan tentang barang-barang yang diangkut dari kepulauan kami untuk memperkaya Negeri Belanda. Disaat inilah aku bertanya pelahan, “Berapa banyak yang diambil Belanda dari Indonesia?”, “Anak ini sangat ingin tahu,” senyum Pak Tjok, kemudian menambahkan, “De Vereenigde Oost Indische Compagnie menyedot — atau mencuri— kira kira 1800 juta gulden dari tanah kita setiap tahun untuk memberi makan Den Haag. “Apa yang tinggal di negeri kita?” kali ini aku bertanya lebih keras sedikit. “Rakyat tani kita yang mencucurkan keringat mati kelaparan dengan makanan segobang sehari,” kata Alimin, yaitu orang yang memperkenalkanku kepada Marxisme. “Kita menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa,” sela kawannya yang bernama Muso. “Sarekat Islam bekerja untuk memperbaiki keadaan dengan mengajukan mosi-mosi kepada Pemerintah,” kata Pak Tjok menerangkan dan kelihatan senang karena mempunyai murid yang begitu bersemangat. “Pengurangan pajak dan serikat-serikat sekerja hanya dapat digerakkan dengan kooperasi dengan

Belanda —sekalipun kita membenci kerjasama ini.” Tapi apakah baik untuk membenci seseorang sekalipun ia orang Belanda?”. ‘Kita tidak membenci rakyatnya,’ dia memperbaiki, ‘Kita membenci sistem pemerintahan Kolonial.’ Mengapa nasib kita tidak berubah jika rakyat kita telah berjuang melawan sistem ini sejak berabad-abad?. ‘Karena pahlawan-pahlawan kita selalu berjuang sendiri-sendiri. Masing-masing berperang dengan pengikut yang kecil di daerah yang terbatas,’ Alimin menjawab. ‘0, mereka kalah karena tidak bersatu,’ kataku. Ahli pikir India, Swami Vivekananda, menulis, ‘Jangan bikin kepalamu menjadi perpustakaan. Pakailah pengetahuanmu untuk diamalkan.’ Aku mulai menerapkan apa-apa yang telah kubaca kepada apa yang telah kudengar. Aku memperbandingkan antara peradaban yang megah dari pikiranku dengan tanah airku sendiri yang sudah bobrok. Setapak demi setapak aku menjadi seorang pencinta tanah air yang menyala-nyala dan menyadari bahwa tidak ada alasan bagi pemuda Indonesia untuk menikmati kesenangan dengan melarikan diri ke dalam dunia khayal.”

Malahan, secara pribadi, Soekarno tidak segan-segan mengakui bahwa kebersamaannya itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap dirinya, terutama kemampuan berpidato, walau bakat itu juga sudah dimilikinya sejak di bangku sekolah HBS. Kutipan di bawah ini menceritakan pengakuan itu, yakni:

“.....Sekalipun kedudukanku sebagai orang yang baru kawin, waktuku di malam hari kupergunakan untuk mempelajari Pak Tjokro. Aku menjadi buntut dari Tjokroaminoto. Kemana dia pergi aku turut. Sukarnolah

yang selalu menemaninya ke pertemuan-pertemuan untuk berpidato, tak pernah anaknya. Dan aku hanya duduk dan memperhatikannya. Dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat. Sekalipun demikian, setelah berkali-kali aku mengikutinya aku menyadari, bahwa dia tak pernah meninggikan atau merendahkan suaranya dalam berpidato. Tak pernah membuat lelucon. Pidato-pidatonya tidak bergaram. Aku tidak pernah membaca salah satu buku yang murah tentang bagaimana cara menjadi pembicara di muka umum. Pun tidak pernah berlatih di muka kaca. Bukanlah karena aku sudah cukup berhasil, akan tetapi karena aku tidak mempunyai apa-apa.

Cerminku adalah Tjokroaminoto. Aku memperhatikannya menjatuhkan suaranya. Aku melihat gerak tangannya dan kupergunakan penglihatanku ini pada pidatoku sendiri. Mula-mula sekali aku belajar menarik perhatian pendengarku. Aku tidak hanya menarik, bahkan kupegang perhatian mereka. Mereka terpaksanya mendengarkan. Suatu getaran mengalir ke sekujur tubuhku ketika mengetahui, bahwa aku memiliki suatu kekuatan yang dapat menggerakkan massa. Aku menguraikan pokok pembicaraanku dengan sederhana. Pendengarku menganggap cara ini mudah untuk dimengerti, karena aku lebih banyak mendasarkan pembicaraanku kepada cara bercerita, jadi tidak semata-mata memberikan fakta dan angka. Aku berbuat menurut getaran perasaanku. Pada suatu malam Pak Tjokro tidak dapat memenuhi undangan ke suatu rapat dan kepadaku dimintanya untuk menggantikannya. Kali ini adalah suatu pertemuan kecil, akan tetapi aku menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Aku mulai dengan suara lunak. ‘Negeri kita, saudara, adalah tanah yang subur,

sehingga kalau orang menanamkan sebuah tongkat ke dalam tanah, maka tongkat itu akan tumbuh dan menjadi sebatang pohon. Sekalipun demikian rakyat menderita kekurangan dan kemelaratan adalah beban yang harus dipikul sehari-hari'" (Adams 2011).

Bakti Soekarno terhadap Tjokroaminoto tampak jelas pada saat tokoh SI itu ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda sehubungan dengan gerakan-gerakan di sejumlah tempat yang mengatasnamakan SI melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Selama dipenjara, tanggung jawab menghidupi keluarganya diambilalih oleh Soekarno. Juga ketika dibuang ke pulau Ende, ia tetap berhubungan melalui kurir rahasia dengan mantan mertuanya itu (Triatmono 2010: 131).

Tentang Kartosoewirjo yang pernah tinggal di kediaman tokoh SI itu bahkan sempat bersama-sama dengan Soekarno tergambar dalam penjelasan berikut, bahwa "Apa yang dikatakan Soekarno tentang Surabaya mungkin juga mengesankan Kartosoewirjo. Walaupun ia tiba di kota itu dua tahun sesudah Soekarno pindah dari Surabaya ke Bandung, pengalaman politik yang diperolehnya di sini dalam banyak hal sama dengan yang dialami Soekarno. Keduanya mempunyai mentor politik yang sama, seorang nasionalis yang paling terkemuka dan popular dalam masanya; pemimpin Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Keduanya tinggal di rumah Tjokroaminoto selama masa yang hampir bersamaan ketika di Surabaya dan memperoleh banyak pengalaman politik awalnya di sini.....Kartosoewirjo tinggal bersama Tjokroaminoto sesudah dia dikeluarkan dari NIAS pada tahun 1927, dan sesudah mengajar sebentar di Bojonegoro. Boleh dikatakan seketika itu juga ia menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto, dan terus melanjutkan fungsi ini sampai 1929." (van Dijk 1983: 13-14)

Pendapat yang berbeda tentang keterangan bahwa sosok itu pernah tinggal di kediaman Tjokroaminoto berasal dari Holk H. Dengel (2011: 8),

yang menjelaskan: “Melalui keanggotaan di organisasi-organisasi pemuda Jong Java dan *JIB*, Kartosoewirjo berkenalan dengan tokoh Agus Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSI (Partai Serikat Islam) jang kharismatik, yang pandangan politiknya, terutama cita-citanya akan suatu negara Islam, di kemudian hari ternyata sangat mempengaruhi jalan pemikiran Kartosoewirjo. Tetapi ketika tinggal di Surabaya, Kartosuwirjo tidak pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto, seperti yang ditulis van Dijk. Kartosuwirjo baru mengenal Tjokroaminoto secara pribadi ketika Tjokroaminoto dan Agus Salim kembali dari perjalanan naik haji ke Mekah. Ketika kartosoewirjo pada awal tahun 1927 dikeluarkan dari NIAS, dia juga dikeluarkan dari *JIB* dan dia kembali untuk beberapa bulan ke Bojonegoro, dimana dia bekerja sebagai guru partikulir untuk membiayai hidup ibunya, karena ayahnya sudah meninggal dunia pada tahun 1925.”

Berikutnya, Dengel (2011: 9) melanjutkan temuannya mengenai pertemuan keduanya, dalam penjelasan sebagai berikut, bahwa “Dalam bulan September pada tahun yang sama, Kartosuwiryo kembali ke Surabaya dan menerima tawaran Haji Oemar Said Tjokroaminoto untuk menjadi sekretaris pribadinya. Tak lama kemudian Haji Oemar Said pindah ke Cimahi dekat Bandung, Kartosuwirjo juga menemaninya ke sana, tetapi dia tidak tinggal bersama Tjokroaminoto. Di rumah Tjokroaminoto di Cimahi untuk pertama kalinya bertemu dengan Soekarno, yang pada saat itu telah menjadi ketua PNI (Perserikatan Nasional Indonesia). Soekarno bertempat tinggal di Bandung sering pergi ke Cimahi ke rumah Tjokroaminoto. Di sini mereka lama berdiskusi tentang politik, dan Kartosuwirjo mendapat kesan, seperti yang diterangkannya pada waktu diintrogasi tahun 1962, bahwa Tjokroaminoto adalah penasehat politik Soekarno pada masa itu.”¹¹

11 Chiara Formichi (2012: 43) mengungkapkannya hampir serupa, yaitu “.... *Kartosuwiryo moved to Surabaya in 1923. It is unclear how he entered the Sarekat Islam circle, but it is likely that during his days at the medical school, his interest in politics brought him to the steps of Tjokroaminoto's house. In the 1910s and early 1920s Tjokroaminoto's residence also functioned as Sarekat Islam's office and was a known hub for*

Pengaruh Tjokroaminoto selanjutnya tampak pada sejumlah sosok yang menganut faham Komunisme. Beberapa nama disebut pernah menetap di kediamannya yang memang terbuka tidak hanya untuk indekos (sewa kamar) dan kunjungan. Musso disebut pernah menjadi anak semangnya. Sedangkan sosok lainnya dikatakan merupakan rekan tukar pikiran dan debat. Keadaan itu digambarkan sebagai “Selama berumah tangga di Surabaya, Tjokroaminoto menyediakan rumahnya untuk pondokan anak-anak sekolah, baik keluarga sendiri maupun orang luar...pengaruhnya terhadap para pelajar yang mondok di rumah itu tidak hanya sebentar tetapi bertahun-tahun lamanya...suasana rumah tangga Tjokroaminoto dirasakan makin mendalam bagi pemuda pelajar serta merupakan ‘Markas Sarekat Islam’. Rumah beliau tidak henti-hentinya dikunjungi tamu bermacam-macam bangsa, corak dan

socio-political discussions. Soekarno would recall his boarding days at Tjokroaminoto's in 1915-16 as crucial to his political formation. In 1962, Kartosuwiryo reportedly stated that it had been during a trip with Tjokroaminoto to Cimahi, north of Bandung, West Java, that he had first met Soekarno in 1927. This meeting could be connected to Kartosuwiryo's presence at the Pekalongan Congress discussed below, a congress in which both Tjokroaminoto and Soekarno participated. The congress would also explain Kartosuwiryo's presence in Batavia in early 1928, soon after Tjokroaminoto's moving there and establishing Fadjar Asia's office in Weltevreden in November 1927.” (Kartosuwiryo pindah ke Surabaya tahun 1923. Tidak jelas bagaimana ia masuk lingkaran Sarekat Islam, tetapi tampaknya bahwa selama ia di sekolah kedokteran, perhatiannya terhadap politik membawanya ke tangga rumah Tjokroaminoto. Pada tahun 1910an dan awal 1920an, kediaman Tjokroaminoto juga berfungsi sebagai kantor Sarekat Islam dan tempat yang dikenal untuk perbincangan politik dan kemasyarakatan. Sukarno mengenang saat-saat tinggal di tempat Tjokroaminoto tahun 1915-16 sebagai masa yang penting untuk pembentukan politiknya. Tahun 1962, Kartosuwiryo mengaku bahwa saat perjalanan dengan Tjokroaminoto ke Cimahi, Bandung utara, Jawa Barat, bahwa ia pertama kali bertemu Soekarno tahun 1927. Pertemuan ini dapat dikaitkan dengan kehadiran Kartosuwiryo di Kongres Pekalongan yang dibicarakan di bawah ini. Kongres itu juga akan menjelaskan kehadiran Kartosuwiryo di Batavia awal tahun 1928, segera setelah Tjokroaminoto pindah ke sana dan mendirikan kantor *Fadjar Asia* di Weltevreden bulan Nopember 1927).

haluannya, dari kaum ningrat hingga jembel... rumah tangga itu merupakan kancah mengadu keuletan ideologi antara Tjokroaminoto dengan Alimin, Semaoen dan Darsono (Gonggong 1993: 68-69).

Tjokroaminoto sangat antusias dalam pembinaan kader intelektual muda yang tidak hanya berpengetahuan sekulerisme yang yang tetapi juga penghayatan agama yang baik. Oleh karena itu ketika; “Fakih Hasyim bersama Mas Mansyur kemudian mendirikan kelompok diskusi agama, Ihyaussunnah. Tjokroaminoto rupanya menaruh simpati kepada kelompok ini. Dibantu Mas Mansyur, Tjokro membuat forum dakwah Ta’mirul Ghoflin. Lewat forum ini, Tjokro beberapa kali mengundang Ahmad Dahlan berceramah di Peneleh VII...Diskusi seperti itulah yang menempa pemuda Sukarno, Semaoen, Musso, dan Kartosoewirjo. Namun kita sama mafhum, Sukarno, Musso, Alimin, Semaoen, dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo belakangan berpisah jalan dengan sang mentor, Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, Musso dan Alimin menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia, sedangkan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, sekretaris Tjokroaminoto, malah angkat senjata melawan pemerintah lewat gerakan Darul Islam” (*Tempo* 21 Agustus 2011: 43).¹²

12 Tentang Musso dan Alimin terdapat dalam karya Ruth McVey (2006: 169), yang memaparkan, *“Musso was born in 1897 in Pegu, a village in the residency of Kediri. He attended high school and teacher training school in Batavia; there he was a friend of Alimin and a protégé first of Hazue and then of the educator, theosophist, and Ethical reformer D van Hinloopen Labberton. Like Alimin, he lived for a time at the Tjokroaminoto boardinghouse in Surabaja, where he met Sukarno, with whom he was one day to compete for control of Indonesia’s revolutionary Republic. Like Alimin, too, he divided his loyalties between several political organizations—in his case, insulinde, Sarekat Islam, and the ISDV—and was considered in the Jogjakarta-Semarang competition as an ally of Tjokroaminoto.”* (Musso lahir tahun 1897 di Pegu, suatu desa di residensi Kediri. Ia mengikuti sekolah tingkat atas dan sekolah pendidikan guru di Batavia; di sana ia berteman dengan Alimin dan anak asuh awalnya dari Hazue dan kemudian seorang pendidik, penganut teosofi dan pembaharu politik Etis D van Hinloopen Labberton. Seperti Alimin, ia tinggal beberapa waktu di tempat tinggal Tjokroaminoto, dimana ia bertemu Sukarno, dengan siapa suatu

Tjokroaminoto tidak hanya mempersiapkan dan menempa sosok-sosok pengisi pergerakan kebangsaan dan perjuangan menuju kemerdekaan, melainkan lebih pada membuka wawasan cerdas, sadar dan luas tentang pilihan-pilihan peranan dalam mengantisipasi zaman yang sedang bergerak dan berubah, membuka relung-relung emansipasi dan kesadaran sosial politik di bawah belenggu kolonialisme yang harus didobrak. Ia meretas jalur-jalur pilihan untuk mencapai kemerdekaan.

Priyayisme Tjokroaminoto

Dalam banyak karya berbagai julukan dan sebutan diberikan dan disandangkan kepada Tjokroaminoto. Juga pemerintah kolonial memiliki sebutan tersendiri untuknya, yaitu Raja tanpa mahkota (*ongekroonde koning*). Berbagai sebutan itu membiasakan kemampuan, tekad dan kiprah perjuangannya dalam mengabdikan diri kepada bangsa yang masih dalam bayangan (*imagined*) dan mulai bergerak membentuk suatu identitas kolektif nyata di tengah-tengah dinamika kolonialisme. Berbagai sebutan itu juga mencerminkan kompleksitas sosoknya yang jarang tandingannya pada masa itu. Kompleksitas itu merentang dari pemikiran, ranah kegiatan, dan strategi perjuangan. Pemikirannya menjelajah isme-isme global seperti Islamisme, Nasionalisme (sekuler), Kapitalisme, Sosialisme dan Marxisme, di samping falsafah dan kearifan budaya asalnya sebagai priyayisme. Ranah kiprahnya tidak hanya di kalangan priyayi, pedagang, atau politisi melainkan juga petani, buruh dan kelompok miskin. Sementara strategi perjuangannya selain melalui organisasi modern, rapat umum, penggalangan massa dan pembinaan kelompok kecil. Kediamannya selalu terbuka untuk mereka yang hendak belajar dan berdiskusi tentang berbagai hal yang hendak meraih

hari ia memperebutkan kendali revolusi Republik Indonesia. Seperti Alimin, juga, ia membelah kesetiaannya antara beberapa organisasi politik—dalam kasusnya—Insulinde, Sarekat Islam, dan ISDV—and dalam persaingan Yogyakarta dan Semarang dipandang sebagai sekutu Tjokroaminoto).

kemajuan. Banyak sosok yang memperoleh pencerahan batin dan intelektual dalam sentuhan dan binaannya. Sebagian dari mereka merupakan tokoh dan pemimpin organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, lepas dari belenggu kolonialisme.

Tjokroaminoto lahir dan berkembang di lingkungan budaya dan masyarakat Priyayi. Paradigma kehidupannya tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan itu. Dalam konfigurasi budaya yang kerap dikenakan pada masyarakat dan budaya Jawa, priyayi adalah suatu varian budaya yang berbeda dengan santri dan abangan, sebagaimana dirintis oleh Clifford Geertz (1983). Teori ini sudah menghadapi dan mengalami berbagai tanggapan, kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, terutama para akademisi. Di antara pokok-pokok pemikiran yang muncul dalam perdebatan dan silang pendapat itu, unsur budaya priyayi tidak terlepas dari pengaruh Islam, yang berinteraksi dengan adat istiadat dan keyakinan yang datang dan berpengaruh sebelumnya.¹³ Oleh karena itu, pada suatu saat dan kondisi tertentu, kelompok

- 13 Penjelasan berikut mendukung uraian tersebut, yakni (Formichi 2012: 21): *"In its early years, Sarekat Islam's strength lay in Tjokroaminoto's ability to create a bridge between socialism and Islam. From a mixed santri-priyayi background, Tjokroaminoto succeeded in reaching farmers, coolies and intellectuals, addressing issues of social and economic inequality as well as pointing to Islam as the foundation of society. Tjokroaminoto assumed leadership in 1912 and retained it until his death in 1934. He had attended the Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, Training School for Native officials) in Magelang and the Burgerlijke Avondschool (Civil Evening School) in Surabaya, where he became proficient in the English language and at the same time received a religious education. As long as Tjokroaminoto led the group, Sarekat Islam was primarily concerned with advancing the socio economic conditions of the widely exploited Javanese peasantry."* (Pada tahun-tahun awalnya, kekuatan Sarekat Islam terletak pada kemampuan Tjokroaminoto membangun sebuah jembatan antara sosialisme dan Islam. Dari latar belakang campuran santri-priyayi, Tjokroaminoto berhasil menjangkau petani, kuli dan intelektual, menyampaikan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi juga merujuk pada Islam sebagai landasan masyarakat. Tjokroaminoto menjadi pemimpin tahun 1912 dan memangkunya hingga akhir hayatnya tahun 1934. Ia mengikuti Sekolah pendidikan Pejabat Pribumi (OSVIA) di Magelang dan Sekolah Umum Malam di

priyayi dapat berada di tengah-tengah pengaruh-pengaruh itu.

Priyayisme merujuk kepada alam pemikiran dan gagasan yang berasal dari lingkungan budaya Jawa yang kejawen, sebagai perpaduan berbagai budaya yang datang dan dapat direntangkan mulai dari Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat hingga Eropa. Budaya India dari Asia Selatan membawa ajaran dan falsafah Hinduisme yang mengajarkan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan dalam simbolisme sakral hubungan manusia dan penguasa alam. Dari Asia Timur datang pengaruh Budhisme yang segera bersintesis dengan Hinduisme. Lalu, agama Islam dari Asia Barat menegaskan keesaan dan emanasi Ilahi dengan makhluk ciptaanNya dalam sinkretisme dengan budaya yang ada. Arus globalisasi budaya ditambah oleh pengaruh Eropa yang tiba dalam dominasi kolonialisme yang segera memperoleh tanggapan reseptif dan resistensi. Sekuleristik Barat tampaknya memperlihatkan beberapa kesesuaian dengan pandangan priyayisme.

Takashi Shiraisi (1990: 39) menjelaskan munculnya kaum muda sebagai akibat dari pengenalan dan penerapan pendidikan Barat yakni:

“Pendidikan gaya Barat tidak hanya sekuler, tetapi juga masuk ke dalam tatanan kolonial yang terbagi secara rasial dan linguistik, serta terpusat secara politik, sedangkan pendidikan tradisional pada dasarnya bersifat religious. Dalam pendidikan gaya Barat, semakin tinggi sekolah seseorang maka ia semakin dekat dengan pusat kota dunia. Dengan demikian, kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang ‘pantas’ semakin terbuka, namun akan semakin terisap ke dalam dunia bahasa Belanda, makin modern dan makin jauh ia dari cara hidup yang dijalani generasi orang tuanya.

Dalam proses metamorphosis ini ada dua unsur yang sangat

Surabaya, dimana ia menjadi fasih dalam bahasa Inggris dan bersamaan dengan itu memperoleh pendidikan agama. Selama Tjokroaminoto memimpin kelompok itu, Sarekat Islam terutama memperhatikan kemajuan keadaan sosio ekonomi pedesaan Jawa yang sangat diperlakukan.

mendasar.

Pertama, seperti yang selalu ditunjukkan, pendidikan gaya baru menyediakan kunci bagi mobilitas, tetapi mobilitas yang dimaksud adalah mobilitas di dalam tatanan sosial dengan stratifikasi rasial yang diciptakan oleh negara Hindia. Dengan demikian, bumiputra tetap bumiputra, betapapun tinggi pendidikannya. Tidak peduli Jawa, Sunda, Minangkabau, atau apa pun karena semuanya adalah bumiputra. Jadi, kategori bumiputra, yang hanya bermakna dalam konteks dominasi kolonial, menjadi dasar solidaritas bagi mereka yang mendapatkan pendidikan gaya Barat yang diciptakan Belanda.

Kedua, pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan setelah lulus jelas berbeda dari generasi orang tua mereka. Kenyataan bahwa mereka menempuh pendidikan modern dan bekerja sebagai kelas menengah kota penerima gaji yang baru terbentuk menjadi dasar solidaritas generasi mereka. Mereka menyebut diri dengan istilah kaum muda, yang lebih modern dan maju ketimbang orang tua mereka dan orang-orang yang tidak berpendidikan gaya Barat. Di antara kaum muda, mereka yang masuk sekolah dasar dan sekolah menengah Belanda juga lebih maju dari mereka yang mengikuti sekolah bumiputra. Kuncinya adalah kemampuan bahasa Belanda dan/ atau akses mereka terhadap dunia Belanda di Hindia karena Belanda yang memberi contoh tentang modernitas dan bahasa Belanda merupakan kunci untuk membuka dunia dan zaman modern.

.....Itulah kaum muda dan zaman di mana mereka hidup. Hal ini tidak berarti bahwa kaum muda menjadi Barat secara menyeluruh dan terpotong dari gagasan, persepsi, kebiasaan,

dan etika tradisional. Mereka sama sekali tidak demikian. Yang penting adalah hal-hal tradisional kehilangan maknanya yang utuh dan mereka dipaparkan berdampingan dengan hal-hal modern sehingga sesuai dengan gaya modernnya kaum muda dan maknanya pun mengalami perubahan. Hal yang unik dalam masa ini adalah persejajaran diri”

Priyayisme tidak sepenuhnya terikat pada Tradisi Besar (*Great Tradition*) yang terpusat di keraton atau kerajaan.¹⁴ Tradisi Besar itu menjadi runutan dan panutan priyayisme dalam menentukan jati diri, substansi dan gaya hidup yang berbudaya dan beradab, seperti pada masa kehidupan leluhur. Budaya keraton sangat kuat mempengaruhi priyayisme. Keberadaan priyayi terkait erat dengan politik keraton. Namun, priyayisme tidak membatasi diri hanya pada sumber keinginan itu. Suatu kenyataan yang menarik adalah bahwa cita-cita emansipasi dan kebebasan dalam priyayisme tidak lagi bersifat navistik, seperti merestorasi kekuasaan lama apakah itu Majapahit atau Mataram, melainkan bentuk kehidupan politik yang baru selaras dengan zaman dan berasal dari budaya Barat, yaitu bangsa dan negara modern.¹⁵ Priyayisme modern memilih ruang dan wadah baru untuk cita-cita dan kehidupannya seperti pengaruh yang diperoleh dalam pengalaman

14 Sebagai tradisi, Priyayisme mencakup golongan bangsawan atau aristokrat, sebagaimana tersirat dalam penggolongan sosial budaya dari kajian C. Geertz (1983).

15 Walau dalam pidato Soekarno disebut-sebut Majapahit sebagai zaman keemasan yang menjadi acuan negara yang diperjuangkan, bentuk monarki bukan pilihannya untuk Indonesia yang merdeka. Lihat gagasan Soekarno tentang zaman keemasan pada William Frederick & Soeri Soeroto (1984). Malahan, warisan kejayaan kerajaan Mataram yang tersebar menjadi kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran, menjadi bagian dari sebuah negara modern, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau pengaruh budaya politik Mataram tampak jelas tergurat pada budaya politik nasional hingga saat ini.

interaksi dengan faham Barat, atau pengaruh pembaratan (Westernisasi).

Priyayisme yang juga kerap disebut sebagai feodalisme, walau sistem sosial ini tidak sepenuhnya tampak pada perjalanan sejarah sosial budaya Jawa, ikut membentuk kebudayaan Indonesia, yang gencar diperbincangkan dan dikonstruksi seiring dengan perjuangan membentuk nusa, bangsa dan negara Indonesia. Priyayisme memilah masyarakat antara lapisan *gusti* dan *kawulo* dalam hubungan yang menyatu atau *manunggaling*. Hubungan yang berpola *patron-client* ini bergerak dalam ikatan kewajiban dyadik yang saling menopang dalam memelihara kelangsungan (*survival*) dan di bawah nuansa keselarasan, keseimbangan dan keserasian. Dalam mangkuk sintesis, sinkretis dan dialektis keragaman budaya yang tidak melebur menjadi satu (*melded*) melainkan membentuk untaian mosaik yang selalu bergerak dan berubah selaras dengan perubahan internal dan perkembangan zaman, priyayisme membentuk suatu mentalitas, paradigma dan kearifan.

Dalam sudut pandang modernisme, seperti yang dilontarkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana (Tangkilisan 2010) yang terkenal pada suatu perdebatan tentang kebudayaan Indonesia sebagai polemik kebudayaan, priyayisme yang berakar pada kebudayaan Jawa yang tradisional merupakan tanggapan dan pertarungan budaya yang kalah terhadap pengaruh budaya Barat sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejarah politik dengan kejatuhan kerajaan-kerajaan Nusantara ke dalam jaringan kolonialisme-imperialisme. Onghokham (1990), Ben (BRO'G) Anderson (2001) dan sejumlah pakar Javanologi lainnya berpendapat bahwa tanda kekalahan budaya itu tampak pada pergeseran signifikansi peranan dalang yang memudar dan digantikan oleh peranan sentir yang penting dalam suatu pementasan wayang. Juga pencarian kearifan dalam kisah-kisah kesenian warisan adiluhung leluhur itu merupakan cerminan pelarian dari kenyataan politik (*escapism*) yang sudah didominasi oleh kekuatan kolonial. Namun, priyayisme sejak awal merupakan latar budaya yang terbuka untuk pengaruh yang datang dari luar sebagai bentuk dari difusi kebudayaan yang timbul bersamaan dengan

dinamika globalisme dan memiliki kemampuan menyesuaikan, menyerap dan menyaring anasir-anasir yang datang.¹⁶ Hingga pada saatnya, pemikiran dan ideologi Barat, yang diperoleh melalui introduksi pendidikan dan sekolah, tentang kebebasan, menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan menjadi senjata dan alat yang ampuh untuk melawan upaya restorasi kolonialisme Belanda pada tahun 1945-1949. Walau sebelumnya, superioritas dan supremasi Barat telah dihancurkan oleh serbuan bala tentara Jepang pada tahun 1942, yang pada awal abad ke-20 sempat mendorong emansipasi Asia (Dunia Timur) ketika mengalahkan Rusia dalam perang 1904-1905.

Soetomo, yang juga berasal dari lingkungan priyayi dan memiliki latar belakang pendidikan kedokteran di STOVIA, mempunyai pandangan bahwa lapisan priyayi berbeda dengan kalangan biasa dalam tingkat intelektualitas dan kesadaran sosial politik. Namun, ia tetap menyerukan dan menggalang potensi priyayi, yang sering tidak memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial lapisan bawahan mereka, untuk memajukan rakyatnya. Kewajiban sosial itu merupakan wujud panggilan jiwa ksatria sebagaimana dalam kisah pewayangan yang tidak hanya menjadi rujukan kearifan hidup tetapi juga merupakan refleksi perjalanan kehidupan manusia di dunia (Tangkilisan 2013). Kedua tokoh ini memiliki kesamaan pengalaman perjuangan, yaitu berangkat dari dunia priyayi dan nasionalisme etnis (*ethno-nationalism*) serta menjadi anggota Volksraad, namun memiliki perkembangan pandangan nasionalisme yang berbeda, yaitu nasionalisme religious dan sekuler.¹⁷ Malahan, jejak perjuangan pergerakan Soetomo

16 Peninggalan penulisan tradisional seperti serat, kisah panji, babad, silsilah, kidung, suluk dan lainnya, serta kitab-kitab seperti Pararaton, Negarakertagama, dan sejenisnya merupakan wujud perjalanan interaksi dan sumber pembentukan priyayisme.

17 "Peran Islam yang substantif dan simbolis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan kunci perdebatan tentang definisi hubungan Islam, negara, dan masyarakat setelah kemerdekaan. Seperti gerakan anti-kolonialisme di negara lain, di India, misalnya, narasi tentang kemerdekaan Indonesia berbeda satu sama lain. Sarekat Islam (SI) yang didirikan pada 1911 menggunakan Islam

merekam inspirasi dan pengaruh Tjokroaminoto, yakni “Barangkali ide untuk *Studieclub* ini (*Indonesische Studieclub*, pen.) berasal dari *Nationale Congressen* (kongres nasional). Ide ini berasal dari Tjokroaminoto yang tujuannya untuk mengumpulkan beberapa kalangan masyarakat yang beranekaragam. Dengan cara demikian terdapat peluang bagi individu-individu dan perhimpunan-perhimpunan untuk bersama-sama berbicara dan bertindak secara nasionalis” (Dhont 2005: 38).

Soetomo pernah menolak prakarsa Tjokroaminoto yang hendak memperkuat persatuan melalui penyelenggaraan “Kongres Kebangsaan Hindia” tahun 1923 dan sejak itu hubungan antara kedua gerakan nasionalis itu menjadi renggang (Rambe 2008: 196). Ketika Soetomo mengutarakan pandangannya bahwa ia berpihak pada gerakan bekerjasama dengan pemerintah jajahan (kooperasi) tahun 1926, Partai Sarekat Islam segera melarang anggotanya bergabung dengan studi klub pimpinannya (Dhont 2005: 74). Walau begitu, Tjokroaminoto cukup popular di kalangan Budi Utomo. Pada kongresnya tahun 1917, yang menentukan garis politik perjuangannya, pencalonan pada dewan rakyat pun menjadi agenda pembicaraan. Sosok calon yang muncul, selain dari kalangan anggota perkumpulan itu seperti dr. Soetomo, Woerjaningrat dan Sastrowidjono, terdapat nama Tjokroaminoto, ketua Central Sarekat Islam (Nagazumi 1989: 104-105).

Pemikiran Tjokroaminoto tampak pada ranah ideologi nasionalisme, sosialisme dan Islam. Pada suatu pidatonya tahun 1914 yang dimuat dalam surat

sebagai struktur pemersatu dalam memobilisasi kesadaran nasional. Ketika konsep nasionalisme Hindia Belanda diajukan oleh Kongres Nasional Hindia Belanda pada 1922, beberapa pemimpin gerakan, seperti Tjokroaminoto dan M. Natsir, berusaha untuk melegitimasi bahwa nasionalisme yang muncul saat itu memiliki karakter keislaman. Sebaliknya, nasionalis sekular seperti Soekarno dan Soetomo, menempatkan sekularisme ke dalam kerangka dan sejarah yang netral dari agama. Sejak akhir 1920, visi kelompok kedua lebih dominan, meskipun ideologi kelompok pertama tidaklah punah” demikian uraian dari Abdullahi Ahmed An-Na’im (2007: 428).

kabar *Sinar Djawa* berkenan dengan penjelasan mengenai Sarekat Islam dalam kaitan dengan Islam, memperlihatkan priyayisme, yakni (Shiraisi 1990: 81-83):

“Sebelonnja kami bitjara lebih djaoeh, maka kami aken menerangken lebih doeloe maksoednja nama ‘Sarekat Islam’.....‘Sarekat Islam’ dengan pendek maksoednja ‘perkoempoelandariorang-orangberagamaIslam.’Iniperkoempoelan boekanja satoe perkoempoelan jang loemrah, tetapi perkoempoelan jang loewar biasa, jang dengen tali agama Islam. Oleh Boemipoetra telah dibikinna beberapa perkoempoelan jang maksoednja moelia tetapi tiadalah satoe jang bisa djadi kekel dan besar. Sarenta ‘Sarekat Islam’ timboel datenglah beriboe-riboe orang jang masoek djadi lidnja akan djadi bersoedara dengan teriket tali agama Islam, dan dari itoe ‘Sarekat Islam’ mendjadi satoe perkoempoelan jang loewar biasa.... Sebagi kami kata, ‘Sarekat Islam’ mendjadi perkoempoelan jang loewar biasa, maka dari itoe tiadalah heran jang pada pergerakan ‘Sarekat Islam’ banjaklah rintangannja dari beberapa fihak jang keliroe pendapetannja Kaoem anti SI beroepaja seolah-olah mendjatoehkan pada pergerakan ‘Sarekat Islam’, tetapi kita tida berkapoetoesan akan tjari djalan boewat memadjoekan bangsa kita dalem segala hal jang bergenra bagi kehidoepannja.....Meskipoen kaoem anti SI makin lama makin djadi besar dan seolah-olah membikin perintangan pada pergerakan kita maka kita ta’ aken berkepoetoesan berdaja oepaja dengan keras di bawah perlindoengan Pamerentah aken memadjoekan dan mendjoendjoeng nasibnya kaoem Boemipoetra dan senantiasa kita aken memegang ksatrian kita boewat mendapat apa jang kita toedjoe...Soedara! Bagaimana besar ksatrian tempe doeloe, soedara boleh tilik sadja pada lelakon wajang sepertinja perangnja Segriwo dan Soebali mereboet ‘tjoepoe manic asto gino’. Bagaimanakah djawab pahlawan itoe waktoe dititahkenoleh Radjanja aken mereboet ‘tjoepoe manik asto gino.’Dia bilang: ‘Djangan poen jang hamba tjoema dapet loeka atau sakit, mati poen hamba djalani aken bisa mendapat ‘tjoepoe manik asto gino’ itoe. Begitoe adalah beberapa toela dan bagimana tabiat satrio mendjoendjoeng dirinja. Maka dari itoe kita aken tida berkepoetoesan berdaja opeaja sampei kita mendapat maksoed kita jang moelia.”

Juga kutipan berikut menegaskan penggunaan simbol budaya Jawa, terutama wayang dalam ungkapan pemikirannya, dalam menggalang solidaritas di kalangan komunitas yang menjadi sasarannya untuk berjuang memperoleh kemajuan dan kesetaraan dengan Belanda, yaitu: “Ketika Sarekat Islam pertama kali mulai menyebar ke seluruh pulau Jawa tahun 1913, penyebar utamanya, Oemar Said Tjokroaminoto, menggunakan gambaran yang dikenal dari Wayang dan Islam untuk menyerukan persatuan pribumi dalam meraih kemajuan dan persamaan dengan Belanda” (*When the Sarekat Islam first began to spread throughout Java in 1913, its most eminent propagandist, Oemar Said Tjokroaminoto, used familiar images from the Wayang and Islam to call for native solidarity in the attainment of progress and equality with the Dutch*) (Tarling 1999: 236).

Dengan priyayisme, Tjokroaminoto dengan luwes mampu menghadapi keadaan yang sebenarnya kontradiksi atau antagonisme terutama pada awal abad ke-20 ketika kesadaran sosial politik mulai berkembang di kalangan rakyat jajahan, termasuk di antara para muslim, yang merupakan basis massa gerakannya. Tidak terlepas dari kemungkinan karisma dan kepiawaian retorika, namun Tjokroaminoto dengan cerdas menjelaskan sikap bekerja samanya dengan pemerintah kolonial, yang tentunya tidak popular untuk kalangan muslim yang sebenarnya sejak abad ke-19 telah memendam ketidaksukaan terhadap rezim kolonial, dalam harmonisasi keyakinan yang dianutnya. Luthfi Assyaukanie (2009: 40) memaparkannya sebagai berikut:

“Satu dari tantangan utama yang dihadapi SI pada masa awal ini adalah mengambil sikap politik terhadap pemerintah kolonial yang bukan muslim. Masalah yang menghantui Muslim Indonesia saat itu adalah bagaimana menghadapi masalah ini. Beberapa dari mereka berhati-hati terhadap apakah syah secara agama untuk setia kepada Belanda yang mereka pandang sebagai kafir. Tjokroaminoto mengerti

keraguan muslim itu, dan dalam suatu pidatonya ia membuat pernyataan ini: 'Menurut Syariat Islam, kita harus mematuhi perintah pemerintah Belanda, kita harus patuh dan tunduk mengikuti hukum dan peraturan Belanda....' Tidak jelas sejauh mana pidato ini mempengaruhi anggota-anggota SI. Namun kenyataan bahwa sebagian besar anggota SI tidak menentang pemerintah bukan Muslim merupakan suatu tanda persetujuan mereka terhadap sang pemimpin. Bahkan jika ada sikap anti pemerintah (yang mana diungkapkan dalam gerakan non koperasi), hal itu tidak berlnadaskan pada agama, tetapi lebih pada ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan pemerintah" (*One of the main challenges SI faced in these early years was to take a political stance vis-à-vis the non-Muslim colonial government. The question haunting Indonesian Muslims at the time was how to deal with this issue. Some of them were cautious as to whether it was religiously legitimate to be loyal to the Dutch whom they saw as the infidel (kafir). Tjokroaminoto understood the Muslim's anxiety; and in one of his speeches he made this statement: "According to the Sjariah of Islam, we must obey the command of the Dutch government, we must strictly and loyally follow the laws and regulations of the Dutch... 'It is not clear how far this speech influenced the SI members. But the fact that most SI members did not oppose the non-Muslim government was an indication of their agreement with the leader. Even if there were anti-government attitudes (which were expressed in the non -cooperation movement), it was not based on religion, but merely on their disappointment with the government's performance)."*

Pemikiran, pribadi dan kiprah Tjokroaminoto bukannya tanpa kritik. Bahkan serangan pun datang pada keislamannya, yang justru bukan dari luar (eksternal) melainkan dari kalangan muslim, seperti yang tampak pada penjelasan berikut: “Tjokroaminoto juga mendapat serangan terhadap ambisi pribadi dan dugaan penyalahgunaan dana. Suatu tuduhan berat dibuat pada awal tahun 1920-an oleh para militant, di antara mereka adalah beberapa ulama dan kyai terkemuka, bahwa Partai Sarekat Islam, Central Sarekat Islam, dan Muhammadiyah hanya memanfaatkan pesona persatuan Islam untuk menutupi langkah mundur mereka dari perjuangan. Haji Mohamad Misbach, seorang pendakwah berpendidikan pesantren yang kondang, dalam serangannya menarik perbedaan antara Islam sejati dan Islam lamisan (semu), atau antara yang taat (mukmin) yang mengorbankan segalanya untuk Tuhan dan munafik yang menyatakan diri sebagai mukmin untuk dipuji. Pandakwah agama Islam di Banten, Minangkabau, Aceh, dan Trengganu menggemarkan pengulangan yang sama” (*Tjokroaminoto, as well, came under attack for his personal ambitions and alleged mismanagement of funds. A more serious charge was made in the early 1920s by militants, some prominent ulama and kyai among them, that the Partai Sarekat Islam, Central Sarekat Islam, and Muhammadiyah were merely using the appeal to Islamic unity in order to camouflage their retreat from the struggle. Haji Mohamad Misbach, a leading pesantren educated muballigh (Islamic propagandist), in his attack drew a distinction between Islam sedjati (true Islam) and Islam lamisan (pseudo-Islam), or between mukmin (the faithful) who sacrifice everything for God and munafik (hypocrites) whose claim to be mukmin is only for show. Islamic propagandists in Banten, Miangkabau, Aceh, and Trengganu echoed the same refrain*”) (Tarling 1999: 237). Ia ditengarai memanfaatkan persatuan muslim untuk mengaburkan maksud hendak mundur dari perjuangan, di samping tuduhan ambisi pribadi dan kecurigaan penyelewengan dana (perkumpulan).

Pluralisme Soekarno

Jejak-jejak pemikiran, cita-cita dan semangat Tjokroaminoto sangat tampak pada sosok Soekarno. Priyayisme juga melekat erat pada diri Soekarno. Ideologi menjadi wahana dan senjata untuk menimbulkan kesadaran, rasa bersatu (senasib) dan semangat perjuangan. Sebagaimana gurunya, Soekarno mengandalkan pada aksi massa dalam mendobrak belenggu kolonial, walau ia memilih jalur non koperasi dalam perjuangannya. Lalu, tampaknya, ia memandang penting pembentukan dan pendidikan kader perjuangan yang memiliki visi, semangat dan tujuan bersama yang jelas, sebagaimana ketika mendirikan Algemeen Studie Club di Bandung (Dhont 2005). Tak beberapa lama, pola perjuangannya bergeser menjadi penggerahan massa dengan mencanangkan sebuah partai politik yang berhaluan nasionalis, yakni Perserikatan, yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 (Ingleton 1983: 35).

Soekarno mencoba meleburkan pandangan tradisionalisme dan modern. Priyayisme tercermin dalam gagasan nasionalisme, yang sebenarnya mewakili aspirasi, kepentingan dan partisipasi kelompok elit priyayi. Sosialisme diadopsi dari kazanah intelektual Barat yang mempertegas panggilan dan kewajiban untuk mengabdi pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak (para kawula) namun tetap dalam kerangka kepemimpinan elit yang timbul pada peranan dan kedudukan negara (pemerintah). Sumbangsih agama tampak pada rujukannya kepada Islam, yang terasa tidak terlalu dieksplorasi lebih relevan dan signifikan. Pemikirannya dituangkan dalam Nasionalisme, Sosialisme dan Islam, yang kelak dikembangkan menjadi ideologi Nasakom, Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Dalam pemikiran Soekarno tampak jelas azas pluralisme sebagai refleksi keadaan sosial penduduk negeri jajahan, yang hendak ditransformasikannya ke dalam bangsa Indonesia.

Genealogi dan kontradiksi pemikiran Tjokroaminoto dalam pengaruhnya terhadap pemikiran Soekarno tampak pada gagasan nasionalisme. Tjokroaminoto menegaskan tidak ada pertentangan antara

Islam dan nasionalisme, bahkan Islam dapat menjadi landasan nasionalisme. Namun, semangat zaman ketika itu berbalut pengaruh Pan-Islamisme dan Kalifahisme (*Khilafatism*), yang lebih membayangkan suatu komunitas Islam internasional yang bebas dan mandiri. Namun perubahan zaman pula yang memainkan peranan dalam perjalanan pemikiran dan faham Islam di berbagai kawasan yang terutama sedang berada di bawah belenggu penjajahan Barat. Arskal Salim (2008: 52) mengungkapkan bagaimana ia meyakinkan pengikutnya bahwa Nasionalisme Islam dan Nasionalisme Hindia Timur tidak saling bertentangan, yaitu:

“Islam setidaknya tidak menghalangi atau menghambat atau menghalangi pembentukan dan jalannya nasionalisme sejati, tetapi nyatanya mendorongnya. Nasionalisme Islam bukanlah nasionalisme yang sempit dan tidak berbahaya (untuk lainnya), tetapi....yang akan menuju pada sosialisme Islam, yakni sosialisme, yang menciptakan humanism tunggal (kesatuan umat manusia) yang idkendalikan oleh Yang Maha Kuasa, Allah, melalui hukum-hukum yang dinyatakan kepada RasulNya, nabu terakhir Muhammad... Lagipula, Tjokroaminoto menyatakan bahwa Islam berisikan ajaran yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik, masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, tidaklah masuk akal untuk mengubah konsep nasionalisme Islam dengan memperkenalkan ungkapan lainnya. Nyatanya, nasionalisme menolong bangsa Indonesia menghindari perpecahan ke dalam jumlah besar nasionalisme kelompok etnik yang kecil. Jadi, baginya, adalah nasionalisme Islam yang menyatukan bangsa Indonesia, tidak memandang latar belakang budaya etnik yang beragam....Namun, beberapa pemimpin Muslim menolak nasionalisme Indonesia karena membelah masyarakat Muslim internasional dan karena

berasal dari Eropa dan membawa perang dan imperialisme. “*Islam did not the least hamper or obstruct the creation and the course of real nationalism, but in fact promotes it. Islamic nationalism was not narrow nationalism and was not dangerous (to others), but...that would lead to Islamic socialism, i.e. socialism, which creates mono-humanism (the unity of mankind) controlled by the Supreme Being, Allah, through the laws which had been revealed to His apostle, the last prophet of Muhammad.....In addition, Tjokroaminoto argued that Islam contains the complete teachings that regulate all aspects of life including politics, society, and economy. There is therefore no legitimate reason to alter the Islamic concept of nationalism by introducing other notions. In fact, Islamic nationalism helped Indonesians avoid dividing into a great number of small ethnic group nationalism. Thus, for him, it was Islamic nationalism that united Indonesians, regardless of their diverse ethnic cultural backgrounds.....Some Muslim leaders, however, rejected Indonesian nationalism because it divided the international community of Muslims and because it originated from Europe and brought war and imperialism).*

Dalam alam pemikiran Soekarno, kritik-kritik yang muncul itu memerlukan tanggapan yang kritis. Namun berbeda dengan panutannya, ia memiliki garis pemikiran yang lebih memadukan perbedaan-perbedaan yang ada, untuk tiba pada suatu bentuk nasionalisme “bangsa” atau sekuler yang toleran dan solider lintas primordial (majemuk atau plural), yakni (Salim 2008: 52, 53):

“Dalam tanggapannya terhadap kritik-kritik ini, Soekarno, seorang pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI, dibentuk tahun 1927), mencoba menghindari pembedaan nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Islam. Malahan, ia mencoba untuk menyerasikan keduanya dengan mengatakan bahwa keduanya berasal dari suatu dasar yang sama, yaitu melawan imperialisme Barat. Lagi pula, ia menawarkan suatu pemahaman khusus tentang nasionalisme Islam. Soekarno menulis bahwa internasionalisme Islam akan memperkuat kekuatan nasionalisme Indonesia dalam menghadapi kolonialisme, karena Muslim yang berdiam di lingkungan negeri Muslim (Dar al-Islam) dituntut untuk berjuang mempertahankan negeri dimana mereka hidup. Dimana pun para Muslim tinggal, menurut Soekarno, mereka harus mencintai dan bekerja untuk kemenangan negeri mereka, dan juga seharusnya Muslim di Indonesia.... Jelas disini bahwa ada sedikit perbedaan antara pemimpin Sarekat Islam dan Soekarno dalam konsepsi mereka tentang gejala psikologi nasionalisme. Akan tetapi, ada banyak perbedaan, dalam tujuan politik nasionalisme mereka. Apa yang Soekarno dan partainya kehendaki adalah kemerdekaan sepenuhnya dan pemerintahan sendiri untuk Indonesia. Ia yakin, kemerdekaan itu hanya akan datang sebagai hasil persatuan usaha seluruh bangsa Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Hal ini ditekankan oleh Soekarno, yang menyatakan bahwa kemerdekaan seperti tujuan orang Kristen Indonesia dan dari Muslim Indonesia tidak ada gunanya...menanti bantuan dari pesawat yang berasal dari Moskow atau kalifah dari Istanbul (*In his response to these criticisms, Soekarno, a leader*

of the Indonesian Nationalist Party (PNI, established in 1927), sought to avoid contrasting Indonesian nationalism and Islamic nationalism. Instead he attempted to reconcile them by saying that both stemmed from a common basis, the fight against Western imperialism. In addition, he offered a particular understanding of Islamic nationalism. Soekarno wrote that the internationalism of Islam would strengthen the power of Indonesian nationalism in the face of colonialism, because those Muslims who reside in any country of the Muslim world (Dar al-Islam) are required to struggle for the defense of the country where they live. Anywhere Muslims live, according to Soekarno, they must love and work for the victory of their abode, and so too must Muslims in Indonesia.....It is obvious here that there was little difference between the leaders of Sarekat Islam and Soekarno in their conceptions of the psychological features of nationalism. There was much difference, however, in their political objectives for nationalism. What Soekarno and his party wanted was full independence with self-governance for Indonesia. Such independence, he believed, would come only as the result of the united efforts of all Indonesians, regardless of their religious backgrounds. This point was stressed by Soekarno, who stated that 'independence was as much the objective of Indonesian Christians as of Muslims (and it) was useless...to wait for help from an airplane from Moscow or a caliph from Istanbul).

Jejak pertemuan Soekarno dan Tjokroaminoto dalam nuansa Islam tampak pada pengamatan di bawah ini, yaitu (Assyaukanie 2013: 198):

“ Soekarno (1901-1970) adalah seorang pemimpin yang luar

biasa. Seperti penjelasan Herbert Feith, Soekarno adalah seorang penggalang kebersamaan yang mampu menyatukan Indonesia. Lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga Jawa sejati, Soekarno bukan seorang yang religious. Ia dididik di sekolah Barat dan bersentuhan dengan Islam hanya ketika ia memulai sekolah lanjutan di Surabaya, suatu kota pelabuhan di Jawa Timur. Pertemuannya dengan H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934), pendiri Sarekat Islam, partai Islam politik pertama di negeri itu, membawanya mempelajari Islam. Tjokroaminoto mengilhami Soekarno tidak hanya mempelajari Islam tetapi juga bersentuhan dengan banyak pemimpin nasional yang berkunjung ke rumahnya. Bagi Soekarno, Tjokroaminoto tidak hanya seorang guru tetapi juga seorang ayah angkat dan mertua, ketika selanjutnya Soekarno menikahi seorang puteri Tjokroaminoto... pertemuan Soekarno dengan Islam adalah penting untuk karirnya mendatang sebagai seorang pemimpin politik. Pengetahuannya tentang sejarah Islam membantunya dalam debat dengan para pemimpin Muslim. Sejak pertengahan tahun 1920-an hingga akhir 1930-an, Soekarno adalah suara yang karismatik, jelas dan bersemangat untuk kebebasan penafsiran Islam. Melalui tulisan-tulisannya yang diterbitkan di berbagai majalah yang beredar luas saat itu, Soekarno mengeritik doktrin klasik Islam, yang dianggapnya mandek, tertinggal dan tidak tenggang rasa. Sementara mengkritik ajaran agamawan, Soekarno berani menyerukan modernisasi dan sekularisasi masyarakat Islam. Ia memuji Mustafa Kamal Ataturk untuk mengakhiri kekalifahan, suatu sistem pemerintahan Islam yang dipandangnya korup dan despotik. Secara terbuka ia mengumandangkan suatu pemikiran kembali Islam sehingga dapat sesuai dengan keadaan modern... Tidak diragukan, Soekarno adalah pendukung utama negara agama yang netral. Ungkapan ‘negara agama netral’ adalah penting untuk memahami

wacana sekularisasi di Indonesia (Soekarno (1901-1970) was an extraordinary leader. As Herbert Feith has argued, Soekarno was a solidarity maker who was able to unify Indonesia. Born and raised in a strong Javanese family, Soekarno was not a religious man. He was educated in Western schools and became acquainted with Islam only when he started high school in Surabaya, a port city in East Java. His encounter with H.O.S Tjokroaminoto (1882-1934), the founder of Sarekat Islam, the first Islamic political party in the country, led him to learn about Islam. Tjokroaminoto inspired Soekarno not only to learn Islam but also to get acquainted with many national leaders who passed through his house. For Soekarno, Tjokroaminoto was not just a teacher but also a foster father and a father-in-law, as Soekarno eventually married one of Tjokroaminoto's daughters...Soekarno's encounter with Islam was important for his future career as a political leader. His knowledge of Islamic history helped him in debates with Muslim leaders. From the mid-1920s until the late 1930s, Soekarno was the most charismatic, articulate and courageous voice for the liberal interpretation of Islam. Through articles that were published in widely circulated magazines of the time, Soekarno criticized classical Islamic doctrines, which he considered stagnant, backward and intolerant. While criticizing Muslim clerics, Soekarno daringly campaigned for modernization and secularization of Islamic society. He praised Mustafa Kamal Ataturk for closing down the caliphate, an Islamic system of government that he considered to be corrupt and despotic. He openly called for a rethinking of Islam so that it could fit the modern situation...Soekarno was undoubtedly the most articulate proponent of a religiously neutral state. The phase 'religiously neutral state' is important for understanding the discourse of secularization in Indonesia).

Tentang kekalifahan sebagai alternatif bentuk politik dan pemerintahan pascakolonialisme, Tjokroaminoto bersikap terbuka dan rasional. Menggelagati perubahan yang terjadi di kancah internasional, pandangannya pun bergeser dan mendekati pemikiran dan tujuan perjuangan muridnya. Ia pun dapat menerima aspek nasionalisme “bangsa” sebagaimana yang dilukiskan oleh Salim (2008: 52):

“Sementara, dengan konsepsi nasionalisme Islam mereka, para pemimpin Sarekat Islam menginginkan suatu pemecahan untuk masalah kalifah internasional. Pada pertemuan khusus di Surabaya tanggal 4-5 Oktober 1924 [tujuh bulan setelah penghapusan kalifah Ottoman]. Sarekat Islam, melalui pemimpinnya, Tjokroaminoto, menekankan kebutuhan para Muslim untuk mempunyai kalifah pengganti. Seperti para Muslim Hindia Timur saat itu masih hidup di bawah pemerintahan yang lain, Tjokroaminoto menjelaskan relevansi kalifah dengan agama. Lebih lanjut ia mendekati kembali kekuatan asing bukan Muslim yang mencoba campur tangan dalam masalah keyakinan Muslim di negeri terjajah.... penjelasan Tjokroaminoto menyarankan bahwa kalau para Muslim Hindia Timur memiliki kesempatan memerintah sendiri, masalah kalifah untuk mereka akan menjadi penting secara politik. Penjelasannya, masa depan politik dari nasionalisme Islam yang diajukan oleh para pemimpin Sarekat Islam tampaknya bergantung pada apakah Pan Islamisme akan berhasil atau tidak. Akhirnya, karena tidak ada kejelasan tentang kampanye untuk masa depan kalifah, para pemimpin Sarekat Islam menanggalkan kampanye Pan-Islamisme tahun 1929 dan beralih memilih nasionalisme Indonesia. Setahun kemudian, nama perkumpulan diubah menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia. Menambah kata ‘Indonesia’ pada nama

partai menyiratkan suatu perubahan tegas orientasi Sarekat Islam dari internasional Islam menjadi nasionalisme Islam Indonesia “ *(Meanwhile, with their conception of Islamic nationalism, the leaders of Sarekat Islam desired a solution to the international caliphate question. At its special meeting in Surabaya on 4-5 October 1924 (seven months after the abolition of the Ottoman caliphate). Sarekat Islam, through its leader, Tjokroaminoto, emphasized the need for Muslims to have a replacement caliph. As Muslims of the East Indies at that time still lived under another government, Tjokroaminoto explained the relevance of the caliphate as a religious one. He further reproached foreign non-Muslim powers who sought to interfere in the religious affairs of Muslims in the colonized lands.....Tjokroaminoto’s explanation suggests that if Muslims of the East Indies had a chance of self-government, the caliphate issue for them would be politically important. In light of this, the political future of Islamic nationalism proposed by the leaders of Sarekat Islam seemed to depend on whether or not Pan-Islamism would succeed. Finally, since there was no clear on the campaign for the future of the caliphate, the leaders of Sarekat Islam gave up on the campaign for Pan-Islamism in 1929 and shifted to favor Indonesian nationalism. A year later, the organization’s name was changed from Partai Sarekat Islam to Partai Sjarikat Islam Indonesia. Adding the word ‘Indonesia’ to name of the party represented a clear shift of Sarekat Islam’s orientation from Islamic internationalism to Indonesian Islamic nationalists).*

Tampak dari penjelasan ini, perubahan sikap dan pergeseran pandangan terhadap masalah nasionalisme, yang tidak lagi berorientasi transnasional,

diwujudkan dalam penggantian sebutan partai dari Partai Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Orientasi perjuangan tidak lagi pada internasionalisme Islam atau lebih popular saat ini dengan istilah transnasional, melainkan pada nasionalisme Islam Indonesia.¹⁸

Gagasan Negara Islam S.M. Kartosoewirjo

Islam adalah benteng Nusantara pada saat menghadapi kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang datang dari Eropa. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Islam merajut Nusantara dan sekitarnya dalam jalinan dan jaringan diplomatik, perdagangan dan budaya, terutama di kawasan pesisir dan gugusan pulau. Perseteruan Islam dan Barat (Eropa) telah terjadi sejak masa awal Masehi ketika Islam berkembang di Timur Tengah dan mulai memasuki Eropa. Kancanah konflik keduanya adalah pada perebutan supremasi dan kekuasaan di Yerusalem, kota suci untuk kedua kepercayaan, Islam dan Barat yang menganut agama Kristen. Gerakan kekuatan Islam ke daratan Eropa, setelah menaklukan sebagian wilayah Spanyol, menghadapi pertahanan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Prancis seperti Karel Martel dan Charlemagne.

Perkembangan Islam di Nusantara dan sekitarnya, yang memanfaatkan jaringan hubungan dengan jazirah India, tidak terlepas dari penjelajahan

18 Bandingkan dengan pandangan lainnya, sebagai berikut "Tjokroaminoto juga mengganti nama perkumpulan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) menjelang tahun 1930, menekankan pergeserannya dari 'gagasan-gagasan internasional pan-Islamisme awalnya' ke suatu titik pandang tentang mengangkat kedudukan Islam di Hindia Timur. Perubahan karakter Sarekat Islam yang sangat modernis akhir 1920-an dan wawasan Tjokroaminoto yang menyempit tampaknya mencerminkan perkembangan ideologi dan politik Kartosoewiryo" (*Tjokroaminoto also changed the name of the organization to Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) by 1930, emphasizing its move away from "its earlier international pan-Islamic ideals" to a focus on uplifting the status of Islam in the East Indies itself. The move strongly modernist character of the Sarekat of the late 1920s and narrowing worldview of Tjokroaminoto appeared to mirror Kartosoewirjo's own political and ideological evolution*). (Ramakrisna 2009: 73).



dan penaklukan Portugis terhadap Malaka. Sebelumnya, Portugis menguasai Gowa di India. Malaka yang sebelumnya diramaikan oleh pelayaran dan perdagangan Muslim dari wilayah sekitarnya. Kebijakan perdagangan Portugis yang bersifat monopoli menyebabkan mereka menghindari tempat niaga yang menjadi tujuan semula. Sebagai gantinya, mereka mencari tempat perdagangan lainnya, yang menyebabkan pertumbuhan pelabuhan-pelabuhan di pantai utara pulau Jawa dan Makasar di jazirah selatan pulau Sulawesi.

Konsolidasi kekuasaan negara kolonial di pulau Jawa mendorong gelombang Islamisasi berikutnya. Penerapan kekuasaan dan kebijakan yang eksploratif dan aneksasi melahirkan kristalisasi perlawanan Islam yang menyentuh hingga lapisan bawah masyarakat Jawa. Tidak hanya pemberontakan Pangeran Diponegoro yang membawa bendera dan pembaharuan Islam dalam perlawanan terhadap gerak perluasan kolonialisme Belanda, gerakan-gerakan sosial pedesaan membawa ideologi perjuangan dan reformisme Islam dalam wujud harapan kedatangan sosok penyelamat seperti Imam Mahdi, Ratu Adil dan Herucokro, sebagaimana ideologi perlawanan pada gerakan Mesianisme, Milerianisme dan Perang Sabil (Suci) (Kartodirdjo 1984). Dalam proses intervensi dan perluasan kolonialisme itu, Islam lebih menyebar ke dalam lapisan masyarakat di pulau Jawa.

Simbol kekuasaan Islam masih berlangsung di lingkungan daerah Swapraja atau Vorstenlanden sebagaimana yang disandang pada gelar lengkap Sultan dan Sunan. Mereka masih dipandang sebagai pelindung agama Islam tidak hanya di yuridiksi wilayah kekuasaan masing-masing, melainkan juga dalam alam budaya Jawa, walau secara nyata tidak menjangkau daerah

lainnya yang berada di bawah rentangan birokrasi kolonial yang dibantu oleh kekuasaan tradisional yakni bupati dan para priyayi.¹⁹

“Gambaran tentang dia (Kartosoewirjo, pen) yang timbul dari catatan-catatan biografi melukiskan seorang yang pendidikan Islamnya jauh ketinggalan di belakang eksponen-eksponen utama modernisme Islam di Indonesia, dan yang cita-cita keagamaannya masih sangat banyak dipengaruhi lingkungan tradisi. Pendidikan Islam mulanya sangat kurang. Pengetahuannya tentang Islam diperolehnya pada tahun-tahun kemudian, dan terutama dari buku-buku asing—barangkali Belanda—mengenai pokok persoalannya dan melalui perkenalan pribadi dengan guru-guru Muslim Indonesia yang terkenal.....Tentu saja buku-buku asing Barat bukanlah sumber terbaik untuk menelaah Islam dan gerakan-gerakan agama yang baru di dalamnya. Tetapi Kartosuwirjo memang tidak punya pilihan lain. Sebagai hasil pendidikan Belandanya yang sekuler, ia lemah dalam terjemahan bahasa Belanda. Kurang lancarnya berbahasa Arab juga merupakan rintangan bagi Kartosuwirjo berhubungan langsung dengan karya para pemikir Islam. Bahkan hal ini pula yang merintanginya untuk naik haji ke Mekah dan mengadakan kunjungan ke pusat-pusat Arab tentang Islam dan modernism Islam. Berbeda dengan sejumlah pemimpin Muslim Indonesia lainnya, Kartosuwirjo tidak pernah ke luar negeri untuk memperluas pengetahuannya tentang Islam melalui berbagai pembicaraan atau telaah dengan guru-guru Muslim internasional yang terkenal.

Pengetahuan yang lebih sempurna yang dimiliki Kartosuwirjo tentang Islam bergantung pada perkenalan pribadi dengan para ulama yang berjumpa dengannya secara kebetulan saja.

19 Secara bertahap, kekuasaan kolonial menerapkan dua pola pemerintahan, yaitu langsung dan tidak langsung (*direct and indirect rule*), lihat Sutherland (1984).

Sebagian dari ini sebagaimana pula halnya mengenai pendidikan politiknya, diperolehnya dari Haji Oemar Said Tjokroaminoto dan kalangan pemimpin Sarekat Islam Surabaya. Lebih penting bagi perkembangan cita-cita keagamaannya adalah pemimpin-pemimpin Islam pedesaan yang dikenalnya sejak 1929, ketika berdasarkan alasan kesehatan ia pindah ke Malangbong, sebuah kota kecil dekat Garut dan Tasikmalaya. Selama ia tinggal di Malangbong dia mempelajari Islam pada sejumlah kiai setempat, antara lain Kiai JusufTauziri yang disebutkan di atas dan mertuanya, Kiai Ardiwisastra. Yang akhir ini tidak hanya menjadi salah seorang anggota PSII dari daerah itu, tetapi seperti dikemukakan Jackson juga ‘seorang guru agama yang sangat masyhur dan Malangbong (Jackson 1971: 437) (van Dijk 1983: 18).’²⁰

Holk H Dengel (2011: 17) menyampaikan, “Setelah HOS Tjokroaminoto

20 Bandingkan dengan penjelasan berikut, “Tjokroaminoto, Muhammad Natsir, Ahmad Hassan dan Hadji Agoes Salim telah dibicarakan lebih lanjut pada berbagai tahap dalam buku ini. Adalah penting diingat bahwa mereka memegang peranan kunci dalam membentuk pandangan Islam di Indonesia pada tahun 1920-an—1960-an, dan secara substansi berinteraksi dengan Kartosuwiryo. Tjokroaminoto dan Salim adalah guru-guru Kartosuwiryo dalam Sarekat Islam, seraya ia bersentuhan dengan Natsir dan Hassan melalui Persatuan Islam (Persis) di Bandung. Karena Persis memperoleh kebanyakan intelektualis nasionalis yang berorientasi agama di Bandung, Ahmad Hassan segera menjadi kawan dan kalangan dekat Kartosuwiryo (*Tjokroaminoto, Muhammad Natsir, Ahmad Hassan and Hadji Agoes Salim are all further discussed at various stages in this book. It is important to keep in mind that they all had key roles in shaping Islamic views in Indonesia in the 1920s-1960s, and substantially interact with Kartosuwiryo. Tjokroaminoto and Salim were Kartosuwiryo’s teachers within Sarekat Islam, whilst he came in contact with Natsir and Hassan through Persatuan Islam (Persis) in Bandung. As Persis gathered most of the religious-oriented nationalist intelligentsia in Bandung, Ahmad Hassan soon became a close friend and peer of Kartosuwiryo*) (Formichi 2012: 17 note 8).

meninggal pada tahun 1934, Kartosuwirjo melanjutkan karya tulis Tjokroaminoto bersama Harsono Tjokroaminoto yang berisikan naskah tentang suatu gambaran ideal umat Islam. Harsono Tjokroaminoto mengolah dan menerjemahkan teks yang berbahasa Arab yang ditulis ayahnya, dan Kartosuwirjo yang belum menguasai bahasa Arab dengan baik, mengetik teks-teks yang ditulis dalam bahasa Latin. Kartosuwirjo merasa heran, demikian Harsono, dimana sebenarnya kedudukan PSII dalam gambaran ideal umat Islam tersebut, karena H.O.S. Tjokroaminoto tidak menyinggung hal tersebut.”

Juga Dengel (2011: 14-15) melihat ada persamaan antara pandangan Tjokroaminoto dengan Kartosoewirjo mengenai kebangsaan. Kartosoewirjo dalam menanggapi ulasan surat kabar “Darmo Kondo” di Solo mengungkapkan gagasannya tentang kebangsaan, seperti:

“Kebangsaan kita dianggap aneh oleh Darmo Kondo, Djanganlah kira kalaoe kita kaoem kebangsaan jang berdasarkan kepada Islam dan keIslamann tidak berangan-angan ke Indonesia merdeka. Tjita-tjita itoe boekan monopolinje college dalam Darmo Kondo. Dan lagi djangan kini, bila kita orang Islam tidak senantiasa beroesaha dan ichtiar sedapat-dapatna oentoek mentjapai tjita-tjita kita, soepaja kita dapat menguasai tanah air kita sendiri. Tjoema perbedaan antara college dalam Darmo Kondo dan kita ialah, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia bagi Nasionalisme jang dinjatakan oleh redaksi Darmo Kondo itoe adalah poentjaknja jang setinggi-tingginya, sedang kemerdekaan negeri toempah darah kita ini bagi ktia hanja satoe sjarat, soeatoe djembatan jang haroes kita laloei, oentoek mentjapai tjita-tjita kita jang lebih tinggi dan lebih moelia, ialah kemerdekaan dan berlakoenja agama Islam di tanah air kita Indonesia ini dalam arti jang seloeas-loeasnja dan sebenarnya. Djadi jang bagi kita hanja satoe sjarat (midel) itoe, bagi redaksi Darmo Kondo adalah maksoed dan toedjoean (doel) jang tertinggi.”

Kesamaan dengan pandangan Tjokroaminoto, yang memaparkannya dalam terbitan Fadjar Asia lebih dahulu dibandingkan Kartosoewirjo, tampak pada bagian sebagai berikut, bahwa “Islam itoelah tjita-tjita kita jang tertinggi, sedang nasionalisme dan patriotism itoe ialah tanda-tanda hidoepr kita sanggoep akan melakoekan Islam dengan seloeas-loeas dan sepenoeh-penoehnja. Pertama-tama adalah kita Moeslim, dan didalam kemoesliman itoe adalah kita nationalist dan patriot, jang menoedjoe kemerdekaan negeri toempah darah kita tidak tjoema dengan perkataan-perkataan jang hebat dalam vergadering sadja, tetapi pada tiap-tiap saat bersedia djuga mendjadikan korban sedjalan apa sadja jang ada pada kita untuk mentjari kemerdekaan negeri toempah darah kita” (Dengel 2011: 14-15). Persamaan berikutnya tampak pada dimensi sintesis dan sinkretis pada sosok Kartosoewirjo sebagaimana tergambar pada penjelasan berikut; ‘Untuk sementara, Kartosoewiryo mengikuti Haji Agus Salim dalam arah ajaran Gandhi sebelum perang swadeshi dan hijrah (swadaya dan menolak struktur penjajahan), mengaitkan tradisi Hindu dengan tradisi Islam dalam keselarasan pandangan Jawa Tengah yang curiga terhadap kehidupan kota dan gaya hidup kolonial. Gandhismenya, yang merupakan persinggahan dan menanti kesempatan, kemudian memberi jalan pada jihad, atau perang suci...Dari kajian mendalamnya tentang Jawa Barat, seorang peneliti yang teliti memandang Darul Islam sebagai suatu kumpulan yang terbentuk dari dasar ikatan desa yang non ideologi dan tradisional, dengan sosok otoritas yang unik Kartosuwiryo: seorang Jawa kota yang memimpin petani Sunda, tidak hanya imam Islam, tetapi juga seorang Ratu Adil yang mistik” (*For a while Kartosoewiryo followed Haji Agus Salim in a pre-war Gandhian devotion to swadhesi and hijrah (self-reliance and repudiation of colonial structure), linking Hindu tradition with Islamic tradition in a comfortable Central Javanese way that was suspicious of urban life and colonial style. His Gandhism, transitory and opportune, then gave way to jihad, or holy struggle.....From his intensive study of West Java, one careful scholar sees*

Javanese Darul Islam as a group whose formation was based on traditional, non ideological village bonds, with Kartosoewirjo the unique authority figure: an urban Javanese leading Sundanese peasant, not only an Islamic imam but a mystic and a Just Prince" (Friend 2009: 54, 55).

Hubungan Tjokroaminoto dan Kartosoewirjo lebih lanjut dijelaskan oleh Herdi Sahrasad, Al Chaidar (2012: 14, 15, 16, 41, 42), sebagai berikut:

"Kartosoewirjo, pemimpin Daulah Islamiyah, dalam suatu pertemuan dengan penggiat Serikat Islam dan DI di Cisayong Jawa Barat tahun 1948, menyampaikan pentingnya pembentukan Majelis Dunia Iman dan Kalifah Islam di Asia Tenggara sebagai lambang pewaris kepemimpinan suatu kalifah internasional Islam setelah kejatuhan dinasti Ottoman di Turki. Kartosoewirjo melanjutkan gagasan HOS Tjokroaminoto, pemimpin utama Sarikat Islam (SI), yang mengumandangkan pentingnya kalifah Islam internasional dalam berbagai pertemuan-pertemuan internasional Muslim di Mekah dan Medinah tahun 1926. Tjokroaminoto yang menyuntik perkumpulan SI dengan gagasan-gagasan politik sezaman berdasarkan kunjungan dan pengalamannya di Timur Tengah. Terkadang, Tjokroaminoto dipengaruhi oleh gagasan kalifah Islam dan Pan-Islamisme, melalui pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Ghani (1839-1897), Muhammad Abduh, Rashid Ridh. Dan ia mengajarkan semua murid politiknya, termasuk Kartosoewirjo, 'Islam dan Sosialisme', yang dimaksudkan Tjokroaminoto untuk menyesuaikan dasar-dasar Islam pada doktrin barunya ini dalam melawan kolonialisme Belanda/ Barat.... Dalam hal ini, penting untuk menggarisbawahi bahwa HOS Tjokroaminoto, guru Kartosoewirjo, (juga Sukarno dan Semaun-Muso), menyarankan dan mendorong dalam pertemuan-pertemuan dengan Muslim internasional di Mekah dan Medinah tahun 1926 pentingnya pembentukan kalifah Islam yang baru setelah jatuhnya kalifah Ottoman di Istanbul, Turki. Namun, tidak ada pemimpin-pemimpin Islam dunia, termasuk Raja Saudi siap untuk menjadi kalifah sebagai pranata dan lambang kekuatan Muslim seluruh dunia. Sehingga, Tjokroaminoto menawarkan Muslim internasional bahwa

Indonesia harus besiap untuk mencapai suatu kalifah Islam internasional, setidaknya di Asia Tenggara. Gagasan-gagasan dan ilham itu kemudian diolah dan diterapkan oleh Kartosuwiryo dengan gerakan Darul Islam, ang mana kemudian mengguncangkan kepulauan itu. Kartosuwiryo menyadari bahwa, hanya untuk difahami, kalifah Islam terakhir berhasil dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan Zionis Perang Salib di Turki selama kalifah Ottoman Abdul Hamid II sekitar tahun 1904. Oleh karena itu, sejak keruntuhnya kalifah Islam terjadi kekosongan kepemimpinan dalam dunia Muslim. Kekosongan kalifah Islam itu menimbulkan akibat serius untuk keberadaan Muslim, seperti pembantaian Muslim di hampir seluruh penjuru dunia tanpa suatu perlawan yang berarti dan pendudukan musuh di Tanah Suci Islam... Seperti kesadaran tradisional rakyat Moro tentang Darul Islam, gerakan Darul Islam di Indonesia memiliki suatu cita-cita hebat yang diperjuangkan Mujahidin dengan militansi dan komitmen teguh Islam. Pemimpin gerakan Darul Islam Kartosuwiryo, sejalan dengan pemimpin Syarikat Islam (HOS Tjokroaminoto), memiliki suatu aspirasi untuk membangun suatu negara Islam di Indonesia sejak awal. Bentuk dari Indonesia masa depan telah mereka rumuskan pada awal abad ke-20." (*Kartosoewirjo, Daulah Islamiyah leader, in a meeting with Serikat Islam activists and DI in Cisayong West Java in 1948, articulated the importance of the establishment of the World Council of Imamate and Caliphate of Islam in Southeast Asia as a symbol of the successor to the leadership of an international Islamic Caliphate after the fall of Otoman in Turkey. Kartosoewirjo continued the idea of HOS Tjokroaminoto, a leading leader of Sarekat Islam (SI), who had announced the importance of the International Islamic Caliphate in various Muslim international meetings in Mecca and Medina in 1926. It was Tjokroaminoto who injected the SI organization with contemporary political ideas based on his journey and experiences in Middle East. To some degree, Tjokroaminoto influenced by Islamic Caliphate and Pan-Islamism ideas, through Islamic reformers such as Jamaluddin Al-Ghani (1839-1897),*

Muhammad Abdurrahman Ridh. And he taught all of his political students, included Kartosoewirjo. 'Islam and Socialism', in which Tjokroaminoto intended to adapt Islamic principles to this new doctrine in resisting Dutch/Western colonialism... In this case, it is important to underline that HOS Tjokroaminoto, the teacher of Kartosoewirjo, (also Sukarno and Semaun-Muso), suggested and encouraged in meetings with international Muslim in Mecca and Medina in 1926 the importance of the formation of the new Islamic Caliphate after the fall of Ottoman Caliphate in Istanbul, Turkey. However, none of the Islamic world leaders, including the Saudi King, was ready to become the caliph as the institutional and symbolic power of Muslims around the world. So, Tjokroaminoto offered the international Muslims that Indonesia should prepare to achieve an international Islamic Caliphate, at least in Southeast Asia. The ideas and inspiration were then articulated and implemented by Kartosuwirjo with the Darul Islam movement, which later made the archipelago tumultuous. Kartosoewirjo realized that, just as understandably, the last Islamic Caliphate had been successfully destroyed by the Crusader-Zionist forces in Turkey during the Ottoman Caliph Abdul Hamid II around 194. Therefore, since the collapse of Islamic caliphate there was a vacuum of leadership in the Muslim world. The emptiness of Islamic caliphate has spawned serious implications for the existence of Muslims, such as the massacre of Muslims in almost all corners of the world without any meaningful resistance and the occupation of the enemy in the Holy Land of Islam. ...Just like the traditional consciousness of Moro people about Darul Islam, the Darul Islam movement in Indonesia has a strong ideals championed by the Mujahideen with a strong Islamic militancy and commitment. The leader of the Darul Islam movement, Kartosoewirjo, along with the leader of Syarikat Islam (HOS Tjokroaminoto), had an aspiration to build an Islamic country in Indonesia from the beginning. The shape of the future Indonesia already they formulated in the early 20th Century).

Perbedaan yang tidak memisahkan antara guru dan murid itu tercermin

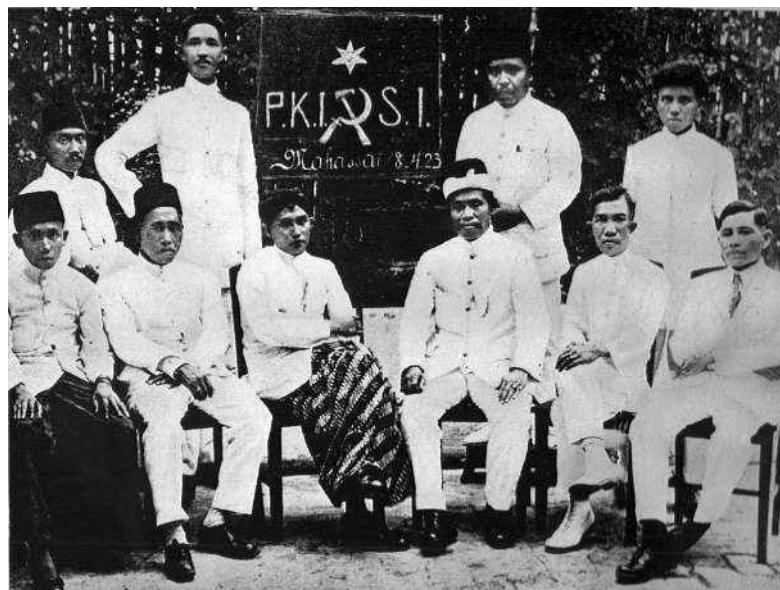
dalam penjelasan berikut ini, bahwa ‘‘Kartosuwiryo mengambil gagasan bahwa persatuan yang asli tidak hanya diperoleh dalam kerangka kelompok Islam dan memperluasnya hingga dimensi internasional perjuangan anti penjajahan. Seperti ditegaskan Tjokroaminoto dalam Islam dan sosialismenya, sosialisme dan Islamisme bertumpu pada jaringan internasional untuk mencapai tujuan sosio-politik mereka. Namun, kalau Tjokroaminoto dan Soekarno menggunakan persamaan ini untuk menjembatani perbedaan, Kartosuwiryo menggunakaninya untuk membuktikan keperkasaan Islam atas ideologi sekuler.’’ (*Kartosuwiryo took the idea that genuine unity could only be obtained within the frame of Islamic groups and extended it to the international dimensions of the anti-colonial struggle. As Tjokroaminoto had already pointed out in his Islam and sosialisme, socialism and Islamism both relied on international networks for the achievement of their socio-political goals. However, where Tjokroaminoto and Soekarno had used this commonality to bridge differences, Kartosuwiryo used it to prove Islam's superiority over secular ideologies*) (Formichi 2012: 43).

Asal usul gagasan Kartosoewirjo mengenai negara Islam (*Islamic State*) tidak terlepas dari pengaruh, ajaran dan pandangan Tjokroaminoto. ‘‘Sama seperti kesadaran tradisional yang terdapat dalam masyarakat *Bangsamoro* tentang darul Islam, gerakan Darul Islam di Indonesia memiliki cita-cita kuat yang diperjuangkan oleh para *mujahid*, dengan militansi dan komitmen idealisme keislaman yang kuat. Pemimpin gerakan Darul Islam, Kartosuwiryo, bersama dengan tokoh Syarikat Islam (H.O.S. Tjokroaminoto) telah mencitacitakan suatu negara Islam di Indonesia dari sejak awal. Bentuk negara Indonesia masa depan sudah mereka rumuskan di awal abad ke-20 ini’’, demikian dipaparkan oleh M. Muntasir Alwi dan Arif Fadhillah (tt: 230). Senada itu, S. Soebardi (1984: 110) menyatakan: ‘‘Kebersamaan selama dua tahun Kartosuwiryo dengan Tjokroaminoto memiliki pengaruh penting dalam perjalanan hidupnya kemudian. Tjokroaminoto adalah seorang pembela utama negara Islam dan akan timbul bahwa kekuatan keyakinannya

memainkan bagian yang menentukan dalam perumusan gagasan Kartosuwiryo tentang bentuk pemerintah yang sangat sesuai untuk Indonesia merdeka.” (*Kartosuwiryo's two year association with Tjokroaminoto was to have an important effect on the course of his later life. Tjokroaminoto was a strong advocate of the Islamic state and it would appear that the strength of his conviction played a decisive part in the formulation of Kartosuwiryo's ideas on the type of government best suited for independent Indonesia*).

Radikalisasi Sekulerisme Komunis

Kerap disebut bahwa Tjokroaminoto merupakan guru dari beberapa tokoh Komunisme di Indonesia. Sebagai guru mereka, tentunya ia memiliki pengetahuan yang luas mengenai Komunisme. Memang, pemikirannya lebih banyak dikenal dalam konteks eksplorasi gagasan Islam dan Sosialisme. Pada saat menjelaskan tentang Sosialisme, pemikirannya menjelajah hingga kepada Sosialisme Ilmiah, yaitu Komunisme.



Semaoen memperlihatkan penghargaan kepada Tjokroaminoto dalam suatu analisis mengenai keterwakilan kaum kromo, yang diperjuangkannya dalam pergerakan Sarekat Islam Semarang dalam Dewan Rakyat (Volskraad). Dari 19 anggota dewan yang diangkat oleh pemerintah kolonial itu, ia memberikan kategori sebagai ningrat etisi, ningrat, kapitalis, musuh kromo, wakil kromo, nasionalis luntur, bukan kromo, penganjur Indie Weerbaar. Kategori kawan kromo yang dimaksudkannya adalah pembela kepentingan kaum kromo. Ia adalah Tjokroaminoto yang ditambahkannya sebagai seorang diplomat. Tjiptomangunkusumo disebutnya sebagai nasionalis luntur (*verwaterde nationalist*). Walau pada saat Tjokroaminoto dalam keraguan dan meminta persetujuan cabang-cabang SI ketika ditawari menjadi anggota dewan itu, SI cabang Semarang tergolong cabang yang tidak setuju dan mengajak cabang lainnya untuk bersikap serupa (Soe 1964: 24, 31). Juga Alimin Pawirohardjo merupakan pembela Tjokroaminoto hingga September 1923, ketika menjadi ketua SI cabang Surabaya (Simbolon 2006: 619). Musso juga sempat memperlihatkan penghargaannya kepada Tjokroaminoto, ketika “Pada waktu Tjokroaminoto ditangkap sehubungan dengan terjadinya peristiwa ‘Afdeling B’ di Garut pada tahun 1921, Soekarno kembali ke Surabaya, bekerja sebagai klerk di Setasiun Kereta Api untuk meringankan beban keluarga Tjokroaminoto. Sementara itu, Musso yang terlibat dalam peristiwa ‘Afdeling B’ dipenjara. Walaupun begitu, ia secara tegas menolak memberi keterangan apa pun berkaitan dengan Tjokroaminoto dalam hubungan dengan SI ‘Afdeling B’. Di balik penjara ia mendapat pelajaran politik tentang komunis secara intensif, tetapi bukan berarti ia langsung menaruh simpati dengan PKI. Dalam pertentangan Semaun melawan Hadji Agus Salim/ Abdul Muis, Musso masih menaruh hormat terhadap Tjokroaminoto” (Kasenda 2014: 230). Soe Hok Gie (2005: 7) juga menggambarkan keadaan serupa tentang Musso, Tjokroaminoto dan peristiwa Afdeling B.

Namun, seperti pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari dan kawan seiring berpisah jalan, ideologi dan cara perjuangan meretakkan kerja sama perjuangan keduanya. Perbedaan dan ambisi tentunya ikut memainkan peranan di balik keretakan itu. Namun, tentunya sebagai guru dan penempa politik yang matang dan jeli, dalam perjumpaan intelektual berupa diskusi dan perdebatan, kenyataan itu bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena Tjokroaminoto bukan panutan akhir melainkan sumber ilmu dan ilham dalam perjuangan melawan belenggu kolonialisme dan yang terlebih penting adalah sebagai lawan bicara dalam upaya memperoleh jawaban dan dataran pemahaman terhadap problematika yang hendak dikupas secara lebih jernih dan mendalam. Perbedaan dan konflik itu digambarkan sebagai, “Setelah memimpin SI Semarang, Semaoen kerap berselisih paham dengan pemimpin Sarekat Islam, Tjokro. Semaoen mengkritik Tjokro, yang masuk menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat bentukan Belanda. Semaoen mencibir Tjokro sebagai antek Belanda. Ini membuat Tjokro naik pitam. ‘Akhirnya Tjokro mundur dari Volksraad.’ Kata Ismail Djaelani, bekas pengurus Partai Sarekat Islam Indonesia... Semaoen dan Tjokro juga berebut pengaruh di SI. Beberapa kali Semaoen melancarkan aksi mogok di kongres. Menurut Djaelani, karena pengaruh Semaoen sudah mengakar, Tjokro memilih kompromi. Semaoen dipilih menjadi komisaris dan propagandis organisasi. Puncak perselisihan keduanya terjadi pada kongres SI di Surabaya pada 1919. Dalam kongres ini, Tjokro memimpin pengambilan keputusan disiplin partai dan melarang kader partai memiliki organisasi lain. Semaoen, yang sat itu menjadi Ketua Perhimpunan Komunis Indonesia, berang. ‘Semaoen memilih hengkang dan mengubah SI Semarang menjadi Sarekat Rakyat.’ (*Tempo* 21 Agustus 2011: 66). Soe (1964: 43) juga mengungkapkan perbedaan di antara keduanya seperti dalam penentuan sikap SI terhadap *Indie Weerbaar*.

Sebelumnya, perdebatan Semaoen dan Tjokroaminoto memperlihatkan hubungan antara murid dan guru, seperti yang dilukiskan oleh Bernhard Dahm (1987: 39), bahwa “akan tetapi dalam 1916 sekalipun ada beberapa

pemimpin yang tidak mau mengerti walaupun pada waktu itu mereka tidak mampu mempengaruhi sikap Tjokroaminoto..demikianlah umpamanya, pemuda Semaun mendapat dampratan, bagaikan seorang murid mendapat jeweran dari gurunya, ketika ia menolak usulan pembentukan ‘dewan kolonial’, dengan alasan bahwa badan itu ‘tidak memiliki kebebasan apapun,’ ..jawaban Tjokroaminoto adalah bahwa tak seorang pun ingin mengulangi apa yang telah terjadi di republik Negro, Haiti, yang dengan cepat mengalami kehancuran karena para warganya tidak memiliki pengertian tentang pemerintahan.” Tampak jelas, Tjokroaminoto memiliki kesabaran yang seolah tanpa batas terhadap mereka yang dipandangnya sebagai murid-muridnya, walau tidak secara langsung. Ia selalu mengambil posisi sebagai penengah, awalnya, terhadap bayang-bayang perpecahan di tubuh SI ketika kelompok muda terutama di Semarang menyuarakan bendera perjuangan buruh yang mengusung ideologi Marxisme-Leninisme atau Komunisme.

Namun, perbedaan ideologi dan cita-cita perjuangan semakin mencuat dan melebar hingga tidak dapat diatasi lagi, bahwa: “Golongan Semaun yang menganut paham nasionalisme tetap menentang kapitalisme. Cokroaminoto sudah sejak pembentukan Sarekat Islam pada tahun 1912 menganut paham religious nasionalisme. Watak kenasionalan dan keagamaan Islam tetap menjadi pegangannya. Demikianlah, timbul selisih paham antara golongan Semaun dan golongan Cokroaminoto. Meskipun demikian, selisih paham itu masih dapat diatasi dengan kompromi dalam perumusan. Baik paham Cokroaminoto maupun paham Semaun dicantumkan dalam perumusan. Asas nasionalisme tetap dipertahankan sebagai asas Sarekat Islam, namun ditambahkan kalimat bahwa Sarekat Islam menentang kapitalisme sebagai penyebab penjajahan. Kecaman Semaun terhadap kebijaksanaan ketua Sentral Sarekat Islam itu perlu dihubungkan dengan keputusan kongres Perserikatan Komunis Hindia yang diadakan tanggal 23 Mei tahun 1920 di Semarang. Dalam keputusan yang pertama ditandaskan bahwa Perserikatan Komunis Hindia menggabungkan diri dengan Communistische international,

disingkat Comintern. Semaun adalah salah seorang anggota pengurus besar Perserikatan Komunis Hindia dan salah seorang pendirinya. Ia berkiprah pada Rusia dan jelas bergabung dengan Comintern. Oleh karena itu, tidak mungkin Semaun menerima paham nasionalisme dan keagamaan, seperti yang dianut oleh Cokroaminoto. Pada dasarnya, paham kebangsaan dan keagamaan memang bertentangan dengan paham komunisme internasional. Oleh karena itu, keadaan dalam Sentral Sarekat Islam akibat kompromi itu juga tidak dapat bertahan lama" (Muljana 2008: 128-129).

Tjokroaminoto bukannya tidak faham dengan ajaran dan pemikiran Komunisme, tetapi ia tidak tertarik dan menganggap tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Komunisme tidak sesuai dengan akidah Islam, demikian uraian dalam salah satu tulisannya. Ia lebih condong pada faham Sosialisme Demokrasi yang dipandang memiliki kesesuaian dengan agama yang dianut dan disebarluaskannya. Namun, ia juga menjunjung tinggi persatuan, karena ia berkeyakinan teguh bahwa umat Islam harus bersatu. Sebagai ideologi, ia dapat menerima dan memiliki toleransi yang besar terhadap Komunisme. Oleh karena itu, sampai suatu batas tertentu, ia tetap berupaya untuk mempersatukan kelompok Komunis Islam dan Sosialis Islam dalam SI walau akhirnya ia tidak memiliki pilihan lain ketika memberlakukan disiplin partai. Dengan ISDV, sebagai cikal bakal Perserikatan Komunis Indonesia yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia, ia tetap memelihara hubungan dan bekerja sama dalam perjuangan.

Sebaliknya, tidak sedikit pendapat muncul, yang menyatakan bahwa dalam konteks dan interaksi itu, Tjokroaminoto mendapat pengaruh yang kuat dari ideologi dan gerakan Komunisme.²¹ Faham Komunisme yang

21 Taufik Abdullah (2009: 19, 20) menjelaskan: "Sarekat Islam cabang Semarang mulai menyerang kepemimpinan pusat Sarekat Islam dari perspektif ideologi. Dipengaruhi oleh suatu perkumpulan sosialis Belanda, para pemimpin cabang ini mulai menggunakan ucapan politik kiri. Penyusupan pengaruh sosialis ke dalam Sarekat Islam tidak hanya meradikalisasi perkumpulan itu secara politik juga mendesak kepemimpinan nasional untuk mempelajari landasan perkumpulan itu. H.O.S.

dengan cepat tumbuh subur terutama di kalangan muda dan buruh tidak luput dari perhatiannya. Namun ia tidak menempatkan buruh sebagai ujung tombak dan sasaran perjuangan, walau ia tetap prihatian dan memberi perhatian pada perbaikan nasib mereka. Kemudian, perkembangan pesat PKI dikatakan menyebabkan Tjokroaminoto membawa partai pimpinannya ke garis pergerakan yang lebih radikal. Untuk meredam pengaruh Komunisme,

Tjokroaminoto harus mengarahkan diri sepenuhnya pada masalah-masalah Islam dan sosialisme dan Hadji Agoes Salim (1884—1954) memperkenalkan konsep modernisme Islam, dengan penekanannya pada rasionalitas dalam memahami doktrin sakral, dan pembebasan dari belenggu tradisi. Kerja sama mereka dalam memimpin Sarekat Islam juga membuat mereka berdua yakin bahwa hanya Islam yang dapat benar-benar mengikat masyarakat beragam etnik ke dalam suatu jenis masyarakat bersama. Dengan upaya-upaya ini, proses ideologisasi Islam mulai. Ketika Sarekat Islam akhirnya mengidentifikasi diri sebagai suatu partai politik dengan suatu ideologi Islam, tidak hanya mengabaikan ciri majemuknya, juga membuat Islam—bersama nasionalisme dan Marxisme—satu dari tiga kecederungan ideologi utama dalam sejarah gerakan nasional Indonesia” (*The Sarekat Islam branch of Semarang began to attack the central leadership of the Sarekat Islam from ideological perspectives. Influenced by a Dutch socialist organization, the leaders of this branch began to use leftist political jargons. The penetration of socialist influences into the Sarekat Islam not only radicalized the organization politically it also forced its national leadership to examine the basic foundation of the association. H.O.S Tjokroaminoto had to address himself squarely to the questions of Islam and socialism and Hadji Agoes Salim (1884—1954) introduced his concept of Islamic modernism, with its emphasis on rationality in understanding the sacred doctrine, and the liberation from the fetters of tradition. Their cooperation in leading the Sarekat Islam also made both of them sincerely believe that only Islam that could really bind the divergent ethnic communities into a new kind of common community. With these attempts, the process of the ideologization of Islam had begun. When the Sarekat Islam finally identified itself as a political party with an Islamic ideology, it not only abandoned its pluralist stance, it also made Islam—along with nationalism and Marxism—one of the three major ideological trends in the history of Indonesian nationalist movement).*

ia mengajukan pemikiran dan ajaran Sosialisme Islam.²² Dalam perenungan dan analisis tentang arah dan cita-cita kehidupan politik yang diidamkan, Tjokroaminoto menggunakan pendekatan historis-materialistik dengan mengacu pada zaman Piagam Medina, bahwa “Setelah Republik Islam didirikan di Medinah, maka Nabi Muhammad SAW memberi kepada orang-orang Yahudi segala hal penduduk dan kebebasan akan mendjalankan agamanya. Nabi kita jang sutji bukan sadja menampak sebagai seorang djuru mengadjar, tetapi didalam fahamnya tentang hak-hak penduduk dan hak-hak ra’jat jang satu terhadap kepada jang lainnya. Nabi kita jang sutji pun njatalah berdiri djuga didalam zamannya dan djuga di dalam segala abad jang sudah liwat dan jang kan datang” (sebagaimana tercantum dalam karya Herdi Sahrasad, Al Chaidar 2012: 238). Dalam deskripsinya itu, tampak jelas prinsip kehidupan politik yang berlandaskan pada demokrasi, toleransi agama dan kesejahteraan sosial yang dipandu oleh ajaran Islam.

Tjokroaminoto menulis lebih jauh sosialisme dalam Islam terkait dengan alat persatuan, yang termuat dalam karyanya *Islam dan Socialisme* (Djokjakarta: Fonds Wakaf S.K. ‘Bendera Islam’, 1925) sebagai berikut:

22 Merujuk pada karya Simbolon (2006: 563) dan ulasan *Tempo* 21 Agustus 2011, Ahmad Faizin Karimi (2012: 154) mengungkapkan bahwa “Tampaknya Kiai Dahlan dan para pengurus Muhammadiyah bersepakat untuk menjadikan Sarikat Islam sebagai wadah gerakan politiknya, membedakannya dari wadah gerakan agama, sosial, dan pendidikan melalui Muhammadiyah Ketika Sarekat Islam masuk ke Yogyakarta pada tahun 1913 pasca kongres SI di Solo, satu tahun setelah pendirian Muhammadiyah sebagian besar anggota Muhammadiyah juga bergabung menjadi anggotanya. Kiai Dahlan sendiri tercatat sebagai pimpinan Sarekat Islam cabang Semarang bersama Mohammad Joesoef, redaktur Sinar Djawa...Terkait keanggotaan Kiai Dahlan dan beberapa muridnya dalam Sarekat Yogyakarta ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa afiliasi Kiai Dahlan dengan SI Yogyakarta karena keinginan Tjokroaminoto untuk membendung gerakan komunis di tubuh SI yang dilakukan oleh Alimin, Seamun dan Darsono melalui SI cabang Semarang. SI merah berusaha merebut massa utama SI dari kelompok buruh pegadaian dan kereta api. Untuk membendung komunisme di tubuh SI inilah, Tjokroaminoto merekrut Kiai Dahlan, Abdoel Moeis, dan Agus Salim.”

(Ihsan & Soeharto 1981: 103)

“Adapoen jang mendjadi dasarnja pengertian Socialismenja Nabi Mohammad s.a.w. jaitoe *kemadjoean peri-keoetamaan* dan *kemadjoean boedi-pekkertinja ra’jat*. Sepandjang kejakinan saja jang tetap, tiap-tiap Socialisme jang sedjati tiadalah akan tertjapai selama-lamanja, kalau tidak dengan kemadjoean-kemadjoean ra’jat jang demikian itoe. Tiap-tiap haloean jang menoedjoe maksoed hanja memenoehi nafsoe kasar (kesenangan harta-benda), apalagi haloean jang *moengkir kepada Allah*, selama-lamanja *tiadalah* akan dapat menimboelkan Perdamaian dan Socialisme jang sedjati. Socialisme dan Perdamaian adalah menoentoet peri-keoetamaan jang besar dan boedi pekkerti jang haloes, jang pada oemoemnja ada pada kita bangsa Timoeran, teroetama sekali kita jang berigama Islam. Oemmat Islam adalah *tjakap sekali* akan melakoekan kehendak Socialisme jang sedjati itoe. Soenggoehpoen pada dewasa ini orang-orang Islam, sebagai djoega oemoemnja orang-orang bangsa Timoeran, telah lama toeroen deradjatnja di dalam matanja doenia jang kasar, tetapi mereka itoe masih mengandoeng sifat dan tabi’at jang ta’ boleh tidak perloe sekali mesti ada boeat dasar dan kemadjoeannja Socialisme. Perkara2 besar jang kedjadian di dalam doenia Islam, teroetama sekali di negeri-negeri di loear Hindia kita, dalam sepoeloeh doeapeloeh tahoen jang achir-achir ini, terlebih poela sesoedahnja perang Turkije-Griekenland jang terachir, adalah memboektikan dengan seterang-terangnja, bahwa rasa persaoedaraan dan persatoean di dalam doenia Islam, jaitoe dasar jang sesoenggoehnja bagi Socialisme, tiadalah mati tetapi bertambah-tambah koeatlah di dalam hatinja oemmat Islam.”

Walau demikian, Tjokroaminoto tidak pernah menjadikan pemikiran Marxisme atau pun Komunisme sebagai gagasan dan fahamnya.²³ Sepertinya, Tjokroaminoto menjalani karmanya sebagai guru, yang tidak selalu digugu dan ditiru tetapi terkadang digerus dan “digerusu”. Dalam pemikirannya, perjuangan berpemerintahan sendiri bagaikan upaya menyusup ke dalam lingkarannya kekuasaan kolonial, termasuk kesediaannya bergabung ke dalam anggota dewan rakyat yang pada tingkatan tertentu membawa perhatian kepada strategi *block within* yang dilancarkan gerakan komunisme, seperti anjuran Sneevliet dan tokoh-tokoh komunisme ke tubuh SI, yang dilakukan oleh Semaoen, Musso, Darsono, Alimin dan pengikut mereka. Setelah itu, Tjokroaminoto tetap berusaha merangkul pergerakan Komunis, demi persatuan Islam Indonesia.

Relevansi & Signifikansi untuk Masa Kini

Walau telah diserang dari berbagai penjuru dan diperbaiki, konfigurasi budaya dan masyarakat Jawa dalam varian Priyayi dan Santri tetap

23 Dalam karyanya tersebut (1925), Tjokroaminoto menjelaskan penolakannya terhadap ajaran Marxisme, yang menjadi landasan faham Komunisme, dalam penjelasannya tentang materialisme sejarah (*historical materialism*) tentang keyakinannya terhadap faham itu, sebagai berikut: “Tidak perloe diterangkan lebih djaoeh poela, bahwa historisch materialism itoe soenggoeh moengkir kepada Allah ! Bebel, seorang socialist besar bangsa Duitsch, mengakoe teroes-terang di dalam: *Die Frau*, begini: ,Boekannja Toehan jang menjadikan menoesia: tetapi menoesia-lah jang membikin-bikin Allah.’Agaknja kita tidak tersesat, kalaoe kita menjatakan: boekan sadja historisch materialism itoe moengkir kepada Allah, tetapi historisch materialism itoe djoega *bertoehankan benda* ! (stofvergoding) ! Ber-toehankan benda di sini tidak bererti: senang atau tjinta kepada benda, tetapi bererti ma’na perkataan jang sebenarnya: benda didjadikan Toehan: dari pada faham ini diterangkan, bahwa benda itoe asalnya segala sesoeatoe, asalnya sifat, asalnya perasaan dan asalnya hidoej jang lebih tinggi! Moengkir kepada Allah, dan bertoehankan benda! (Ihsan & Soeharto 1981: 107)

mempengaruhi cakrawala intelektual Tanah Air.²⁴ Secara akademik, pemakaian konfigurasi ini memudahkan proses pemahaman dan eksplorasi permasalahan yang penting dalam membangun suatu kerangka analisis untuk memberikan penjelasan (*to explain*) mengenai permasalahan yang diajukan. Terlebih penting lagi, konfigurasi tersebut tidak lagi menjadi alat bantu pemahaman dan penjelasan, melainkan melekat dalam paradigma untuk mengerti dan berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar dalam kehidupan bermasyarakat, atau bahkan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, varian-varian itu memang nyata dan hidup dalam masyarakat Indonesia yang

24 Yon Mahmudi (2008: 21) mengajukan tipologi Santri baru dalam kajian tentang Jemaah Tarbiyah, sebagai rujukan tentang keadaan dan perkembangan kajian tentang santri. Gagasan antara lain adalah "Bab ini menelah perkembangan awal santri baru selama masa pemantapan Orde Baru Soeharto hingga kejatu-hannya tahun 1998 . Kita memperkenalkan 3 corak santri baru; konvergen, radikal dan global. Sementara hal ini bukan penggolongan yang kaku, ketiga corak itu dapat dijelaskan dengan keterkaitan terhadap berbagai pengelompokan dalam Islam Indonesia. Santri digambarkan sebagai 'konvergen' adalah penggiat tradisionalis dan modernis yang cenderung saling bercampur. Santri 'radikal' biasanya pesimis terhadap perjuangan Islam tradisional dan modern dan menuntut perubahan radikal di Indonesia. Santri global lebih dipengaruhi oleh gerakan transnasional di Timur Tengah, tetapi tetap membentuk pengelompokan tradisionalis dan modernis di tanah air. Pendekatan kita berdasarkan pada telaah asal usul doktrin dan agenda keagamaan dari santri sezaman untuk memahami secara lebih baik timbulnya Jemaah Tarbiyah" (*This chapter analyses the early development of the new santri during the time of the consolidation of Soeharto's New Order up until its collapse in 1998. We introduce three types of new santri: convergent, radical and global. While these are not rigid classifications, the three variants can be explained by affiliation with different groupings within Indonesian Islam. Santri described as "convergent" are both traditionalist and modernist activists who tend to merge with each other. The "radical" santri are usually pessimistic about the traditionalist and modernist struggles in Islam and demand radical change in Indonesia. The "global" santri are more influenced by trans-national movements in the Middle East, yet still form part of both traditionalist and modernist groupings at home. Our approach is based on an analysis of the doctrinal origins and the religious agendas of these contemporary santri in order to better understand the emergence of the Jemaah Tarbiyah).*

kerap di sebut sebagai majemuk, plural atau multikultur.

Simbol-simbol kebudayaan nasional memperlihatkan keberadaan dan dinamika terutama varian budaya priyayi dan santri. Oleh karena itu, perubahan yang timbul di Indonesia dewasa ini terkait erat dengan pasang surut hubungan internal dan eksternal kedua varian atau kelompok sosial itu, yang tentunya tidak terlepas dari dinamika konteks global. Hubungan keduanya berlangsung dalam nuansa harmonis dan konflik, aliansi dan kolusi, langsung atau tidak langsung, dan koalisi atau oposisi, dalam gerak persaingan memperebutkan kuasa dan pengaruh, terutama pada ranah politik dan pemerintahan.

Tidaklah berlebihan apabila priyayisme, di samping santriisme, menjadi signifikan dan relevan untuk difahami dalam mempelajari masa lampau Indonesia, yang memiliki kurun waktu yang krisis dan menentukan (*formative years*) dalam proses pembentukan bangsa dan negara (*nation and state building*) hingga menjadi seperti saat ini dalam batasan politik teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awal abad kedua puluh dalam ritme dan derap perkembangan negara kolonial Hindia Belanda tumbuh dan berkembang kesadaran dan rasa kebangsaan sebagai benih persatuan nasional dan bangsa. Identitas baru ditemukan, disebarluaskan dan diformulasikan dalam istilah Indonesia. R.E. Elson (2008) menggali dan menelusuri bagaimana gagasan Indonesia lahir dan berkembang luas di lingkungan dan dalam gerak perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya, mulai dari struktur kolonial global hingga negara bangsa (*nation-state*) yang berdaulat di tengah kancah internasional. Sejumlah nama dan sosok muncul sebagai pemberi jejak, benih dan sumbangsih dalam proses konjungtural gagasan identitas kebangsaan itu.

Suatu tanda tanya yang berbalut keprihatinan muncul tatkala menemukan peranan dan sumbangsih seorang H.O.S. Tjokroaminoto tidak memperoleh perhatian, eksplorasi dan eksplorasi yang memadai dalam perjalanan gagasan itu. Elson (2009: 18) menjelaskan tentang sosok itu sebagai, “SI,

yang digerakkan oleh kepemimpinan Oemar Said Tjokroaminoto yang karismatik sejak 1912, menggunakan Islam (yang tentunya bukan sasaran untuk ditunggangi kolonialisme) sebagai penanda solidaritas ‘nasional’, ‘pribumi’, --orang Kristen tak diterima sebagai anggota SI—dan menghimpun segala unsur masyarakat pribumi.” Suatu sikap yang perlu ditanggapi secara lebih kritis dan bijaksana adalah pernyataan berikutnya bahwa “Walau Laffan mengingatkan kita bahwa SI ‘adalah gerakan massal pertama yang mengaku punya anggota di seluruh Hindia, gerakan tersebut tidak pernah menjadi wahana dengan satu tujuan yang berpandangan nasionalis.” Di sisi lain, ia menggambarkan perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan prakarsa Budi Utomo, yang lebih fokus berjuang untuk memajukan rakyat Jawa dan Madura, memiliki kesadaran yang meluas yang nantinya akan sampai kepada gagasan Indonesia (Elson 2009: 18, 19). Namun, Soe Hok Gie (1964: 42) memaparkan bahwa suatu sidang SI bulan September 1918 muncul usulan untuk mengangkat Sneevliet, seorang Belanda anggota Partai Komunis Belanda, sebagai wakil Sarekat Islam di Negeri Belanda. Kompromi tercapai dengan mengangkatnya sebagai wakil SI dengan mandat yang terbatas dan dapat dicabut kembali. Sementara G.M.T Kahin (1995: 85) menyebut Sarekat Islam sebagai organisasi nasionalis Indonesia pertama yang berdasarkan politik.

Fakta memperlihatkan seperti pada pemikiran Tjokroaminoto bahwa Indonesia dan keindonesiaan muncul sebagai identitas dan tujuan yang hendak dicapai, walau dieksplorasi melalui sudut pandang Islam dalam balutan priyayisme, karena pandangannya merupakan perpaduan dari berbagai ideologi dan faham yang sedang berkembang pada zamannya itu dalam palungan budaya Jawa. Beberapa pandangan dan pendapat memberikan indikasi itu, seperti dari Frank Dhont (2005: 24) yang menyatakan bahwa “kelompok penting pribumi paling awal adalah Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908..kemudian pada tahun 1912, berdiri Sarekat Islam...akan tetapi dasar nasionalisme Hindia-Belanda atau Indis

terjadi pada saat De Indische Partij didirikan... nasionalisme Indis didasari solidaritas antara golongan, Indo di Hindia-Belanda, golongan Tionghoa di Hindia-Belanda serta golongan pribumi.” Di bagian lain karyanya (Dhont 2005: 113) dinyatakan bahwa “evolusi politik di Indonesia sudah mulai pada awal abad 20, titik awal nasionalisme Hindia-Belanda merupakan ide dari Indische Partij..memang Boedi Oetomo lebih awal didirikan tetapi Boedi Oetomo merupakan suatu organisasi yang pada dasarnya mau membela kepentingan Jawa dan bukan ‘membebaskan’ wilayah Indonesia... SI (Sarekat Islam) sebagai calon pelopor nasionalisme Indonesia yang mau membela hak orang Islam.”

Sementara menurut Azyumardi Azra (2014: xii), “Meski berangkat dari Islam, SI adalah gerakan kebangsaan pertama, kebangkitan nasional awal, dari berbagai segi...pertama, dari sudut keanggotaan dan kepemimpinan yang mencakup berbagai suku bangsa Nusantara, kedua dari keluasan penyebarannya yang melintasi batas-batas wilayah dan pulau; ketiga, dari sudut program dan jargon yang diusung, yang intinya menuntut kemerdekaan Nusantara dari penjajahan Belanda; dan keempat kemajemukan kelas sosial para pemimpin dan anggotanya sejak dari kalangan santri, abangan, priyayi, buruh, petani, dan kaum marginal lainnya.” Senada dengan itu, menurut Ahmad Safi Maarif (2014: xvi), bahwa “Namun demikian, tercatat dalam sejarah, SI tetaplah sebagai pelopor awal nasionalisme Indonesia bersama dengan IP (Indische Partij) pimpinan trio Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hadjar Dewantara).”²⁵ Valina Singka Subekti

25 Menarik untuk disimak ungkapan dari Ary Nilandari (2005: 145-146), bahwa “De ongekroonde koning van Java” atau ‘raja Jawa yang tidak dinobatkan’ demikian orang Belanda menjuluki Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Bagi rakyat ketika itu, Tjokroaminoto adalah ratu adil. Tetapi ada julukan yang lebih pas untuk tokoh Sarekat Islam (SI) ini. Tokoh Nasionalisme Modern Indonesia Julukan itu datang dari sejarawan Ahmad Sjafii Maarif. “Dialah yang pertama kali memunculkan apa yang disebut nasionalisme modern Indonesia. Saya kira Tjokroaminoto adalah the real founding father of nationalism. Dari dia lahir tokoh-tokoh besar yang dimiliki bangsa ini, salah satunya Bung Karno.”

(2014: 1, 3) lebih tegas mengungkapkannya, bahwa “Syarikat Islam (SI) merupakan pelopor gerakan nasional Indonesia yang paling awal...sebagai gerakan massif yang menentang kolonialisme, SI menghimpun kekuatan sosial yang bersifat transprimordial, multiethnic, dan ideologis..Dari ‘rahim’ gerakan SI lahir tiga gerakan politik yang kontribusinya sangat signifikan bagi Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia berdasarkan Nasionalisme dipimpin Sukarno (1927), partai Komunis Indonesia pimpinan Semaun (PKI, 1920) dan gerakan Darul Islam pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.” PKI mencantumkan Indonesia dalam nama partainya, sedangkan DI bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia.

Priyayisme merupakan gagasan, faham dan ideologi yang bersegi majemuk (*multifacet*), tidak meleburkan (*melded*) dan berkemampuan cerlang budaya (*local genius*) sehingga menjadi tidak mudah dan rumit untuk dimengerti dan dijelaskan, karena kelenturan, kekenyalan dan transparansinya dalam multisitas yang unilitas, sebagaimana ungkapan bhineka tunggal ika. Landasan dan pengikat utamanya adalah kejawaan, yang disebut sebagai kejawen dalam priyayisme, yang sulit untuk ditentukan akar pastinya karena proses sintesis, sinkretis dan dialektis dalam pembentukannya. Ajaran dan praktik Animisme, Dinamisme, Hinduisme, Budhisme, Islam hingga sekulerisme, teosofi dan idealisme Barat mengambilbagian dalam proses pembentukan itu. Pulau, masyarakat dan budaya Jawa telah lama menjadi bagian dan mengalami globalisasi dan globalisme. Sebagai bagian dari kebudayaan dunia, budaya Jawa tidak berada dalam kedudukan resesif, melainkan memberikan sumbangsih dan partisipasi dalam perkembangan dan pengembangan kehidupan internasional. Pemikiran dan gebrakan Soekarno sempat mewarnai perjalanan politik dunia dengan gagasan-gagasan non blok (*non-alignement*), hubungan antarbangsa yang seimbang serta adil dan Pancasila untuk perdamaian dunia, di tengah-tengah persaingan Perang

Dingin. Rintisan itu sempat dilanjutkan masa Orde Baru, yang terputus pada tahun 1998 sejak mana citra dan peranan Indonesia di kancah internasional terpuruk dan hingga kini sulit untuk bangkit kembali.

Tjokroaminoto adalah seorang priyayi santri yang memiliki cita-cita persatuan nasional dalam Islam. Sejak awal kiprah politiknya, visi persatuan itu senantiasa mewarnai gagasan dan kiprah pergerakannya yang mengarah pada perjuangan terhadap belenggu kolonialisme. Namun, ia hidup dan berjuang pada masa perubahan yang terkait pada dinamika global yang diwarnai oleh gerakan-gerakan perubahan, termasuk di lingkungan Islam. Reformisme Islam, yang menurut sejumlah pakar Islamologi telah berlangsung sejak abad-16/17, pada abad ke-20 memilah masyarakat umatnya ke gerakan organisasi, yang dikatakan oleh Deliar Noer (1980) sebagai gerakan modernis Islam, baik dalam bentuk partai maupun organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, Persis hingga Nadhlatul Ulama. Keberagaman dalam reformasi Islam termasuk tanggapan-tanggappannya merupakan kancah perjuangannya untuk menegakkan persatuan yang secara gradual berubah dari Islam internasional dalam bentuk restorasi kekalifahan hingga Islam Indonesia. Di balik “kegagalan” upaya mempersatukan itu, terselip sifat dan ciri kemajemukan Indonesia yang tampak di berbagai bidang, sehingga pilar dan sabuk pengikat integritas dan integrasi yang integral menjadi relevan dan signifikan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pusaran globalisme.

Spektrum gagasan, pemikiran dan faham Tjokroaminoto menyebar ke ranah dan substansi intelektual yang meliputi politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya seperti status hukum (*rechtpersoon*), pemerintahan swamandiri (*zelfbestuur*), sosialisme, dan yang terpenting adalah nasionalisme dan kemerdekaan. Signifikansi dan relevansi intelektual, kognisi dan refleksi Tjokroaminoto seyogyanya tidak ditempatkan pada pencapaian dan kemajuan pergerakan nasional seperti pengaruh pada peningkatan pembentukan partai, organisasi fusi, lembaga sosial dan jumlah

pengikut (massa) belaka, melainkan pada perjalanan dan perkembangan mencapai dan mengisi kemerdekaan. Visi, semangat dan cita-citanya tampak jelas pada beberapa tokoh pergerakan nasional yang mengartikulasikan dan mengkonsolidasikannya dalam paradigma dan kepentingan masing-masing yang masih terikat dan terbenam dalam konteks dan batasan Indonesia atau mungkin lebih tepat keindonesiaan dalam ruas-ruas ideologi Nasionalisme plural, Komunisme dan Islam.

Menarik makna belajar dari masa lampau untuk mencapai kearifan, tampaknya penjelasan Kahin (1995) tentang latar belakang kebangkitan pergerakan Islam dalam konteks kelahiran Sarekat Islam memiliki signifikansi dan relevansi dengan keadaan dewasa ini. Kahin (1995: 85) menyampaikan, “Meskipun lingkungan umum yang menyebabkan nasionalisme politik laten dari masa itu penting dalam menciptakan kondisi sosial secara keseluruhan yang menggerakkan kepemimpinan itu, ada lagi faktor-faktor yang menonjol lainnya yang juga terlibat. Yang sangat penting adalah dampak pemikiran Islam Modernis. Ini cenderung mendorong penerimaan di kalangan orang Indonesia terpelajar disebabkan oleh makin agresifnya sifat kegiatan misionaris Kristen yang berkembang selama dasawarsa pertama abad ini di Indonesia.”²⁶ Yang juga penting adalah reaksi keras yang didorong oleh

²⁶ Walau pandangan dari kalangan Kristenisasi memandang Sarekat Islam tidak sebagai ancaman, seperti ungkapan berikut, “Menghadapi serangan-serangan itu, M. Lindenborn, seorang penginjil di Jawa Barat, muncul dalam upayanya menjelaskan bahwa Sarekat Islam, setidaknya selama kurun waktu awal keberadaannya, bukan suatu gerakan keagamaan anti penginjilan. Tanda-tanda sikap bermusuhan terhadap penginjilan atau terhadap agama bukan Islam tidak ditemukan dalam pemikiran para pemimpin Sarekat Islam, juga tidak dalam anggaran dasarnya, ia tegaskan. Lindenborn berpendapat bahwa penginjilan tidak pernah membahayakan keadaan politik di Jawa. Selanjutnya, bukan penginjilan yang bertanggungjawab atas pecahnya kemarahan rakyat seperti yang tampak dalam Sarekat Islam. Untuk mendukung pendapatnya, Lindenborn mengutip sejumlah pernyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin terkemuka perkumpulan itu, yaitu Raden Cokroaminoto, Raden Cokrosudarmo, dan Raden Hadiwijoyo, ketika

hubungan Indonesia dengan keangkuhan sifat agresif berbau politik yang ditunjukkan oleh orang Cina di Hindia yang terpengaruh oleh gagasan-gagasan nasionalisme bangsa Cina di negaranya. Gelombang nasionalisme bangsa Cina di kalangan mereka, terutama pada masa revolusi tahun 1911 itu, cenderung merangsang lebih banyak keretakan dalam hubungan-hubungan mereka yang nadanya sama sekali tidak bersahabat dengan orang Indonesia, dan membangkitkan suatu reaksi kebangsaan di kalangan banyak orang Indonesia yang punya hubungan dengan orang Cina. Lebih-lebih lagi, banyaknya konsesi ekonomi dan politik dari pemerintah Hindia Belanda yang dimenangkan oleh pergerakan kebangsaan Cina di kalangan orang Cina di Hindia yang terorganisir pada tahun 1904 hingga 1911, tidak hanya mendorong rasa iri hati banyak orang Indonesia, tetapi juga membuka mata mereka akan kemungkinan yang dapat diperoleh dengan tindakan politik yang terorganisir.”

Dalam konteks hubungan Tjokroaminoto dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai anak didik atau muridnya, yang menjadi pemain utama dalam pembentukan, pencanangan dan perjuangan kemerdekaan

mereka ber kunjung ke Benjamin ter Kuile, seorang notaries, pada 8 Juli 1918.... Hal itu adalah bukti bahwa selama anggaran dasar yang baru dikerjakan di Surabaya, sikap tidak bermusuhan Sarekat Islam terhadap agama lain adalah lebih terungkap “*In the face of such attacks, M. Lindenborn, a missionary in West Java, came to the fore in his attempt to make it clear that Sarekat Islam was, at least during the initial period of its existence, not an anti-mission religious movement. Signs of a hostile attitude towards the mission or towards other non-Islamic religions were nowhere to be found in the ideas of the Sarekat Islam's leaders, nor in its constitution, he pointed out. Lindenborn held the opinion that the mission in no event endangered the political situation on Java. Morepver, it was not the mission that was responsible for the outburst of people's anger as manifested within the Sarekat Islam. To back up his argument, Lindenborn quoted a numer of pronouncements made by the very leaders of the organization, e.q. Raden Cokroaminoto, Raden Cokrosudarmo, dan Raden Hadiwijoyo, when they were on a visit to Benjamin ter Kuile, a notary, on July 8, 1918....It was evident that during the initial stage of its existence, in articular the time when the new constitution was being worked in Surabaya, Sarekat Islam's non hostile attitude towards other religions was more explicit*” (Sumartana 1991: 199-200).

bangsa dan negara Indonesia sejak masa pergerakan nasional, kesimpulan yang dapat menyesatkan harus dijernihkan. Tjokroaminoto tidak pernah menyukai, apalagi menganjurkan konflik, perpecahan ataupun bentrokan, yang selalu dihindari semampunya walau sering tidak berhasil karena keadaan menghendakinya untuk bersikap dan bertindak tegas terutama saat memimpin dan membawa organisasi yang diayominya melalui saat-saat yang sulit, genting dan kritis, namun tetap penuh keadilan dan kebijaksanaan menurut akidah agama Islam walau terkadang masih memperlihatkan jejak-jejak priyayisme. Apabila arena pertarungan politik internal muncul, yang memperlihatkan persaingan ideologis nasionalisme, agama dan komunisme, yang melibatkan sosok-sosok yang pernah dekat dengannya, kenyataan itu harus difahami sebagai kehendak sejarah dalam konteks pilihan-pilihan yang diambil untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka sebagaimana yang diperlihatkan oleh Soekarno, Kartosuwirjo dan Musso serta Alimin. Semaoen segera menyadari keadaan yang dihadapinya dan mengambil pilihannya sendiri.

Tjokroaminoto dapat dikatakan mempersiapkan pilihan-pilihan jalan yang hendak ditempuh. Masalah keberhasilan atau kegagalan, kesulitan dan kemudahan, serta hambatan dan tantangan yang akan dihadapi tentunya di luar kuasa dan keinginannya walau secara langsung dan tidak telah tercakup dalam faham, ajaran dan teladannya. Dalam ukuran dan lingkup itu, ia boleh disebut-sebut sebagai berhasil, untuk menjadi seorang guru. Kalaupun ada kegagalan yang hendak dicari-cari darinya, barangkali keterbukaan dan welas asih terhadap murid-muridnya terlampaui lembut untuk mampu menjinakkan dan meredam watak garang ideologi ketika hendak mewujudkan dan mencapai cita-citanya melalui penggerahan kekuatan (*massa actie*) dan radikalasi para pengusungnya. Di antara mereka, murid dan penganut, ada yang menjadi penerus, pelurus hingga penggerus warisan intelektual, jejak pergerakan dan kiprah perjuangannya.

Daftar Pustaka

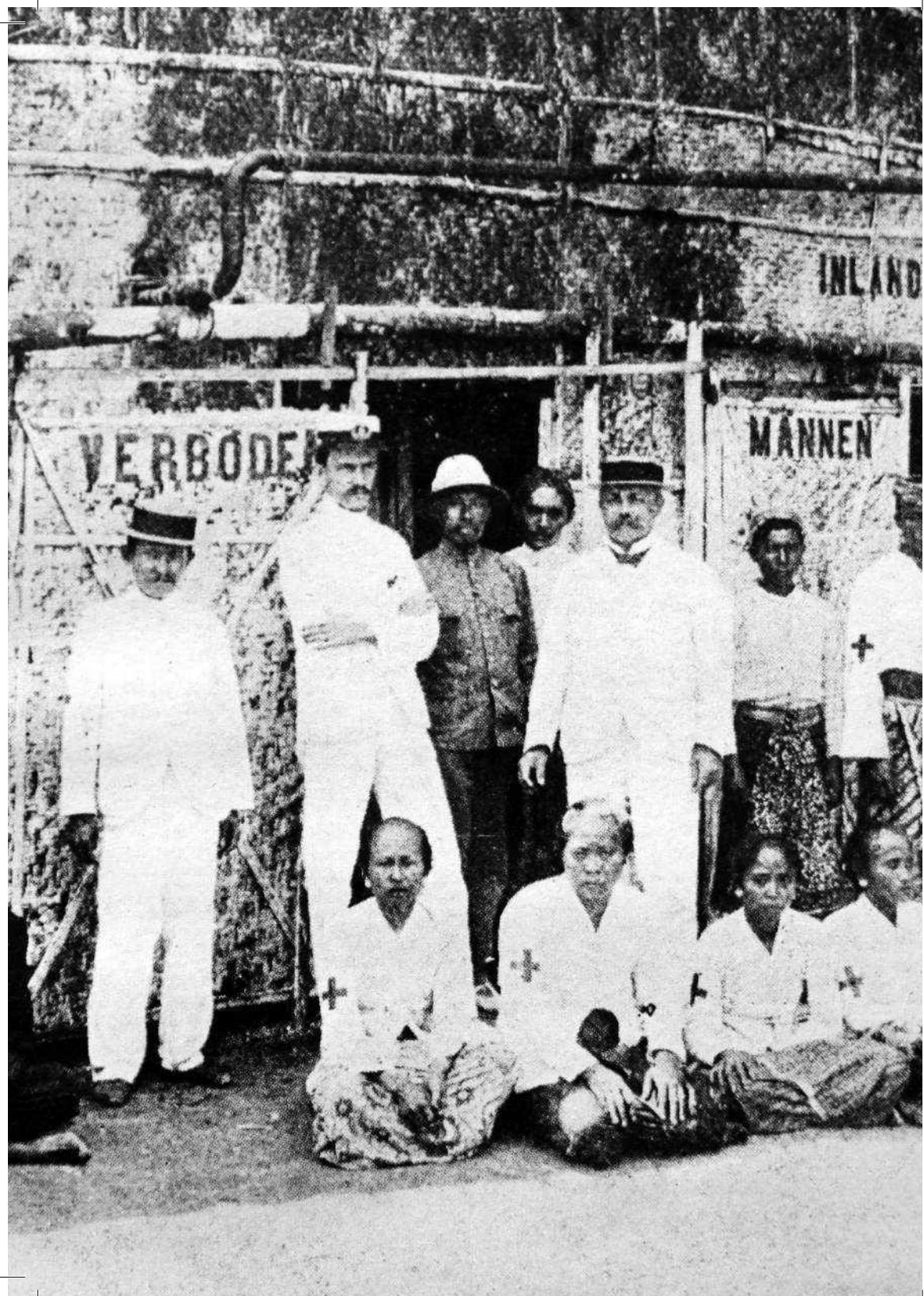
- Abdulgani, Roeslan (1976). *Alm. Dr. Soetomo yang Saya Kenal Hasil Penyelidikan dan Penelitian pada Berbagai Sumber Sejarah, baik yang Ada di Jakarta maupun di Berbagai Arsip Negeri Belanda*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Abdullah, Taufik (2009). *Indonesia towards Democracy*. Singapore: ISEAS
- Adams, Cindy (2011). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno & Media Pressindo
- Alwi, M. Muntasir, Arif Fadhillah (tt). *Aplikasi Islam dalam Wilayah Kuadran Rumusan Dasar Teoritis, Praksis, dan Revolusioner Adaptasi Mukmin terhadap Kondisi-kondisi Negara*. Tt: Madani Press.
- Anderson, B.R.O'Gorman (2001). *Kuasa Kata Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Jakarta: Mata Bangsa
- Anshari, Endang Saifuddin (1983). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: C.V. Rajawali
- Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Assyaukanie, Luthfi (2009). *Islam and the Secular State in Indonesia*, ISEAS Series on Islam. Singapore: ISEAS Publication
- (2013). "Political Secularization in Indonesia." dalam: Ranjan Ghosh (ed.) *Making Sense of the Secular Critical Perspectives from Europe to Asia*. New York: Routledge
- Azra, Azyumardi (2014). "Kata Pengantar Dinamika PSII: Prisma Politik Islam Indonesia." dalam: Valina Singka Subekti. *Partai Syarikat Islam Indonesia Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Azra, Azyumardi, Kees van Dijk, Nico J.G. Kaptein (2010) (eds.). *Varieties of Religious Authority Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*. Singapore: ISEAS Publishing
- Burhanudin, Jajat (2010). "Traditional Islam and Modernity: Some Notes on the Changing Role of the Ulama in Early Twentieth Indonesia." dalam:

- Azyumardi Azra, Kees van Dijk, Nico J.G. Kaptein (eds.). *Varieties of Religious Authority Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*. Singapore: ISEAS Publishing, hal. 54-72
- (2012). *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta Selatan: Mizan Publika
- Dahm, Bernhard (1987). *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES
- Dengel, Holk H (2011). *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo “Angan-angan yang Gagal”* Jakarta: Sinar Harapan.
- van Dijk, Cornelis (1983). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. (terjemahan). Jakarta: Graftipers.
- Dhont, Frank (2005). *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dick, Howard (2002). “Formation of the Nation-state, 1930s–1966.” Dalam: Howard Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad, Thee Kian Wie. *The Emergence of a National Economy: an Economic History of Indonesia, 1800–2000*. Honolulu: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin and University of Hawai’i Press.
- Elson, Robert E (2009). *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Formichi, Chiara (2012). *Islam and the Making of the Nation Kartosuwiryo and Politcal Islam in Indonesia*. Leiden: KITLV Press
- Frederick, William (1989). *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Yayasan Karti Sarana & Gramedia
- Frederick, William, Soeri Soeroto, peny. (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum & Sesudah Revolusi*. Jakarta LP3ES
- Friend, Theodore (2009). *Indonesian Destinies*. Harvard: Harvard University Press
- Geertz, Clifford (1983). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Gonggong, Anhar (Peny.) (1993). *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Ghosh, Ranjan (ed.) (2013). *Making Sense of the Secular Critical Perspectives from Europe to Asia*. New York: Routledge,

- Ihsan, A Zainoel, Pitut Soeharto (peny.) (1981). *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok Capita Selecta Pertama Kumpulan Tulisan Asli Lezing Pidato Tokoh Pergerakan Kebangsaan 1913-1938*. Jakarta: Jayasakti
- Ingleson, John (1983). *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES
- Kahin, George McTurnan (1995). *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Sebelas maret University Press & Pustaka Sinar Harapan.
- Karimi, Ahmad Faizin (2012). *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: MUHI Press
- Kartodirdjo, Sartono (1990). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru jilid 2: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kasenda, Peter (2014). *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka
- Kasenda, Peter, Yuda Tangkilisan, Djoko Marihandono (2013). *Dokter Soetomo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional
- Korver, A.P.E (1985). *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: Grafitipers
- Laffan, Michael Francis (2003). *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia The Umma below the Winds*. London & New York: Routledge Curzon
- Latif, Yudi (2005). *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan Pustaka
- Legge, John D (1996). *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, cetakan ketiga. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Maarif, Ahmad Safii (2014). “Kata Pengantar”. Dalam: Valina Singka Subekti. *Partai Syarikat Islam Indonesia Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mahmudi, Yon (2008). *Islamising Indonesia The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: ANU E Press
- McVey, Ruth (2006). *The Rise of Indonesian Communism*, reprint. Jakarta: Equinox Publishing
- Mohammad, Herry dkk. (2006) *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press

- Muljana, Slamet (2008). *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, jil. I. Yogyakarta: LKiS
- Nagazumi, Akira (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Modern Indonesia*. Jakarta: van Niel, Robert (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Nilandari, Ary (ed.). *Memahat Kata Memugar Dunia 101 Kisah yang Menggugah Pikiran*, Buku Kesatu. Bandung: Mizan Learning Center, 2005
- Noer, Deliar (1980). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900—1942*. Jakarta: LP3ES
- Onghokham (1990). *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- (1983). “Kata Pengantar” dalam: Heather Sutherland. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Ramakrisna, Kumar (2009). *Radical Pathways Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*. Westport: Greenwood Publishing Group
- Rambe, Safrizal (2008). *Sarekat Islam Pelopor Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia
- Sahrasad, Herdi , Al Chaidar. *Islamism & Fundamentalism*. Aceh: University of Malikussaleh Press, 2012
- Salim, Arskal (2008). *Challenging the Secular State Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press
- Scherer, Savitri Prastiti (1985). *Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Shiraishi, Takashi (1997). *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Simbolon, Parakitri Tahi (2006). *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Grasindo & Kompas Media Nusantara
- Soe Hok Gie (2005). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang

- Soebardi, S (1983). "Kartosuwiryo and the Darul Islam Rebellion in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 14, no. 1 (March, 1983), hal. 109-133
- (1964). *Di bawah Lentera Merah Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*. Tt: tp.
- Subekti, Valina Singka (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sumarsam (1995). *Gamelan Cultural Interaction and Musical Development in Central Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1995
- Surjomihardjo, Abdurrachman (1986). *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Sumartana, Th. (1991). *Mission at the Crossroads: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-religious Change in Java 1812-1936*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Sutherland, Heather (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Tangkilisan, Yuda (2013). "Indonesia Mulia: Butir-butir Tersebar Pemikiran Dr. Soetomo mengenai Memajukan Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Indonesia." dalam: Peter Kasenda, Yuda Tangkilisan, Djoko Marihandono. *Dokter Soetomo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, hal. 117-144
- (2010). "Culturepreneurship dan Indonesia yang Modern Pemikiran Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana." Dalam: Yuda Tangkilisan et al. *Penulisan Sejarah Pemikir Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah Ditjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Tangkilisan Yuda, et al (2010). *Penulisan Sejarah Pemikir Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah Ditjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Tempo* 21 Agustus 2011
- Triatmono, Hero (ed.) (2010). *Kisah Istimewa Bung Karno*. Jakarta: Kompas Media Nusantara



MENGHADAPI PERADILAN KOLONIAL : TJOKROAMINOTO DALAM PERKARA HUKUM

Harto Jowono

Sebagai seorang tokoh massa dan pimpinan suatu organisasi politik, Tjokroaminoto berada dalam posisi yang saling berhadapan dengan penguasa kolonial. Dalam segala tindakannya yang bernilai strategis politis, Tjokroaminoto kerap kali berbenturan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Tindakan itu dianggap sebagai ancaman terhadap struktur yang dianggap sah atau setidaknya tidak sesuai dengan arah dan kebijakan rezim kolonial. Sebagai sosok yang harus bisa memainkan perannya dalam struktur (*agency*), Tjokroaminoto bukan hanya berhadapan dengan rezim penguasa secara individual melainkan juga secara struktural. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa suprastruktur yang menopang system kekuasaan kolonial mencakup segala komponennya, termasuk aparat hukum.

Mengingat system kolonial yang berlaku saat itu, dengan sifat sentralisasi kekuasaan dalam segala aspeknya, sistem hukum kolonial yang diterapkan juga dimaksudkan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah kolonial. Dengan demikian fondasi hukum yang diletakkan sebagai penopang system tersebut adalah aturan-aturan dari sistem hukum positif yang telah diberlakukan di Negara induk dan kemudian sejak pertengahan abad XIX dinyatakan berlaku di tanah koloni Hindia Belanda (konkordansi).¹ Melalui aplikasi demikian, pemerintah kolonial dengan mudah menemukan tuduhan terhadap mereka yang aktivitas atau pandangan yang dipublikasikan sebagai

1 Prinsip konkordansi adalah penerapan sistem hukum yang berlaku di Negara induk di tanah koloni. Proses ini dipicu oleh dipublikasikannya UU Liberal tahun 1848 yang dijadikan sebagai dasar sistem pemerintahan Belanda dan hubungannya dengan tanah koloni. Bertolak dari UU tersebut, pemerintah Den Haag kemudian menerbitkan *Regeering Reglement* pada tahun 1854 sebagai bentuk UU baru dan dasar hukum dalam mengatur hubungan kekuasaan dan hukum di tanah koloni Hindia Belanda. Aturan ini dipublikasikan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1855 nomor 2.

membahayakan bagi keamanan dan ketertiban (*rust en orde*),² termasuk Tjokroaminoto. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi politisasi perkara hukum dan kriminalisasi aktivitas politis yang melibatkan sosok Tjokroaminoto.

Kasus Tanah Partikelir

Tanah partikelir merupakan suatu institusi yang menduduki posisi khusus dalam sistem agraria kolonial Hindia Belanda. Keberadaannya telah ada sejak awal abad XIX, meskipun pola yang sama dalam kepemilikan tanahnya telah dimulai sejak pertengahan abad XVIII dengan pembelian tanah di daerah Buitenzorg oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff dan diikuti oleh penguasaan petak-petak tanah luas di sekitarnya oleh para petinggi VOC lainnya.³ Salah satu identitas dari tanah partikelir yang membedakannya dengan kepemilikan tanah lain, di samping jaminan hak

2 J.S. Furnivall, *Policy and Practice: a comparative study of Burma and Netherland India* (Cambridge, 2014, Cambridge University Press), halaman 238. Prinsip penegakan keamanan dan ketertiban ini membedakan sistem hukum yang diterapkan oleh Belanda dengan sistem hukum Inggris, yang berdasarkan pada *rule of law*. Dalam sistem hukum Inggris, termasuk dalam sistem hukum kolonialnya yang menekankan *law and order*, terdapat pemisahan antara kekuasaan hukum dan politik yang tegas. Sementara itu dalam sistem hukum continental yang dianut Belanda, pemisahan ini tidak terlalu jelas terlihat sehingga sering terjadi percampuran dalam aplikasinya. Sebagai akibatnya, kasus larangan berkumpul (*verbod voor vergadering*) terutama bagi organisasi massa atau organisasi politik oleh petugas kepolisian kolonial bisa dikonotasikan sebagai tindakan politik sekaligus tindakan hukum.

3 J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Batavia, 1902, Albrecht), halaman 11. Pelepasan tanah kepada Baron van Imhoff oleh Marta Wangsa, menyangkut tanah Kampung Baru pada tanggal 10 Agustus 1745 yang disahkan melalui resolusi oleh Dewan XVII. Imhoff bukan hanya menjadi pemilik tanah tetapi juga mewarisi hak-hak feudal yang dimiliki oleh penguasa bumi putera sebelumnya. Untuk menarik penawaran tanah-tanah sekitarnya, ia menetapkan bahwa pemilik tanah di sekitar Kampung Baru juga akan mendapatkan hak-hak kekuasaan seperti dirinya. Hal ini mendorong sejumlah pejabat VOC untuk mengikuti langkahnya dengan membeli tanah-tanah di sekitar Buitenzorg seperti Kedong Badak, Cipamingkis, Cilengsi, Jampang, Ciblagong, Cikalang, Bekasi, Jatinegara, Cibadak, dan Pagar Besi.

milik mutlak (*recht van eigendom*) yang pada akhir abad XIX diperkuat dengan pemberian status *verponding* sebagai dasar untuk menghitung pajak tanahnya (*grondbelasting*), adalah hak-hak kekuasaan yang melekat pada pemiliknya (*landeigenaar*).⁴

Berdasarkan sistem tersebut, pemilik tanah memiliki kewenangan sebagai pengganti pemerintah untuk seluruh tanah yang dimilikinya dan tercatat sebagai tanah partikelir dalam catatan kadaster pemerintah. Setelah membayar pajak tanahnya kepada pemerintah, termasuk juga pajak kepala (*hoofdbelasting*) dari penduduk yang menghuni tanah itu, pemilik tanah mempunyai kekuasaan sangat luas untuk menerapkan aturan-aturan sendiri, sejauh aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah terutama yang berkaitan dengan gangguan keamanan. Dasar hukum yang menjamin kekuasaan pemilik tanah ini telah diletakkan sejak tahun 1836, dan dengan dasar tersebut pemilik tanah partikelir sering disebut sebagai tuan tanah.⁵

Kekuasaan tuan tanah partikelir sangat luas dan bahkan melalui arti

- 4 J.A. Krajenbrink, *Het regt van eigendom der bezitters van particuliere landen op Java met authentieke acten bewezen* (Tiel, 1864, D.R. van Wermeskerken), halaman 11-12. Pemberian status *verponding* ini muncul pada tahun 1862 atas dasar keputusan Menteri Negara J.J. Rochussen. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa untuk menghitung jumlah pungutan hasil bumi (*cuke*) yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kepada pemilik tanah partikelir ini, dan juga untuk menghitung penebusan jumlah kerja wajib yang disesuaikan dengan luas tanah yang digarap oleh pekerjanya, pemerintah menetapkan nilai dasar sebagai standar perhitungan. Nilai dasar yang melekat pada nilai tanah itu disebut sebagai *verponding*.
- 5 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1836 nomor 19. Peraturan ini diberlakukan bagi tanah-tanah partikelir yang terletak di sebelah barat aliran sungai Cimanuk (*bewesten de Tjimanoek rivier*). Dalam peraturan tersebut tercantum hak-hak yang dinikmati oleh pemilik tanah partikelir termasuk pemungutan cukai dalam bentuk sebagian panen, penyisihan hasil bumi dari penduduk sebagai upeti kepada pemilik tanah, kewenangan membuat aturan hukum sendiri dan memelihara aparat keamanan khusus.

pentingnya dalam system agraria kolonial, keberadaannya tidak tergoyahkan oleh perubahan dalam sistem perundangan di bidang pertanahan Hindia Belanda. Ketika pemerintah kolonial menerbitkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada tahun 1870,⁶ peraturan ini dinyatakan tidak berlaku di tanah partikelir (*uitsluiting der particuliere landen*). Dengan demikian penduduk bumi putra di tanah-tanah partikelir, yang dianggap sebagai penghuni yang menumpang hidup dengan hak garap dan tunduk kepada tuan tanah, tidak mendapatkan jaminan untuk memperoleh hak milik (*eigendomrecht*) atau hak kepemilikan (*bezitsrecht*) seperti yang terjadi pada tanah negara (*Staatsdomein*).⁷

Pesona kepemilikan tanah ini sangat tinggi terutama bagi kalangan individu swasta yang memiliki modal untuk membelinya. Pemerintah sendiri memberi peluang untuk itu sehingga institusi tanah-tanah partikelir ini segera menyebar dan terus bertambah pada awal abad XIX, terutama di sekitar kota Batavia. Di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Jenderal Raffles, institusi tanah partikelir juga mulai muncul di Jawa Timur dan terutama di sekitar kota Surabaya yang dirintis oleh keluarga kapten Tionghoa Han Tjan Pit. Begitu juga di daerah Semarang, tanah-tanah partikelir mulai muncul yang dirintis oleh bekas anggota dewan Hindia Belanda, Muntinghe.⁸ Sejak itu

6 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1871 nomor 55, yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yang disebut *Agrarische Besluit*, dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1871 nomor 118.

7 Willem van Assen, *De agrarische wet en Koninklijk Besluit tot hare uitvoering* (Amsterdam, 1872, C.A. Spin en Zoon), halaman 28-29. Dalam hal ini, posisi tanah partikelir memenuhi syarat bagi status *Lex specialis derogate generalis*, atau kasus khusus yang mengalahkan ketentuan umum. Ketika perdebatan berlangsung dalam parlemen Belanda, para pendukung tanah partikelir menggunakan pasal 2 dari *Staatsblad* tahun 1836 nomor 19, yang menjamin hak milik mutlak atas tanah itu berdasarkan pembelian dan pembayaran pajak pada pemilik tanah dan semua orang yang hidup dari tanah itu wajib membayar upeti sebagai bentuk subordinasi dan hutang kepada pemilik tanah.

8 Henry David Levyssohn Norman, *De Britsche Heerschappij over Java en Onderho-*

kemudian muncul kelompok tanah-tanah partikelir yang terletak di sebelah timur sungai Cimanuk (*beoosten de Tjimanoek rivier*).⁹

Di bawah pemerintahan Baron van der Capellen yang lebih menyukai eksplorasi Negara, ada upaya untuk mengurangi kekuasaan para tuan tanah ini dengan cara menekan hak mereka untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Dengan cara ini diharapkan agar kewenangan untuk menjaga keamanan tetap dipegang oleh pemerintah atau pejabatnya di daerah (dalam hal ini residen) dan para pemilik tanah partikelir ini tunduk kepada perintahnya.¹⁰ Tetapi perubahan segera terjadi di bawah pemerintahan Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignies sejak tahun 1826. Dalam laporan program ekonomi dan kolonisasinya tahun 1827 kepada pemerintah di Den Haag, Du Bus bahkan menjamin kebebasan bagi para pemilik tanah partikelir, khususnya di Jawa Timur, untuk menguasai sendiri produksi tanah itu termasuk produk tanaman yang saat itu menjadi monopoli pemerintah, yaitu kopi. Dengan langkah ini, Du Bus memperkuat hegemoni tuan tanah partikelir termasuk dalam aspek ekonomi dan juridisnya.¹¹

origeden (1811-1816) ('s Gravenhage, 1857, Gebroeders Belinfante), halaman 295.

Nilai tanah-tanah di Semarang lebih besar daripada di Surabaya, meskipun keduanya masih di bawah tanah-tanah partikelir di Jawa Barat, khususnya di Keresidenan Batavia. Di masa penerapan *Kultuurstelsel*, tanah-tanah partikelir ini juga dikecualikan dan tuan tanah tetap menikmati hak-hak primordialnya yang tidak bisa dikurangi atau dilanggar oleh *Kultuurstelsel*.

- 9 H. van Dissel, "Rapport omrent de particuliere landerijen beoosten de Tjimanoek rivier" dalam *Tijdschrift voor de Nederlandsch Indische maatschappij van Nijverheid en Landbouw*, tahun 1878, vol. 22, halaman 237-238.
- 10 Bahkan dalam hal ini residen diberi kewenangan untuk menggunakan para mandor di tanah partikelir dalam menjaga keamanan di kompleks itu. Dengan sistem ini, kebebasan pemilik tanah yang menghidupi dan memelihara mandornya jelas sangat ditekan dan wewenang pemerintah diperluas dalam sistem penegakkan hukum di tanah-tanah partikelir. Johan Albert Spengler, *Nederlandsch Oost Indische Besittingen onder het bestuur van Gouverneur Generaal Baron van der Capellen (1819-1825), eerste gedeelte* (Utrecht, 1863, Kemink en Zoon), halaman 118.
- 11 Karena bermaksud menerapkan penghematan, Du Bus menganggap bahwa intervensi pemerintah terhadap persoalan internal tanah partikelir tidak lagi sesuai den-

Di masa *Kultuurstelsel*, status dan posisi tanah-tanah partikelir ini tidak banyak mengalami perubahan dan cenderung semakin diperkuat oleh pemerintah. Di bawah system ini, tuntutan pemerintah hanya menerapkan monopoli dalam penjualan kopi dan tanaman lain yang tumbuh di tanah-tanah partikelir dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan *Kultuurstelsel* secara tegas tidak diberlakukan di tanah-tanah partikelir. Sebaliknya pemerintah justru mengeluarkan peraturan pada tahun 1836 yang menegaskan status dan kewenangan pemilik tanah partikelir serta status tanahnya dalam system agraria kolonial.¹²

Dalam peraturan ini, pasal 2 menjamin hegemoni tuan tanah seperti yang tercantum berikut ini

Uit krachte van het directe eigendomrecht in den landeigenaar gevestigd, is hij bevoegd tot het heffen van een aandeel in den oogst of opbrengst van alle gronden, die door inlandsche bevolking bebouwd of vrucht gevende gemaakt zijn of worden. Aan hem behooren alle woeste gronden, mitsgaders bosschen, bamboezen en andere natuurlijke voortbrengselen den lands, met deze verstande nogtans, dat aan de opgezetenen, die aan den eigenaar de bepaalde opbrengst voldoen op den grond, dien zijn in gebruik hebben, de vrije beschikking blijft over de weiden voor hun vee, en over de bosschen tot het vergaderen van bamboe, rottang, allang-allang, brandhout en verdure dagelijksche benodigheden, mits deze bestemd zijn zijn voor eigen gebruik en niet ter verkoop.

gan tujuan dan cenderung menimbulkan pemborosan. Untuk itu tuan tanah dipercaya kembali sepenuhnya menegakan dominasinya, dengan catatan memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Pembebasan produk kopi ini berarti juga pelepasan kembali mandor-mandor tuan tanah yang difungsikan sebagai mandor kopi di tanah partikelir. H. van der Wijck, *De Nederlandsche Oost Indische bezittingen onder het bestuur van Commisaris Generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830)* ('s Gravenhage, 1866, Martinus Nijhoff), halaman 186.

12 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1836 nomor 19.

Peraturan yang berlaku untuk semua tanah partikelir di Jawa ini menegaskan bahwa tuan tanah atau pemilik tanah partikelir memiliki kewenangan yang sangat luas pada batas-batas lingkup tanahnya, baik atas tanah maupun penduduknya. Bahkan pemerintah sendiri tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi tanpa membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan tuan tanah, dan tuan tanah bisa melakukan perlawanannya ketika pemerintah memaksanya (*de eigenaars dier landerijen tegen deze onregmatige handelingen van het Gouvernement zich verzetten*).¹³ Prinsip ini setidaknya sampai akhir tahun 1830an diberlakukan, dan baru pada awal tahun 1840-an muncul perubahan. Perubahan ini terutama berkaitan dengan benturan kepentingan antara pemerintah dan tuan tanah sehubungan dengan kerja wajib yang diperlukan bagi perawatan infrastruktur.

Terutama untuk tanah-tanah partikelir di wilayah Keresidenan Surabaya, tuntutan pemerintah bagi perawatan jalan dan jembatan yang digunakan untuk pengangkutan produk yang dihasilkan oleh *Kultuurstelsel* dari pedalaman ke pelabuhan sangat tinggi dan hal itu hanya bisa dilakukan lewat tanah-tanah partikelir ini. Mengingat tuan tanah memiliki kewenangan atas semua infrastruktur di tanahnya, pemerintah tidak bisa menuntutnya untuk mengerahkan penduduk melakukan kerja wajib (*heerendiensten*) bagi perawatan seperti di tanah pemerintah. Terutama tuan tanah di Surabaya menegaskan status hak milik (*eigendom*) yang telah diperoleh lewat penjualannya tahun 1812. Atas dasar kondisi di atas, Gubernur Jenderal P. Merkus kemudian mencabut salah satu fasilitas yang dinikmati tuan tanah, yaitu bahwa sejak tahun 1845 pemerintah melalui residen Surabaya berhak meminta tenaga kuli dari tuan tanah untuk melakukan kerja wajib bagi perawatan fasilitas umum di lingkup tanahnya.¹⁴

13 Anonim, "De bescherming der inlandsche bevolking op Java" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, tahun 1853, vol. 15, halaman 34.

14 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 9 September 1844 no. 8*, bundle *Algemeen Secretarie*.

Akan tetapi kebijakan di atas merupakan tindakan terakhir pemerintah terhadap tanah-tanah partikelir di Jawa Timur sepanjang abad XIX. Sejak tahun 1870 dengan dikeluarkannya *Agrarische Wet*,¹⁵ status tanah partikelir ini menjadi semakin kuat dengan *eigendom verponding*, yang berarti bahwa pemilik tanah memiliki kekuatan hukum tetap atas kepemilikannya yang diakui oleh pemerintah kolonial. Lewat *verponding* yang dipegangnya, pemilik tanah bisa menjadikannya sebagai jaminan untuk mendapatkan dari lembaga perbankan dan perkreditan, termasuk milik pemerintah.¹⁶

Bertolak dari situ, pada decade 1880-an sejumlah tuan tanah di Keresidenan Surabaya, yang kebanyakan adalah orang Tionghoa, memperluas kepemilikannya atas lahan-lahan lain. Lewat pembelian dari penduduk yang sudah mendapatkan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah dengan adanya *Agrarische Wet* di atas, orang-orang kaya Tionghoa, baik tuan tanah maupun bukan, berhasil membeli tanah-tanah itu dan menegaskan haknya yang baru atas lahannya. Penduduk bekas pemiliknya yang tinggal di tanah itu kemudian dimintakan hak guna usaha (*erfpacht recht*) oleh tuan tanah kepada pemerintah.¹⁷ Akibatnya pada awal tahun 1890an, dalam daftar yang

15 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1871 nomor 55. Dalam peraturan ini, ternyata kembali tanah partikelir tidak terkena pemberlakuan.

16 *Verponding*, berasal dari kata *ponden* atau *ponderen*, yang bersumber dari bahasa Latin *ponderare*. Artinya adalah menafsirkan atau cara menafsirkan. Dalam prakteknya, *verponding* merupakan nilai pokok dari objek tidak bergerak untuk menetapkan jumlah pajaknya. Besarnya adalah 2/3 dari nilai beli objek itu dan terutama digunakan untuk mengukur nilai pajak bagi tanah. Ini diberlakukan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1871 nomor 68 sebagai hasil perubahan dari *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1823 nomor 5.

17 Memang dengan *erfpacht recht* ini, pemegangnya mendapatkan hak memiliki hasil yang dipetik dari tanah itu. Namun bertolak dari situ pemegang hak akan terkena pajak menurut aturan resmi pemerintah. Oleh karena itu dalam prakteknya penduduk tanah partikelir ini membayar pajak ganda, yaitu pajak pendapatan kepada pemerintah dan *cuve* sebagai bentuk sewa tanah kepada tuan tanah. C.E. van Kesteren, *Een en Ander over de welvaart Inlansche Bevolking en de toekomst der Europeesche Landbouw-nijverheid in Nederlandsch Indië* (Leiden, 1885, E.J. Brill), halaman 36

tercatat tentang tanah-tanah partikelir ini di *Regeering Almanak*, luasnya mencapai 5776 bahu dan menguasai penduduk sebanyak hampir 27.000 jiwa yang tersebar dalam 29 tanah partikelir.¹⁸

Dalam praktik sehari-hari, tuan tanah memiliki kekuasaan yang menggantikan pemerintah di tanah-tanahnya. Mereka berhak memungut *cuke* dalam prosentase tertentu yang ditetapkan olehnya dari hasil tanah penduduk yang menumpang di tanahnya.¹⁹ Tuan tanah juga menjadi penanggungjawab keamanan atas wilayahnya dengan membentuk struktur aparat hukum dan peradilan sendiri, seperti mandor dan tukang pukul yang bertugas menjaga keamanan, termasuk juga pemilihan atau pengangkatan kepala desa. Selain itu juga pemilik tanah berhak meminta penghuninya melakukan kerja wajib baik bagi kepentingan dirinya maupun kepentingan pemerintah ketika dibutuhkan. Umumnya eksistensi mereka terjamin dan diakui oleh pemerintah kolonial meskipun ada sejumlah peraturan yang dibuat untuk membatasi wewenang sampai awal abad XX.

Keberadaan institusi tanah partikelir dengan hak-hak tuan tanah seperti yang disebutkan di atas ini dipandang oleh pemerintah kolonial juga sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan system politik dan hukum yang berlaku. Di samping itu sejumlah peristiwa pemberontakan dan kerusuhan yang terjadi di beberapa tanah partikelir membuat para petinggi kolonial memandang bahwa keberadaan tanah partikelir tidak lagi bisa dibiarkan dan pemerintah harus mengambilalihnya dengan cara membeli kembali, karena status hak milik yang dipegang oleh tuan tanahnya wajib dihormati. Dengan penghapusan institusi ini, pemerintah akan mengambil alih semua yang sebelumnya dimiliki oleh tuan tanah dan bertanggungjawab untuk

18 “In en om Soerabaja” dalam *De Locomotief*, tanggal 25 Mei 1891, lembar ke-2. Di antara para pemilik tanah ini, kapten Tionghoa di Surabaya The Toan Lok menjadi pemilik utama lewat kongsi. Diduga sejak kepemilikan pertama oleh Kapten Han Tjan Pit di masa Daendels, sistem kepemilikan tanah-tanah partikelir di Keresidenan Surabaya ini dilakukan oleh kongsi yang merupakan bentuk investasi modal dari keluarga atau kelompok kerabat.

19 “Vergelijking met Gouvernement’s landrente” dalam *De Locomotief*, tanggal 2 Agustus 1887, lembar ke-2.

mengeksplotasi dan menjaga keamanan dan ketertiban di tanah-tanah itu.²⁰

Suara untuk menuntut pengembalian tanah-tanah partikelir oleh Negara menjadi semakin keras dilontarkan pada tahun-tahun pertama awal abad XX, ketika politik Etis diumumkan sebagai pedoman kebijakan kolonial. Di kalangan parlemen Belanda agenda itu menjadi objek perdebatan selama beberapa tahun dalam sidang tahunannya. Tuntutan yang muncul adalah bahwa keberadaan tanah partikelir merugikan secara ekonomi bagi koloni dan penduduk bumi putera, sehingga tidak menghasilkan eksplotasi lahan yang maksimal. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk membebaskan penduduk dari eksplotasinya dengan membeli kembali tanah-tanah itu.²¹

Upaya ini akhirnya berhasil mencapai tujuan meskipun masih dalam tahap awal, yaitu dengan diterbitkannya peraturan tentang penebusan kembali tanah-tanah partikelir di sebelah barat sungai Cimanuk pada tahun 1912.²² Berdasarkan peraturan ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk secara bertahap membeli kembali tanah-tanah partikelir ini meskipun masih terbatas pada tanah-tanah di Keresidenan Batavia, dan selanjutnya meluas ke Priangan.²³

20 “Particuliere landerijen op Java” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 1 Mei 1909, lembar ke-2. Dalam hal ini pemerintah lebih banyak mengegarah pada penghapusan hak-hak kekuasaan (*afschaffing van souvereine rechten*) dari tuan tanah, karena dari penelitian terbukti ada tanah partikelir yang menunjukkan kondisi ekonomi penduduknya justru lebih baik daripada tanah pemerintah.

21 “Terugkoop van particuliere landerijen op Java” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 24 Juli 1906, lembar ke-2. Di kalangan parlemen ada tiga kelompok yang mengajukan alternatif bagi keberadaan tanah partikelir. Kelompok pertama menghendaki agar tanah-tanah itu tetap ada untuk menghormati hak milik tuan tanah tetapi dengan penerapan peraturan pemerintah secara lebih luas. Kelompok kedua menghendaki penghilangan wewenang politis dari tuan tanah dan hanya memiliki hubungan ekonomi dengan penduduknya. Kelompok ketiga yang didukung oleh Menteri Koloni menuntut penebusan kembali oleh pemerintah atau penghilangan institusi tanah partikelir.

22 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1912 nomor 422.

23 “Aankoop particuliere landerijen” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 21 November 1913, lembar ke-1. Langkah pemerintah yang tidak bisa segera menghapusk tanah partikelir sekaligus ini disebabkan oleh penolakan Menteri de Waal

Meskipun terbatas di sebelah barat Cimanuk, berita tentang rencana pemerintah ini segera meluas ke wilayah lain dan terutama ke Keresidenan Surabaya. Di sini, tanah-tanah partikelir yang ada diatur dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 1880.²⁴ Keberadaan tanah-tanah ini tidak menjadi sorotan publik, mengingat selama beberapa decade tidak ada laporan tentang pergolakan atau protes yang disampaikan oleh penduduk terhadap perlakuan tuan tanah. Namun demikian kondisi kehidupan penduduk di tanah-tanah ini juga dianggap memprihatinkan dan tidak jauh berbeda dengan penduduk di tanah-tanah partikelir Jawa Barat yang menjadi korban eksploitasi tuan tanah.²⁵

Setelah dorongan untuk penghapusan tanah-tanah partikelir oleh pemerintah ini muncul pada awal decade kedua abad XX, sorotan terhadap keberadaannya mulai tampak di mana-mana termasuk di Keresidenan Surabaya. Beberapa orang anggota Sarekat Islam memanfaatkan hal ini untuk menjadikannya sebagai agenda politik bagi perjuangan partainya. Mereka menyampaikan hal ini kepada Tjokroaminoto sebagai ketua umum CSI pada bulan April 1916. Olehnya, masalah ini dijadikan sebagai salah satu pokok bahasan dari kongres tahunan Sarekat Islam yang diadakan di Bandung pada tanggal 20 Juni 1916. Dari pembahasannya, CSI selanjutnya menyetujui pengiriman mosi kepada pemerintah agar segera mempercepat proses penghapusan tanah-tanah partikelir ini.²⁶

Malefijt yang mempertimbangkan sejumlah aspek bagi kebijakan itu. Oleh karenanya Gubernur Jenderal Idenburg memutuskan untuk melakukannya secara bertahap dan terbatas di wilayah Jawa Barat.

24 *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1880 nomor 150. Peraturan ini disusun berdasarkan hasil penelitian oleh Mr. H. van Dissel pada tahun 1878.

25 “De Sarikat Islam” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 8 Mei 1916, lembar ke-2. Terlepas dari kepentingan propaganda politik, beberapa anggota Sarekat Islam melaporkan kepada Tjokroaminoto tentang kehidupan sosial di tanah-tanah partikelir sekitar Surabaya. Tjokroaminoto kemudian menjadikan laporan ini sebagai agenda rapat tahunan SI di Semarang.

26 “S.I. Congres”, dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 Juni 1916, lembar ke-1. Dalam hal ini orang yang diserahi untuk menyusun mosi tersebut adalah Abdool Moeis, yang kelak menjadi wakil Sarekat Islam dalam Volks-

Langkah juridis yang diambil oleh CSI ini memotivasi organisasi ini dan terutama Tjokroaminoto untuk segera memperluas pandangannya. Beberapa bulan kemudian, sasarannya tidak lagi terbatas pada tanah-tanah partikelir di Jawa Barat namun juga di sekitar kota Surabaya. Pada tanggal 20 November 1916, dalam sebuah rapat terbuka di gedung Tamansari Surabaya, Tjokroaminoto menyoroti keberadaan tanah-tanah partikelir yang dihuni oleh ratusan orang bumi putera. Ia mempersoalkan perampasan panen rakyat yang masih ada di sawah oleh para mandor tuan tanah dan menganggapnya ini sebagai suatu bentuk perampasan hak milik dan sudah selayaknya kasus ini dibawa ke pengadilan untuk diadili oleh hakim pemerintah (*dit is te beschouwen als een middel van den landeigenaar om zich tegen het wegvalen van den oogst te beveiligen. Ieder die waagt, komt in aanraking met den strafrechter*).²⁷

Ketika Tjokroaminoto tidak melihat tanda-tanda dari pemerintah untuk membenahi kondisi tersebut, pada bulan Juni 1917 dalam rapat umum SI di Taman Sirene Batavia, ia mengulangi kembali kritiknya terhadap keberadaan tanah-tanah partikelir.²⁸ Dalam rapat ini Tjokroaminoto mengambil langkah lebih maju dengan meminta agar SI Batavia mengundang beberapa administratur tanah partikelir dalam rapat untuk bisa melakukan diskusi dengannya. Namun demikian tanggapan publik terhadap sikap ini justru menuduh Tjokroaminoto telah memanfaatkan topik yang menjadi sorotan publik ini sebagai propaganda politik untuk mentenarkan SI dan khususnya bagi dirinya. Salah satu tuduhannya adalah bahwa justru di Surabaya, atas provokasi SI hubungan antara tuan tanah dan penduduk tanah partikelir

raad.

27 “De particuliere landerijen” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 25 November 1916, lembar ke-2. Tanah-tanah partikelir yang menjadi sorotan Tjokroaminoto ini adalah Bagong, Simo, Karah, Darmo, Manyar, Ngagel dan Kaputran. Semuanya terletak di dalam kota Surabaya.

28 “Vergadering der SI” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 12 Juni 1917, lembar ke-1.

terganggu.²⁹

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak SI segera mengambil sikap untuk membela diri. Terutama ini dilakukan ketika mereka menanti pemerintah yang tidak segera bertindak terhadap para pemilik tanah partikelir. Dalam pertemuan di Batavia pada tanggal 20 Oktober 1917, beberapa tokoh SI yang tidak sabar segera mendesak Tjokroaminoto agar mengambil “djalan kras” untuk memperjuangkan nasib penduduk di tanah partikelir.³⁰ Pada kesempatan yang sama, perwakilan SI dari Semarang, Semaoen, mendesak dia untuk menghadap kepada pemerintah untuk membicarakan pembebasan (*onteigenning*) tanah-tanah partikelir di sana. Desakan radikal dari Semaoen ini mendapatkan dukungan dari perwakilan SI Buitenzorg, yang menegaskan bahwa penderitaan penduduk di tanah-tanah partikelir daerahnya tidak lagi tertahanakan.³¹

Di tengah situasi panas dengan sejumlah tuntutan yang mendesak Tjokroaminoto ini, terjadi suatu peristiwa yang semakin memperuncing persoalan. Pada minggu kedua November 1917 beberapa tuan tanah di kota Surabaya mengadukan penduduknya kepada aparat hukum dengan tuduhan tidak memenuhi kewajiban menyertakan *cuve*. Oleh karena itu tuan tanah ini menuntut agar penduduk tersebut meninggalkan rumah mereka di kampung Kebon Sasaran, yang terletak di Pesapen. Polisi bertindak cepat dan menangkap empat orang yang dianggap sebagai provokatornya.

29 “Propaganda voor SI” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 14 Juni 1917, lembar ke-1. Mengingat harian ini memiliki orientasi politik Etis, berita yang dimuat olehnya hanya merupakan deskripsi dari opini publik saat itu secara umum terhadap SI, terutama dari kalangan masyarakat Eropa yang mengkhawatirkan pertumbuhan SI sebagai suatu kekuatan politik Islam yang besar.

30 “Het S.I. Congres” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 21 Oktober 1917, lembar ke-1. Ungkapan ini disampaikan dalam rapat umum terbuka di depan massa rakyat hari Minggu, sementara dalam rapat pengurus tertutup hari Sabtu malam tidak disinggung.

31 “Het SI Congres” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 Oktober 1917, lembar ke-2.

Mengingat asisten wedana Kremlangan yang dilapori oleh masyarakat tidak segera bertindak, massa bergerak menemui Tjokroaminoto dan mengadukan hal ini kepadanya. Tjokroaminoto segera berangkat menemui residen Surabaya bersama perwakilan penduduk. Dari hasil pertemuannya, Tjokroaminoto berhasil memperoleh perkenan residen untuk memukimkan penduduk kampong Kebon Sasaran di sebidang lahan yang terletak di jalan Gresik sebagai tempat tinggal sementara. Atas pertolongan ini, penduduk tanah partikelir itu menunjukkan simpati dan penghargaannya kepada Tjokroaminoto.³²

Tentu saja peristiwa di atas bukan hanya membuat situasi politik menjadi panas dan suasana tegang muncul dalam kehidupan social di Surabaya, namun juga mengangkat nama Tjokroaminoto di kalangan publik yang dikenal sebagai penyelamat rakyat. Bagi pemerintah kolonial hal ini tidak bisa dibiarkan karena adanya dua pertimbangan yang beresiko: faktor keamanan dan faktor politik yang akan menguntungkan Sarekat Islam. Oleh karena itu, atas saran Residen Surabaya pada pertengahan Januari 1918 pemerintah pusat menunjuk seorang pejabat yang diserahi tugas untuk mendata tanah-tanah partikelir di Surabaya, yang akan dipertimbangkan untuk dibebaskan.³³

Menanggapi penunjukkan pejabat ini, Tjokroaminoto segera menulis surat kepada residen Surabaya agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Dalam suratnya itu Tjokro menekankan kejelasan tentang status hukum (*rechtstoestand*) dari penduduk bumi putera di tanah-tanah partikelir, sambil menanti pembebasan tanah-tanah itu oleh pemerintah.³⁴ Menanggapi surat ini, Gubernur Jenderal Limburg Stirrum sendiri menetapkan bahwa langkah-

32 “Particuliere landerijen” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 14 November 1917, lembar ke-2. Tidak lama kemudian peristiwa serupa juga terjadi di tanah partikelir Patemon milik tuan tanah Tjoa Tjoan Djie, yang juga menuntut penduduk karena tunggakan dalam membayar uang sewa.

33 *ANRI, Brief van Gouvernement Secretaris 17 Januari 1918 no. 17, bundle Algemeen Secretarie.*

34 “Het Sarekat Islam Congres” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 12 Februari 1918, lembar ke-2.

langkah akan diambil untuk memberikan status hukum bagi penduduk tersebut. Pemerintah mencabut hak *erfpacht* yang selama ini dimiliki penduduk karena dianggap sebagai sumber beban ganda, dan menggantikannya dengan hak pakai (*gebruikrecht*) setelah tanah itu dibebaskan oleh pemerintah. Dari situ, penduduk akan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan agar bisa mendapatkan hak kepemilikan individu turun-temurun (*erfelijk bezitsrecht*) setelah menghuni dan mengerjakannya selama beberapa tahun.³⁵

Meskipun langkah di atas seolah-olah menunjukkan kemenangan Tjokroaminoto dan SI dalam membela rakyat di tanah-tanah partikelir, justru pada bulan-bulan setelah keluarnya keputusan tersebut terjadi peristiwa yang menyulitkan Tjokroaminoto dan hal ini dipicu oleh tindakan eks-anggotanya. Soehari, bekas anggota SI yang dikeluarkan karena mengikuti Semaoen dengan ideologi komunisnya, membentuk gerakan yang disebut Poro Jitno. Dengan gerakan ini, ia melakukan provokasi kepada penduduk tanah partikelir untuk tidak membayar *cuve* dan sewa tanah sehingga kasus ini akan diangkat ke forum politik dan hukum. Ketika hal ini akhirnya mengarah pada bentrokan fisik di tanah Ketabang, Porong dan Menukan pada bulan April 1918, karena tuan tanah menolak tuntutannya untuk membebaskan rakyat dan aparat keamanan turun tangan, Soehari melontarkan tuduhan kepada Tjokroaminoto yang dianggap bertanggungjawab atas semua ini.³⁶

Akan tetapi setelah polisi turun tangan dan diproses oleh pemeriksaan pengadilan, keterlibatan Tjokroaminoto tidak terbukti dan dia dilepaskan dari tuduhan. Sebaliknya polisi akhirnya berhasil menangkap Soehari, yang

35 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 25 Maart 1918 no. 35*, bundle *Algemeen Secretarie*. Apa yang dimaksudkan dengan *erfelijk bezitsrecht* ini adalah agar tanah itu bisa dimiliki oleh orang bumi putera tetapi tidak bisa dijualnya, sehingga statusnya bukan hak milik mutlak (*eigendom recht*).

36 “Het relletje in ‘t Porongsche” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 23 Mei 1918, lembar ke-2. Dalam aksinya, Soehari menulis surat kepada pemerintah bahwa pemimpin perlawanan di desa Jenggot dan penghasut penduduk di sejumlah tanah partikelir adalah “Sang Wiro”. Menurut kata-katanya, Sang Wiro ini diidentikkan dengan Tjokroaminoto.

selama ini disinyalir menjadi tempat pengaduan penduduk tanah partikelir Porong yang tidak puas terhadap perlakuan tuan tanah. Penangkapan Soehari bukan hanya mengungkap konspirasi yang dibangun di kalangan penduduk tanah partikelir, namun juga keterikatannya dengan gerakan kiri Semaoen di Jawa Tengah.

Meskipun Tjokroaminoto selamat dari tuduhan di atas, persoalan ini membuat marah rekan-rekannya di SI yang menuduh pemerintah terlalu lambat dalam menangani perkara tanah partikelir. Dalam dua rapat umum pada bulan Oktober 1918 sejumlah tokoh dari Sosial Demokrat yang sebelumnya bergabung dengan SI diundang. Di antara mereka yang hadir adalah Semaoen, Darsono dan beberapa tokoh lain. Persoalan tanah partikelir kembali dibicarakan sebagai agenda dan rapat memutuskan untuk mengirimkan kembali mosi kepada pemerintah sehubungan dengan hal ini.³⁷

Mosi kedua tentang tanah partikelir dikirimkan oleh CSI kepada pemerintah Batavia. Tututan mereka adalah tetap pada penghapusan dan pengambilalihannya oleh pemerintah, serta perbaikan nasib dan perubahan status penduduk bumi putera yang tinggal di atasnya. Dalam rapat di Taman Sirene, Batavia pada tanggal 23 November 1918, dengan adanya peristiwa kerusuhan di tanah partikelir Cileungsi yang mengakibatkan penyitaan peralatan pertanian penduduk petani di sana oleh tuan tanah, Tjokroaminoto bertindak berani. Bersama Abdoel Moeis ia menyediakan dana f 1000 untuk menebus kembali peralatan itu dan mengajak anggota CSI untuk menyumbang guna penebusan tanah ini.³⁸

Walaupun tidak berhasil mencapai tujuannya dalam waktu dekat, upaya Tjokroaminoto untuk memperbaiki nasib penduduk dengan menuntut pemerintah membebaskan status tanah-tanah partikelir terus berlangsung. Sejumlah tanah partikelir memang mulai ditebus kembali oleh pemerintah.

37 "S.I. Congres" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 25 Oktober 1918, lembar ke-2.

38 "De SI vergadering in Sirene Park" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* tanggal 25 November 1918, lembar ke-1.

Akan tetapi reaksi dari pihak tuan tanah terhadap desakan Tjokroaminoto juga tidak bisa diabaikan. Mereka menuduh Tjokroaminoto sebagai provokator radikal yang akan mengobarkan kerusuhan dengan kekuatan massa. Tentu saja hal ini dibantah olehnya dan dikeluhkan kepada pemerintah.³⁹ Kendati demikian Tjokroaminoto tetap tidak menyerah dan terus berjuang bagi terwujudnya maksud itu.

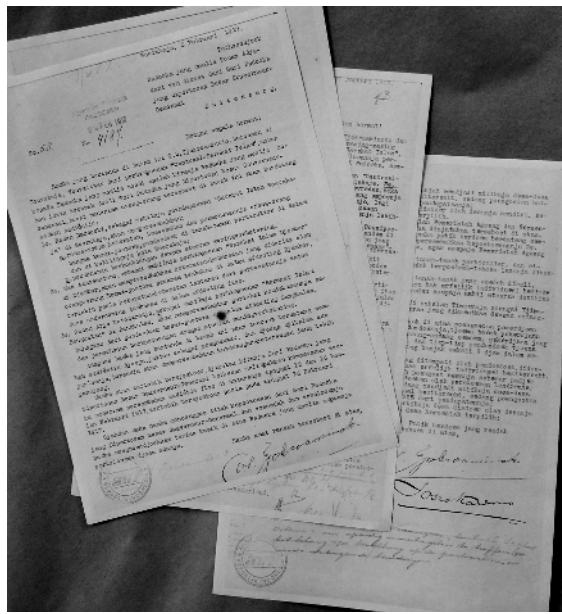
Penahanan Tjokroaminoto

Jika dalam perjuangan menghapuskan institute tanah partikelir dan mengentaskan nasib penduduknya yang terpuruk Tjokroaminoto tidak mendapatkan rintangan dari pemerintah, dan menunjukkan tanda-tanda kemenangan setidaknya sampai 1920, peristiwa lain setahun kemudian menghadapkan dirinya terhadap kepentingan pemerintah secara langsung dan berakhir pada penangkapannya oleh aparat kepolisian.

Sejak keberhasilannya dalam membantu penduduk tanah partikelir, bersama juga dengan ketenarannya yang semakin besar dalam memimpin Sarekat Islam Pusat, Tjokroaminoto tampil sebagai sosok publik yang terkenal dan berpengaruh baik di kalangan anggota pergerakan maupun masyarakat luas. Oleh karena itu pemerintah kolonial, terutama agen-agen *Politiek Inlichtingen Dienst* (PID),⁴⁰ mulai melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada Tjokroaminoto dan segala aktivitasnya. Hal ini terutama semakin dianggap penting ketika suara dan pidato Tjokroaminoto dianggap mulai menunjukkan sikap keras dan berani menentang atau mengritik

39 ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 3 Maart 1919 no. 25*, bundle *Algemeen Secretarie*.

40 Harry A. Poeze, “Political Intelligence in the Netherlands Indies” dalam Robert Cribb, *The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden, 1994, KITLV Press), halaman 230. PID adalah institusi polisi rahasia yang merupakan bagian dari kepolisian kolonial dan didirikan pada tanggal 6 Mei 1916. Objeknya adalah individu atau organisasi yang dianggap menjadi ancaman bagi hukum publik dan ketertiban, khususnya organisasi politik yang dianggap radikal seperti SI dan komunis.



kebijakan pemerintah kolonial secara terbuka pada akhir dekade kedua abad XX.⁴¹

Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan oleh kebijakan dan sikap pemerintah kolonial yang menunjukkan ketegasan terhadap kehidupan organisasi dan pergerakan kaum nasionalis Indonesia setelah Perang Dunia I. Meningkatnya unsur-unsur radikal di kalangan pergerakan nasionalis sebagai akibat dari pengaruh ideologi internasional seperti Islam dan komunis tidak bisa dihindari lagi sebagai suatu kenyataan politik. Situasi ini menciptakan ketegangan dan peningkatan eskalasi protes serta perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan kebijakannya yang dianggap sebagai bentuk penindasan politik terhadap tanah koloni.⁴²

41 “Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 13 Oktober 1921, lembar ke-2

42 Cornelis Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War 1914 – 1918* (Leiden, 2007, KITLV Press), halaman 467. Tuntutan persamaan hak semakin keras disuara-

Ketika tuntutan kalangan pergerakan memuncak dengan adanya “janji November” (*November beloofthen*) oleh Gubernur Jenderal Limburg Stirrum,⁴³ yang bermaksud untuk mengadakan pembaharuan dalam pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan rakyat di tanah koloni setelah Perang Dunia I berakhir, bagi pemerintah kolonial tidak ada lagi alternatif lain kecuali mengambil tindakan tegas. Terutama bagi pemerintah kolonial ide-ide internasional yang baru seperti komunis yang terwujud dalam organisasi politik ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) harus segera ditumpas dan tidak bisa dibiarkan berkembang di kalangan masyarakat.⁴⁴

Sarekat Islam yang sebelumnya dianggap sebagai organisasi massa tidak radikal menjadi sasaran pengawasan ketat selanjutnya. Terutama hal

kan setidaknya oleh dua partai yang terkenal dengan radikalismenya yaitu Insulinde yang merupakan penjelmaan Indische Partij setelah para pemimpinnya diasingkan pada tahun 1915, dan ISDV yang mulai tumbuh. Kekerasan keduanya segera mempengaruhi kelompok lain termasuk Sarekat Islam dalam menyuarakan penentangan terhadap kebijakan pemerintah kolonial selama ini.

43 Herman Smit, *Landvoogd tussen twee vuren: Jonkheer Mr. A.C.D. de Graeft, Gouverneur Generaal van Nederlands Indie 1926-1931* (Hilversum, 2011, Herman Smit & Uitgevery verloren), halaman 25. Apa yang disebut sebagai janji November adalah janji yang diucapkan oleh Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum bahwa pada bulan November dan Desember 1918 setelah Perang Dunia I berakhir, akan ada perubahan politik dalam arti keterlibatan lebih luas dari penduduk bumi putera dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan atas tanah koloni. Ini diwujudkan dalam bentuk Volksraad sebagai lembaga wakil rakyat pertama dalam politik pemerintahan tanah koloni ini.

44 Ruth T. Mc Vey, *The rise of communism in Indonesia* (Singapore, 2007, Equinox Publishing), halaman 14. ISDV merupakan organisasi dari orang-orang yang berideologi sosialisme pertama kali di Indonesia di bawah pimpinan Sneevliet dan kemudian juga Brooshoff Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Mei 1914 di Surabaya. Pada mulanya organisasi ini merekrut anggotanya dari kalangan ormas buruh termasuk buruh kereta api (VSTP) yang sangat kuat di Surabaya. Pengaruh keberhasilan revolusi komunis di Rusia atas organisasi ini sangat besar. Mereka berhasil menarik pengikut dari kelompok Islam, termasuk dari kalangan Sarekat Islam dengan para tokohnya seperti Semaoen dan Darsono. Kelak ISDV akan berubah menjadi partai komunis Indonesia.

ini terjadi setelah pada akhir dekade kedua abad XX organisasi ini disinyalir terlibat dan berada di belakang sejumlah peristiwa kekerasan atau perlawanan terhadap pemerintah. Meskipun pada umumnya peristiwa ini bersifat lokal, penggunaan nama dan pengaruh Sarekat Islam dan khususnya Tjokroaminoto memberi alasan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap para tokoh Sarekat Islam terutama yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban. Penangkapan terhadap sejumlah tokoh SI segera dilakukan dan tindakan ini selalu mengikuti penumpasan terhadap suatu gerakan perlawanan, sehingga bersifat sebagai bentuk penyidikan terhadap mereka yang dicurigai berperan secara tidak langsung dalam perlawanan tersebut.

Suatu peristiwa besar yang mengejutkan pemerintah, masyarakat dan bahkan SI sendiri adalah kasus perlawanan Kyai Haji Mohamad Hasan Arif di kampung Cimareme, desa Cikendal, Leles, Garut. Peristiwa yang terjadi pada Juli 1919 ini sebenarnya berlatar belakang pada konteks sosial ekonomi pedesaan, yaitu panen dan penjualan padi sebagai hasil panen. Hasan Arif sendiri adalah pimpinan Sarekat Islam lokal yang bersikap kritis terhadap aparat pemerintah baik Eropa maupun bumi putera. Terutama terhadap bupati Garut Raden Suria Karta Legawa dan wedana Leles yang membawahi desa Cimareme, kritik Hasan sering dilontarkan. Kedua aparat bumi putera ini, terutama wedana Leles yang mulai menjabat pada April 1919 dituduh sebagai prototip pejabat bumi putera yang korup dan suka mengeksplorasi rakyat dengan latar belakang kehidupannya yang menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu Hasan menganggap kedua tokoh ini tidak layak untuk tampil sebagai sosok pemimpin.⁴⁵

45 Yong Mun Cheung, *Conflicts within prijaji world of the Parahyangan in West Java 1914-1927* (Singapore, 1973, ISEAS), halaman 24. Cheung memandang bahwa peristiwa di atas merupakan klimaks dari persaingan antara kelompok priyayi feudal (*menak*) dan kalangan ulama yang telah ada sejak abad XIX. Terutama nuansa yang muncul dalam hal ini adalah perebutan pengaruh dan legalitas dalam posisi masing-masing di kalangan masyarakat Sunda. Mengingat kelompok priyayi semakin

Sebagai kontradiksi terhadap pencitraan aparat bumi putera ini, Haji Hasan tampil sebagai sosok ulama yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Pengaruhnya bukan hanya diperoleh dari statusnya sebagai seorang agamis yang saleh tetapi juga dari leluhurnya yang merupakan cikal bakal daerah Cimareme. Mertuanya Haji Gazali oleh masyarakat juga dihormati dan disegani karena dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan kesaktian supranatural.⁴⁶ Haji Gazalli dan Haji Hasan mempertahankan pengaruh dan posisinya di kalangan masyarakat lewat ikatan patron-klien yang dibangun baik secara spiritual maupun ekonomi. Di rumahnya sering terdapat perkumpulan sejumlah orang untuk mengaji dan mempelajari ilmu keagamaan, di samping juga menjadi tempat untuk meminta pertolongan saat terjadi kesulitan panen.

Ketika Sarekat Islam mulai menyebar dengan cabang-cabangnya di Keresidenan Priangan, Haji Hasan segera bergabung di dalamnya dan mendapatkan posisi penting sebagai ketua cabang Cimareme. Seiring dengan meningkatnya pamor Sarekat Islam, wibawa Haji Hasan juga meningkat di kalangan masyarakat ketika semakin banyak orang yang mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi ini. Dengan demikian, kehidupan dan hubungan sosial antara Hasan dan masyarakat meningkat dari ikatan primordial menjadi ikatan kepartaian, dan langkah mereka sering diorientasikan pada program partai serta petunjuk dari para pemimpin Sarekat Islam.⁴⁷ Dengan

menyandarkan diri mereka pada penguasa kolonial, kalangan ulama lebih banyak menggalang dukungan dari rakyat dengan menegakkan citra dan pengaruh mereka sebagai rohaniawan yang bersih dari tujuan eksplorasi.

- 46 Sartono Kartodirdjo, “Agrarian radicalism in Java: its setting and development” dalam Claire Holt, *Culture and Politics in Indonesia* (Singapore, 2007, Equinox Publ), halaman 115.
- 47 Anonim, “Het Garoet drama en de Afdeeling B’ dalam *De Indische Gids*, tahun 1920, vol. I, halaman 450. Dari hasil penyelidikan kepolisian setelah peristiwa tanggal 7 Juli 1919, terbukti bahwa Haji Hasan sebenarnya tidak langsung tercatat sebagai anggota SI melainkan sebagai anggota kelompok Guna Perlayan, suatu inti organisasi yang tergabung dalam *Afdeeling B*.

posisi demikian, tidak mengherankan apabila polarisasi antara Haji Hasan dan pengikutnya di satu sisi dan aparat birokrasi pemerintah di sisi lain menjadi semakin jauh, dan suatu peristiwa yang bersifat provokatif sedikit bisa memicu terjadinya konflik terbuka antara keduanya.

Pada bulan itu, April 1919, pemerintah kolonial lewat bupati meminta kepada masyarakat terutama pemilik sawah di seluruh Cimareme untuk menyetorkan hasil panen padi mereka. Padi ini akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus disetorkan ke tempat yang sudah ditetapkan. Perintah ini disampaikan kepada Haji Hasan lewat wedana Leles, yang sudah lama bermusuhan dengannya. Kesempatan ini digunakan oleh wedana tersebut untuk menunjukkan sikap dan kekuasaannya terhadap Hasan dengan dalih melaksanakan instruksi dari pemerintah. Terlepas dari kebencianya terhadap wedana, Hasan merasa keberatan terhadap instruksi itu karena akan merugikan dirinya dan keluarganya. Jumlah 40 pikul padi sebagai hasil panen sawahnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup Hasan dan keluarganya sendiri.

Oleh karena itu pada 24 April 1919, Hasan berpikir untuk menulis surat kepada asisten residen, karena dalam pikirannya tidak ada manfaatnya menghadap bupati Garut untuk mengadukan hal ini. Akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi, dan tawaran Hasan bahwa ia hanya bisa menjual 10 pikul padi sementara sisanya akan digunakan untuk kebutuhan keluarganya ditolak oleh asisten residen. Alasan Hasan bahwa keluarganya yang besar membutuhkan beras itu dianggap tidak masuk akal dan justru asisten residen mencurigai adanya pemupukan kekuatan yang dilakukan oleh Hasan.⁴⁸

48 “Het verzet in ‘t Garoetsch” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 19 Juli 1919, lembar ke-2. Suratkabar ini menuliskan bahwa aparat distrik dan desa telah mencurigai maksud Haji Hasan dengan penolakannya. Ini berarti bahwa reaksi asisten residen disebabkan oleh informasi sepihak yang diberikan oleh para aparat bumi putera, khususnya wedana Leles, bahwa Haji Hasan memiliki niat buruk dengan persediaan padi yang tidak disetorkannya itu.

Setelah hampir tiga bulan tidak ada solusi, akhirnya bupati diperintahkan untuk berangkat ke Cimareme dengan membawa sejumlah perangkat pada 4 Juli 1919. Tujuan kedatangannya adalah melakukan kesepakatan dan pembicaraan lebih lanjut dengan Haji Hasan bagi penyetoran padi tersebut. Ketika pembicaraan ini juga tidak menemukan solusi, pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih keras. Hasan sendiri bukannya tidak mengetahui tanda-tanda ini, dan ia segera mengumpulkan keluarganya termasuk mertuanya Haji Gazali untuk memperkuat posisinya. Keesokan harinya tidak hanya keluarganya tetapi juga banyak massa yang berkumpul di rumahnya untuk menunjukkan simpati kepada Hasan.

Pada 7 Juli 1919 asisten residen tiba dengan sejumlah aparat kepolisian dan wedana serta beberapa pejabat bumi putera. Setibanya di rumah Hasan, asisten residen memberikan ultimatum agar Hasan segera menghadap kepada pemerintah setempat dan menyetorkan padinya. Namun situasi saat itu sudah tegang karena ada desas-desus beredar bahwa residen dan bupati akan datang dengan membawa sejumlah pasukan militer. Hasan yang sebenarnya bersikap kooperatif segera menarik diri ke dalam rumahnya, sementara Haji Gazali yang akan mengikutinya ditarik oleh seorang aparat bumi putera dan ditangkap. Kejadian berikutnya menunjukkan adanya pengepungan rumah itu oleh aparat dan setelah peringatan, tembakan dilepaskan. Sebagai akibatnya hampir seluruh orang yang berada di dalam rumah terbunuh, termasuk Haji Hasan sendiri.

Peristiwa di atas segera menimbulkan kehebohan tidak hanya di kalangan masyarakat kampong Cimareme tetapi juga di wilayah sekitarnya, dan bahkan mencapai tingkat elite politik kolonial dan para tokoh pergerakan nasional. Pemerintah segera memerintahkan penyelidikan terhadap peristiwa ini dan dari hasilnya diketahui bahwa Hasan dan sejumlah orang lain yang menjadi korban tercatat sebagai anggota Sarekat Islam. Haji Gazali bersama 90-an orang lain yang disinyalir terlibat ditangkap dan diinterogasi. Dari

hasil interrogasi ini diketahui bahwa orang-orang ini bukan berasal dari Cimareme melainkan banyak yang datang dari Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Manonjaya dan bahkan Cirebon. Suatu benang merah yang menyatukannya adalah sebagian besar dari mereka merupakan anggota Sarekat Islam.⁴⁹

Terlepas dari apakah ada pembuktian mengenai keterlibatan langsung Sarekat Islam sebagai organisasi dalam peristiwa perlawanan Haji Hasan di atas, informasi yang diterima oleh penyidik mengenai pengakuan sejumlah tawanan memberi alasan pemerintah untuk menjadikan Sarekat Islam sebagai organisasi yang dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa ini.⁵⁰ Hal ini membuka peluang bagi aparat keamanan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap beberapa orang tokoh Sarekat Islam yang selama ini dianggap vocal dan radikal untuk segera dilakukan penangkapan, seperti yang selama ini telah direncanakan.⁵¹

49 "De Garoet affair" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 23 Juli 1919, lembar ke-1. Meskipun beberapa orang yang diinterogasi mengaku bahwa mereka melakukan perlawanan atas instruksi dari CSI, hal itu tidak terbukti. Diduga bahwa pengakuan tersebut untuk menambah keberanian dan wibawa mereka dalam melawan pemerintah. Dengan demikian, status keanggotaan dan symbol-simbol SI menjadi unsure yang penting dalam menumbuhkan semangat dan motivasi dari masyarakat awam untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai penindasan dan eksplorasi.

50 Kalangan pers kolonial terpecah dalam pandangan ini. Misalnya Koran konservatif *Prianger Bode* menuduh bahwa keterlibatan SI tidak bisa dihindari. Surat kabar itu bahkan menambah dengan berita bahwa beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa ini, Haji Hasan telah mendatangkan seorang ulama dari tempat lain yang diketahui memiliki zimat untuk kekebalan tubuh bagi persiapan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Berita ini sebaliknya dibantah oleh *Bataviaasch Nieuwsblad* yang menyebutkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, karena pada hari peristiwa Hasan tidak melakukan perlawanan sama sekali dan hanya menutup diri di dalam rumah. Jadi tidak mungkin bila ada persiapan perlawanan. "Garoet in de Inlandsche Pers" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 24 Juli 1919, lembar ke-2.

51 "Nieuwe gegevens" dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 24 Juli 1919, lembar ke-1. Sebelum melangkah ke sana, aparat keamanan kolonial telah merancang strategi dengan membungkam gerakan SI di Priangan yang

Sikap pemerintah di atas segera mendapatkan tanggapan dari pihak SI. Salah satunya adalah ketua SI cabang Cianjur yang segera menjadi sasaran pemeriksaan oleh aparat. Pada 30 Juli 1919, tokoh ini bersama Sembilan orang pengurus lainnya berangkat ke Garut dan dipertemukan dengan dua orang tawanan. Di depan mereka, setelah dilakukan pertukaran keterangan, terbukti bahwa SI Cianjur tidak mengetahui peristiwa di Cimareme dan bahkan ketua maupun Sembilan orang lainnya tidak saling mengenal dengan mereka yang ditangkap, termasuk dengan Haji Gazali.⁵²

Namun demikian, tidak hanya pemerintah, Tjokroaminoto sendiri sudah beberapa saat sebelumnya mensinyalir adanya suatu tanda-tanda yang beresiko dari animo masyarakat luas terhadap SI. Ia menerima berita dari Sosrokardono yang berkunjung ke Manonjaya pada Januari 1919 tentang adanya rencana sekelompok orang yang memasuki SI untuk membentuk kumpulan khusus dengan mengatasnamakan organisasi ini.⁵³ Kumpulan itu disebut sebagai *Afdeeling B* yang bertujuan menggulingkan kekuasaan Belanda. Ketika berada di Bandung pada Februari 1919, Tjokroaminoto

dianggap menguat belakangan ini dan berpotensi untuk melakukan perlawanan.

Dengan alasan bahwa Cimareme menjadi bagian dari komplottan yang lebih besar dengan jangkauan di seluruh keresidenan, banyak cabang SI di Priangan yang segera diperiksa dan sejumlah pengurusnya ditangkap.

52 “De SI voorzitter van Tjiandjoer” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 22 Agustus 1919, lembar ke-2. Di sini terbukti bahwa para tawanan itu menggunakan SI untuk kekuatan mereka. Meskipun diduga memang mereka anggota atau simpatisan SI, tetapi adanya komplottan seperti yang dituduhkan oleh aparat keamanan tidak terbukti. Bahkan tidak kenalnya ketua SI di Cianjur dengan Haji Gazali yang dianggap berpengaruh di Garut membuat kecurigaan pemerintah yang selama ini menganggap sosok Gazali sebagai tokoh sangat berbahaya dan berpengaruh segera pudar.

53 “Centraal Sarekat Islam” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 5 Agustus 1919, lembar ke-1. Haji Ismail sebagai pembentuk kelompok ini memberitahu sendiri Sosrokardono ketika berkunjung di rumahnya, di Manonjaya. Setahun kemudian, pada tahun 1918, Haji Ismail mengulangi kembali tekadnya itu kepada Sosrokardono ketika bertemu di suatu acara SI di Yogyakarta. Saat itu Haji Ismail sudah membawa symbol keanggotaan dengan inisial SI yang berupa sebuah gelang untuk anggota kelompok ini.

melakukan konfirmasi dengan ketua cabang SI Bandung Ismail tentang hal ini, dan bahkan menerima keterangan tentang Haji Suleiman dan Adrai sebagai pembentuk kelompok tersebut. Menurut pengakuan Ismail kepadanya, diketahui bahwa SI baik pusat maupun cabang tidak memiliki hubungan dengan apa yang disebut sebagai *Afdeeling B* ini.⁵⁴

Kendati pada bulan-bulan pertama setelah kejadian itu situasi mulai reda dengan adanya pengakuan sejumlah saksi yang mengeliminir keterlibatan SI, kasus Cimareme kembali menghangat seiring dengan terbitnya laporan dari Komisaris khusus Roo de la Faille yang diperintahkan untuk menyelidiki secara rinci kasus tersebut. Dalam laporannya, Roo de la Faille menyebutkan ditemukan tanda-tanda konspirasi yang melibatkan SI untuk melawan pemerintah. Berita ini membuat situasi kembali tegang dan pengurus pusat SI dalam kongres yang diadakan akhir Oktober 1919 di Surabaya segera membahasnya dan memutuskan untuk mengajukan mosi kepada pemerintah. Dalam mosi itu disampaikan dua hal. Pertama, CSI menuntut penangkapan dan pemeriksaan terhadap bupati Garut dengan tuduhan bersaksi palsu serta provokatif sehingga terjadi kejadian di Cimareme. Kedua, pemerintah mencabut laporan Roo de la Faille yang dianggap tidak valid dan tidak netral dalam mencari sumber informasi.⁵⁵

Bertolak dari laporan Roo de la Faille dan sejumlah informasi yang berasal dari interogasi beberapa orang saksi, pemerintah memanfaatkan peristiwa ini untuk melumpuhkan gerakan Sarekat Islam. Alasan pemerintah

54 “De Sarekat Islam” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 22 Agustus 1919, lembar ke-2. Meskipun mengetahui hal tersebut, Tjokroaminoto tidak lagi membicarakannya sebagai agenda diskusi. Mungkin saja ia menganggap hal ini tidak terlalu penting dibandingkan masalah besar yang dihadapinya saat itu seperti pembaharuan pemerintahan, Volksraad dan juga tanah partikelir.

55 “Het congres der SI over het gebeurde te Garioet” dalam *Rotterdamsche Courant*, tanggal 5 Desember 1919, lembar ke-2. Bupati dalam hal ini diketahui menekan ketua SI cabang Garut agar menandatangani pernyataan tentang keberadaan *Afdeeling B* dan keterlibatannya di dalam gerakan ini. Jika ketua SI tidak bersedia, maka dia akan diancam untuk dijebloskan dalam penjara.

ini diperkuat dengan adanya peristiwa yang mirip dengan Cimareme dan dengan dampak yang lebih parah karena jatuhnya korban jiwa seorang pejabat Belanda. Peristiwa ini adalah perlawanan rakyat terhadap tuntutan kerja wajib di desa Salumpaga, Distrik Toli Toli pada Juni 1919 yang menyerang dan membunuh Kontrolir Toli-Toli De Kat Angelino, di samping Raja Bantilan dan beberapa aparat kepolisian. Seperti halnya Haji Hasan, tuduhan pemerintah ditujukan kepada pemimpin SI setempat, Haji Hayun, yang segera ditangkap dan dibuang ke Jawa.⁵⁶

Pada peristiwa tersebut, penyelidikan segera dilakukan bukan hanya oleh kalangan SI lokal namun juga beberapa tokoh nasional SI yang dicurigai ikut terlibat atau setidaknya memiliki pengaruh dalam mengobarkan perlawanan rakyat. Sasarannya di sini adalah Abdoel Moeis yang sebagai anggota Volksraad datang ke Toli-Toli pada Mei 1919. Dalam rapat akbar, Moeis berpidato tentang perubahan dalam pemerintahan dan perjuangan rakyat Sulawesi. Karena statusnya sebagai pengurus pusat CSI, kedatangan Moeis dianggap sebagai memotivasi massa rakyat untuk berani melakukan penentangan terhadap kebijakan pemerintah, meskipun dari hasil penyelidikan tentang keterlibatan Moeis dalam peristiwa Salumpaga tidak terbukti.⁵⁷

Jika upaya pemerintah untuk mendiskreditkan Abdoel Moeis dengan peristiwa di Salumpaga tidak berhasil, di Jawa taktik pemerintah kolonial dalam menangkap para petinggi Sarekat Islam jauh lebih efektif dengan memanfaatkan peristiwa *Afdeeling B*. Beberapa orang tokoh SI yang

56 *Koloniaal Verslag over het jaar 1920, bijlage A*, halaman 19.

57 *Handelingen van den Volksraad, vol. 15*, tahun 1920, halaman 26. Memang pada tanggal 11 Mei 1919 Abdoel Moeis dengan perahu mendarat di Bwool dan didampingi oleh Haji Hayun melakukan kunjungan ke Kampung Baru, Toli-Toli untuk menghadiri rapat akbar yang telah direncanakan di sana. Dalam rapat ini, Abdoel Moeis memberikan pidatonya. Dengan demikian keberadaannya di sana sekaligus juga menjadi fungsionaris CSI yang berkunjung ke daerah.

dianggap berpikiran dan sering berkomentar radikal terhadap pemerintah menjadi sasaran penangkapan ini. Dari interogasi terhadap Haji Samsoeri yang tinggal di Ciamis dan dituduh sebagai pengikut *Afdeeling B*, ketua *Landraad* setempat Jansen mencatat beberapa nama yang perlu ditangkap. Dua nama disebutkan yaitu Moeso dan Alimin, yang saat itu sedang berada di Tasikmalaya dan Ciamis. Keduanya segera ditangkap oleh polisi dan dimasukkan dalam penjara antara 10 dan 14 September 1920.⁵⁸

Sosok penting yang sering disebut dalam peristiwa *Afdeeling B* di Jawa Barat, dan terutama peristiwa Cimareme, adalah Sosrokardono, putra bupati Jepara yang sekaligus adalah saudara kandung R.A. Kartini. Kehadiran Sosrokardono di Garut menjelang peristiwa Cimareme dan kontaknya dengan beberapa tokoh yang diketahui menjadi pengurus *Afdeeling B*, serta penerimaan setoran uang kas dari kelompok ini, menjadikan Sosrokardono sebagai sasaran penahanan oleh PID. Dalam pemeriksaan beberapa orang saksi, petugas interrogator mencoba menggali sebanyak mungkin informasi tentang peran Sosrokardono dan hubungannya dengan Tjokroaminoto.⁵⁹

Sosrokardono tidak lama setelah peristiwa di Cimareme segera ditangkap oleh polisi dan ditahan. Akan tetapi, mengingat latar belakangnya sebagai seorang bangsawan Jawa dan elite intelektual hasil didikan Belanda, perlakuan terhadap Sosrokardono berbeda dengan para tahanan lain yang

58 “Moeso en Alimin gearresteerd” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 September 1920. Moeso saat itu adalah redaktur dari suratkabar milik SI, *Oetoesan Hindia*, yang dikenal sering memuat artikel dan komentar radikal terhadap pemerintah kolonial. Sementara itu Alimin di samping sebagai pengurus CSI juga menduduki jabatan sebagai ketua dari organisasi Serikat Pegawai Pega-dai-an Bumi putera Revolusioner (PPPB) di Yogyakarta. Keduanya merupakan pengikut kubu Semaoen dalam CSI dan kelak akan memisahkan diri dan membentuk SI Merah yang merupakan cikal bakal organisasi komunis di Indonesia.

59 “De zaak Sosrokardono” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 5 November 1920, lembar ke-2. Interogasi ini juga bermaksud untuk mengungkapkan latar belakang bergabungnya Sosrokardono dalam Sarekat Islam serta karirnya di dalam organisasi tersebut hingga bisa bersahabat dan menjadi sekretaris Tjokroaminoto.

diduga ikut aktif dalam *Afdeeling B*. Pemerintah Belanda mengizinkan CSI seorang pengacara bagi Sosrokardono untuk menghadapi pengadilan yang diselenggarakan pada Januari 1920,⁶⁰ meskipun permintaan dari CSI bagi pembebasan Sosrokardono dari tuduhan atau setidaknya berstatus tahanan luar ditolak oleh pemerintah.⁶¹

Akan tetapi sasaran utama pemerintah adalah tetap Tjokroaminoto. Sejak beberapa tahun sebelum peristiwa Cimareme dan *Afdeeling B*, Tjokroaminoto telah dijadikan target bagi penangkapan karena kritiknya yang keras terhadap pemerintah kolonial. Ketenaran dan pengaruhnya yang tumbuh terutama di daerah Priangan telah menjadi sasaran penangkapan oleh pemerintah. Hal ini tidak selalu terbatas pada kasus kekerasan tetapi juga secara administratif, pemerintah berusaha menjebak Tjokroaminoto. Salah satunya terjadi pada 28 September 1918 ketika Asisten Residen Bandung W.R. Hillen tiba-tiba memanggil mantra guru di Cangkring Mas Soeriadimadja yang diketahui menjadi aktivis SI. Dalam interrogasi ini, Hillen ingin mengetahui tentang relevansi kunjungan Tjokroaminoto ke Majalaya dan munculnya aturan pembayaran premi bagi anggota baru. Karena mantra guru itu menjawab negatif pertanyaannya, Hillen tidak memiliki alasan untuk memanggil Tjokroaminoto.⁶²

60 “Een advocaat voor Sosrokardono” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 6 Oktober 1919, lembar ke-1. Dari 37 cabang SI di Jawa Barat yang mengetahui penangkapan dan penahanan Sosrokardono ini, 26 cabang menyatakan kesediaannya untuk menunjuk seorang pengacara untuk mendampinginya. Ini membuktikan bahwa pengaruh Sosrokardono di antara para pengurus cabang SI sangat besar.

61 “Verzoek invrijheid-stelling van Sosrokardono” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 3 Oktober 1919, lembar ke-1. Di samping CSI, dua pengurus cabang organisasi pegadaian yaitu di Malang dan Surabaya, mengirimkan surat serupa kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum. Ini menjadi bukti bila di luar SI, Sosrokardono juga termasuk sosok yang aktif dan disegani publik.

62 ANRI, Proses verbal mantra guru di Cangkring Mas Soeriadimadja, 28 September 1918, dalam *Sarekat Islam Lokal* (Jakarta, 1975, ANRI), halaman 86. Suatu yang tampak aneh apa kewenangan dan relevansi seorang asisten residen mempersoalkan

Dalam peristiwa Salumpaga yang menjerat Abdoel Moeis, nama Tjokroaminoto juga disebut-sebut oleh penyidik. Ini terjadi ketika setelah pembunuhan terhadap kontrolir De Kat Angelino, masa segera bergerak menjarah toko-toko milik orang-orang Tionghoa di Kampung Baru. Nuansa anti-Tionghoa yang sering dikaitkan dengan tujuan perjuangan SI memberikan alasan, yang sebenarnya tidak terlalu relevan dan tuduhannya juga tidak pasti, untuk memunculkan wacana bagi penangkapan dan penahanan Tjokroaminoto.⁶³

Beberapa hari setelah peristiwa di Cimareme, perburuan terhadap orang-orang SI yang disinyalir menjadi anggota *Afdeeling B* dengan cepat dilakukan secara intensif. Sasarannya adalah sejumlah kabupaten di Priangan yang diduga menjadi basis gerakan ini. Di Tasikmalaya penangkapan segera dilakukan terutama karena sejumlah orang SI di sini langsung terlibat dalam peristiwa Haji Hasan. Di antara mereka adalah Haji Soeelman yang datang beberapa kali ke rumah Hasan menjelang peristiwa. Bahkan dalam pemeriksaan, Haji Soeelman dituduh menggerahkan massa dengan membawa kain putih dan senjata tajam untuk persiapan perlawanannya. Hal ini segera dikaitkan dengan hasutan Tjokroaminoto (*in allerhoogste instantie besluit van Tjokroaminoto*) oleh Asisten Residen Tasikmalaya Voet.⁶⁴

Berdasarkan laporan Voet, Residen Priangan De Steurs kemudian membuat laporan kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum pada 2 Agustus 1919. Dalam laporan tersebut di antaranya disebutkan sebagai berikut

Kan tot nu toe niet bewezen worden dat de oprichting

pembayaran iuran atau premi masuk organisasi yang merupakan masalah internal atau rumah tangga suatu organisasi. Ketika hal ini diberlakukan pada organisasi Eropa seperti *Vaderlandsche Club*, tidak ada pejabat Belanda yang mempermasalahkan pembayaran iuran masuk dan iuran rutin.

63 “De moord op controleur de Kat Angelino” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 19 Juni 1919, lembar ke-2.

64 ANRI, Laporan Asisten Residen Tasikmalaya tanggal 18 Juli 1919 kepada Residen Priangan De Stuers, dalam *Sarekat Islam Lokal*, halaman 103.

geschiede met goedkeuring van Tjokroaminoto, zoo wijst alles op dat hij er van op de hoogste was en is het trouwens ondenkbaar dat een dergelijke zoo ingrijpende organisatie onder leiding van personen uit zijne dagelijksche omgeving opgericht zou kunnen worden, zonder zijn medeweten.⁶⁵

“Jika sampai sekarang tidak bisa ditunjukkan bahwa pendirian (*afdeeling B*) dilakukan dengan persetujuan Tjokroaminoto, maka semua menunjukkan bahwa dia pastimengetahuinya dan tidak pernah terbayangkan bahwa suatu organisasi yang begitu rapi dibentuk di bawah pimpinan orang-orang yang berasal dari lingkungan sehari-harinya, tanpa sepengetahuannya.”

Dari isi surat di atas, tampak bahwa sebenarnya residen sendiri tidak menemukan titik sambung yang jelas mengenai keterlibatan Tjokroaminoto dalam peristiwa di Cimareme. Para pejabat kolonial setempat hanya bisa meraba-raba dan tidak mampu membuktikan peristiwa yang tepat untuk menyeret Tjokroaminoto ke depan sidang pengadilan.

Menanggapi sejumlah kecurigaan dan dugaan dari pemerintah, Tjokroaminoto bisa berdalih sebagai alibinya untuk membela keberadaannya di daerah Priangan. Alibinya adalah bahwa pada April 1919 istrinya meninggal dan dimakamkan di Tasikmalaya. Oleh karenanya sangat wajar bila ia sering berada di daerah tersebut dan tidak mungkin mencurahkan perhatian terhadap peristiwa *Afdeeling B*, dengan alasan masa perkabungan.

65 ANRI, Surat Residen Bandung De Steurs kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum tanggal 2 Agustus 1919, dalam *Sarekat Islam Lokal*, halaman 116. Dalam surat itu, De Stuers juga mempertanyakan mengapa Tjokroaminoto pada tanggal 12 Juli 1919 berada di Garut, dan kemudian mengadakan rapat rahasia di Majenang bersama Haji Adrai (yang sampai saat itu masih buron). Ungkapan ini menunjukkan keanehan karena status Adrai yang masih buron dan berada dalam daftar pencarian orang oleh polisi kolonial justru diketahui oleh residen Priangan berada di Majenang beberapa hari kemudian. Jika memang masih buron, mengapa aparat kolonial setempat yang mengetahui keberadaannya di Majenang tidak segera melakukan penangkapan, karena toh mereka mengetahui ada rapat rahasia tersebut.

Bahkan ketika Haji Soleiman diadili di Tasikmalaya, pada 8 Februari 1920, Tjokroaminoto sendiri tidak hadir meskipun ia berada di sana.⁶⁶

Selama 1920 tampaknya pemerintah Belanda belum bisa menemukan alasan yang tepat untuk menangkap Tjokroaminoto. Tjokroaminoto hanya dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara keterlibatan Sosrokardono untuk *Afdeeling B*. Peristiwa ini terjadi pada akhir Oktober 1920 di pengadilan negeri (*landraad*) Bandung.⁶⁷

Setelah vonnis dijatuhkan kepada Sosrokardono dalam bentuk tahanan selama empat tahun, perhatian pemerintah dicurahkan pada Tjokroaminoto. Dalam sidang Volksraad 8 Februari 1921, nama Tjokroaminoto mulai disebut-sebut sebagai terlibat dalam laporan Ziesel tentang peristiwa di Salumpaga.⁶⁸ Tetapi tidak ada anggota Volksraad yang menyalahkan Tjokroaminoto. Bahkan sebulan kemudian, diselenggarakan rapat kongres SI Pusat di Yogyakarta pada 3 Maret 1921, Tjokroaminoto memperoleh dukungan moral dari semua pengurus pusat SI dan para pengurus cabang. Ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dukungan kepadanya dalam menghadapi kasus hukum serta kepercayaan sepenuhnya pada kepemimpinan Tjokroaminoto atas SI.⁶⁹

Peristiwa ini semakin mengkhawatirkan pemerintah kolonial terhadap keberadaan dan pengaruh Tjokroaminoto. Di mata pemerintah, keberadaan Tjokroaminoto yang bebas menunjukkan bahwa persoalan *Afdeeling B* tidak akan selesai. Sementara itu pemerintah bertekad untuk menggunakan kasus ini dalam memasukkan Tjokroaminoto dalam penjara. Untuk itu pada awal April 1921 Tjokroaminoto mulai mengalami proses pemeriksaan

66 “De Afdeeling B zaak” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 9 Februari 1920, lembar ke-2.

67 “De zaak Sosrokardono” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 28 Oktober 1920, lembar ke-2.

68 ‘Volksraad’ dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 9 Februari 1921, lembar ke-2.

69 “SI Congres” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 13 April 1921, lembar ke-2.

Dalam kongres itu, Tjokroaminoto masih memimpin rapat-rapat dengan didampingi oleh Haji Agoes Salim, yang secara informal menggantikan posisi Sosrokardono.

intensif secara rutin oleh tim penyidik. Hal ini mengakibatkan perhatian dan waktunya untuk SI berkurang dan ia mulai mendapatkan kritik dari rekannya, terutama dari kelompok SI kiri seperti Darsono.⁷⁰

Kendati tidak ada alasan yang kuat untuk menangkap dan menahannya, akhirnya pemerintah memutuskan bahwa Tjokroaminoto harus ditangkap. Akibatnya, alasan administratif dicari-cari, yaitu untuk memudahkan pemeriksaan secara intensif, Tjokroaminoto perlu ditahan (*onderzoek belemmerd worden indien Tjokroaminoto nog langer in vrijheid werd gelaten*).⁷¹ Bertolak dari situ, pengadilan kemudian memerintahkan untuk menjemput Tjokroaminoto di rumahnya di Surabaya dan memasukkannya dalam tahanan. Pada 27 Agustus 1921, proses penangkapan terjadi dan proses penahanan Tjokroaminoto dimulai.⁷²

Berita penangkapan Tjokroaminoto ini segera menyebar di kalangan publik, termasuk para tokoh pergerakan. Mereka mulai menunjukkan simpatinya kepada Tjokroaminoto dan mengritik tindakan pemerintah yang tanpa dasar kuat telah menangkapnya. Salah satunya adalah Soerjopranoto, tokoh dari gerakan buruh yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirrum agar membebaskan Tjokroaminoto. Bahkan Soerjopranoto berani menjaminkan diri bahwa Tjokroaminoto tidak akan melarikan diri dan tetap akan kooperatif terhadap pemeriksaan.⁷³ Akan tetapi sikap pemerintah tetap tegas yaitu bahwa Tjokroaminoto akan ditahan untuk memudahkan interogasi dan pemeriksaannya.

Peradilan dan Masa Tahanan

70 “Uit het inlandsche wereld” dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 3 Mei 1921, lembar ke-2. Darsono sendiri menggantikan Alimin menjadi pimpinan PPPB, dan kelak Darsono juga akan menjadi tokoh dari SI merah.

71 “Tjokroaminoto” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 26 Agustus 1921, lembar ke-2.

72 “Tjokroaminoto gearresteerd” dalam *Bataviaasch nieuwsblad*, tanggal 29 Agustus 1921, lembar ke-2.

73 “Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 13 Oktober 1921, lembar ke-2.

Penahanan Tjokroaminoto mengawali suatu proses penyidikan yang berakhir dengan pengadilan dan penjatuhan vonis. Akan tetapi, proses ini juga tidak mudah sebagai akibat dari aturan yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah Belanda sejak 1867. Dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1867 nomor 10 disebutkan bahwa bupati atau kerabat dekat bupati tidak bisa diperiksa dan diadili oleh lembaga *landraad*, melainkan oleh *Raad van Justitie*, yang setara dengan orang Eropa. Mengingat Tjokroaminoto ternyata memiliki banyak kerabat dekat bupati dan dirinya adalah seorang priyayi tinggi, ia tidak bisa dituntut di depan *landraad*. Hal ini mempersulit pemerintah karena perkara yang dituduhkan adalah konspirasi *Afdeeling B*, yang sedang ditangani oleh *landraad* Garut, Ciamis dan Tasikmalaya. Tjokroaminoto tidak memenuhi syarat untuk dihadapkan pada tiga pengadilan itu.⁷⁴

Tjokroaminoto sendiri merasakan tekanan batin dan fisik pada bulan-bulan pertama penahanannya. Pemeriksaan yang berlangsung sangat menyita pikiran dan waktu sementara juga perhatiannya dicurahkan pada organisasi yang ditinggalkannya. Hal ini mempengaruhi kondisi fisiknya, sehingga pada awal Januari 1922 ia jatuh sakit. Dokter penjara yang memeriksanya, Kayadoe, melaporkan kepada hakim yang berwenang memeriksa kasusnya bahwa Tjokroaminoto tidak memungkinkan tampil di pengadilan dalam kondisi fisik demikian, dan ia membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit.⁷⁵ Setelah beberapa hari di rumah sakit dan dinyatakan membaik, Tjokroaminoto diperkenankan kembali ke selnya. Namun kini pemerintah memberikan kelonggaran bagi keluarganya untuk menjenguknya dan tinggal di Batavia.⁷⁶

Selama tinggal di Batavia, tentu saja masalah kehidupan bagi mereka

⁷⁴ “Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 9 Agustus 1921, lembar ke-2.

⁷⁵ “Tjokro” dalam *De Indische Courant*, tanggal 13 Januari 1922, lembar ke-1. Jika dr. Kayadoe mengusulkan demikian, ini berarti bahwa kondisi kesehatan Tjokroaminoto memang serius karena tidak mungkin Kayadoe yang tidak pernah berhubungan dengan Tjokroaminoto memiliki kepentingan atau agenda politik tertentu untuk itu.

⁷⁶ “Tjokroaminoto” dalam *De Indische Courant*, tanggal 6 Januari 1922, lembar ke-1.

menjadi sangat sulit. Bukan hanya tidak adanya penghasilan rutin yang selama ini diberikan oleh Tjokroaminoto sebagai kepala keluarga, namun juga tidak ada sumber pemasukan sementara pengeluaran rutin terus berlangsung. Namun demikian, rekan-rekan perjuangan Tjokroaminoto tidak menutup mata terhadap hal ini. Beberapa rekan yang setia memuat tulisan dalam sebuah suratkabar bumi putera yang bermaksud mengetuk hati kalangan mereka untuk menyisihkan sumbangan guna membantu kehidupan keluarga Tjokroaminoto di Batavia. Ketika hal ini mulai dilakukan pada awal Maret 1922, sumbangan segera mengalir dan berhasil menyelamatkan keluarga Tjokroaminoto dari keterpurukan hidup.⁷⁷

Karena pemerintah bertekad bahwa Tjokroaminoto harus dihukum dan tidak boleh dibebaskan lagi, tuduhan lain harus disampaikan kepadanya. Kali ini adalah kesaksian palsu yang diberikan kepadanya dalam pemeriksaan perkara Sosrokardono dalam sidangnya di *Raad van Justitie* Batavia pada 28 dan 30 Oktober 1920. Namun Tjokroaminoto membantah dengan tegas dan setelah dikonfirmasi, tidak ada kesaksian palsu yang diberikan kepadanya. Kini penyidik segera bergeser pada objek yang berbeda tetapi dengan tuduhan yang sama, yaitu melakukan sumpah palsu sebagai saksi dalam perkara Haji Samanhoedi di *landraad* Ciamis pada 29 September 1920.⁷⁸ Namun kembali tuduhan ini runtuh karena menurut keterangan saksi Haji Ismail, Tjokroaminoto sama sekali tidak bersaksi untuk Haji Samanhoedi.

Setelah Tjokroaminoto berada dalam tahanan, pemerintah tampaknya membatasi pemberitaan keluar tentang dirinya karena khawatir akan menimbulkan kehebohan di kalangan publik, terutama massa pendukungnya.

77 “Tjokroaminoto” dalam *De Indische Courant*, tanggal 25 Maret 1922, lembar ke-1.

Akan tetapi sebagai akibat terjadinya pemogokan pegawai pegadaian, sumbangan ini merosot tajam dan tidak lancar. Dari situ bisa diketahui bahwa kebanyakan mereka yang menunjukkan simpatinya dan berkontribusi adalah pegawai pegadaian.

78 Pers Belanda sendiri mengkritik tuduhan ini sebagai sesuatu yang dicari-cari untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa Tjokroaminoto ditangkap. Salah satunya adalah *Java Bode*, yang meragukan efektivitas dari tuduhan tersebut. “Te laat gekomen” dalam *De Telegraaf*, tanggal 22 Oktober 1921, lembar ke-2.

Oleh karena itu, hanya sedikit suratkabar yang memuat berita tentang kasusnya, kecuali yang dipercaya oleh pemerintah. Dalam waktu sebulan, sebanyak 16 orang saksi dicari dan disiapkan untuk memberikan kesaksian dalam sidang peradilannya.⁷⁹ Sementara itu sejak akhir Maret 1922 perkara Tjokroaminoto mulai disidangkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia. Dalam sidang pertama perkara Tjokroaminoto, animo masyarakat sangat banyak termasuk juga kalangan orang Eropa sehingga ruang sidang tidak mampu menampung semua pengunjung.

Sidang yang dijadualkan mendengar kesaksian Sosrokardono tentang peran Tjokroaminoto dalam *Afdeeling B* tidak bisa dilakukan karena saksi masih sakit. Sementara itu hakim mempersoalkan istilah *bahoe soekoe* dan *harta benda* yang digunakan oleh Tjokroaminoto dalam suratkabar Sarekat Islam *Oetoesan Hindia* tanggal 30 Juli 1919, karena istilah ini digunakan oleh Haji Ismail dalam perkaranya *Afdeeling B*. Namun karena ada perbedaan penafsiran antara hakim dan Tjokroaminoto sebagai terdakwa tentang makna itu, maka persoalan itu tidak diteruskan dan sidang kemudian dilanjutkan pada 5 April 1921 dengan acara mendengarkan kesaksian Sosrokardono.⁸⁰

Akan tetapi Sosrokardono berulang kali dipanggil untuk hadir menjadi saksi tetapi tidak pernah dapat memenuhi panggilan itu. Pada sidang hari keempat, anggota majelis hakim Mr. Ducloux yang mendengar tentang adanya pemanggilan paksa terhadap Sosrokardono segera melakukan konfirmasi. Berdasarkan keterangan dokter penjara Siahaya, dinyatakan bahwa Sosrokardono sedang dalam kondisi sakit di tahanan dan tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat untuk hadir memberikan kesaksian. Alternatifnya hanya dua, yaitu pembatalannya sebagai saksi atau memberikan

79 “De zaak Tjokroaminoto” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 24 Februari 1922, lembar ke-1.

80 “De zaak Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 1 April 1922, lembar ke-1. Hakim dalam hal ini berdasarkan pada terjemahan oleh lembaga Volks-lectuur (perpustakaan rakyat), sementara Tjokroaminoto menyalahkan terjemahan tersebut sebagai menyimpang dari maknanya.

kesaksian secara tertulis. Mengingat keterangan Sosrokardono tidak bisa diperoleh, sidang terpaksa ditunda dan vonis bagi Tjokroaminoto belum bisa diputuskan. Kembali Tjokroaminoto diminta meninggalkan ruang sidang dan diikuti oleh para pendampingnya.⁸¹

Pemerintah kolonial tampaknya tidak mau memperpanjang dan memperlambat pembahasan kasus ini. Dalam waktu tiga minggu pada April 1921, sembilan kali sidang atas kasus *Afdeeling B* dengan terdakwa Tjokroaminoto dilaksanakan di *Raad van Justitie* Batavia. Pada sidang kesepuluh yang diselenggarakan pada 24 April 1922, nasib Tjokroaminoto diputuskan. Hakim ketua Plate menjatuhkan vonis satu tahun tahanan dengan tuduhan melakukan sumpah palsu (*maineed*).⁸² Apa yang dimaksudkan dengan sumpah palsu ini tidak diketahui mengingat dalam tuduhan sebelumnya tidak terbukti, sementara juga tidak ada dalam perkara *Afdeeling B* yang merupakan tindak perlakuan terhadap kekuasaan yang sah.⁸³

Bahkan jaksa agung sendiri menyatakan bila Tjokroaminoto secara langsung tidak terlibat dalam persoalan *Afdeeling B*, dan khususnya dengan peristiwa di Cimareme. Namun hakim menggunakan kesaksian Said Hasan bin Semid mengenai informasi yang disampaikan kepada Tjokroaminoto oleh beberapa pihak mengenai *Afdeeling B*. Tjokroaminoto dianggap telah mengetahui tujuan *Afdeeling B* ini dibentuk sejak adanya surat Haji Ismail kepada Sosrokardono yang dikirimkan ke kantor secretariat SI Pusat di Surabaya pada tanggal 2 Februari 1918. Mengingat Tjokroaminoto adalah ketua SI Pusat, tidak mungkin ia tidak mengetahui surat tersebut dan isinya

81 “De zaak Tjokroaminoto” dalam *De Indische Courant*, tanggal 7 April 1922, lembar ke-1. Apakah ini merupakan taktik Sosrokardono agar tidak bisa diadu terhadap mantan pimpinannya sesuai permintaan pengadilan, tidak diketahui dengan pasti.

82 “De zaak Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 5 Mei 1922, lembar ke-1. Pada saat vonnis ini dijatuhkan, Tjokroaminoto tidak hadir di pengadilan tetapi ia menerima hukuman ini dengan membubuhkan catatan dan tandatangannya.

83 “De zaak Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 25 April 1922, lembar ke-1. Di antara para hadirin dalam sidang putusan vonis ini, terdapat beberapa ahli hukum Eropa.

yang merupakan surat dinas organisasi. Ini digunakan sebagai titik tolak untuk menuntut Tjokroaminoto sebagai melakukan sumpah palsu.⁸⁴

Masa tahanan satu tahun ini tidak dilewatkan semuanya oleh Tjokroaminoto, karena berdasarkan aturan hukum kolonial, ia telah mendekam dalam penjara sejak bulan Agustus 1921. Dengan demikian masa penahanan awal selama Sembilan bulan diperhitungkan untuk memotong masa vonnis satu tahun. Oleh karena itu, Tjokroaminoto hanya tinggal menjalani sisa hukumannya selama tiga bulan.⁸⁵

Meskipun seharusnya Tjokroaminoto meninggalkan penjara dan menghirup kembali kebebasannya pada Agustus 1922, bersamaan dengan situasi politik yang kondusif, pemerintah kolonial memberikan kelonggaran dengan pembebasan bersyarat. Pembebasan ini diberikan pada Mei 1922. Syarat yang diberikan bukan pengawasan secara fisik melainkan pembatasan dalam kegiatannya. Tjokroaminoto dibebaskan pada pertengahan Mei 1922 dan diperintahkan untuk tinggal di Yogyakarta.

Namun mengingat keluarganya masih menunggu di Batavia selama proses persidangan dan penahanannya, Tjokroaminoto bermaksud membawa kembali mereka ke Surabaya. Pada 16 Mei 1922 Tjokroaminoto bersama keluarganya dengan menaiki kereta ekspres tiba di Surabaya dengan disertai oleh H.A. Salim. Setibanya di stasiun Surabaya Kota, rombongan ini disambut oleh pegawai Setia Usaha yang menerbitkan surat kabar *Oetoesan Hindia*, yang langsung membawa mereka ke gedung “Taman Kemoeljan”. Di dalam

84 “Het zaak Tjokroaminoto” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 25 April 1922, lembar ke-1. Dalam hal ini status Tjokroaminoto sebagai anggota Volksraad juga diperhitungkan sehingga ia tidak dituntut dengan pasal 155 *Strafvordering* (tuntutan pidana), dan menyerahkan kepada jaksa agung tuduhan mana yang lebih layak: keterlibatan dalam gerakan terlarang atau sumpah palsu.

85 “Tjokroaminoto veroordeeld” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 5 Mei 1922, lembar ke-1. PErs Belanda mengomentari bahwa Tjokroaminoto memperoleh remisi bagi hukumannya. Tetapi sebenarnya ini bukan remisi melainkan potong masa tahanan, karena pada prakteknya Tjokroaminoto tetap menjalani penahanannya selama dua belas bulan.

gedung ini banyak kerabat dan sahabat telah menunggu dan Tjokroaminoto berpidato singkat untuk menyampaikan terimakasih atas dukungan dan perhatian mereka selama dalam proses hukum.⁸⁶

Tidak lama tinggal di Surabaya, Tjokroaminoto mendapatkan perintah dari pemerintah agar berangkat ke Yogyakarta dan menghabiskan waktu tahanan luarnya di kota itu. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dirinya dari kegiatan politik dan terutama dari aktivitasnya dalam Sarekat Islam. Tjokroaminoto mematuhi perintah itu dan segera berangkat ke Yogyakarta pada awal Juni 1922. Ia tiba di sana ketika gelombang pemogokan buruh sedang terjadi, terutama pekerja pegadaian.⁸⁷

Kendati Tjokroaminoto menjalankan hukuman dalam waktu tidak lama dibandingkan Sosrokardono yang dituntut empat tahun penjara, kasus Tjokroaminoto menjadi sorotan publik yang sangat tajam dan membuktikan ketidakadilan sikap dan kebijakan pemerintah kolonial. Ini terjadi hingga dalam pembahasan para anggota Volksraad. Titik tolak mereka adalah perbedaan pandangan antara hakim dari pengadilan tinggi (*Raad van Justitie*) dan Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) Hindia Belanda mengenai kasus Tjokroaminoto, dengan pendapat Jaksa Agung yang mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menuntut Tjokroaminoto secara pidana.

Dari perbedaan ini, beberapa elite intelektual nasionalis mencoba menelusuri perkembangan awal perkara ini. Sejak awal, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tjokroaminoto ternyata tidak dilakukan oleh petugas lembaga pengadilan, melainkan oleh tim yang dibentuk oleh jajaran birokrasi pemerintahan dan melibatkan beberapa orang wedana dan asisten wedana. Dengan cara kerja demikian, sudah bisa diduga bahwa nuansa politik jauh lebih besar daripada perkara hukum dalam tuduhan yang dilontarkan terhadap Tjokroaminoto. Pada prinsipnya pedoman mereka adalah instruksi

86 "Tjokroaminoto" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 18 Mei 1922, lembar ke-1.

87 "Tjokroaminoto voorlopig uit politieke beweging" dalam *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, tanggal 17 Juni 1922, lembar ke-2.

pemerintah bahwa Tjokroaminoto menjadi simbol ancaman bagi kekuasaan, bukan hanya bagi keamanan dan ketertiban, dan untuk itu harus segera diamankan atau dihukum.⁸⁸

Bukan hanya elite nasionalis yang mengritik fenomena ini, bahkan di kalangan orang Belanda sendiri sejak awal sudah meragukan kebenaran dari tindakan pemerintah menangkap dan mengadili Tjokroaminoto. Salah satunya adalah seorang wartawan bernama Wormser yang menulis sebagai berikut

*Tjokro is vervolgd wegens meineed. Indien hij vrijgesproken wordt, dan geschiedt dit omdat zijn schuld niet wettig of niet overtuigend of niet wettig en overtuigend is bewezen.*⁸⁹

“Tjokro dituntut karena sumpah palsu. Apabila dia dibebaskan, maka ini terjadi karena kesalahannya tidak sah atau tidak meyakinkan, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”

Komentar Wormser ini membuktikan adanya opini publik yang bingung dengan langkah pemerintah kolonial dalam menghadapi seseorang bumi putera seperti Tjokro. Justru di mata publik Eropa tampak kelemahan sikap dan pemikiran aparat pemerintah kolonial ketika menghadapi situasi yang diciptakannya sendiri.

Dua bulan kemudian, pada pertengahan Agustus 1922, sesuai dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan dan revisi oleh Mahkamah Agung kolonial (*Hoogerechthof*) yang memberikannya kebebasan bersyarat pada Juni, masa hukuman Tjokroaminoto berakhir. Ia dibebaskan dari masa pengawasannya di Yogyakarta dan diperkenankan kembali bebas ke

88 “Tjokro” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 16 Juni 1922, lembar ke-2. Kritik keras dilontarkan oleh Volksraad terhadap Departemen Kehakiman yang dianggap tidak netral dan lebih melayani kepentingan politik daripada penegakkan hukum secara adil dan obyektif.

89 “De zaak Tjokro” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 12 April 1922, lembar ke-1.

Surabaya.⁹⁰ Keputusan bebas ini berarti bahwa Tjokroaminoto kembali bebas melakukan aktivitasnya, termasuk dalam kehidupan berpolitik dan berorganisasi.

Jaminan kebebasan dari pemerintah kolonial ini selanjutnya diabuktikan. Beberapa hari setelah pengumuman Mahkamah Agung tersebut disampaikan kepadanya, Tjokroaminoto menghadiri kongres PPPB di Ambarawa. Dalam kongres yang agendanya adalah pergantian pengurus ini, secara aklamasi Tjokroaminoto diangkat menjadi ketua dengan Soerjopranoto sebagai wakilnya.⁹¹ Meskipun Tjokroaminoto sudah lama tidak aktif dalam dunia pergerakan, dan terutama dalam PPPB, pemilihannya menjadi ketua membuktikan bahwa pengaruh dan namanya masih disegani oleh kalangan dunia organisasi bumi putera.

Sementara itu di kalangan Sarekat Islam sendiri, pengumuman pembebasan Tjokroaminoto mendapatkan sambutan yang sangat positif. Dua hari sebelum PPPB mengadakan kongresnya, 20 Agustus 1922, di kota yang sama Sarekat Islam mengadakan rapat akhir yang dihadiri oleh 400 orang. Dalam rapat itu, pembebasan Tjokroaminoto diumumkan secara resmi dan Sarekat Islam siap kembali menyambut bekas pemimpinnya itu untuk aktif memimpin kembali organisasi ini.⁹²

90 “Tjokroaminoto vrijgesproken” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 18 Agustus 1922, lembar ke-1.

91 “De Aangewezen leiders” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 23 Agustus 1922, lembar ke-1.

92 “Vergadering S.I.” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 21 Agustus 1922, lembar ke-1. Tidak diketahui apakah Tjokroaminoto sendiri hadir dalam rapat itu, tetapi ada dugaan bahwa SI mengadakan rapat di Ambarawa karena diketahui Tjokroaminoto berada di kota tersebut dalam rangka kongres PPPB. Jadi ada kemungkinan SI

Kesimpulan

Proses litigasi yang dialami oleh Tjokroaminoto ketika ia harus berurusan dengan aparat hukum kolonial di atas mencerminkan tindakan dan sikap pemerintah kolonial terhadap pihak yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaannya. Kasus ini menjadi suatu prototip dari upaya rezim kolonial untuk mengatasi bahaya yang muncul dari kalangan para tokoh pergerakan nasionalis. Dengan dalih menegakkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), pemerintah kolonial bisa menangkap seseorang dengan tuduhan yang akan dirancang kemudian, ketika proses hukum mulai dijalankan. Oleh karena itu, bisa diduga bahwa tuduhan yang disiapkan bagi penangkapan seseorang sering tidak sesuai atau aparat hukum di lembaga pengadilan sendiri tidak siap untuk menyidangkan perkara tersebut, yang mendapatkan instruksi dari pihak eksekutif kolonial.

Kasus Tjokroaminoto, sejauh menyangkut persoalannya dengan dunia hukum kolonial, dari penjelasan di atas menunjukkan dua kajian menarik. Kajian pertama menyangkut persoalan perdata, sementara kajian kedua menyangkut kasus pidana. Keduanya diletakkan dalam konteks kehidupan berorganisasi yang dalam hal ini ditampung dalam Sarekat Islam. Melalui Sarekat Islam, Tjokroaminoto mengungkapkan pandangannya yang dianggap sebagai melawan terhadap struktur yang ada. Ironisnya, dalam dua kasus tersebut, Tjokroaminoto berhasil memenangkan terutama perkara perdata, sementara dalam pidana Tjokro mengalami kekalahan meskipun tidak terbukti.

Persoalan tanah partikelir, yang saat itu menjadi sorotan publik, menjadi suatu kasus perdata yang harus dihadapi oleh Tjokroaminoto. Sebagai objek perkara, sumber persoalan dari tanah partikelir adalah kepemilikan dan hak-

yang mengadakan pertemuan adalah SI wilayah dan bukan CSI.

hak pemiliknya ketika dihadapkan pada hak penduduk. Mengingat hubungan hukum antara pemilik tanah dan penghuninya sarat dengan ikatan primordial kekuasaan yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum Barat sendiri ketika dihadapkan pada masalah hak-hak individu termasuk hak milik, keberadaannya menjadi sasaran serangan Tjokroaminoto.

Mengingat lingkup perkara itu adalah perdata, selayaknya apa yang dijadikan perkara adalah kepemilikan tanah itu. Akan tetapi mengingat dalam system yang berlaku keberadaan tanah partikelir dilindungi oleh peraturan hukum yang kuat, bahkan menjadi kasus khusus yang mengalahkan kasus umum (*lex specialis derogate generalis*), tidak mungkin hal ini diselesaikan secara perdata. Oleh karenanya, Tjokroaminoto beralih dari aspek pidana, dengan mengangkat pelanggaran hak yang dilakukan oleh tuan tanah. Lewat jalur ini, ia mampu membuktikan kepada pemerintah kolonial bahwa keberadaan tanah-tanah partikelir berpotensi pada gangguan keamanan dan selayaknya dihilangkan. Pemerintah menerima alasan ini dan Tjokroaminoto berhasil mencapai target perjuangannya. Dengan kata lain, dalam persoalan ini terjadi proses pemidanaan terhadap kasus perdata.

Sebaliknya dalam persoalan *Afdeeling B*, Tjokroaminoto harus mendekam di tahanan kolonial. Sejumlah pemberontakan daerah yang menjadi pemicu dari tindakan hukum kolonial terhadap Sarekat Islam membawa Tjokroaminoto dalam ranah pidana dan harus dihadapkan ke depan pengadilan. Akan tetapi, tuduhan yang dilontarkan terhadap dirinya sangat lemah dan bahkan dalam pemeriksaan terbukti tidak relevan, yaitu keterlibatan Tjokroaminoto dalam *Afdeeling B*. Jika tuduhan ini benar, maka Tjokroaminoto akan terkena jerat pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberontakan, dengan resiko hukuman berat termasuk hukuman pembuangan.

Dalam pemeriksaan dan keterangan para saksi, tuduhan ini tidak terbukti. Oleh karenanya, aparat peradilan segera mencari tuduhan lain yaitu sumpah palsu dalam pemberian kesaksian oleh Tjokroaminoto. Perubahan tuduhan dalam proses persidangan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tuduhan yang dilontarkan terhadap Tjokroaminoto tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Dari situ bisa diduga bahwa aparat penegak hukum bekerja bukan atas dasar profesionalisme penegakan hukum, melainkan atas instruksi dari penguasa politik dan untuk kepentingan politik. Perbedaan antara keduanya menemukan titik temu pada prinsip yang mendasari sistem hukum dan politik kolonial, yaitu penegakan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, terdapat proses politisasi atas perkara dan lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1855 nomor 2.
- *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1836 nomor 19.
- *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1871 nomor 55
- *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1871 nomor 68
- *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1912 nomor 422.
- *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1836 nomor 19
- *Besluit van Gouverneur Generaal 9 September 1844 no. 8*, bundel *Algemeen Secretarie*. Jakarta: Koleksi ANRI.
- *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1880 nomor 150.
- *Brief van Gouvernement Secretaris 17 Januari 1918 no. 17*, bundle *Algemeen Secretarie*. Jakarta: Koleksi ANRI
- *ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 25 Maart 1918 no. 35*, bundle *Algemeen Secretarie*. Jakarta: Koleksi ANRI
- *Besluit van Gouverneur Generaal 3 Maart 1919 no. 25*, bundle *Algemeen Secretarie*. Jakarta: Koleksi ANRI

B. Koran dan Majalah

“In en om Soerabaja” dalam *De Locomotief*, tanggal 25 Mei 1891, lembar ke-2.

“Vergelijking met Gouvernement’s landrente” dalam *De Locomotief*, tanggal 2 Agustus 1887, lembar ke-2.

Particuliere landerijen op Java” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 1 Mei 1909, lembar ke-2.

“Terugkoop van particuliere landerijen op Java” dalam *Het nieuws van*

den dag voor Nederlandsch Indie, tanggal 24 Juli 1906

“Aankoop particuliere landerijen” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 21 November 1913, lembar ke-1.

“De Sarikat Islam” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 8 Mei 1916, lembar ke-2.

S.I. Congres”, dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 Juni 1916, lembar ke-1

“Propaganda voor SI” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 14 Juni 1917, lembar ke-1.

“Het S.I. Congres” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 21 Oktober 1917, lembar ke-1.

Het SI Congres” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 Oktober 1917, lembar ke-2.

“Het Sarekat Islam Congres” dalam *Algemeen Handelsblad*, tanggal 12 Februari 1918, lembar ke-2.

“Het relletje in ‘t Porongsche” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 23 Mei 1918, lembar ke-2.

“De SI vergadering in Sirene Park” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad* tanggal 25 November 1918, lembar ke-1.

“Het verzet in ‘t Garoetsch” dalam *De Sumatra Post*, tanggal 19 Juli 1919, lembar ke-2.

“Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 13 Oktober 1921.

“De Garoet affair” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 23 Juli 1919, lembar ke-1.

“Garoet in de Inlandsche Pers” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 24 Juli 1919, lembar ke-2.

“Het congres der SI over het gebeurde te Garoet” dalam *Rotterdamsche Courant*, tanggal 5 Desember 1919, lembar ke-2.

“Moeso en Alimin gearresteerd” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 21 September 1920.

“Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 13 Oktober 1921, lembar ke-2

“Tjokroaminoto” dalam *De Indische Courant*, tanggal 6 Januari 1922, lembar ke-1.

“Te laat gekomen” dalam *De Telegraaf*, tanggal 22 Oktober 1921, lembar ke-2.

“De zaak Tjokroaminoto” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 1 April 1922, lembar ke-1

“Tjokroaminoto veroordeeld” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 5 Mei 1922, lembar ke-1.

“De Aangewezen leiders” dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, tanggal 23 Agustus 1922, lembar ke-1.

Anonim. 1853.“De bescherming der inlandsche bevolking op Java” dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, tahun 1853, vol. 15.

Anonim, “Het Garoet drama en de Afdeeling B’ dalam *De Indische Gids*, tahun 1920, vol. I.

C. Buku

Assen, Willem van. 1872. *De agrarische wet en Koninklijk Besluit tot haren uitvoering*. Amsterdam: C.A. Spin en Zoon.

Cheung, Yong Mun. 1973. *Conflicts within prijaji word of the Parahyangan in West Java 1914-1927*. Singapore: ISEAS.

Dijk, Cornelis. 2007. *The Netherlands Indies and the Great War 1914 – 1918*. Leiden: 2007.

Dissel, H. van. 1878.”Rapport omtrent de particuliere landerijen beoosten de Tjimanoek rivier” dalam *Tijdschrift voor de Nederlandsch Indische maatschappij van Nijverheid en Landbouw*, tahun 1878, vol. 22.

Faes, J. 1902. *Geschiedenis van Buitenzorg*. Batavia: Albrecht

Furnivall, J.S. 2014. *Colonial Policy and Practice: a comparative study of Burma and Netherland India*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kartodirdjo, Sartono. 2007. “Agrarian radicalism in Jawa: its setting and development” dalam Claire Holt, *Culture and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publ.

Kesteren, C.E. van. 885. Kesteren, *Een en Ander over de welvaart Inlansche Bevolking en de toekomst der Europeesch Landbouw-nijverheid in Nederlandsch Indië*. Leiden: E.J. Brill.

Krajenbrink, J.A. 1864. *Het regt van eigendom der bezitters van particuliere landen op Java met authentieke acten bewezen*. Tiel: D.R. van Wermeskerken

Norman, Henry David Levyssohn. 1857. *De Britsche Heerschappij over Java en Onderhoorigheden (1811-1816)*. 's Gravenhage: Gebroeders Belinfante.

Poeze, Harry A. 1994. "Political Intelligence in the Netherlands Indies" dalam Robert Cribb, *The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.

Smit, Herman. 2011. *Landvoogd tussen twee vuren: Jonkheer Mr. A.C.D. de Graeft, Gouverneur Generaal van Nederlands Indie 1926-1931*. Hilversum: Herman Smit & Uitgevery verloren.

Spengler, Johan Albert. 1863. *Nederlandsch Oost Indische Besittingen onder het bestuur van Gouverneur Generaal Baron van der Capellen (1819-1825), eerste gedeelte*. Utrecht: Kemink en Zoon.

Vey, Ruth T. Mc. 2007. *The rise of communism in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.

Wijck, H. van der Wijck. 1866. *De Nederlandsche Oost Indische bezittingen onder het bestuur van Commisaris Generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830)*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.





Museum Kebangkitan Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan